

Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia

Yoseph Tugio Taher
**Mengorek Abu
Sejarah Hitam Indonesia**

Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia

©Yoseph Tugio Taher

Pengantar: Jakob Sumardjo

Editor: Bilven

Desain sampul: Prima R. Bardin

Diterbitkan oleh **Ultimus**

Cetakan 1, Agustus 2010

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

TAHER, Yoseph Tugio

Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia

Cetakan 1, Bandung: Ultimus, 2010

xii + 256 hal.; 14,5 x 20,5 cm

978-602-8331-06-7

★ penerbit buku
Ultimus

Bandung 2010

Distribusi:

CV Ultimus

Jl. Rangkasbitung 2A, Bandung, 40272

Telp./Faks. (022) 70908899, 7217724

ultimus_bandung@yahoo.com

www.ultimus-online.com

Pengantar

Menggulingkan Soeharto Sekali Lagi

Jakob Sumardjo

“...Aku memberi kesaksian tentang kebenaran;
setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku.”
Kata Pilatus kepada-Nya: “Apakah kebenaran itu?”
(Yohanes 18: 37—38a)

PERTANYAAN yang abadi: apakah kebenaran itu? Dan ada-ketidakaan jawaban yang abadi pula. Pertanyaan manusia sepanjang abad itu tidak mungkin ada jawabannya yang diiyakan seluruh umat manusia. Terlalu banyak kebenaran-kebenaran, dan masih akan bertambah lagi kebenaran-kebenaran baru.

Kebenaran itu bukan masalah kata-kata. Kebenaran adalah kenyataan di hadapan manusia. Kebenaran itu realitas. Kebenaran adalah masalah nilai, dan nilai merupakan kualitas, sifat-sifat. Apakah “panjang” itu? Apakah “merah” itu? Apakah “suci” itu? Dapatkah Anda mengatakan “merah” itu apa? Karena suatu kualitas, maka nilai “merah” itu senantiasa mengikuti benda-benda. Anda baru mengenal apa itu “merah” pada bunga, langit senja, pipi gadis remaja, pada darah. Begitu pula “kebenaran” hanya hadir pada perbuatan. Dan itulah masalahnya yang terbesar.

Dalam kearifan lokal masyarakat Sunda dikenal ungkapan *Tekad Ucap Lampah* atau *Kehendak Pikiran Perbuatan*. Ungkapan itu tidak bermakna kalau tidak disadari bahwa ketiga-tiganya adalah satu adanya. Memang tiga hal, tetapi sesungguhnya satu hal saja. Memang satu hal, tetapi sesungguhnya ada tiga.

Kearifan semacam itu sudah dikenal sejak zaman Upanishad di India, melalui ucapan orang bijak Yajñakalpa yang kira-kira bunyinya: “Manusia memutuskan sesuatu berdasarkan keinginannya. Dan melakukan sesuatu berdasarkan keputusannya. Dengan perbuatannya itulah manusia berubah.” Ada tiga kesatuan, yakni keinginan, pemikiran, dan perbuatan. Dan perbuatanlah yang mengubah manusia.

Peristiwa G30S tahun 1965 penuh dengan aksi banyak pihak. Perbenturan aksi-aksi ini tentu didasari oleh keinginan pelaku-pelakunya yang juga saling bertentangan. Namun, dalam buku Yoseph Tugio Taher ini, semua peristiwa penuh konflik itu hanya bersumber pada satu keinginan tunggal, yakni Jenderal Soeharto. Keinginan Soeharto hanya satu, yakni merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno. Keinginan tunggal itu diwujudkan melalui pemikiran yang brilian, sehingga maksudnya yang jahat disulap menjadi perbuatan mulia.

Dengan amat rinci, Taher memaparkan peristiwa yang penuh perbuatan itu yang mengarah hanya pada satu keinginan dan satu pemikiran Jenderal Soeharto saja. Soeharto adalah dalang peristiwa yang mengubah Indonesia itu. Tidak ada dua keinginan atau banyak keinginan, karena semua digerakkan oleh Soeharto.

Selama lebih dari 30 tahun, Soeharto disanjung sebagai penyelamat bangsa dan negara dari sebuah kudeta. Dialah tokoh baik, pahlawan bangsa, karena telah melakukan perbuatan yang dasarnya keinginan baik. Tokoh jahatnya adalah PKI, karena partai ini punya keinginan jahat, yaitu kudeta. Ibarat cerita wayang kulit, PKI adalah pihak kiri dan Soeharto adalah pihak kanan. Kiri itu “jahat” dan kanan “baik”.

Tetapi wayang kulit itu harus dilihat dari dua sisi, yakni sisi penonton di belakang dalang dan sisi penonton di belakang layar wayang (kelir). Peristiwa G30S selama ini dilihat dari belakang dalang, yakni pihak yang baik ada di kanan. Sedang buku ini justru melihat peristiwa itu dari balik kelir, yang hanya menonton bayang-bayang dan melihat dengan jelas bahwa pihak kiri adalah kebenaran dan kebaikan dan pihak kanan justru yang jahat.

Itulah rumitnya menentukan kebenaran. Jadi, apa kebenaran itu? Benar dan tidak benar itu berupa perbuatan, berupa peristiwa yang semua manusia bisa melihatnya sebagai kenyataan. Kalau semua kejadian itu bisa dikumpulkan data-datanya secara komplit dan sempurna, maka dapat dibaca jalan pikiran pembuat peristiwa itu, dan dapat dibaca apa yang diinginkannya. Apakah perbuatan-perbuatan itu benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, tergantung pada keinginan pelakunya.

Tetapi keinginan dan pemikiran itu ada di dalam diri pelaku. Keinginan dan pikiran itu tidak bisa dilihat, yang bisa dilihat itu hanya perbuatannya. Dengan demikian, apakah Peristiwa G30S benar atau tidak benar, tergantung dari penafsiran belaka. Dan semua penafsiran terhadap kenyataan, hasil perbuatan, tergantung dari keinginan, maksud, dan penafsirannya pula. Penafsiran tergantung di mana Anda menonton peristiwa itu, dari belakang dalang, yang berarti Anda

melihat seperti diinginkan dalang, atau dari seberang dalang di balik kelir, yang berarti bertentangan dengan dalang.

Ada sudut lain untuk menilai kebenaran, yakni ketidaksadaran pelakunya. Apa pun keinginan si pelaku, baik atau jahat, yang berhasil disembunyikan dari perbuatannya, orang masih dapat melihat otentitas diri pelaku dari sisi yang si pelaku tidak menyadarinya. Metode yang dipakai adalah perbandingan semua perbuatan yang pernah dilakukan di luar perbuatannya yang sedang kita nilai. Itulah pengulangan pola-pola.

Buku Taher ini bekerja secara itu pula. Dia mencoba menunjukkan pola keputusan dan tindakan yang pernah dilakukan Soeharto sebelum G30S. Misalnya Peristiwa 3 Juli 1946. Di situ diperlihatkan pola perbuatan Soeharto sebagai dalang peristiwa. Dua pihak yang saling bermusuhan, di mana Soeharto terjepit di dalamnya dalam sebuah dilema, penyelamatan dirinya dilakukan dengan meniupkan kabar dusta yang dilihat dari subjek kepentingan mereka yang saling bertentangan. Soeharto selamat dengan mengorbankan orang yang mempercayai ucapannya.

Pola berpikir yang dapat dikenali kembali dari pola perbuatan akan menunjukkan segi kepribadian yang tidak disadari oleh pelaku. Ya, Soeharto memang senantiasa berpikir begitu dalam melakukan sesuatu. Pola perbuatan dan pola berpikirnya selalu berulang. Taher menunjukkan bahwa pola G30S pernah dilakukan Soeharto pada Peristiwa 3 Juli 1946. Untuk membuktikan bahwa itulah pola perbuatan Soeharto, perlu dikumpulkan lebih banyak lagi bukti-bukti. Orang tidak bisa menipu dirinya dan menipu orang lain, karena semua perbuatannya berdasarkan suatu pola tetap yang dia sendiri tidak menyadarinya. Orang lain yang akan menunjukkan padanya bahwa ia senantiasa berbuat dalam sebuah pola yang sama.

Apakah kebenaran itu? Kebenaran hadir dalam perbuatan. Tanpa perbuatan, tanpa peristiwa, tanpa kelakuan, tidak ada yang disebut benar atau tidak benar. Dan G30S adalah peristiwa, perbuatan yang melibatkan begitu banyak pihak dan banyak orang. Apa yang sebenarnya terjadi, dapat diketahui kalau orang mampu mengumpulkan semua tingkah laku yang dapat dibaca dari fakta dan data. Tetapi menilai apakah peristiwa itu sebagai tingkah laku yang benar atau salah tetap sebuah misteri karena setiap perbuatan menyembunyikan keinginan-keinginan baik atau jahat, dengan pemikiran benar atau tidak benar dalam mewujudkan keinginannya itu. Yang bisa kita lakukan hanya menafsirkan keinginan jahat atau baiknya melalui pola-pola perbuatan dari pihak-pihak yang terlibat.

Akhirnya, ini masalah apa yang dinamakan “sejarah”. Apakah sejarah itu? Sejarah hanyalah kata-kata, pikiran juga. Sejarah bukan peristiwa itu sendiri. Sejarah itu sebuah opini atau penafsiran atas tanda-tanda peristiwa. Setiap orang dapat menafsirkan peristiwa dari sudut pandangnya masing-masing, yakni dari keinginan dan cara mewujudkan keinginannya terhadap tanda peristiwa yang

dihadapinya. Sejarah pada dasarnya mitos manusia modern. Dan sebagai mitos, tinggal Anda mempercayai atau tidak mempercayai.

Peristiwa G30S selama 30 tahun lebih telah berhasil diwujudkan dalam sebuah mitos yang mendudukkan Soeharto sebagai seorang “hero”. Mitos ini punya alasannya sendiri pula mengapa dapat diterima sebagai kebenaran oleh seluruh rakyat Indonesia begitu lama. Kita semua telah mempercayai itulah kejadian yang sebenarnya. Bahwa PKI dalang dari peristiwa itu dan Soeharto adalah penyelamat negara dan bangsa. Tidak cukup hanya menyusun sejarah atau mitos tentang kebenaran itu, tetapi juga mewujudkannya dalam ritual-ritual, film, museum, buku-buku. Rakyat Indonesia bertubi-tubi ditanamkan tentang kebenaran pihak kanan ini.

Setelah Soeharto terguling dari jabatan pemimpin bangsa begitu lama, setara dengan jabatan Sultan Agung dari Mataram yang juga 33 tahun memerintah, maka mulailah muncul tulisan-tulisan anti-mitos Soeharto ini. Sebenarnya anti-mitos ini sudah muncul juga ketika Soeharto masih jaya-jayanya berkuasa, yakni lewat penerbitan kaum eksil di Belanda. Namun anti-mitos semacam itu semakin deras setelah Soeharto jatuh. Selama Soeharto masih hidup pun anti-mitos ini terus ditulis, dan setelah meninggalnya pun tetap ditulis. Dan mitos Soeharto ini masih dilakukan untuk menggulingkannya.

Mitos Soeharto ini oleh Taher dinamai “sejarah hitam”, dan ada pula yang menamainya “sejarah gelap”. Mitos G30S yang selama ini beredar tentu saja “sejarah terang dan sejarah kebenaran”. Gerakan anti-mitos yang sekarang gencar diungkapkan justru menamakan ‘sejarah terang’ itu sebagai “sejarah gelap”.

Tidak mudah untuk meruntuhkan sebuah mitos bangsa. Mitos itu bukan soal benar atau tidak benar, ilmiah atau tidak ilmiah, tetapi soal kepercayaan bersama. Meskipun tidak ilmiah, kalau mitos itu diakui dan dipercayai, seutuhnya adalah kebenaran. Dan bagaimana Anda akan meruntuhkan sebuah kepercayaan bersama yang selama lebih dari 30 tahun ini bertubi-tubi ditanamkan dalam pikiran dan kesadaran bangsa Indonesia? Tidak mudah. Anda sedang melawan peristiwa itu sendiri, sejarah sesungguhnya yang penuh misterium itu.

Pada waktu usia saya sepuluh tahun, saya menonton pertunjukan wayang kulit dalam ritual bersih desa, yakni ruwatan desa supaya terhindar dari segala bentuk musibah. Pertunjukan itu dilakukan di tepi sungai besar desa kami, yakni di tempat yang ada sumber air besar, dari mana ibu-ibu desa membawa air dari sumber itu untuk memasak makanan sehari-hari. Lakon yang dipilihnya adalah *Bandung Bandawasa*, yakni pahlawan mitos asal-usul daerah kami di sekitar kota Klaten. Bandung Bandawasa bermusuhan dengan Ratu Baka yang jahat. Dalam perkelahian mereka akhirnya Ratu Baka dapat dihancurkan Bandung Bandawasa dengan cara membantingnya pada batu. Kepalanya berhamburan sehingga otaknya menjadi gunung gamping dekat desa saya.

Itulah “sejarah desa” kami. Kami semua percaya bahwa gunung kapur itu berasal dari isi otak Ratu Baka. Kami menggalinya untuk dijual. Dan kami percaya

bahwa bekas otak itu membawa berkah karena semua itu akibat perbuatan pahlawan kami Bandung. Setelah saya dewasa tentu saja tidak lagi mempercayai mitos semacam itu, tetapi penduduk desa, bahkan yang muda-muda dan putus sekolah tetap percaya mitos irasional itu sebagai sejarah desa yang sebenarnya. Sejarah atau mitos desa itu menjadi bagian dari diri mereka. Yang kita sebut irasional ternyata justru rasional yang tak bisa ditawar-tawar.

Apakah kebenaran itu? Akhirnya, kebenaran soal mitos. Soal cerita, soal kata-kata, soal sejarah. Bagi yang mempercayai mitos tersebut, semuanya menjadi kebenaran. Dan yang tidak mempercayainya, meskipun ilmiah dan rasional, tetap bukan kebenaran. Buku Taher ini sebuah anti-mitos orde baru yang berusaha “meluruskan” kebenaran. Dan dia tidak sendirian. Banyak sarjana luar Indonesia yang juga getol meruntuhkan mitos yang sudah ada. Semua itu tinggal menunggu waktu, apakah mitos-mitos baru ini akan berhasil meruntuhkan mitos lama “ciptaan” Soeharto.

Ternyata Soeharto belum terguling.

Bandung, 18 Juli 2010

Daftar Isi

Pengantar—Menggulingkan Soeharto Sekali Lagi—Jakob Sumardjo—v

Pendahuluan—1

Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia

Indonesia Sesudah Proklamasi—5
Peristiwa 3 Juli 1946—7
Rasionalisasi Hatta—10
Peristiwa Madiun—12
Kesimpulan dari Peristiwa Madiun—13
Gejolak dalam Penolakan Rera dan KMB—13
Serangan Umum 1 Maret 1949—15
Yoga Sugama—Ali Murtopo—Soeharto—24
Kejahatan Kriminal—27
<i>Think Tank</i> CIA—29
Buntut Peristiwa Madiun—31
PRRI/Permesta—31
Keterlibatan Asing—36
Amanah Bung Karno—44
<i>Van der Plas Connection</i> —45
Menemukan Jagonya—45
Situasi Tanah Air—46
Bung Karno Dijadikan Presiden Seumur Hidup—47
Nasakom—48
Situasi di Kalangan Militer—55
Untung—Latief—Supardjo dan Soeharto—57
Kunjungan Latief kepada Soeharto—58
Gerakan 30 September—60
Aksi G30S—64
Kontra Aksi—66
Kelicikan dan Pembangkangan Soeharto—69
Fitnah dan Rekayasa—74
Autopsi Jenazah Para Jenderal—77
Kondisi Jenazah—81

Pengalaman dalam Melakukan Autopsi—84
Situasi Jakarta—86
Telegram Duta Besar Amerika Serikat—88
Aidit Dibunuh!—92
Pembunuhan di Daerah-Daerah—93
Aceh dan Sumatra Utara—93
Riau—94
Sumatra Barat—95
Jawa Barat—97
Jawa Tengah—97
Jawa Timur—98
Bali—99
Penggolongan Tahanan Politik—100
Jumlah Korban—102
Kolonel Sarwo Edhi Wibowo—103
Ditunggu...—103
Pengakuan Sarwo Edhi—104
Jaket Kuning dan Nasi Bungkus—105
Letnan Kolonel Untung—107
Kolonel A. Latief—110
Hubungan Latief dengan Soeharto—111
Kolonel Latief: “ <i>Jenderal Soeharto Terlibat G30S!</i> ” —111
Trio Sel Komunis? —113
Kolonel Latief, Gembong atau Korban? —114
Pernyataan dan Tuntutan Kol. A. Latief—115
Brigjen Supardjo, <i>G30S Dirancang untuk Gagal</i> —118
Lettu. Doel Arief—120
Sersan Mayor Boengkoes—122
Gembong G30S, Syam Kamaruzaman—123
Syam – Sang Agen Ganda? —125
Peranan Syam Kamaruzaman—126
Kegiatan Setelah Gagal—128
Ada ‘Tiga Orang Syam’? —129
Soeharto: Senyum yang Buram dari Manusia Langka—131
Soekarno Diusir—145
Saat Terakhir Bung Karno—152
Tidak Produktif? —166
“G30S/PKI” atau G30S/1965? —170
Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto—171
Gerakan 30 September dan Amerika Serikat—175
Versi Mutakhir G30S—184

Lampiran: Daftar Korban Genosida 1965—1968 di Indonesia

A—Tidak Jelas Penahanannya, Diculik, Dihilangkan, dan Dibunuh—193
B—Tahanan yang Dihilangkan, Dibunuh, dan Meninggal—206
C—Pemeriksaan Perempuan di Indonesia Tahun 1966—1967—251
D—Penjelasan tentang Pemeriksaan Perempuan di Indonesia Tahun 1966—1967—253

Pendahuluan

“ALMARHUM Presiden RI Bung Karno pernah mengatakan, ‘Dalam menyikapi sejarah bangsa, ambillah abunya! ... sesuatu yang telah hangus terbakar dan yang tersisa cuma abu, namun belum segera padam seluruhnya, masih ada segumpal api dalam abu dari sisa yang telah terbakar dan hangus.’ Dan itulah abu sejarah yang dimaksudkan oleh Presiden Soekarno itu, yang masih meninggalkan sisa api yang bisa dihidupkan kembali,” begitu tulis Asahan Aidit, M.A., Ph.D., filolog, dalam *Wahana News*, 7 Januari 2007, yang bertemakan “*Sikap terhadap Sejarah*”. Tulisannya itu dilanjutkan dengan kalimat: “Tapi, bagaimanakah sikap bangsa ini terhadap sejarah bangsanya yang sudah menjadi abu, dan lantas akan dikemanakan abu yang dianjurkan oleh Soekarno agar diambil. Untuk apa? Untuk dibuang begitu saja? Lantas untuk apa diambil? Atau untuk disiram cepat-cepat agar sisa api di dalam sekam itu padam secara mutlak hingga cuma debu seratus persen dan sejarah pun sirna tanpa bekas, terlupakan, dan sejarah cumalah sekadar angin lalu tanpa meninggalkan bekas.”

Sesungguhnya, inilah sekarang yang dilakukan oleh sebagian orang yang menjadi “pelaku sejarah yang kejam penuh dosa, ... sebuah rezim yang berhutang nyawa jutaan manusia, ... musuh rakyat yang dari generasi ke generasi terus memeras, menindas, dan memperlakukan rakyat sebagai budak abdi mereka, bersama gerakan anti komunis yang semakin marak menyala, semakin agresif dan semakin nekat, terang-terangan secara brutal melecehkan demokrasi, mendemonstrasikan kefanatikan....” Demikian tulis Asahan Aidit.

Dengan berbagai daya dan cara, kaum rezim orde baru dan sisa-sisanya, ataupun yang secara berselubung menjadi penerusnya dan masih berkuasa, mencoba menyiram abu sejarah yang masih tersisa, agar supaya generasi mendatang tidak pernah tahu, tidak pernah mendengar bahkan tidak pernah mengenal apalagi memikirkan atau menyelidiki tentang sejarah hitam bangsa Indonesia. Tentang G30S, tentang pembunuhan brutal atas jutaan bangsa Indonesia yang tak berdosa, tentang kekejaman kaum militer terhadap bangsanya sendiri, tentang Soeharto, militer yang dengan licik mengingkari Pancasila, mengingkari

Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, merebut bahkan membunuh dengan kejam atasannya, presiden, pemimpin rakyat, dan bapak bangsa Indonesia: Soekarno!

Orde baru mempunyai “versi sejarah” yang sejak 1965 dipaksakan, dijejalkan ke dalam benak para generasi muda, dan yang sampai hari ini masih diteruskan oleh sisa-sisa dan penerus orde baru yang masih duduk di kursi empuk pemerintahan. Mereka mencoba untuk mengelabui dan membodohi rakyat dengan berbagai dalih dan cara, seperti “membicarakan masalah G30S sebagai tidak produktif.”¹

Ini berarti nasib lebih dari 3 juta manusia yang dibunuh dengan kejam oleh rezim orba/Soeharto, tidak perlu dibicarakan. Membicarakannya, dianggap sebagai hal yang tidak produktif, tidak ada harga. Begitulah watak dan moral rezim orba dan golongan yang secara sembunyi menjadi penerus orba. Lebih parah lagi, pemerintah mengizinkan atau memaksakan, hanya satu sejarah G30S versi orde baru yang kebenarannya sangat diragukan, untuk para pelajar dan generasi muda, seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan menutup mata akan kebenaran, demokrasi dan hak-hak kemanusiaan, menutup rapat-rapat pintu penyelidikan atas segala kebohongan dan penipuan sejarah yang dilakukan orde baru, dengan melarang dan menarik dari peredaran, semua buku yang tidak mencantumkan PKI di belakang kata G30S. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, tidakkah itu berarti menerima, menelan bulat-bulat, dan melanjutkan “sejarah” yang dikarang orde baru, yang juga bisa diartikan bahwa pemerintah adalah sesungguhnya adalah penerus dari rezim orde baru?

“Sejarah adalah milik pemenang. Realitas tersebut terbukti dalam pengungkapan fakta peristiwa G30S selama ini yang merupakan interpretasi sejarah dari penguasa orde baru.”²

Karena ‘sejarah adalah milik pemenang’ yang berkuasa hampir 1/3 abad, dan yang memaksakan versinya, karenanya, apakah bisa menjadi jaminan bahwa sejarah yang mereka tulis itu adalah benar? “*The winner takes all*,” kata peribahasa, “si pemenang memperoleh segala-galanya!” Pemenang “menciptakan dan mengarang” sejarah, termasuk—sudah barang tentu—melecehkan, menabur fitnah, dan kebohongan terhadap mereka yang dilumpuhkan, dikalahkan, serta memutarbalikkan segala fakta kebenaran! Generasi muda bangsa Indonesia mempunyai hak penuh untuk mengetahui sejarah bangsanya, sejarah leluhurnya, pahlawan-pahlawan bangsanya, berhak penuh untuk mengetahui pengkhianat-pengkhianat bangsanya, mengetahui sejarah terang dan sejarah kelam, gelap dan hitam dari bangsa dan pemimpinnya!

Untuk tujuan inilah, penulis mencoba mengorek abu sejarah hitam bangsa Indonesia semenjak proklamasi kemerdekaan, pemberontakan daerah, dan perihal kejadian tahun 1965, pembunuhan massal yang menelan korban jutaan anak-anak

¹ *Rakyat Merdeka*, 1 Oktober 2006.

² *Riau Pos*, 1 Oktober 2006.

bangsa. Kendatipun usaha ini berkemungkinan kurang bisa melengkapi kebutuhan dan pemenuhan keinginan yang diperlukan, namun penulis mencoba—dengan daya dan usaha—mengumpulkan ‘abu-abu’ yang berserakan di mana-mana—dari berbagai sumber, tulisan dari para penulis di surat kabar dan situs internet, yang sengaja atau tidak, disembunyikan dan berada di luar pengetahuan umum, dan menjadikannya satu urutan, satu kronologis untuk dibaca, untuk bahan rujukan, agar generasi muda dapat melihat, mempelajari, menjadi jelas dan mempertimbangkan, kemudian mempunyai pengertian dan kesimpulan mengenai sejarah yang digelapkan atau dihilangkan oleh bekas penguasa orde baru dan sisasisanya, terutama mengenai kejadian tahun 1965 yang menelan korban jutaan anak-anak bangsa yang tak berdosa. Sejarah gelap dan kelam bangsa Indonesia tahun 1965, bukanlah seperti batu yang oleh golongan rezim orba dan pewarisnya bisa begitu saja dicampakkan, dilempar ke laut dan tak bakal timbul lagi. Sejarah adalah milik generasi bangsa, dan mereka harus mengorek, menggali, dan mempelajari dan harus mengetahuinya, karena Peristiwa 1965 adalah merupakan peristiwa besar, peristiwa yang membelokkan arah sejarah, peristiwa yang mengubah langkah dan budaya bangsa Indonesia. Seperti yang pernah diucapkan oleh Prof. Ben Anderson: *“Sekarang memang banyak sejarah yang dihapus. Kita juga harus ingat bahwa orba selama ini justru melakukan apa yang suka saya sebut ‘kebijaksanaan pembodohan’ masyarakat Indonesia sendiri. Bukan hanya tentang pembunuhan tahun 65. Tetapi juga tentang bagaimana munculnya kesadaran nasional, sejarah zaman pergerakan yang sebenarnya, tentang zaman Jepang, zaman revolusi, dsb. Karena yang mau dijadikan pahlawan itu cuma ABRI. Padahal ABRI kan belum lahir waktu orang lain sudah berjuang puluhan tahun. Tapi toh sekarang mulai terlihat usaha anak-anak muda untuk mencari informasi, untuk menggali kembali sejarah bangsanya. Dan memang ini tugas anak muda, kan? Untuk tidak mau dibodohi.”*

Demikian Prof. Ben Anderson, guru besar sejarah dan politik Universitas Cornell, Amerika Serikat.

Dan maksud tulisan ini adalah sekadar membantu bangsa dan kaum muda Indonesia, untuk mengaji dan menelusuri kembali [terutama] sejarah peristiwa G30S—1965. *“Karena peristiwa G30S merupakan peristiwa besar, maka segala usaha dari pihak mana pun untuk mencari kebenaran tentang peristiwa itu sendiri, serta sebab-sebab dan latar belakangnya—dan juga akibat-akibat selanjutnya—adalah sangat berguna bagi sejarah bangsa kita.”*³

*“Kalau kita ingin supaya masa depan bangsa ini cerah, harus ada keberanian untuk membongkar yang lama, sehingga kita tahu betul peristiwa ini bagaimana sebetulnya, adanya, dan sebagainya.”*⁴

Sudah barang tentu, tulisan ini jauh dari sempurna, karena penulis sekadar meramu dan mengumpulkan “abu-abu yang berserakan di segala penjuru”

terutama mengenai informasi Peristiwa 1965, peristiwa yang tidak bisa dan tidak pernah akan dilupakan oleh segenap bangsa Indonesia. Semoga hal ini akan berguna dan membantu, namun diharapkan, agar generasi muda terus menggali lebih dalam lagi akan kebenaran-kebenaran yang dihilangkan, disembunyikan dan ditutupi oleh penguasa orde baru dan penerusnya. Ayo, maju terus, jebol terus dalam mencari dan membukakan fakta kebenaran. Kemudian, semua terserah kepada kaum muda dan generasi bangsa Indonesia yang tercinta!

Selamat membaca.

Australia—2009

³ A. Umar Said, dalam “Tulisan Ulasan tentang Buku Pledoi Kol. A. Latief: *Soeharto Terlibat G30S*”.

⁴ K.H. Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI.

Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia

Indonesia Sesudah Proklamasi

SETELAH Perang Dunia II berakhir dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, terjadilah era perang dingin antara blok Barat (kapitalis) dan blok Timur (sosialis) yang berlanjut dengan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan situasinya. Era perang dingin sangat mempengaruhi rakyat Indonesia, sehingga secara garis besar rakyat Indonesia juga terbelah dua, yaitu yang setuju dengan paham kapitalis (golongan kanan) dan yang setuju dengan paham sosialis (golongan kiri). Kondisi ini diketahui oleh negara-negara maju sehingga mereka berlomba-lomba menanamkan pengaruhnya di Indonesia, terutama negara-negara kapitalis sesuai dengan kepentingan negaranya masing-masing. Mereka *'ngiler'*¹ melihat bumi Indonesia, zamrud khatulistiwa yang demikian luas dengan kekayaan alam yang melimpah, yang bisa dijadikan sasaran yang sangat menarik, memiliki jumlah penduduk yang bisa "dimanfaatkan", baik sebagai tenaga kerja murah maupun sebagai tenaga cadangan untuk perang, di samping juga sebagai pasar yang potensial bagi hasil-hasil industri negara maju.²

Menurut Perjanjian Wina tahun 1942, negara-negara kolonialis bersepakat untuk mendapatkan kembali wilayah-wilayah yang pernah mereka kuasai, apabila Jepang dapat diusir dari wilayah-wilayah yang didudukinya. Menjelang akhir perang, tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara Sekutu. Satuan tentara Australia telah mendaratkan pasukannya di Makasar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah. Sementara Pulau Morotai dan Irian Barat bersama-sama dikuasai oleh satuan tentara Australia dan Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Komando Kawasan Asia Barat Daya (*South West Pacific Area Command/SWPAC*). Setelah perang usai, tentara Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian timur, Amerika Serikat menguasai Filipina, dan tentara Inggris dalam bentuk komando

SEAC (*South East Asia Command*) bertanggung jawab atas India, Burma, Srilanka, Malaya, Sumatra, Jawa, dan Indocina. SEAC dengan panglima Lord Mountbatten sebagai komando tertinggi Sekutu di Asia Tenggara bertugas melucuti balatentara Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil Sekutu (*Recovered Allied Prisoners of War and Internees/RAPWI*). Berdasarkan *Civil Affairs Agreement*, pada 23 Agustus 1945, Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. Tentara Inggris selaku wakil Sekutu tiba di Jakarta, 15 September 1945, dengan didampingi Dr. Charles van Der Plas, wakil Belanda pada Sekutu. Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA (*Netherland Indies Civil Administration*—pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J. van Mook, ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 (*statkundige concepti* atau konsepsi kenegaraan), tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang. Pidato Ratu Wilhelmina itu menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemaikmuran yang di antara anggotanya ialah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda, di bawah pimpinan Ratu Belanda.³

Negara Indonesia yang masih sangat muda, sejak kemerdekaannya diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta yang mewakili bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, pada hakikatnya sudah tercabik-cabik oleh kaum kolonialis/Sekutu yang telah menguasai sebagian besar bumi nusantara, seperti kita lihat di atas. Di samping itu, berbagai tokoh saling berganti mencoba memimpin, membawa negara mengikut cara dan pemikirannya. Dari satu tokoh bertukar kepada tokoh lain, dan pihak lawan yang menghendaki kehancuran republik, tidak tinggal diam berpangku tangan, memakai para tokoh-tokoh yang dapat digunakan sebagai pionnya.

Situasi keamanan ibu kota Jakarta (Batavia saat itu) makin memburuk, karena mendapat tekanan yang gencar dari kolonialis dan terjadinya berbagai pertempuran pada saat masuknya Sekutu dan NICA ke Indonesia yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya, seperti pertempuran yang terjadi pada: Peristiwa 10 November di daerah Surabaya dan sekitarnya; Palagan Ambarawa di daerah Ambarawa, Semarang, dan sekitarnya; Perjuangan gerilya Jenderal Sudirman, meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur; Bandung Lautan Api, di daerah Bandung dan sekitarnya.⁴

Sebelumnya, pada 9 November 1945, Soekarno meminta Sutan Syahrir untuk membentuk kabinet. Akan tetapi, dengan menggunakan KNIP⁵, Syahrir mengambil kekuasaan dari presiden. Hal ini sementara membuat lemahnya posisi Soekarno, sedang Belanda meningkatkan keberadaannya di daerah Jakarta dan sekitarnya.

¹ menitikkan air liur, berselera.

² Fakta Kebenaran Korban Tragedi 65 oleh LPRKROB, YPKP65, dan Pakorba. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

³ *Free Encyclopedia Wikipedia*

⁴ *Free Encyclopedia Wikipedia*

⁵ Komite Nasional Indonesia Pusat—*Pen*.

Soekarno dan Hatta pindah ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946, meninggalkan Syahrir dan golongan pro-negosiasi dengan Belanda di Jakarta. Persatuan Perjuangan yang dibentuk oleh Tan Malaka menentang pemerintahan Syahrir serta negosiasinya dengan Belanda. Begitu pun Jenderal Sudirman, juga menyuarakan anti Syahrir dan negosiasi dengan Belanda.

Persatuan Perjuangan meningkatkan kritik terhadap pemerintahan Syahrir, hingga Tan Malaka dan yang lain-lain, ditangkap dan ditahan oleh Syahrir, sedang Syahrir pada 17 Maret 1946, secara rahasia menyetujui negosiasi dengan Belanda di mana hasilnya Republik Indonesia hanya berkuasa atas Jawa, Madura, dan Sumatra.

Pada 27 Juni 1946, kesatuan militer di bawah Jenderal Soedarsono, membebaskan Tan Malaka dan pengikutnya dari tahanan di Surakarta, dan sebaliknya menangkap dan menahan Sutan Syahrir, sementara pasukan Jenderal Soedarsono menduduki Yogyakarta.

Presiden Soekarno mendeklarasikan keadaan bahaya dan menghendaki Syahrir dibebaskan. Pasukan yang loyal pada Soekarno maju dari Surabaya ke Surakarta, dan pasukan Siliwangi dikirim ke Yogyakarta. Adam Malik dan para pemimpin muda yang radikal ditangkap.

Peristiwa 3 Juli 1946

PADA awal bulan Juli 1946, pihak militer membebaskan Adam Malik dari penjara. Presiden Soekarno mengambil kontrol situasi. Menurut komentar Bonnie Triyana atas tulisan Asvi Warman Adam yang berjudul *“Soeharto, Sisi Gelap Sejarah Indonesia”*, diceritakan antara lain bahwa: Soeharto, seorang bekas sersan KNIL (tentara Belanda), yang kemudian menjadi pejuang Peta, dan di saat kemerdekaan menjadi letkol dan menjabat sebagai komandan resimen dalam Divisi III APRI di bawah pimpinan Mayjen. Soedarsono, pada tanggal 2 Juli 1946, membebaskan tahanan politik dari Penjara Wirogunan dan membawanya ke markas Resimen Wiyoro.

Menurut catatan Harsutejo, “Soeharto memulai karier militernya sebagai kopral KNIL (*Koninklijk Nederlands-Indisch Leger*) alias tentara penjajah Belanda pada 1940-an di Batalyon XIII di Rampal, Malang. Karena prestasinya, ia segera naik pangkat menjadi sersan. Kariernya menjadi buah pembicaraan kawan-kawan sesama tentara, oleh karena umumnya orang-orang dari Jawa mengalami diskriminasi dalam KNIL jika dibandingkan dengan orang Maluku dan Sulawesi Utara yang dianggap ‘lebih setia’....”⁶

Di markas Resimen Wiyoro itu, esoknya, pada 3 Juli 1946, para tahanan politik yang terdiri dari Moh. Yamin, Iwa Kusuma Sumantri, dan Dr. Sutjipto, merumuskan sebuah surat yang intinya meminta Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan kepada Tan Malaka. Dalam pertemuan itu turut hadir Mayor Jenderal

⁶ Harsutejo, *Jejak Hitam Soeharto, Sejarah Gelap G30S dan Sekitar G30S*. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

Soedarsono, Komandan Divisi III APRI, yang mendukung upaya transfer kekuasaan (*baca: kudeta*) itu.

Mendapat informasi itu, Bung Karno mengirim Ketua Pemuda Pathuk, Sundjojo, yang merupakan kolega dari Soeharto dan Syam Kamaruzaman, karena di samping sebagai militer, Soeharto dan mereka adalah sesama kader dalam Partai Sosialis di Pathuk, ketika PKI, Murba, dan PSI masih berada dalam satu wadah partai tersebut.⁷

Ketua Pemuda Pathuk, Sundjojo, membawa surat perintah dari Presiden Panglima Tertinggi APRI Soekarno agar Letkol. Soeharto menangkap Mayjen. Soedarsono, Komandan Divisi III APRI, yang juga merupakan atasan Soeharto dengan alasan turut dalam usaha kudeta terhadap Soekarno. Soeharto merasa bimbang, di satu sisi karena baik Soekarno ataupun Soedarsono adalah dua orang pemimpinnya. Namun, di sisi lain dia tak ingin kehilangan jabatannya hanya karena melakukan insubordinasi pada presiden. Sebagai orang Jawa, Soeharto senantiasa mengadopsi nilai-nilai budaya Jawa dalam kehidupannya. Ia pendiam, sedikit senyum, tampak bersahaja, dan sederhana. Namun, di balik itu semua, Soeharto juga dikenal sebagai perwira yang gemar menikam rekannya sendiri. Akal bulus pun disusun rapi oleh Soeharto untuk mengatasi hal ini. Ia meminta agar Sundjojo mengembalikan surat perintah penangkapan Soedarsono itu dan meminta agar perintah diberikan melalui Panglima Besar Jenderal Sudirman. Penolakan perintah presiden oleh Soeharto itu membuat Bung Karno berang. Dalam kesempatan itu ia mengatai Soeharto sebagai *opsir koppig* atau opsir keras kepala.⁸ Setelah itu, pada malam harinya, Soeharto segera menghadap Soedarsono dan mengatakan ada orang yang ingin menculiknya (Soeharto tidak memberitahu Soedarsono bahwa sesungguhnya yang diperintah menangkap dirinya adalah Soeharto sendiri), ia juga meminta agar Soedarsono pindah ke Resimen III Wiyoro. Pada saat yang sama, Soedarsono mengatakan pada Soeharto bahwa ia akan menghadap Presiden Soekarno keesokan pagi. Lalu diam-diam Soeharto memberitahu pihak istana tentang apa yang terjadi di Markas Resimen Wiyoro dan mempersilakan mereka untuk menangkap Soedarsono di Istana Yogyakarta keesokan paginya. Pada pagi hari, Soedarsono dan Mohamad Yamin mengunjungi Soekarno, dan menyatakan keinginan mereka supaya Syahrir diganti dengan Tan Malaka. Soekarno memerintahkan agar Soedarsono dan Mohamad Yamin ditangkap. Lalu, di manakah letak kelicikan Letkol. Soeharto? Hal itu dapat dilihat dari cara ia mengikuti perintah Soekarno tanpa harus dibenci oleh Soedarsono, yakni dengan cara membohonginya.⁹

Begini pelaku kudeta ditindak, maka dengan cepat dan lihai Letkol. Soeharto segera turut serta menangkap para pelaku lainnya, sehingga tampaknya seolah-

⁷ Charles van der Plas Connection, http://www.munindo.brd.de/artikel/vander_plas2.html.

⁸ *kop*=kepala; *pig*=babi

⁹ Komentar Bonnie Triyana atas buku Asvi Warman Adam: *Soeharto, Sisi Gelap Sejarah Indonesia*.

olah dia sebagai pahlawan penyelamat. Hal ini tercatat dalam sejarah sebagai “Peristiwa 3 Juli 1946”.

Dr. Subandrio, mantan wakil perdana menteri RI yang ditangkap dan ditahan oleh Soeharto tahun 1965, dalam tulisannya yang berjudul “*Kesaksianku tentang G30S*”, tentang Peristiwa 3 Juli 1946 ini antara lain menulis:

“Percobaan kudeta 3 Juli 1946 dilancarkan di bawah pimpinan Tan Malaka dari Partai Murba. Tan Malaka mengajak kalangan militer Jawa Tengah, termasuk Soeharto. Yang akan digulingkan adalah Perdana Menteri Syahrir. Awalnya, 20 Juni 1946, PM Syahrir dan kawan-kawan diculik di Surakarta. Penculiknya adalah kelompok militer di bawah komando Divisi III dipimpin oleh Soedarsono. Soeharto selaku salah seorang komandan militer Surakarta terlibat dalam penculikan itu. Pada 2 Juli 1946, kelompok penculik berkumpul di markas Soeharto sebanyak dua batalyon. Pasukan lantas dikerahkan untuk menguasai beberapa sektor strategis seperti RRI dan Telkom. Malam itu juga mereka menyiapkan surat keputusan pembubaran Kabinet Syahrir dan menyusun kabinet baru yang sedianya akan ditandatangani oleh Presiden Soekarno di Istana Negara Yogyakarta esok harinya. SK dibuat dalam empat tingkat. Keputusan Presiden dimuat dalam Maklumat Nomor 1, 2, dan 3. Semua maklumat mengarah ke kudeta. Misalnya, Maklumat Nomor 2 berbunyi demikian: *‘Atas desakan rakyat dan tentara dalam tingkatan kedua terhadap Ketua Revolusi Indonesia yang berjuang untuk rakyat, maka kami atas nama kepala negara hari ini memberhentikan seluruh kementerian negara Sutan Syahrir. Yogyakarta, 3 Juli 1946, tertanda: Presiden RI Soekarno.’*”

Tetapi percobaan kudeta ini ternyata gagal. Para pelakunya ditangkap dan ditahan. Persis pada saat itu Soeharto berbalik arah. Ia yang semula berkomplot dengan penculik, berbalik menangkapi komplotan penculik. Ia beralih, keberadaannya sebagai anggota komplotan penculik merupakan upaya Soeharto mengamankan penculik.

Itulah karakter Soeharto dan ia bangga dengan hal itu. Soeharto tidak merasa malu berbalik arah dari penjahat menjadi penyelamat. Malah, dalam buku otobiografinya, Soeharto menyebut sekilas peristiwa itu, tetapi menurut versinya, tentu saja faktanya dia balik sendiri. Pada awal Indonesia merdeka itu, Soeharto sudah menerapkan politik “bermuka dua”.¹⁰

Syahrir membentuk kabinet baru di mana termasuk Mohamad Natsir, Amir Syarifudin, Sultan Hamengkubuwono IX, Haji Agus Salim, dan Ir. Djuanda. Dan pada 15 November 1946, dilangsungkan Persetujuan Linggarjati di mana Belanda mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatra.

Sekitar 18–24 Desember 1946, Belanda membentuk Negara Indonesia Timur yang mencakup seluruh bagian dari Indonesia bagian Timur. Amir Syarifudin mencabut dukungannya terhadap pemerintahan Syahrir yang kemudian menjadi wakil Indonesia di PBB dan pada 27 Juni 1947 Amir Syarifudin menjadi Perdana

Menteri Republik Indonesia. Pada 20 Juli 1947, Belanda melakukan agresi yang pertama terhadap Indonesia, mengebom banyak kota dan daerah, dan tentara Belanda menduduki daerah-daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, Semarang, Medan, Padang, dan Palembang. Pada 8 Desember 1947, Belanda dan wakil Indonesia bertemu di kapal Amerika USS Renville dan menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Renville, yang kemudian disusul dengan tindakan Belanda membentuk Negara Sumatra Timur pada 25 Desember 1947, dan membentuk “Negara Madura” pada 21 Januari 1948.

Pada saat itu Amir Syarifudin yang adalah perdana menteri semenjak 27 Juni 1947, merasa dikhianati dengan adanya Perjanjian Renville pada 19 Januari, yang hasilnya lebih memperkecil dan membatasi wilayah republik yang hanya meliputi sebagian kecil Jawa Tengah (Yogya dan 8 keresidenan) serta daerah Banten. Maka secara ksatria dan demokratis Amir Syarifudin menyerahkan kembali mandat pemerintahan kepada Presiden Soekarno pada 23 Januari 1948. Seluruh anggota yang tergabung dalam kabinetnya (PNI dan Masyumi) meletakkan jabatan ketika Perjanjian Renville ditandatangani, dan Soekarno menunjuk Hatta (wakil presiden) untuk membentuk dan memimpin suatu “kabinet presidentil” darurat (1948–1949) yang semua pertanggungjawabannya harus dilaporkan kepada Soekarno sebagai presiden. Hatta menjadi perdana menteri merangkap wakil presiden.¹¹

Rasionalisasi Hatta

PADA tanggal 29 Januari 1948, Kabinet Hatta dibentuk dengan programnya: melaksanakan hasil Persetujuan Renville, mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat, melakukan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera) Angkatan Perang RI, dan pembangunan.

Pemerintahan Hatta inilah yang dinilai oleh kaum kiri sebagai pemerintahan yang paling tunduk dan akan menyerahkan kedaulatan RI kepada Belanda, sehingga timbul ketidakpuasan yang luas terutama karena ada rencana dari Hatta untuk merasionalisasi TNI kemudian membentuk tentara federal bekerja sama dengan Belanda. Ini terbukti dengan kejadian-kejadian sebagai berikut:

Mulai bulan Februari 1948, Kolonel A.H. Nasution bersama Divisi Siliwangi hijrah dari Jawa Barat menuju Yogyakarta sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Renville kemudian ditempatkan tersebar di wilayah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur khususnya di daerah yang kekuatan kaum kirinya cukup kuat seperti di Solo dan Madiun yang dimaksudkan untuk persiapan membersihkan kaum kiri tersebut. Pasukan Siliwangi tersebut segera menjadi pasukan elite pemerintah Hatta dengan kelengkapan tempur yang lebih baik sehingga timbul iri hati pada pasukan di luar Divisi Siliwangi.

Dalam bulan April 1948 terjadi demonstrasi terutama dari pelajar di Jawa Timur menentang Rasionalisasi dan Rekonstruksi; Bulan Mei 1948 di Solo, tentara

¹⁰ <http://www.wirantaprawira.net>.

¹¹ *Free Encyclopedia Wikipedia*

Divisi Panembahan Senopati melakukan demonstrasi menentang Rera; Tanggal 2 Juli 1948, Komandan Divisi Panembahan Senopati Kolonel Sutarto dibunuh oleh tembakan senjata api orang tak dikenal, kemudian diikuti dengan penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa orang kiri antara lain Slamet Widjaya dan Pardio serta beberapa perwira dari Divisi Panembahan Senopati, a.l. Mayor Esmara Sugeng, Kapten Sutarto, Kapten Suradi, Kapten Supardi, dan Kapten Mudjono, diduga kuat dilakukan oleh Divisi Siliwangi sebagai kepanjangan tangan pemerintahan Hatta, walaupun kemudian pembunuh Kolonel Sutarto ditangkap, tetapi pemerintah tidak mengadilinya bahkan oleh Jaksa Agung ketika itu malahan dibebaskan dengan alasan tidak dapat dituntut secara hukum (*yuridisch staatsrechtelijk*).

Penculikan dan pembunuhan ini terus berlanjut terhadap orang-orang kiri maupun anggota Divisi Panembahan Senopati sehingga menimbulkan keresahan dan suasana saling curiga-mencurigai dan ketegangan tinggi. Pada tanggal 21 Juli 1948 diadakan pertemuan rahasia di Sarangan Jawa Timur antara Amerika Serikat yang diwakili oleh Gerard Hopkins (penasihat urusan politik luar negeri) dan Merle Cochran (wakil AS di Komisi Jasa-Jasa Baik PBB) dengan 5 orang Indonesia yaitu: Wakil Presiden Moh. Hatta, Natsir, Sukiman, R.S. Sukanto (Kapolri), dan Mohammad Rum yang menghasilkan rencana kompromi berupa likuidasi bidang ekonomi, politik luar negeri, UUD 45, dan juga Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera) di bidang Angkatan Perang dengan menyingkirkan orang-orang (pasukan) yang dicap sebagai golongan kiri/merah, dan ini terkenal dengan *Red Drive Proposal* atau usulan pembasmian kaum kiri.

Tanggal 13 September 1948 terjadilah pertempuran antara Divisi Panembahan Senopati dibantu ALRI melawan Divisi Siliwangi yang diperkuat pasukan-pasukan lain yang didatangkan ke Solo oleh pemerintah Hatta; Tanggal 15 September 1948 dilakukan gencatan senjata yang disaksikan juga oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, petinggi-petinggi militer RI, dan juga Residen Sudiro. Divisi Panembahan Senopati menaati gencatan senjata namun lawan terus melakukan aksi-aksi yang agresif dan destruktif.

Sebagian anggota Politbiro CC PKI yang tinggal di Yogyakarta memutuskan untuk berusaha keras agar pertempuran di Solo dilokalisasi dan mengutus Suripno untuk menyampaikan hal tersebut kepada Muso, Amir Syarifudin, dan lain-lain yang sedang keliling Jawa. Rombongan Muso menyetujui putusan tersebut. Jadi dalam hal ini kebijaksanaan PKI sesuai atau sejalan dan menunjang kebijakan Panglima Besar Jenderal Sudirman.

Sementara itu penculikan-penculikan dan pembunuhan terhadap orang-orang dan personil militer golongan kiri semakin mengganas dengan puncaknya pada tanggal 16 September 1948, markas Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) di Jalan Singosaren Solo diserbu dan diduduki oleh kaki-tangan Hatta (Siliwangi) sehingga pertempuran Solo semakin menghebat.

Aksi pembersihan orang-orang kiri ini tidak hanya terjadi di Solo, tetapi meluas ke Madiun dan daerah lainnya, dan hasil Rera ini TNI yang tadinya berkekuatan 400.000 hanya tinggal 57.000. Sementara itu ancaman Belanda masih di depan mata, terbukti kemudian dengan Agresi Militer Belanda II.

Peristiwa Madiun

OLEH pemerintah Hatta didatangkanlah ke Madiun pasukan-pasukan Siliwangi yang langsung menduduki beberapa pabrik gula, mengadakan latihan-latihan militer serta menindas para buruh pabrik gula dengan membunuh seorang anggota Serikat Buruh Gula bernama Wiro Sudarmo serta melakukan pemukulan-pemukulan dan intimidasi terhadap para buruh. Penempatan pasukan ini tidak dilaporkan kepada komandan teritorial militer setempat sehingga menimbulkan ketegangan, dan kemudian kesatuan militer setempat yaitu Brigade 29 atas persetujuan komandan teritorial militer setempat, bergerak melucuti pasukan Siliwangi.

Dalam keadaan panas, kacau dan tak terkendali itu, karena Residen Madiun tidak ada di tempat dan walikota sakit, maka pada tanggal 19 September 1948, Front Demokrasi Rakyat (FDR) mengambil prakarsa untuk mengangkat Wakil Walikota Madiun Supardi sebagai pejabat residen sementara, dan pengangkatan ini telah disetujui baik oleh pembesar-pembesar sipil maupun militer dan dilaporkan ke pemerintah pusat di Yogyakarta serta dimintakan petunjuk lebih lanjut. Peristiwa inilah yang mengawali apa yang disebut sebagai “Peristiwa Madiun”.

Pada tanggal 19 September 1948 malam hari, pemerintah Hatta menuduh telah terjadi “Pemberontakan PKI”, sehingga dikerahkanlah kekuatan bersenjata oleh Hatta untuk menumpas dan menimbulkan konflik horisontal dengan korban ribuan orang terbunuh, baik golongan kiri, tentara, maupun rakyat golongan lain.

Pada tanggal 14 Desember 1948, sebelas orang pemimpin dan anggota PKI dibunuh di Dukuh Ngaliyan, Kelurahan Halung, Kabupaten Karanganyar, Keresidenan Surakarta pada jam 23.30, yaitu: 1. Amir Syarifudin, 2. Suripno, 3. Maruto Darusman, 4. Sarjono, 5. Dokosuyono, 6. Oei Gee Hwat, 7. Haryono, 8. Katamhadi, 9. Soekarno, 10. Ronomarsono, dan 11. D. Mangku. Sementara itu lebih kurang 36.000 aktivis revolusioner lainnya ditangkap, dimasukkan dalam penjara, dan sebagian dibunuh tanpa proses hukum, a.l. di penjara Magelang—31 anggota dan simpatisan PKI, di Kediri—berpuluh-puluh orang termasuk Dr. Rustam, anggota Fraksi PKI dan BP KNIP, di Pati—antara lain Dr. Wirereno, dan banyak lagi yang lainnya.

Berdasarkan fakta pada saat Amir Syarifudin menjadi perdana menteri dan memimpin pemerintahan, karena dikhianati dalam Perjanjian Renville, maka secara ksatria dan demokratis menyerahkan kembali mandat pemerintahan kepada Presiden Soekarno, sehingga sangat naif menuduhnya bersama golongan kiri melakukan pemberontakan dan membentuk pemerintahan Soviet—Madiun.

Amir Syarifudin bekas Perdana Menteri Republik Indonesia yang juga berada di kota itu (Madiun) telah membantah segala sesuatu yang disiarkan dari Yogyakarta pada masa itu. Penjelasan melalui radio, “Undang-Undang Dasar kami adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, bendera kami adalah Merah Putih, dan lagu kebangsaan tidak lain dari Indonesia Raya,” seperti disiarkan pada tanggal 20 September 1948 oleh Aneta, kantor berita Belanda di Indonesia.

Kesimpulan dari Peristiwa Madiun

PIHAK imperialis kolonialis pimpinan Amerika Serikat dalam menerapkan politik pembersihan kaum kiri (*Red Drive Proposal*) di Indonesia sebagai bagian makro politiknya untuk membendung komunisme, telah mempengaruhi pemerintah Hatta agar mau membersihkan orang-orang kiri (komunisme) dari pemerintahan, terutama dari Angkatan Perang sebagai salah satu syarat mutlak pengakuan negara Republik Indonesia oleh dunia internasional (pihak Barat).

Pemerintah Hatta menerima dan melaksanakan tawaran tersebut antara lain dengan membuat program Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera) di lingkungan angkatan perang yang kemudian menimbulkan gelombang penolakan yang luas. Untuk meredakan penolakan tersebut dilakukan upaya-upaya yang sistematis, antara lain dengan melakukan teror berupa pembunuhan, penculikan, penahanan, dan intimidasi lainnya terutama kepada kaum kiri, yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Solo. Peristiwa Madiun sama sekali bukanlah pemberontakan PKI, apalagi fitnah bahwa PKI telah mendirikan Negara Soviet Madiun, tetapi merupakan rekayasa jahat pemerintah Hatta guna mendapatkan momen (kondisi dan situasi) yang tepat untuk dapat digunakan sebagai dalih (dasar) untuk menyingkirkan (membasmi) golongan kiri dari pemerintahan maupun angkatan perang, yang kemudian mendapat perlawanan dari rakyat yang konsekwen anti kolonialis/imperialis.

Gejolak dalam Penolakan Rera dan KMB

GEJOLAK sebagai akibat penolakan Rera dan KMB ini terjadi di mana-mana, antara lain: Peristiwa Batalyon 426 di Kudus tahun 1950 karena menolak dilucuti dan diberlakukan Rera, batalyon ini diserbu dan melarikan diri ke barat, sebagian bergabung dengan DI/TII di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Peristiwa Merbabu Merapi Complex (MMC) terjadi di daerah Semarang, Solo, Magelang, dan Yogyakarta, yaitu pejuang-pejuang revolusi yang menolak Rera dan KMB. Peristiwa Barisan Sakit Hati di Cirebon (BSH), yaitu para pejuang yang menolak Rera dan KMB. Peristiwa APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) dipimpin Westerling, yaitu bekas KNIL yang tidak puas kepada pemerintah RIS. Pergolakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Gejolak-gejolak yang terjadi ini membuktikan

keberhasilan politik pecah-belah (*divide et impera*) kaum kolonialis Belanda dengan sekutunya kaum imperialis Amerika dan antek-anteknya.¹²

Bahwa kolaborasi antara pemerintah Hatta dengan pihak kolonialis Belanda maupun imperialis Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya telah berhasil memecah-belah persatuan dan kesatuan serta membelokkan jalannya revolusi Indonesia.

Pada tanggal 19 Desember 1948 itu pula Belanda menyerbu dan menduduki Yogyakarta dengan perlengkapan perang bantuan Amerika, hal itu terjadi setelah politik *Red Drive Proposal* sukses dilaksanakan oleh pemerintah Hatta demi tercapainya Persetujuan Roem—Royen yang merugikan RI yang dilanjutkan dengan terselenggaranya Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949, dan kemudian lahirlah Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan konstitusi RIS-nya, dan hasil yang sangat merugikan Indonesia a.l. Irian Barat masih di tangan Belanda dan hutang Hindia Belanda sebesar US\$1,13 miliar menjadi tanggungan RI (hutang ini antara lain adalah biaya untuk memerangi RI), juga terjadi penurunan pangkat dalam APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) bila menjadi APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat).¹³

Hal yang merugikan Republik Indonesia seperti membayar hutang-hutang Belanda (bukan hutang Indonesia) sebenarnya sejak semula sudah berada dalam pikiran Hatta. Hal ini dapat kita lihat dari Manifesto Politik Dr. Moh. Hatta (Wakil Presiden RI) pada tanggal 1 November 1945, yang antara lain berbunyi: “*Kita yakin, bahwa tanah kita yang kaya-raya ini jika diusahakan dengan sesungguhnya untuk meninggikan derajat penghidupan bangsa kita serta dunia umumnya akan masih banyak benar memberi ruangan untuk tenaga dari seluruh dunia, terutama dari Amerika Serikat dan Filipina untuk turut dalam pembangunan negara dan bangsa kita.... Dengan pengakuan kemerdekaan kita, kita akan menanggung segala yang patut kita tanggung menurut kedudukan kita, segala hutang Hindia Belanda sebelum penyerahan Jepang dan patut menjadi tanggungan kita, kita akui sebagai hutang kita. Segala milik bangsa asing dikembalikan kepada yang berhak serta yang diambil oleh negara akan dibayar kerugiannya dengan seadil-adilnya....*”¹⁴

Hal ini sungguh sangat berlawanan dengan tekad dan semangat bangsa dan rakyat Indonesia yang dengan gegap gempita menyuarakan “*Hantjoerkan moesoeh kita, Inggris dan Amerika!*” yang menjadi dasar perjuangan kaum Pembela Tanah Air (Peta) sebelum 1945.¹⁵ Dan Hatta justru mengakui hutang Hindia Belanda sebesar US\$1,13 miliar menjadi tanggungan RI, di mana hutang ini antara lain adalah biaya untuk memerangi RI. Begitu liciknya kolonialis memperpanjang tangannya melalui

¹² Fakta Kebenaran Korban Tragedi 65 oleh LPRKROB, YPKP65, dan Pakorba. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

¹³ Fakta Kebenaran Korban Tragedi 65 oleh LPRKROB, YPKP65, dan Pakorba. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

¹⁴ Sidik Kertapati, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, hal. 149—50, <http://www.geocities.com/edicalhyono>.

¹⁵ Silakan Lihat Film Dokumen Abc: *Riding The Tiger*.

para cendekiawan di dalam negeri Indonesia. Tidak heran kalau rakyat menolak KMB dan Rera!

Pada serangan Belanda yang dimulai pagi hari 19 Desember 1948 itu, kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Para pemimpin pemerintahan republik, Soekarno, Hatta, dan Syahrir, membiarkan diri mereka ditangkap Belanda, dan ditawan di Pulau Bangka, guna memancing kemarahan dunia. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dibentuk dan berkedudukan di Payakumbuh, Sumatra Barat dengan Mr. Syafrudin Prawiranegara sebagai pejabat presiden. Panglima TNI Jenderal Sudirman segera mengirimkan berita radio, mendukung pemerintahan darurat ini dan meningkatkan perang gerilya melawan Belanda. Pada 13 Juli 1949, Mr. Syafrudin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada presiden—wakil presiden, Soekarno—Hatta.

Sembilan belas negara-negara Asia memboikot Belanda, sementara hampir seluruh Indonesia dalam kuasa dan pengawasan Belanda, kecuali Aceh dan sebagian Sumatra. Sejumlah besar tajuk surat kabar Amerika menentang tindakan Belanda, dan pemerintah AS menghentikan bantuan keuangan kepada Belanda yang hanya digunakan buat penggunaan militer menyerang Indonesia. DK-PBB menyerukan penghentian permusuhan. Akhirnya, pada akhir 1948, Belanda menerima perintah PBB dan melakukan gencatan senjata di Jawa dan Sumatra.

Pada masa pendudukan Belanda tahun 1949 ini, Sultan Hamengkubuwono IX yang tetap berada di Istana Yogyakarta, dan tidak beranjak selama pendudukan Belanda, menolak tawaran Belanda yang ingin menjadikannya sebagai Kepala Pemerintahan Jawa, dan berhenti dari pemerintahan/kekeratonan Yogya. Beliau bahkan memberikan bantuan kepada pejuang-pejuang gerilya Republik Indonesia yang melawan Belanda. Sri Sultan, mengatur rencana dan pelaksanaan serangan para gerilya Republik Indonesia atas kedudukan Belanda di Yogyakarta, untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada. Serangan ini dikenal dengan sebutan “SO” yang berarti “Serangan Oemoem”,¹⁶ yang berlangsung pada 1 Maret 1949, di mana para gerilya Republik Indonesia selama 6 jam dapat menduduki kota Yogyakarta yang dikuasai Belanda.¹⁷

Serangan Umum 1 Maret 1949

DALAM ucapannya ketika upacara pemakaman mantan Presiden Indonesia Jenderal Soeharto, pada Januari 2008, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono antara lain mengatakan: “Almarhum Soeharto, tercatat dalam sejarah sebagai pejuang yang paling monumental dalam perjuangan Serangan Umum 1949. Sebab, perjuangan almarhum memberikan bobot dan nilai yang berujung pada kedudukan

¹⁶ oe=ui

¹⁷ peristiwa ini dijadikan film perjuangan oleh sutradara Usmar Ismail dengan judul “Enam Djam di Djogdja” pada tahun 1951—Pen.

Indonesia di mata negara lain. Juga pada perjuangan lainnya di saat awal perjuangan dan pascakemerdekaan.”

Apakah benar Soeharto yang jadi pemimpin dan penggagas atau prakarsa, dan pejuang yang paling monumental dalam “Serangan Umum 1 Maret 1949” di Yogyakarta itu hingga tercatat dalam sejarah, seperti yang “diakui” dan diucapkan oleh presiden Indonesia itu? Kalau boleh kita bertanya: Sejarah siapa? Sejarah bangsa Indonesia, sejarah orde baru, atautkah sejarah Soeharto? Mari kita lihat penjelasan-penjelasan sejarah dan komentar yang bisa kita peroleh dan gunakan untuk bahan pertimbangan, sebagai berikut:

Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, sangat banyak buku-buku sejarah, bahkan film yang menggambarkan bahwa Letkol. Soeharto adalah penggagas dan pemimpin Serangan Umum 1 Maret 1949, “yang memberikan bobot dan nilai yang berujung pada kedudukan Indonesia di mata negara lain”, seperti yang diucapkan SBY tahun 2008 di atas. Film “Janur Kuning” misalnya, melukiskan kepahlawanan Soeharto muda ketika memimpin tentara republik menyerbu Yogyakarta, yang kala itu dikuasai oleh Belanda. Tapi, benarkah penggagas dan pemimpin serangan itu Soeharto? Lalu di mana peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman?

“Pemutarbalikan sejarah oleh Soeharto mengenai Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi pembahasan buku *Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949*, karangan Tim Lembaga Analisis Informasi yang cetakan pertamanya diterbitkan tahun 2000 itu,¹⁸ Sri Sultan HB IX pernah bertutur: ‘Sayalah¹⁹ yang semula membicarakan gagasan itu dengan Jenderal Sudirman yaitu minta izinnya untuk mendapatkan kontak langsung dengan Soeharto, ketika itu berpangkat mayor, untuk menjalankan tugas melaksanakan gagasan saya.’ Hal itu terungkap dalam buku biografi Sultan HB IX, *Tahta untuk Rakyat* (1982). Berdasarkan bukti-bukti dan saksi sejarah, buku ini menyimpulkan bahwa prakarsa serangan adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX.”²⁰

Pengungkapan lain yang lebih jelas, terperinci dan menyeluruh adalah tulisan Harsutejo yang berjudul “Jejak Hitam Soeharto”, yang dimuat dalam harian berita *Rakyat Merdeka*, semenjak Jumat, 19 Mei 2006 yang juga telah dibukukan. Mengenai Soeharto dan SU 1 Maret 1949, dapat kita baca sbb.:

“Pertama-tama perlu kita kutipkan versi Soeharto tentang kejadian sejarah yang cukup menarik ini. Pertama, versi yang ditulis oleh O.G. Roeder pada tahun 1976 antara lain berdasar wawancara intensif dengan Soeharto. Si penulis mengaku bahwa selama itu ia berada dekat dengan Soeharto pribadi. (Roeder, 1977:xi).

“Beberapa kali Soeharto sendiri menjalankan tugas rahasia masuk kota yang diduduki Belanda itu. Dengan berpakaian seperti seorang petani ia membawa buah-buahan ke dapur keraton Sultan ... menghadap Sri Sultan Hamengkubuwono

¹⁸ Seperti dikutip buku *Memoar Oei Tjoe Tat, Pembantu Presiden Soekarno*

¹⁹ Hamengkubuwono IX—Pen.

²⁰ <http://id.shvoong.com/books/1755952-kontroversi-seranganumum-maret-1949/>

IX. Diadakanlah perundingan-perundingan yang lama.... Sri Sultan, yang disegani oleh rakyat maupun pemimpin, menjadi jantung dari perlawanan nasional terhadap penjajahan Belanda di Jawa Tengah. Dan Letnan Kolonel Soeharto adalah komandan lapangan yang paling dipercaya.... Dalam salah satu perundingan rahasia ... telah diambil suatu keputusan yang berani untuk mengadakan serangan umum terhadap Yogyakarta dan menduduki kota 'sekalipun hanya untuk beberapa jam'. Tujuannya adalah, menunjukkan kepada dunia bahwa perlawanan Indonesia yang gigih tidaklah patah seperti yang pernah dinyatakan oleh wakil Belanda di Perserikatan Bangsa-Bangsa." (Roeder, 1977:205—206).

Serangkaian pertemuan tersebut diadakan sebelum 1 Maret 1949. Jadi menurut versi ini, SU 1 Maret 1949 antara lain merupakan pelaksanaan hasil dari pembicaraan beberapa kali pertemuan antara Soeharto dan Sri Sultan, "...dalam salah satu perundingan rahasia ... telah diambil suatu keputusan yang berani untuk mengadakan serangan umum terhadap Yogyakarta dan menduduki kota itu...." Selanjutnya Roeder melukiskan serangan itu berdasar kisah Soeharto, sbb.:

"Pada tanggal 1 Maret 1949, tepat pada jam 6.00 pagi, ketika sirene meraung-raung menandakan berakhirnya jam malam, pasukan gerilya memasuki kota. Soeharto berada dalam pasukan yang akan memberikan pukulan, dengan senapan Owen yang berat di tangannya. Prajurit-prajurit menggunakan daun kelapa muda²¹ yang digantungkan di bahu sebagai tanda pengenal. Serangan itu berjalan lancar. Pusat kota dapat diduduki...." (Roeder, 1977:207).

Perlu ditambahkan bahwa Roeder menulis biografi Soeharto atas restu sang jenderal.

Kolonel Latief sedikit menyinggung tentang SU 1 Maret 1949 yang dikemukakannya di depan sidang mahmilti pada tahun 1978 yang tidak pernah ditanggapi oleh Soeharto. Selama kekuasaan Soeharto, pembelaan Latief tersebut dalam kenyataannya merupakan bacaan terlarang. Seperti kita ketahui, pada tahun 1949 Kapten Latief adalah komandan kompi di bawah Soeharto yang ikut melakukan serangan umum pada 1 Maret 1949. Ketika pasukan Latief mengundurkan diri keluar kota, ia melapor kepada Soeharto tentang keadaan pasukannya, ketika itu Soeharto sedang menikmati makan soto babat.... (Latief, 1999:95). Tidak disebut apakah Letkol. Soeharto memegang senjata Owen yang berat itu.

Dalam versi lain yang tercantum dalam otobiografinya yang ditulis pada tahun 1989, 13 tahun setelah "versi Soeharto/Roeder", Soeharto mengaku bahwa sejak pendudukan Yogya oleh tentara Belanda pada 19 Desember 1948, ia telah mempunyai gagasan untuk melakukan serangan umum.

"Otak saya seakan-akan berputar, cari akal, bagaimana caranya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Yogyakarta kepada TNI. Bagaimana meyakinkan mereka, bahwa TNI masih mampu mengadakan perlawanan,"

²¹ Janur Kuning—HS.

(Soeharto, 1989:58). Pendeknya Soeharto mengklaim dirinya sebagai satu-satunya penggagas, pemikir, pengambil inisiatif, dan pelaksana SU 1 Maret 1949, lengkap dengan strategi dan seluruh taktiknya. Rupanya Soeharto perlu melandasi diri lebih kokoh dalam memberikan legitimasi sebagai seorang pemimpin cemerlang dan sama sekali patut untuk dikokohkan kembali sebagai Presiden RI lebih lanjut.

"Persis pada waktu saya menyetel radio memantau siaran luar negeri bersama-sama dengan Purhadi, perwira PHB yang sekarang sudah tiada, terdengar siaran luar negeri mengenai perdebatan di PBB. Belanda mengatakan bahwa tindakan polisionilnya, ... telah berhasil. Yogya telah mereka duduki, pemerintahan Belanda berjalan lancar, TNI sudah tidak ada, ekstremis sudah di luar kota, katanya. Hati saya melawan mendengar siaran itu.... Seketika itu saya berpikir, 'Bahan apa yang akan digunakan Palar, wakil RI di PBB untuk menjawab pernyataan pihak Belanda itu?' Maka muncul keputusan dalam kepala saya: 'Kita harus melakukan serangan pada siang hari, supaya bisa menunjukkan pada dunia kebohongan si Belanda itu.'" (Soeharto, 1989:60).

Banyak orang yang mengalami masa gerilya di Jawa Tengah pada tahun 1949 dan juga para pelaku meragukan bahwa pasukan Soeharto memiliki radio di daerah pedalaman pada masa gerilya yang serba sulit itu. Ajaib bahwa apa yang dikatakan Soeharto itu amat mirip dengan apa yang dikatakan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam sambutan pembukaan Monumen 1 Maret 1949 di depan Presiden Soeharto pada 1973, 16 tahun sebelum klaim Soeharto dan tidak dibantah olehnya.

"Maka kira-kira tanggal 10 Februari [tepatnya 14 Februari] kita mengadakan perundingan, kami laporkan kepada Pak Harto mengenai suasana di kota ini dan beranggapan bahwa satu-satunya jalan adalah SO, yaitu Serangan Oemoem. Kebetulan saya mendengar dari radio bahwa soal Indonesia akan dibicarakan di dalam *United Nations* pada kira-kira akhir Februari, maka saya usulkan agar dijadikan satu saja, untuk memberikan semangat kembali kepada penduduk di kota dan untuk menarik perhatian daripada *United Nations*. Mengenai teknis pelaksanaan, saya serahkan kepada Pak Harto, segala risiko adalah pada saya...." (Suwarno, 2000:135).

Hal yang sama ini kemudian juga terdapat dalam wawancara Sri Sultan yang termuat di *Asiaweek* pada tahun 1986, jadi 3 tahun sebelum klaim Soeharto.

Berbeda dengan versi Roeder/Soeharto pertama di atas yang mengakui sejumlah pertemuan dengan Sri Sultan sebelum 1 Maret 1949, maka dalam versi otobiografinya ia mengatakan bahwa pertemuan dengan Sri Sultan terjadi baru pada pertengahan Mei 1949, jadi jauh sesudah SU 1 Maret.

"Saya menyamar masuk kota menemui Sri Sultan itu pada pertengahan bulan Mei, bertolak dari Bibis, jadi sesudah Serangan Umum 1 Maret 1949." (Soeharto, 1989:66).

Pada tahun 1960, Mayjen. T.B. Simatupang, bekas Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) RI menerbitkan memoarnya, *Laporan dari Banaran*. Memoar ini ditulis berdasar buku harian dan catatan-catatannya yang telah dibuatnya selama perang

gerilya di Jawa Tengah dalam kapasitasnya sebagai seorang kolonel dengan jabatan Wakil II KSAP, sedang KSAP dijabat oleh Jenderal Sudirman. Ketika itu Kolonel A.H. Nasution menjabat Panglima Tentara dan Teritorium Djawa (PTTD), markasnya disebut Markas Besar Komando Djawa (MBKD). Sedang Komando Sumatra di bawah Kolonel Hidayat. Kedua komando berada di bawah Panglima Besar Sudirman. (Simatupang, 1981:3).

Catatan dan buku harian itu meliputi periode 19 Desember 1948 sampai dengan 27 Desember 1949. Di dalamnya terekam juga Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, sbb.:

“Tanggal 1 Maret 1949, Di Wiladeg kami bertemu dengan saudara-saudara Sumali dan Ir. Dipokusumo, yang bersama-sama memimpin Staf Penerangan Komisariat Pusat Pemerintah di Jawa. Mereka sedang menunggu-nunggu kabar dari Yogyakarta, sebab hari itu juga, yakni tanggal 1 Maret 1949, pasukan-pasukan kita akan melancarkan “SO” atau *serangan umum (oemoem)* atas kota. Inilah serangan yang beberapa waktu yang lalu telah saya bicarakan dengan Bambang Sugeng di Banaran. Saudara-saudara Sumali dan Dipokusumo telah bersiap-siap untuk menyiarkan “SO” ini melalui pemancar radio dekat Banaran ke Sumatra dan New Delhi yang kemudian akan menyiarkan berita itu kepada dunia. Khusus pada tingkat sekarang ini, di mana Belanda sedang ngotot, maka sebuah berita yang agak sensasional mengenai serangan umum atas Yogyakarta pasti akan mempunyai efek yang sangat baik bagi kita.” (Simatupang, 1981:69).

Selanjutnya catatan Kolonel Simatupang merekam nama Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai memberikan pegangan yang kuat kepada semua orang, baik militer, pamongpraja, pemuda, pelajar, dan orang desa, dengan sikap tegas membantu perjuangan serta menentang tawaran-tawaran Belanda. (Simatupang, 1981:69,74).

Setelah hengkang dari Yogya, Kolonel Simatupang dalam kapasitasnya sebagai Wakil II KSAP melakukan perjalanan ke banyak basis gerilya di wilayah pedalaman Yogya, Surakarta, dan Kedu, dengan markasnya di Banaran, kira-kira 50 km barat laut Yogya. Ketika serangan 1 Maret terjadi, Kolonel Simatupang sedang berada di Desa Wiladeg, kira-kira 65 km sebelah timur Yogya, bertemu dengan petugas penerangan yang bersiap-siap menyiarkan berita serangan umum.

Selama perjalanannya ke tiga wilayah tersebut ia mencatat banyak nama pejabat sipil dan militer yang ditemuinya maupun yang telah melakukan tugas di tempat lain. Nama-nama itu, misalnya, kedua petugas penerangan tersebut di atas, kemudian juga Mayor Daeng dari Siliwangi, Letkol. Sudarto, bekas mahasiswa teknik Bandung, Daan Yahya dari Siliwangi, Letkol. Taswin, seorang komandan brigade, Kemal, seorang komandan batalyon, Princen, Mokoginta, komandan PM, Chairul Saleh, Letkol. Sadikin, Letkol. Kusno Utomo. Ketika bertemu Mayor Wiluyo, yang bersangkutan sedang ditugaskan oleh Kolonel Bambang Sugeng untuk menghubungi Letkol. Yani di Kedu, Letkol. Soeharto di Yogya, dan Letkol. Bachrun di Pekalongan, dan masih banyak para pembesar sipil dan militer lain

sehubungan dengan tugasnya masing-masing. (Simatupang, 1981:27). Simatupang pun membuat berbagai analisis dalam catatannya tentang keadaan politik internasional sehubungan dengan situasi Indonesia, organisasi perang rakyat, dsb. (Simatupang, 1981:37–39) dan masih banyak analisis yang lain.”²²

“Berdasarkan catatan harian Kolonel Simatupang, jelas bahwa rencana Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan suatu topik yang menjadi bahasan serius di kalangan pimpinan teras atas AD, antara lain antara Kolonel Simatupang sebagai Wakil KSAP II dengan Kolonel Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi III. Buku peninggalan almarhum Simatupang ini merupakan salah satu bahan sejarah yang tidak bisa diboongi oleh seorang Jenderal Soeharto sekalipun. Entah, barangkali Soeharto tidak pernah membaca tulisan seniornya tersebut yang telah dibuat pada 1959 dan terbit pertama kalinya pada 1960, ketika Kolonel Soeharto baru saja dipecat sebagai Panglima Diponegoro karena kasus penyelundupan, lalu masuk ke Seskoad di Bandung.

Dalam hubungan dengan serangan umum ini, nama Letkol. Soeharto sama sekali tidak terekam dalam catatan Wakil II KSAP Kolonel Simatupang. Mungkin sekali menurut Simatupang, komandan serangan itu bisa dilakukan oleh siapa saja yang ditugaskan, tidaklah terlalu penting. Ketika itu yang berada di wilayah tersebut adalah Letkol. Soeharto.

Pastilah catatan dan tulisan Simatupang tersebut yang didasarkan pada buku hariannya sama sekali tidak terpengaruh oleh rezim orba yang kemudian berdiri. Hal ini sedikit berbeda nuansanya dengan tulisan Jenderal Nasution yang baru disusunnya pada masa puncak rezim orba, yang antara lain berbunyi:

“...Sesuai dengan perkembangan diplomasi, dalam rangka tahap ke-2 perlawanan kita, maka Letkol. Soeharto mengambil keputusan untuk menyerang kota Yogya tanggal 1 Maret, sehingga mata internasional, melalui KTN dan lain-lain, dapat menyaksikan. Terjadilah Serangan Umum 1 Maret, “enam jam di Yogya” — yang setelah orde baru berdiri selalu diperingati secara besar-besaran.

Dan aksi ini adalah dalam rangka taktis ofensif yang sedang dilancarkan oleh Panglima Bambang Sugeng di seluruh wilayahnya, terhadap kota-kota kabupaten dan keresidenan, terutama di daerah Banyumas, Kedu, Semarang, dan Yogya. Pada waktu yang agak bersamaan juga Divisi I memulai aksi yang demikian di Jawa Timur, menyusul Divisi II (Jawa Tengah bagian timur), kemudian Divisi IV (Jawa Barat).” (Nasution, 2A, 1989:229–230).

Jenderal Nasution pun mencatat bahwa serangan itu bagian dari gerakan Divisi III Jawa Tengah bagian barat yang meliputi Yogya, Semarang, Kedu, dan Banyumas di bawah Panglima Kolonel Bambang Sugeng. Kemudian seluruh divisi di Jawa melakukan hal yang sama. Buku Jenderal Nasution itu memuat lampiran laporan wawancara Sri Sultan dengan BBC pada 23 November 1985. Disebutkan bahwa selama pendudukan Belanda, Sri Sultan terus-menerus mendengarkan siaran radio

²² Harsutejo, *Jejak Hitam Soeharto, Sejarah Gelap G30S dan Sekitar G30S*. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

luar negeri termasuk tentang akan diadakannya perdebatan tentang Indonesia di PBB awal Maret 1949.

Maka Sri Sultan melakukan kontak dengan Panglima Besar Sudirman tentang usulan serangan umum pada siang hari. Jenderal Sudirman menyetujui ide tersebut dan meminta Sri Sultan menghubungi komandan pasukan setempat, Letkol. Soeharto. Pertemuan dengan Letkol. Soeharto diadakan pada 14 Februari 1949. (Nasution, 2A, 1989:323).

Selanjutnya dimuat juga wawancara Jenderal Soeharto yang berisi klaimnya tentang kejadian sejarah yang sudah kita kenal itu yang juga termuat dalam otobiografi Soeharto. (Soeharto, 1989:56—64). Rupanya, Jenderal Nasution dengan sengaja tidak memberikan komentarnya untuk menghindari polemik dengan Jenderal Soeharto yang sedang berada di puncak kekuasaannya.

Pendeknya, catatan-catatan sejarah serta kesaksian para pelaku membuktikan dengan telak bahwa Jenderal Soeharto telah berdusta dengan sadar tentang klaimnya terhadap SU 1 Maret 1949 di Yogya, bahkan dengan tidak tahu malu menentang keterangannya sendiri kepada penulis biografinya O.G. Roeder yang memuji-mujinya begitu tinggi. Kenekatan Soeharto masih berlanjut dalam hal SU. Ia sama sekali tidak menyinggung nama Panglima Besar Sudirman, seolah panglima ini sudah berada di tempat jauh, tidak berdaya karena sakit-sakitan dan tidak memiliki kemampuan untuk menghubungi anak buahnya di sekitar Yogya.

Nama petinggi militer lain pun tidak pernah disebutkan, Soeharto mencatatnya sebagai berikut: “Waktu itu tidak ada komunikasi antar pimpinan TNI. Pak Dirman sudah berada di dekat Jawa Timur. Mungkin sudah di Pacitan. Mungkin sudah di Desa Sobo. Komando Panglima Divisi ada di Ngangkrik, Magelang. Kita memerlukan waktu sehari-hari untuk dapat sampai ke sana.” (Soeharto, 1989:60).

Pendeknya, hanya Soeharto yang berpikir keras dan melakukan daya upaya dalam hubungan dengan ibukota republik, yang lain sedang bersembunyi jauh di sana di gunung dan hutan mencari selamat. Padahal Jenderal Sudirman terus-menerus berhubungan dengan sejumlah anak buahnya, pernah melakukan kontak surat-menyurat dengan Sri Sultan sebelum SU melalui kurirnya seperti yang diungkapkan Cokropranolo dalam bukunya *Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman*. Cokropranolo sebagai utusan Jenderal Sudirman yang membawa surat untuk Sri Sultan berangkat dari Pacitan 8 Februari 1949. Karena Yogya sedang panas maka ia menuju markas Letkol. Soeharto dan menemuinya.

“Dalam pertemuan itu disampaikan maksud dan tujuan kedatangan saya ke Yogya. Selanjutnya karena situasi kondisi kota yang diketahui Pak Harto dengan baik, saya mohon pertolongan untuk menyampaikan surat Pak Dirman kepada Sri Sultan secara aman dan rahasia. Dengan senang hati beliau menerima surat Pak Dirman untuk disampaikan kepada Sri Sultan. Jawaban atas surat Pak Dirman itu akan disampaikan oleh seorang perwira utusan Pak Harto.” (Tjokropranolo, 1992:167).

Di sini jelas Soeharto benar-benar tidak tahu malu, begitu nekat dan tega telah mempreteli peran sejarah Sri Sultan untuk dikenakan pada dirinya sendiri bagi merebut pakaian bekas Sri Sultan untuk dikenakan pada dirinya, bak Petruk menjadi raja. Bahkan sekaligus mengabaikan peran tokoh-tokoh terhormat seperti Panglima Besar Sudirman, Kolonel Simatupang, dan Kolonel Bambang Sugeng, dsb. sekadar sebagai tokoh kelas pinggiran.

Kalau dalam versi pertamanya Soeharto masih mengakui serangkaian pertemuan dengan Sri Sultan sebelum SU, maka dalam versi keduanya ia telah “lupa” dengan pengakuannya itu. Ia mengatakan, “Saya menyamar masuk kota menemui Sri Sultan itu pada pertengahan bulan Mei, bertolak dari Bibis, jadi sesudah Serangan Umum 1 Maret 1949.” (Soeharto, 1989:66). Jadi kali ini Soeharto versus Soeharto. Dalam hal ini Soeharto dengan mudahnya menelan ludahnya sendiri, padahal ludah itu sudah tersebar luas dalam bentuk buku O.G. Roeder yang direstuihnya.

Setelah mengumpulkan banyak data yang selama ini tidak diungkapkan, dilengkapi setumpuk kesaksian mereka yang masih hidup dan menjadi pelaku langsung sejarah ketika itu, maka tim penulis buku *Pelurusan Sejarah SO 1 Maret 1949* menyimpulkan bahwa hal itu merupakan hasil perenungan seorang konseptor yang berwawasan kenegarawanan, memiliki wewenang besar untuk memobilisasi dan memfasilitasi berbagai aspek dan komponen serta memberikan komando aksi dengan menyiapkan suatu skenario yang tepat dengan berbagai improvisasi.

Hal demikian ketika itu hanya mungkin dilakukan oleh sosok seperti Sri Sultan HB IX atau Jenderal Sudirman, dan bukan pada level operasional bawah (Tataq Chidmad, cs., 2001:4), seperti misalnya Letkol. Soeharto, yang ketika itu “hanya” salah seorang komandan resimen, yang dalam keadaan bergerilya di pedalaman tentunya hanya mempunyai fasilitas yang amat terbatas. Menurut hemat saya, salah satu nama yang perlu ditambahkan dari pimpinan tingkat atas itu ialah Wakil II KSAP Kolonel Simatupang dan Kolonel Bambang Sugeng, paling tidak mendiskusikannya seperti terekam di dalam bukti sejarah di atas.

Semasa berkuasa, Jenderal Soeharto mendengar juga desas-desus pembicaraan yang tidak sependapat dengan klaim Soeharto sebagai konseptor yang brilian sekaligus eksekutor yang sukses SU 1 Maret 1949, antara lain di kalangan pelaku sejarah yang masih hidup termasuk yang pernah membantunya. Dengan enteng Soeharto bereaksi, “Tapi harus diingat, saya yang memimpin dan melaksanakan rangkaian serangan-serangan tersebut. Kalau ada orang yang mengatakan itu bukan ide saya boleh-boleh saja, tapi kalau ide itu tidak dilaksanakan, tentu hanya ide, sudah dilaksanakan baru orang mencari siapa yang punya ide, ini kan aneh....”

Dalam hal ini Soeharto merasa menjadi orang yang tak tergantikan untuk melaksanakan Serangan Umum terhadap kedudukan Belanda di Yogya. Bagi penyelidikan sejarah, mencari konseptor yang sebenarnya dari suatu inisiatif bersejarah adalah hal biasa saja, sama sekali tidak aneh. Tapi rupanya bagi Soeharto hal itu tidak perlu dipertanyakan, karena *toh* yang memberikan kesaksian adalah

seorang Jenderal Soeharto, Presiden RI, Mandataris MPR, tak mungkin salah karena ia pemegang amanat kebenaran.

Dalam kasus Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogya yang diduduki tentara Belanda tersebut, pendeknya, catatan-catatan sejarah serta kesaksian para pelaku membuktikan dengan telak bahwa Jenderal Soeharto telah berdusta dengan sadar tentang klaim peran dirinya, bertentangan dengan keterangannya sendiri kepada penulis biografinya O.G. Roeder. Untuk itu ia pun tega mengorbankan bekas anak buahnya salah seorang saksi hidup, Marsudi, seorang perwira intelnya di masa itu yang mengantarnya masuk ke keraton Yogya. Ia dipenjarakan selama lima tahun selama orba karena tidak mau didikte Soeharto.

Letkol. Soeharto tidak banyak mengambil bagian dalam SU itu, ia hanya enak-enak berada di garis belakang yang aman sembari makan soto di warung sebagai yang diceritakan Latief ketika pertempuran seru terjadi dan cukup banyak korban jatuh. Adegan 'Soeharto makan soto babat' itulah yang disebut Subandrio sebagai "skandal Soeharto". Dalam pasukan Kapten Latief yang masuk ke Yogya dari Godean itu bergabung juga Laskar Pesindo yang sudah bersiap di dalam kota di bawah pimpinan Supeno dan Pramuji, yang menurut A.M. Hanafi merupakan kekuatan militan serangan umum tersebut." Demikian riset sejarah dan tulisan Harsutejo.

Bahkan, Prof.Dr. W.F. Wertheim juga memberikan penjelasan: "Latief telah menjadi bawahan dari Soeharto waktu Yogya diduduki Belanda, tahun 1949. Malahan, menurut keterangan Latief dalam eksepsinya, waktu serangan ke Yogya pada tanggal 1 Maret 1949, dengan Yogya diduduki pasukan Republik selama 6 jam, bukan Soeharto yang sebenarnya masuk Yogya, melainkan Latief sendiri! Waktu Latief pulang ke komandonya di pegunungan bersama grupnya, Soeharto bersama ajudannya sedang makan soto!"

Jadi, dengan banyaknya penjelasan dan bukti serta keterangan sejarah ini, kaum muda, bangsa Indonesia bisa mempertimbangkan dan menganalisa sendiri tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 yang secara licik dan tidak tahu malu diakui oleh Soeharto sebagai prakarsa, hasil pemikiran dan pimpinannya! Sedikit pertanyaan, apakah perilaku Soeharto yang makan soto di pegunungan, sementara bawahannya, Latief dan anak buahnya, berperang melawan Belanda di Yogya pada 1 Maret 1949 itu bisa dikatakan bahwa "Soeharto sebagai pejuang yang paling monumental dalam perjuangan Serangan Oemoem 1949" seperti yang diucapkan oleh Presiden SBY ketika pengebumian Soeharto pada Januari 2008 itu? Biar generasi muda bangsa Indonesia yang menilainya!

Asvi Warman Adam, ahli sejarah dalam LIPI menulis: "Setelah membebaskan para pemimpin politik yang ditahan di Penjara Wiragunan, malam itu juga Soeharto membocorkan rahasia ini ke istana. Besoknya, 3 Juli 1946, Soedarsono yang datang bersama rombongan ditangkap pasukan pengawal presiden. Jadi kalau rencana Soedarsono itu dapat disebut sebagai percobaan "kudeta" yang pertama sejak Indonesia merdeka, maka Soeharto diam-diam telah

menggagalkannya. Ia memanfaatkan strategi *nglurug tanpa bala*, memakai orang lain untuk kepentingannya, sebuah siasat yang terus dipergunakannya selama memerintah. Mengenai Serangan Umum 1 Maret 1949, mengesankan prakarsa itu berasal dari Letkol. Soeharto sendiri. Padahal Sri Sultan Hamengkubuwono IX memintanya menghadap ke keraton pada 14 Februari 1949 dan menyarankan agar dilakukan serangan tersebut. Foto pertemuan Sri Sultan dengan Soeharto tersebut diserahkan pihak keraton agar dipasang di Monumen Yogya kembali, yang dibangun untuk memperingati peristiwa tersebut. Anehnya, hal itu tidak dilakukan. Peran Sri Sultan sengaja dihilangkan."

Perlu diingat, bahwa Wikipedia, ensiklopedia yang mengumpulkan dan menulis data-data sejarah Indonesia, juga menulis bahwa "Penggagas sebenarnya serangan ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sebagai raja Yogyakarta, gubernur militer, serta menteri pertahanan." Jadi bukannya Soeharto. "Pengakuan" Soeharto yang tidak tahu malu ini seperti kata sebutan "telur mata sapi". Ayam yang punya telur, tapi sapi yang tidak ada sangkut-pautnya yang punya nama!

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan: "Jangan Menggelapkan Sejarah", sedang Bung Karno sendiri sebelumnya mengatakan "Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah". Nah, sejarah mana yang mesti kita ikuti? Sejarah karangan, sejarah yang digelapkan oleh Soeharto, ataukah sejarah yang sebenarnya terjadi?

Yoga Sugama—Ali Murtopo—Soeharto

PADA akhir 1956, ketika rencana pengangkatan Kolonel Bambang Supeno sebagai Pangdam Diponegoro bocor, terjadi rapat gelap di Kopeng dihadiri sejumlah perwira yang dikoordinir oleh Letkol. Soeharto melalui anak buahnya, Mayor Yoga Sugama sebagai Asisten I Divisi di Semarang, Soeharto sendiri tidak hadir. Dari puluhan perwira yang hadir hanya Kolonel dr. Suhardi yang menandatangani setuju pencalonan Letkol. Soeharto dan menolak pencalonan Kolonel Bambang Supeno sebagai Pangdam Diponegoro. Soeharto yang ingin merebut kedudukan ini berpaku dengan waktu karena pencalonan Bambang Supeno tinggal menunggu tanda tangan presiden. Akhirnya komplotan tersebut berhasil.

Seandainya tidak, maka rapat gelap itu akan diusut, dan yang paling terbukti adalah Kolonel dr. Suhardi, sedang Soeharto tidak terbukti tersangkut karena Soeharto menjadi 'Mr. Alibi'. Masalah tersebut dicatat juga oleh Ali Murtopo yang ketika itu kapten dan Komandan Raiders yang diminta Yoga Sugama untuk melakukan operasi intelijen soal pencalonan Soeharto. (Yoga Sugama, 1990:20—30). Selanjutnya Yoga Sugama mencatat bahwa rapat di Kopeng itu dihadiri oleh Sudarmo Djojowiguno, Suryo Sumpeno, Surono, Pranoto, Suwito Haryoko (Asisten II), Suwarno (Asisten IV), dan Munadi (AsistenV). Ia dan Mayor Suryo Sumpeno berangkat ke Jakarta menemui Kolonel Zulkifli Lubis di MBAD untuk

menggagalkan pencalonan Bambang Supeno dan menggantinya dengan Soeharto. Usaha mereka berhasil. (Yoga Sugama, 1990:80–82).

Inilah trio pertama Soeharto—Ali Murtopo—Yoga Sugama. Trio ini pula kelak melakukan usaha-usaha menikam politik konfrontasi Presiden Soekarno dengan penyelundupan ke Malaysia dan Singapura serta kontak-kontak politik gelap dengan pihak Malaysia melibatkan tenaga militer, politisi sipil anti komunis, pengusaha. Kontak-kontak trio ini di lapangan melibatkan Ali Murtopo, Benny Moerdani, A.R. Ramly, selanjutnya di Malaysia dengan Des Alwi, Prof. Sumitro. (Yoga Sugama, 1990:139; Hanafi, 1998:206).²³

Tentang ini, Ketua Dewan Redaksi Majalah *Tapak*, P. Hasudungan Sirait, menulis: “Kunci kekuatan posisi Yoga Sugama adalah kedekatan hubungan pribadinya dengan Soeharto. Kedekatan keduanya sudah sejak lama, yaitu ketika mereka masih sama-sama di Teritorium IV—Diponegoro. Hal ini diceritakan dalam kitab *Memori Jenderal Yoga*. (B. Wihoho dan Banjar Chaeruddin, 1990).

Dikisahkan bahwa sebagai asisten intelijen (asintel), Yoga mulai sering berhubungan dengan Soeharto menjelang Pemilu 1955. Saat itu Soeharto menjadi penanggung jawab keamanan pemilu di Jawa Tengah bagian timur. Namun sejauh itu relasi mereka masih sebatas profesional. Sebuah situasi kemudian membuat afeksi keduanya saling bertaut untuk seterusnya.

Pertengahan 1956, pimpinan Angkatan Darat (AD) hendak menjadikan Kol. Bambang Supeno sebagai Panglima TT-IV Diponegoro menggantikan Kol. M.Bachrum. Yoga dan sejumlah perwira Diponegoro menolak rencana itu dengan alasan penempatan Bambang Supeno akan merebakkan konflik di lingkungan TT-IV, sebab Bambang Supeno, perwira yang pernah mengajukan keberatan kepada Presiden Soekarno sehubungan dengan rencana AD untuk mengurangi personilnya, sangat dekat dengan Wakil Kepala Staf AD (Wakasad) Zulkifli Lubis. Lubis saat itu sedang menjadi sorotan karena mencoba menggalang dukungan di sejumlah kesatuan di Jawa Barat. Di samping itu, masih pada pertengahan 1956, anak buahnya menangkap Menlu Roeslan Abdulgani dengan tuduhan memanipulasi dana. Di masa itu kabinet sering jatuh bangun. Para perwira pun berpolitik, sehingga kepemimpinan di AD labil.

Yoga yang secara pribadi sebenarnya dekat juga dengan Zulkifli Lubis, bahu-membahu dengan sejumlah perwira Diponegoro untuk menggagalkan pengangkatan Bambang Supeno. Salah satu yang ia lakukan adalah mengondisikan di lingkungan Divisi Diponegoro dan AD agar Soeharto saja yang menjadi Panglima TT-IV.

Untuk itu ia menugasi secara khusus anak buahnya, Ali Moertopo. Dalam sebuah tulisan di buku *Memori Jenderal Yoga*, Ali mengungkapkan bahwa saat menjalankan tugas khusus inilah ia menjadi dekat secara pribadi dengan Yoga. Bersama Suryo Sumpeno, Yoga kemudian menjadi utusan kelompok penolak

Bambang Supeno di TT-IV untuk menemui Wakasad Zulkifli Lubis di Jakarta. Alhasil, Letkol. Soeharto, Kastaf TT-IV, yang menjadi panglima merangkap Penguasa Perang Daerah (PPD). Pangkatnya segera dinaikkan menjadi kolonel. Soeharto tak melupakan jasa baik mereka yang telah mendukungnya. Yoga yang sejak tahun 1955 (hingga 1959) menjadi asisten intelijen dipercaya merangkap sebagai wakil kepala staf harian PPD. Sedangkan Ali Moertopo yang sebelumnya selalu di pasukan tempur, ditarik menjadi staf di Asisten V Teritorial. Seorang lagi yang ditarik Soeharto ke staf adalah sahabat Ali Moertopo, Sudjono Humardani. Yoga, Ali, dan Sudjono kelak akan selalu di lingkaran dalam Soeharto setelah panglima tersebut menjadi orang nomor satu.

Kalau membaca memoarnya akan terlihat adanya dua figur yang besar pengaruhnya dalam perjalanan karier Yoga Sugama. Yakni Zulkifli Lubis dan Soeharto. Yoga lahir di Tegal pada 12 Mei 1925. Sewaktu masih di bangku kelas III AMS (setara SMU) ia mendapat kesempatan untuk bersekolah di akademi militer Jepang (*Rikugun Shikan Gakko*), Tokyo, tahun 1942. Ia masih menjadi siswa di sana saat Sekutu mengebom Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945. Saat keadaan serba sulit di Jepang, di sana ia diterima bekerja di markas Sekutu sebagai penerjemah. Secara tak langsung di markas itulah ia mulai mengenal dunia intelijen. Setelah dua tahun di markas sekutu, ia kembali ke tanah air dan bekerja di Kementerian Pertahanan, Yogyakarta. Sesudah Agresi Belanda (Desember 1948), ia menjadi perwira intelijen di Staf Teritorium Militer (STM) merangkap Asisten I (Intelijen) Brigade Gunung Jati, Banyumas. Seusai penyerahan kedaulatan (1949) ia ditarik ke Departemen Pertahanan/Staf Angkatan Perang, Jakarta. Di sana ia menjadi staf Zulkifli Lubis, Kepala Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP). Ia segera akrab dengan Lubis, orang yang sering disebut sebagai bapak intelijen Indonesia. Dari Lubis ia mendapat pengetahuan yang luas ihwal situasi politik dalam negeri. Adalah Zulkifli Lubis yang mengirim Yoga belajar ke dinas intelijen Inggris MI-6, di Maresfield. Selulus dari MI-6, ia kembali ke Jakarta dan menjadi anak buah Zulkifli Lubis. Tapi sebentar saja. Ia kemudian dikirim ke Semarang sebagai Asisten I (Intelijen) TT-IV Diponegoro. Waktu itu Panglima TT-IV adalah Kol. M. Bachrum. Tak begitu jelas mengapa Zulkifli Lubis melepas anak didik yang telah ia sekolahkan di MI-6 itu ke Diponegoro. Bukankah intel hasil sekolahan profesional sangat ia butuhkan saat itu? Sebuah jawaban yang mungkin adalah untuk membendung penetrasi PKI. Saat itu sejumlah perwira TT-IV merupakan kader PKI. Setelah bergabung dengan TT-IV, yang menjadi kiblat Yoga tampaknya tidak lagi Zulkifli Lubis, melainkan Soeharto. Seperti telah disebut, gerakan untuk menolak Bambang Supeno sebagai Panglima TT-IV telah mendekatkan Yoga ke Soeharto. Hubungan Soeharto dengan Lubis sendiri saat itu tak begitu jelas seperti apa. Yang pasti, setelah menjadi Panglima TT-IV, Soeharto pernah mengutus Yoga menemui Lubis di Jakarta untuk meminta agar petinggi AD yang anti-PKI itu menghentikan upayanya menggalang kekuatan militer di daerah. Lubis yang telah dipecat sebagai Wakasad dan memilih bersembunyi menyatakan akan tetap

²³ Harsutejo, *Jejak Hitam Soeharto, Sejarah Gelap G30S dan Sekitar G30S*. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

bergabung dengan PRRI/Permesta. Alasannya, ungkap Yoga, pemerintah sudah terlalu condong ke kiri. Pada penghujung 1956, sejumlah daerah bergolak. Pemberontakan PRRI/Permesta kemudian meletus. Zulkifli Lubis menjadi salah satu tokoh sentral gerakan yang menentang Jakarta ini.

Untuk memadamkan pemberontakan PRRI/Permesta, Divisi Diponegoro mengirim dua Resimen Tim Pertempuran (RTP) ke Sumatera Barat. Yoga Sugama yang sebelumnya selalu di jurusan intelijen meminta agar dirinya diikutkan di satuan tempur. Motif Yoga, seperti ia ungkapkan, adalah untuk mencari pengalaman sekaligus untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan pengikut fanatik Zulkifli Lubis. Soeharto setuju. Yoga dipercaya menjadi komandan RTP II. Kepala stafnya adalah Katamso. Mereka berangkat ke Bukittinggi awal 1959. Ternyata setelah beberapa bulan, Katamso dipindahkan ke Riau.²⁴ Sebagai penggantinya, Yoga mengusulkan Ali Murtopo ke Panglima Diponegoro, Soeharto. Ternyata diluluskan. Saat berduet dengan Yoga-lah, kata Ali, ia mendalami seluk-beluk dunia intelijen. Pada Februari 1961, PRRI/Permesta menyerah secara massal. RTP II kembali ke divisi induknya di Semarang. Ternyata nama divisi itu sudah berubah, dari TT-IV menjadi Kodam VII Diponegoro. Panglimanya juga sudah bukan Soeharto. Panglima baru adalah Pranoto Reksosamudro. Sedangkan Soeharto, ia disekolahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) Bandung sebagai hukuman. Ia dituduh memperkaya diri lewat Yayasan Pembangunan Teritorium Empat.

Dianggap sebagai anggota 'klik Soeharto', Yoga diasingkan oleh pimpinan baru Diponegoro. Tak tahan, ia pun ribut dengan pimpinan sehingga dihukum. Ganjarannya, sama seperti Soeharto, disekolahkan ke Seskoad Bandung (1961–1962). Selulus dari Seskoad ia diberi dua pilihan: menjadi instruktur Seskoad atau menjadi atase militer. Yoga memilih yang terakhir. Ia menjadi atase militer di Yugoslavia (1962–1965).

Kejahatan Kriminal

SETELAH Soeharto menjadi Panglima Daerah Militer di Jawa Tengah pada 20 Desember 1956, di saat NKRI menghadapi pemberontakan separatis yang menamakan dirinya PRRI dan Permesta di Sumatra dan Sulawesi, terjadi kejahatan terorganisasi (*organize crime*) berupa penyelundupan besar-besaran, penggelapan barang-barang milik perusahaan negara, manipulasi *dump* kendaraan bermotor milik Divisi Diponegoro dan pungutan liar atas barang-barang kebutuhan rakyat. Pelakunya terdiri dari oknum militer dan sipil, dengan pelaksana utamanya antara lain adalah Liem Sioe Liong, Thee Kian Seng (Bob Hasan), Tik Liong (Sutikno-pedagang besi tua). Bahkan Bob Hasan dengan bangga pernah bercerita di depan wartawan tentang hal tersebut. Sedang biang keladi kejahatan terorganisasi tersebut tidak lain adalah Kol. Soeharto, yang terkenal dengan sebutan "*Opsir Koppig*" dalam

²⁴ Menjabat Danrem 031 Wirabima di Pekanbaru—*Pen*.

Peristiwa 3 Juli 1946 di Yogyakarta, yang telah menjabat sebagai Panglima Divisi Diponegoro di Jawa Tengah.²⁵

Atas laporan dari Kepala Staf Divisi Diponegoro Kol. Pranoto Reksosamudro dan Letkol. Soenaryo, komandan CPM Jawa Tengah, yang mendeteksi dan mengamati kejahatan tersebut, adanya kriminalitas terorganisasi itu akhirnya sampai ke tangan Jenderal Nasution yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan/Ketua Paran (Badan Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Aparat Negara). Jenderal A.H. Nasution memerintahkan agar kejahatan tersebut diusut. Dan pengusutan ini dilakukan oleh sebuah Tim Pengusut Markas Besar Angkatan Darat (MBAD), yang terdiri dari Mayjen. Suprpto, deputi Pangad sebagai ketua, dengan anggota-anggota terdiri dari Mayjen. S. Parman, Mayjen. Haryono M.T., Brigjen. Sutoyo, dan Brigjen. Panjaitan.

Dengan teliti dan kerja keras, dengan didukung bukti-bukti yang sah, akhirnya tim berkesimpulan bahwa terhadap para pelaku harus diambil tindakan. *Pertama*, Kolonel Soeharto yang menjadi biangnya harus dipecat dari kedudukannya selaku Panglima Divisi Diponegoro, dan *kedua*, mereka yang terlibat, diajukan ke depan pengadilan.

Keputusan yang diambil atasan adalah, memecat Kol. Soeharto sebagai Panglima Divisi Diponegoro, tetapi tidak diajukan ke depan pengadilan. Kol. Soeharto kemudian dipindahkan ke Jakarta tanpa jabatan. Sedang Tik Liong diusut oleh Kejaksaan Negeri Semarang atas perintah Jaksa Tinggi Jawa Tengah Mr. Imam Barjo yang kemudian ternyata meninggal secara misterius.

Dengan pemecatan dirinya sebagai Panglima Divisi Diponegoro tersebut, Kolonel Soeharto sangat marah dan dendam, bersumpah untuk membuat perhitungan dan akan menghancurkan mereka-mereka yang membuat dirinya celaka. Mereka itu tidak lain adalah para perwira anggota Tim Pengusut MBAD dan penanda tangan Surat Keputusan Pemecatan Panglima Divisi Diponegoro yang tidak lain adalah Panglima Tertinggi/Presiden Soekarno.²⁶

Sebenarnya Jenderal A.H. Nasution menghendaki agar Soeharto, cs. diseret ke pengadilan militer, tetapi karena dibela oleh Mayjen. Gatot Subroto maka Presiden Soekarno memeti-es-kan perkara ini, namun Nasution tetap mencopot Soeharto sebagai Panglima Diponegoro dan mengirimnya belajar ke Seskoad, di mana Soeharto bertemu dan bergaul dengan Brigadir Jenderal Suwanto yang merupakan agen CIA dan telah berhasil menciptakan Seskoad menjadi pemikir dan produsen perwira-perwira calon pucuk pimpinan AD maupun pemimpin-pemimpin pemerintahan di kemudian hari.²⁷

Mantan Waperdam Dr. Subandrio juga menulis:

²⁵ *Charles van der Plas Connection*, http://www.munindo.brd.de/artikel/vander_plas2.html.

²⁶ *Charles van der Plas Connection*, http://www.munindo.brd.de/artikel/vander_plas2.html.

²⁷ Fakta Kebenaran Korban Tragedi 65 oleh LPRKROB, YPKP65, dan Pakorba. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

“Saat menjadi panglima di Divisi Diponegoro, Soeharto menjalin hubungan dengan pengusaha Cina, Liem Sioe Liong (kelak mendapat perlakuan istimewa dari Soeharto, sehingga Liem menjadi pengusaha terbesar Indonesia). Perkawanan antara Soeharto dan Liem ini, antara lain, menyelundupkan berbagai barang. Soeharto pernah berdalih bahwa penyelundupan itu untuk kepentingan Kodam Diponegoro. Berita penyelundupan itu cepat menyebar. Semua perwira saat itu mengetahuinya. Bahkan terungkap bahwa penyelundupan itu bukan untuk kepentingan Kodam, tetapi duitnya masuk kantong Soeharto dan Liem.

Saat mengetahui ulah Soeharto, kontan Yani marah. Pada suatu kesempatan, Yani bahkan sampai menempeleng Soeharto, karena penyelundupan itu dinilai memalukan korps. A.H. Nasution lantas mengusulkan agar Soeharto diadili di mahkamah militer dan segera dipecat dari AD. Namun, Mayjen. Gatot Subroto mencegah, dengan alasan bahwa perwira ini masih bisa dibina. Gatot lantas mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar Soeharto diampuni dan disekolahkan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung. Presiden Soekarno setuju saja. Karena itu, Soeharto masuk Seskoad dan diterima oleh Danseskoad Brigjen. Suwanto. Saat itu Seskoad tidak hanya mengajarkan pendidikan kemiliteran, tapi juga bidang ekonomi dan pemerintahan. Para perwira di Seskoad berfungsi sebagai guru teori negara dalam negara.²⁸

Think Tank CIA

MENGENAI “hubungan” antara Jenderal Soeharto dan Jenderal Suwanto ini, dalam artikel “*Jejak Hitam Soeharto*”, Harsutejo menulis:

“Di Bandung, Kolonel Soeharto bertemu dengan Kolonel Suwanto, Wadanseskoad, hal ini sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup Soeharto selanjutnya. Sekolah Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung yang telah berdiri sejak 1951 ini merupakan sebuah *think tank* AD, pendidikan militer Indonesia tertua, terbesar dan paling berpengaruh. Seskoad telah menjadi tempat penggodokan perkembangan doktrin militer di Indonesia. Sampai 1989 telah meluluskan 3.500 perwira. Para alumninya menjadi tokoh terkemuka dalam pemerintahan. Hampir 100 orang menjadi sekretaris jenderal, gubernur, pimpinan lembaga-lembaga nasional atau badan-badan non-departemental. Presiden, wakil presiden, dan lebih 30 menteri merupakan alumni Seskoad.”

Suwanto sendiri pernah menempuh pendidikan *Infantry Advance Course* di Fort Benning pada 1954 dan *Command and General Staff College* di Fort Leavenworth, AS pada 1958. Ia bersahabat dengan Prof. Guy Pauker, konsultan RAND (*Research and Development Corporation*) yang dikunjunginya pada 1963 dan 1966. Suwanto-lah yang menjadikan Seskoad sebagai *think tank* politik MBAD, mengarahkan para perwira AD menjadi pemimpin politik potensial. (Sundhaussen, 1988:245).

²⁸ <http://www.wirantaprawira.net>.

Seskoad memancarkan pamornya sebagian besar karena jasa Suwanto, sangat besar perannya dalam perkembangan politik. Karena jasanya pula maka Seskoad menjadi pusat pemikiran politik serta menghadapi perkembangan PKI. (Hidayat Mukmin, 1991:125). Guy Pauker adalah pengamat masalah Asia, orang penting dalam *Rand Corporation*, kelompok pemikir (*think tank*) CIA.²⁹ Sejak itu Seskoad biasa disebut sebagai negara dalam negara, membuat garis politiknya sendiri, bahkan mempunyai perjanjian kerja sama dan bantuan dari AS terlepas dari politik pemerintah RI.

Soeharto, murid baru yang masuk pada Oktober 1959 ini telah mendapatkan perhatian besar dari sang guru. Pada awal 1960-an Soeharto dilibatkan dalam penyusunan Doktrin Perang Wilayah serta dalam kebijaksanaan AD dalam segala segi kegiatan pemerintah dan tugas pemerintahan. Peran Soeharto dalam *civic mission* menempatkan dirinya dan sejumlah opsir yang condong pada PSI dalam pusat pendidikan dan pelatihan yang disokong oleh CIA lewat pemerintah AS, suatu program bersifat politik. (Scott, 1999:81). Pada masa di Bandung, Kolonel Soeharto inilah agaknya hubungan Suwanto—Syam—Soeharto—CIA mendapatkan dimensi baru. (Hanafi, 1998:20—25).

Penyempurnaan Doktrin Perang Wilayah dan *civic mission* menjadi suatu doktrin strategis intervensi politik AD menjelang 1965, suatu proses ideologis mempersiapkan dan mematangkan AD dalam melakukan pengoperan kekuasaan. Perkembangan selanjutnya, Jenderal Suwanto menjadi orang penting sebagai penasihat politik Jenderal Soeharto. Doktrin tersebut yang mewarnai pernyataan Jenderal Soeharto pada 16 Agustus 1966 untuk memenuhi desakan Pauker bahwa AD harus memainkan peran kepeloporan di semua bidang. (Scott, 1999:82).

Dalam sambutannya ketika melantik Letjen. Panggabean menjadi Wapangad pada hari tersebut, Jenderal Soeharto mengatakan bahwa pengesahan Supersemar oleh MPRS berarti penugasan pemerintahan dengan ruang lingkup luas. Hal itu merupakan penghargaan dan kepercayaan kepada ABRI umumnya dan AD khususnya. Doktrin Tri Ubaya Cakti yang telah menegaskan tuntutan AD untuk memiliki peran politik mandiri disusun kembali oleh Jenderal Suwanto dan mengenai peran AD ditegaskan lebih lanjut seperti penekanan Pauker dalam peran kontra revolusionernya. (Scott, 1999:82—83). Dengan belajar dari *Rand Corporation*, kemudian Ali Murtopo, cs. dengan restu Soeharto mendirikan lembaga kajian yang disebut CSIS (*Centre for Strategic and International Studies*) sebagai *think tank* orde baru.”

²⁹ *Rand Corporation* didirikan pada 1948, mula-mula sebagai *think tank* AU Amerika (USAF), kemudian meluas bagi pemerintah AS. Kajian yang dilakukannya di samping masalah-masalah militer juga meliputi masalah politik, sosial, ekonomi, budaya, hubungan internasional, kekuatan-kekuatan lokal-regional-global. Kaki mereka berpijak pada pemerintah AS (CIA), lembaga pendidikan tinggi, dan perusahaan-perusahaan industri raksasa. Badan ini melakukan kontak dan hubungan informal termasuk dengan Seskoad di Bandung. (Lihat: Harry Tjan Silalahi, ‘*Think Tank*’ dalam *CSIS Sekar Semerbak, Kenangan untuk Ali Moertopo*, Yayasan Proklamasi CSIS, Jakarta, 1985:334—341.)

Buntut Peristiwa Madiun

PADA 27 Januari 1955, meskipun sudah kadaluwarsa, Aidit dihadapkan pada pengadilan di Jakarta mengenai Peristiwa Madiun. Dalam hal ini PKI dituduh mengadakan kudeta. Dasarnya adalah pidato Hatta yang menyatakan “*entah benar entah tidak*” bahwa PKI mendirikan negara Soviet di Madiun dengan mengangkat Wakil Walikota Supardi jadi residen sementara untuk mengisi kekosongan. Ini dianggap melanggar KUHP Pasal 310 dan Pasal 311. Dalam persidangan Aidit, diminta agar Moh. Hatta tampil sebagai saksi. Jaksa menyatakan keberatan atas pembuktian yang akan diajukan oleh Aidit, maka jaksa harus mencabut tuduhan pasal-pasal tersebut di atas. Pada akhirnya keberatan jaksa dan tuduhan terhadap Aidit melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dicabut. Karenanya Aidit tak dapat dituntut dan bebas tanpa syarat. Jelaslah, bahwa ada orang-orang yang khawatir kalau Peristiwa Madiun ini menjadi terang bagi rakyat.³⁰

Tahun 1955 itu, dalam pemilihan umum yang dilangsungkan buat pertama kalinya di Indonesia untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante, PKI yang dikambinghitamkan oleh pemerintah Hatta dalam Peristiwa Madiun 1948, menduduki tempat ke-4 sebagai partai besar di Indonesia, dengan komposisi jumlah wakil sbb.: PNI—57, Masyumi—57, NU—45, dan PKI—39 kursi. Dan setelah melihat hasil fitnah yang cuma didasarkan atas berita “*entah benar entah tidak*” bahwa PKI melakukan pemberontakan dan mendirikan negara Soviet di Madiun pada tahun 1948, yang berakibat pembunuhan ribuan rakyat tak berdosa yang dilakukan oleh militernya Pemerintah Hatta, ternyata tidak mempan, serta disebabkan “perbedaannya” dengan Soekarno yang ternyata sesungguhnya tidaklah seperti “dwi-tunggal” yang dilambangkan, didengungkan, dan diagungkan, maka pada 1 Desember 1956, Drs. Mohammad Hatta mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

PRRI/Permesta

DI sebuah kota kecil di pesisir barat pantai Sumatra yang bernama Salido, 20 Desember 1956, berlangsung suatu sidang reuni para militer pejuang yang tergabung dalam Resimen IV Divisi Banteng Sumatera Tengah. Reuni tersebut menghasilkan dan membentuk suatu badan organisasi yang dinamai “Dewan Banteng” dengan tokoh-tokoh militer seperti Kolonel Achmad Husein dan Kolonel Dahlan Jambek sebagai pimpinannya. Sejalan dengan itu, di Sumatra Utara juga berdiri “organisasi militer” yang dinamakan Dewan Gajah pada 22 Desember 1956 di bawah Kolonel Mauludin Simbolon, sedang di Sumatra Selatan dibentuk Dewan Garuda pada 15 Januari 1957 yang dipimpin oleh Letkol. Barlian. Dan kesemua dewan militer tersebut, begitu didirikan, begitu mengambil alih kekuasaan pemerintahan sipil di daerah.

Dalam suatu rapat raksasa 10 Februari 1958 yang dilangsungkan di Padang, Kolonel Achmad Husein mengambil kesempatan untuk menantang pemerintah dengan memberi ultimatum kepada pemerintah pusat di Jakarta, dengan menyampaikan poin-poin tantangan:

- Supaya Kabinet Djuanda dibubarkan dalam tempo 5x24 jam dan mengembalikan mandatnya kepada presiden.
- Supaya Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX ditunjuk sebagai formatur untuk membentuk kabinet baru.
- Supaya kabinet baru diberi kesempatan sepenuhnya untuk bekerja sampai diadakan pemilu berikutnya.
- Supaya Presiden Soekarno/Pejabat Presiden membatasi diri menurut konstitusi.
- Apabila tuntutan di atas tidak dipenuhi maka kami akan mengambil langkah kebijaksanaan sendiri.

Hari berikutnya, setelah melalui sidang darurat, Kabinet Djuanda mengambil keputusan: menolak keras ultimatum Padang dan bahkan memerintahkan KSAD memecat langsung serta menangkap para kolonel yang berada di belakang dewan tersebut—Ahmad Husein, Zulkifli Lubis, Mauludin Simbolon, dan H.N. Ventje Sumual.³¹

Pada 15 Februari 1958, dalam suatu pertemuan di Sungai Dareh, Sumatra Barat, yang dihadiri antara lain oleh Letkol. Achmad Husein, Letkol. Sumual, Kol. Simbolon, Kol. Dachlan Djambek, Kol. Zulkifli Lubis, M. Natsir, Sjarif Usman, Burhanuddin Harahap, dan Sjafrudin Prawiranegara, telah menghasilkan “kesepakatan”, maka Achmad Hussein, seperti yang disiarkan lewat Radio Republik Indonesia Bukittinggi, memproklamkan pemerintahan tandingan terhadap NKRI yang sah yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pemerintah tandingan itu bernama “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” yang disingkat PRRI, dengan presidennya Mr. Syafrudin Prawiranegara, dengan ibukota PRRI berkedudukan di Padang, Sumatra Barat. “Proklamasi PRRI” ini didukung oleh Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, Kolonel V. Sumual, yang juga memproklamkan apa yang mereka namakan “Perjuangan Rakyat Semesta” yang disingkat Permesta.

Proklamasi PRRI ini, menjadi titik awal pembangkangan dan perlawanan secara terbuka terhadap pemerintah dan kepemimpinan Presiden Soekarno serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia di berbagai daerah, terutama rakyat Minangkabau, dikuasai oleh oknum-oknum, baik militer maupun sipil, yang tidak merasa puas dengan kepemimpinan Bung Karno, dan menggiring rakyat Minangkabau untuk melepaskan diri dari ikatan persatuan NKRI, dengan mengingkari pemerintahan pusat dan mendirikan pemerintahan tandingan, yang disebut PRRI, dengan presiden dan perdana menterinya sendiri.

³⁰ Fakta Kebenaran Korban Tragedi 65 oleh LPRKROB, YPKP65, dan Pakorba. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

³¹ <http://www.ranah-minang.com/tulisan/204.html>.

Rakyat dididik dan diindoktrinasi bahwa Indonesia berada dalam cengkeraman imperialis Jawa, dan bahwa komunis telah menguasai Pulau Jawa, dan menimbulkan sinisme serta antipati kesukuan dan keagamaan. Dan dalam kenyataan, para tokoh dan pentolan PRRI maupun Permesta ini tidak berdiri sendiri. Rakyat dengan gamblang melihat dan membangun keberanian dan keyakinan akan “perjuangan” mereka karena mereka mendapat bantuan dan sokongan kuat dari imperialis Amerika Serikat yang sejak lama memang tidak suka atas kepemimpinan Bung Karno. AS memberi jaminan dan bantuan apa saja untuk PRRI/Permesta. Persenjataan-persenjataan modern dari Amerika, seperti LMG 12,7mm, bazooka, granat semi-otomatis, persenjataan infanteri, dan senjata-senjata penangkis serangan udara, dll., dijatuhkan dari kapal terbang pengangkut AS bermotor empat di hutan-hutan Sumatra yang telah diatur dan ditentukan, untuk melengkapi persenjataan militer PRRI guna melawan Pemerintahan NKRI.³²

Di samping itu, Amerika juga memberikan pelatih-pelatih militer AS, yang berkedok sebagai “*Caltex's Employee*”, pegawai perusahaan minyak Amerika, yang bertugas melatih para militer pemberontak PRRI untuk melawan NKRI dan memberikan indoktrinasi buat mengikuti kemauan dan keinginan imperialis AS. Dan semua persenjataan serta alat komunikasi modern ini disalurkan kepada gerombolan pemberontak melalui Singapura, yang dikendalikan dan diorganisir oleh seorang tokoh politik dan ekonomi yang terkenal Profesor Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Bahkan di daerah Caltex sendiri di Pekanbaru, Riau, rakyat sering mendapati dan melihat masuknya berpeti-peti senjata-senjata gelap dari kapal-kapal yang datang dari Singapura.

Di bagian timur nusantara, Permesta memperoleh bantuan dari CIA dengan alat persenjataan dan personil-personil pelatih seperti Lawrence Allan Pope, yang dengan pesawat terbangnya yang diberi nama “Aurev”, Angkatan Udara Revolusioner, menjatuhkan bom-bom dan membunuh rakyat Ambon yang berada di kapal yang sedang berlabuh maupun masyarakat Kristen yang baru saja selesai melakukan ibadah keagamaan, ataupun rakyat yang sedang berada di pasar-pasar. Namun sang pilot yang merasa jagoan dalam Perang Dunia II dan Perang Korea ini, dapat ditangkap beserta dokumen CIA yang dikantonginya, setelah pesawat terbang yang digunakannya menjatuhkan bom membunuh rakyat Indonesia, dapat ditembak jatuh. Dengan bukti ini, Amerika tidak bisa mengelak dari tuduhan telah membantu dan mempersenjatai pemberontak separatis, yang mendirikan pemerintah lain dalam pemerintah yang sah, NKRI.

Sementara itu, semenjak deklarasi “Dewan Banteng”, pada 20 Desember 1956, pihak militer di Sumatra Tengah telah melakukan operasi dan menangkap serta menahan anggota serta pimpinan-pimpinan organisasi berhaluan kiri, terutama PKI, yang kemudian di dalam tahanan, mereka dibunuh dan dilenyapkan sejalan dengan garis dan keinginan Pentagon Amerika yang memang anti komunis dan

³² Pengakuan Alm. Jenderal A. H. Nasution dalam film dokumen ABC: *Riding the Tiger*.

berbuat apa saja untuk melenyapkan komunis dari bumi Indonesia, agar Indonesia bisa menjadi “kawan dan sahabat baik” imperialis Amerika. Namun, kendatipun banyak bukti menunjukkan, golongan yang masih berpihak kepada PRRI dalam hal ini tidak mau mengakui bahwa mereka menerima dan mengikuti arahan imperialis AS, bahkan menyatakan bahwa “*isu yang sebenarnya terjadi adalah dugaan bahwa PRRI/Permesta memberontak sebagai wujud protes terhadap Presiden Soekarno yang terlalu memanjakan PKI sehingga banyak kebijakan pemerintah yang berbau ideologi PKI. Hal ini terlihat dari penyerangan PRRI/Permesta terhadap massa PKI di kedua provinsi tersebut di atas.*”³³

[Pertanyaan timbul: “Kalau hanya untuk mewujudkan protes terhadap Presiden Soekarno, mengapa mesti bersekutu dengan imperialis AS, menerima bantuan berton-ton amunisi dan senjata-senjata modern serta personil dan pelatih Amerika untuk menghancurkan NKRI dari dalam?” Karena *dugaan* bahwa Bung Karno “memanjakan” PKI, maka PRRI membunuh ribuan anggota PKI. Mereka tidak mau melihat sejarah dan takut akan kenyataan yang ada bahwa PKI, secara demokratis, melalui pemilihan umum yang terbuka pada tahun 1955, telah tumbuh menjadi sebuah partai besar di antara 4 partai besar lainnya, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI, untuk DPR dan Konstituante di Indonesia.]

Akibat dari penangkapan dan penahanan para anggota dan pimpinan PKI oleh PRRI tersebut, ribuan manusia-manusia tak berdosa, mati dibunuh, diberondong oleh PRRI di tempat tahanannya. Mayat-mayat mereka dibakar, dibuldoser, ditolak ke dalam lubang-lubang yang telah dipersiapkan untuk kuburan massal. Di setiap sudut negeri di Sumatera Tengah, di Simun, Atar, Situjuh, Gunung Sago, di setiap pelosok dan penjuru, “*kampung jo nagari ranah Minang*” menjadi kuburan-kuburan massal orang-orang yang dituduh sebagai PKI, sementara keluarga mereka dianiaya dan diperkosa. Tak heran kalau pada tahun-tahun sesudah itu timbul nyanyian rakyat Minangkabau untuk mengingat para korban ini yang salah satu baitnya berbunyi: ... “*Lah ditembak dibaka pulo. Digiliang luluh binaso.*”³⁴

Dengan terjadinya pemberontakan PRRI/Permesta, proyek Amerika—Inggris tersebut, Bung Karno seolah-olah ditampar mukanya, sebagai pemimpin kenamaan dunia, sempat jatuh citra dan martabatnya. Namun, pemberontakan daerah yang didukung oleh ancaman Armada VII Amerika yang menang perang melawan Jepang di Lautan Pasifik dan mondar-mandir di luar pantai barat Sumatra dan Laut Jawa itu, dalam waktu singkat berhasil dengan gemilang ditumpas oleh “Operasi 17 Agustus” di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani yang dapat merebut kota Padang, ibukota PRRI. Dan dalam waktu relatif singkat, seluruh PRRI berhasil digulung.³⁵

³³ Harian online *Kabar Indonesia*, 1 Oktober 2007, “PRRI/Permesta, Dialog untuk Persaudaraan”.

³⁴ Sudah ditembak dibakar pula, digilas hancur binasa.

³⁵ <http://www.wirantaprawira.net>.

“Menghadapi PRRI ini, AURI menyiapkan hingga 40 pesawat, hampir seluruh kekuatan dipusatkan di Tanjung Pinang, Riau. Berturut-turut dalam operasi perebutan, B-25 dan P-51 menghujani dengan senapan mesinnya: Lapangan Udara Simpang Tiga Pekanbaru (12 Maret) di bawah pimpinan Letkol. Kaharudin Nasution, kota Medan (17 Maret), serta kota Padang (17 April). Tujuh belas hari kemudian, Bukittinggi juga jatuh ke tangan pasukan APRI.”³⁶

Para perwira militer dari Jawa, baik dari Divisi Siliwangi, Diponegoro, ataupun Brawijaya, silih berganti bertugas ke Sumatra Barat dalam penumpasan PRRI dan menstabilkan Sumatra Barat. Nama-nama perwira militer yang pernah bertugas di Sumbar dan kemudian hari menjadi terkenal, antaranya adalah Yoga Sugama, Ali Murtopo, Untung (bawahan Yoga Sugama waktu di RTP-II Bukittinggi), Katamso, Suryo Sumpeno, Pranoto Reksosamudro, dan tidak ketinggalan, Ahmad Yani yang menjadi Panglima Komando Operasi “17 Agustus” yang pertama.

Jika operasi penumpasan pemberontak ini berjalan agak lama, maka pemerintahan tandingan itu bisa sempat membuat perjanjian, dan Amerika bisa menggerakkan Armada VII untuk mendarat di wilayah Indonesia dengan berbagai dalih dan alasan.³⁷

Dengan hasil penumpasan yang diperoleh, wajah dan citra Bung Karno kembali cerah dan terangkat kembali di mata dunia, dan Indonesia tidak bisa dipandang remeh saja oleh negara lain, terutama negara bekas kolonialis. Bung Karno merasa lega dan gembira serta berterima kasih kepada Kolonel Ahmad Yani, yang kemudian menjadi “anak kesayangannya”, yang mampu mengangkat kembali citra dan martabatnya di mata dunia internasional.³⁸

Pemberontakan daerah yang menantang pemerintahan pusat dengan mendirikan pemerintahan tandingan dengan presiden serta perdana menterinya sendiri ini, ternyata gagal dan dapat ditumpas dengan korban nyawa yang tidak sedikit jumlahnya. Banyak rakyat tak berdosa mati menjadi korban. Baik kaum komunis—yang ditangkap dan ditahan oleh pemberontak PRRI dan dibunuh secara massal atau dihabisi di dalam tahananannya, atau pihak militer daerah—yang terpaksa menjadi alatnya PRRI dan ikut memberontak melawan pusat, ataupun para militer—yang ditugaskan pemerintah pusat untuk menghancurkan gerombolan pemberontak PRRI, maupun rakyat dan penduduk setempat—bersalah ataupun tidak yang menjadi korban dalam operasi pembersihan anasir-anasir pemberontak PRRI, semuanya itu sampai sekarang tidak diketahui berapa jumlahnya. Praktis, pemberontakan yang punya itikad melepaskan diri dari pemerintah pusat, dengan pembentukan pemerintahan sendiri yang disebut PRRI itu, gagal total.

³⁶ angkasa-online.com.

³⁷ Atau, mungkin juga sudah membuat perjanjian, namun tidak dapat segera terpenuhi karena ABRI bertindak cepat. Silakan lihat di bagian lain tulisan ini.—Pen.

³⁸ <http://www.wirantaprawira.net>.

Setelah masa jauh berlalu, setelah rakyat Minangkabau mengobati luka-luka dan kehancuran yang dilakukan oleh pimpinan politik dan militer yang ambisius, dan terutama setelah gerakan Jenderal Soeharto berhasil merebut kekuasaan Presiden Soekarno dan melenyapkan PKI dan membunuh lebih dari 3 juta orang-orang komunis, menahan ratusan ribu dan menyengsarakan hidup lebih dari 20 juta bangsa Indonesia, maka golongan-golongan pro-PRRI/Permesta mulai bangkit dan bersuara, dengan berbagai dalih mempertahankan bahwa pembentukan PRRI itu bukanlah pemberontakan, namun ‘gerakan koreksian’ terhadap pemerintahan pusat. Rakyat yang melek, bisa melihat permainan lidah para politisi, yang telunjuknya lurus kelingking berkait, yang mengatakan ‘gerakan koreksian’ dengan mengultimatum pemerintah, mengultimatum presiden, memakai cara sendiri dengan mendirikan pemerintahan tandingan dengan presiden dan perdana menteri serta kepala staf angkatan darat sendiri. Apakah itu yang dinamakan ‘gerakan koreksian’ atukah ‘gerakan separatis’, atukah gerakan pembangkangan, atukah gerakan pemisahan diri dari NKRI? Semua ‘keberanian’ kaum politisi dan militer di daerah ini, tidak ayal lagi, karena imperialis berada di belakangnya. Namun setelah belang imperialis ketahuan dan menarik sokongannya, maka berbondong-bondong mereka menyerah kepada Soekarno, dengan berbagai dalih dan alasan, berputar lidah mencoba berlindung di balik lalang sehelai, seperti “tidak berniat mau memecah NKRI”, “tidak ada dari tokoh-tokoh tersebut yang berniat untuk keluar dari NKRI. Mereka lebih baik menyerah pada Soekarno daripada mengkhianati perjuangan mereka untuk tetap bersatu dalam NKRI”, dan sebagainya, dan sebagainya!

Sedikit kutipan dari *website* Kodam II Sriwijaya, untuk diketahui, tentang Penghancuran PRRI dan mengenai Mayor Nawawi yang diburu dari Sumatra Selatan serta Presiden PRRI Syafrudin Prawiranegara, adalah sbb.: “Pasukan Mayor Nawawi, cs. terus diburu dan dikepung dari segala penjuru serta diputuskan kontakannya dengan Syafrudin Prawiranegara selaku Presiden PRRI yang berkedudukan di Padang. Sayangnya, pasukan Nawawi dalam jumlah yang tidak sedikit dan merupakan mantan pejuang kemerdekaan berhasil melewati kepungan untuk bergabung dengan pasukan Letkol. Husain, cs. di Padang.”³⁹

Keterlibatan Asing

KINI, mari kita lihat kutipan berita mengenai pengakuan keterlibatan pihak imperialis Amerika sendiri, yang pernah dimuat harian *Suara Pembaruan* Jakarta:

Kegagalan pemberontakan PRRI/Permesta, di Sumatra dan Sulawesi, memberi pelajaran kepada pemerintah AS bahwa intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain untuk melakukan suatu perubahan terbukti *counter productive* dan lebih baik membantu mengembangkan institusi demokrasi dengan harapan perubahan bisa terjadi dari dalam. Kesimpulan itu dibuat oleh Dr. Barbara Harvey, penulis buku *PRRI/Permesta: Pemberontakan Setengah Hati* yang juga mantan wakil duta

³⁹ Kodam II Sriwijaya

besar AS di Jakarta. Hal itu terungkap dalam seminar sehari “50 Tahun Hubungan Indonesia—Amerika” dengan subtema “Pemberontakan PRRI/Permesta” yang berlangsung di Kampus UI Depok. Menurut Barbara, pemerintah AS menghentikan keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI—Permesta (1958—1961) sejak pesawat pembom yang dipiloti Allan Pope, seorang agen CIA, ditembak jatuh pada bulan Mei 1958. Keterlibatan AS sendiri bermula sejak September 1957 melalui sebuah panitia inter-departemen yang menyusun rencana membendung komunisme di Indonesia. Menurut rencana itu, dengan mendukung PRRI/Permesta maka akan terbentuk negara-negara kepulauan dimulai dengan “Negara Sumatera” yang bersifat anti-komunis, sehingga apabila PKI dapat merebut kekuasaan di Jawa, maka kekuasaannya terbatas di pulau itu saja.

Orang yang banyak berperan dalam operasi itu adalah Menlu AS John Foster Dulles, dan saudaranya, Direktur CIA W. Allen Dulles. Bantuan AS waktu itu berupa senjata, latihan, dan uang yang diberikan melalui suatu operasi rahasia (*covert action*). Dan itu semua dihentikan ketika pesawat yang diterbangkan Allan Pope jatuh di seputar Maluku. Insiden ini secara langsung menyingkap keterlibatan AS dengan kelompok PRRI/Permesta.⁴⁰

Buku *Feet of the Fire* karya bersama Kenneth Conboy dan James Morrison dengan rinci mengungkapkan operasi rahasia CIA dalam menggoyang kekuasaan Bung Karno tahun 1957—1958. Operasi militer itu berupaya menyingkirkan rezim yang sedang tidak disukai AS dan menggantikannya dengan penguasa boneka.

Dwight Eisenhower, pensiunan jenderal bintang lima, mantan Panglima Besar Sekutu di Eropa, tahun 1953 terpilih sebagai Presiden AS. Sejak hari pertama berkantor di Gedung Putih, Eisenhower yang lebih dikenal dengan panggilan Ike, merasa punya tugas menghancurkan komunisme.

Sedangkan untuk membendung pengaruh Cina komunis di Asia Tenggara, Ike dihadapkan kepada dilema. Apakah dia harus membiarkan Indonesia tetap bersatu, tetapi di bawah pengaruh komunis? Ataukah, memecah-belah negara tersebut, namun sebagian mungkin bisa dia tempatkan dalam kekuasaan non-komunis?

Komunis belum berkuasa dan Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Tetapi, melihat meluasnya pengikut PKI setelah Pemilu 1955, ditambah munculnya ajakan Bung Karno kepada PKI masuk dalam pemerintahan, dilengkapi kenyataan AS tidak bisa menjadikan Bung Karno sebagai bonekanya, Ike lebih suka merancang skenario memecah-belah Indonesia.

Bung Karno yang dinilai akan segera jatuh ke kubu pengaruh komunis, harus digoyang dan kalau mungkin dilengserkan. Kebijakan yang digariskan Ike tersebut segera dilaksanakan dengan bersemangat oleh dua bersaudara Dulles: Menteri Luar Negeri John Foster Dulles bersama Allen Dulles, Direktur CIA, dinas rahasia AS.

Maka, mulailah kebijakan mengobok-obok Indonesia. Antara lain dengan mengalirkan dana, personil, berikut peralatan militer, menunjang pemberontakan PRRI/Permesta.

Isu yang dipakai untuk memulai pemberontakan adalah kurangnya perhatian pemerintah pusat di Jakarta kepada persoalan daerah. Arus besar pemikiran menentang Jakarta ini dilengkapi sejumlah sentimen pribadi, dan juga kekalahan politik pada Pemilu 1955. Kemenangan dalam pemilu yang demokratis ini ternyata dijawab dengan aksi non-demokratis. Dengan dalih Indonesia tidak boleh dibiarkan jatuh ke kubu komunis, CIA segera melancarkan operasi rahasia dengan memanfaatkan sejumlah kolonel pembangkang yang kebetulan panglima militer di daerah.

Akhirnya, sesudah menelan korban ribuan orang tewas, baik pada rakyat biasa, para pemberontak, dan juga tentara pusat, operasi rahasia CIA untuk mendukung pemberontakan PRRI/Permesta mengalami kegagalan memalukan.

Operasi tersebut mengerahkan sejumlah tenaga ahli CIA untuk memberikan latihan perang dan mendampingi pertempuran di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara. Menyelenggarakan pelatihan di Saipan, mengalirkan perbekalan militer, menebar uang rupiah palsu, mengirim kapal selam, pesawat terbang, dan juga para penerbang tempur. Bahkan, CIA merekrut para veteran perang asal Polandia, Taiwan, dan Filipina, untuk membantu memenangkan perang kotor mereka.

Bahwa CIA berminat menggoyang Bung Karno memang bukan sekadar analisa. Tetapi, bagaimana mereka bisa leluasa campur tangan di Indonesia? Jawabannya mungkin dilihat dari perundingan Ahmad Husein dan Ventje Sumual dengan Foster Collins, agen CIA di Singapura.

Sayang, buku ini tidak banyak menyinggung peran para politisi sipil pendukung pemberontakan. Satu-satunya yang dikisahkan agak rinci hanya peran Sumitro Djojohadikusumo. Tokoh ini bukan hanya ikut dalam pertemuan di Sungai Dareh (ketika para pemberontak merancang pembangkangan), tetapi dia juga yang aktif melakukan *shopping* persenjataan sejak dari Eropa Barat sampai Taiwan. Kini, semua peristiwa dalam buku ini, tinggal menjadi sebuah catatan sejarah. Hikmah yang bisa dipetik adalah pelajaran bahwa setiap boneka, hanya akan bisa berkiprah kalau sedang dimainkan oleh sang dalang. Begitu pihak dalang, CIA dan pemerintah AS menarik dukungannya, maka hari-hari akhir pemberontakan PRRI/Permesta tinggal dihitung dengan jari. Tragisnya, kebijakan AS ternyata bisa berubah dengan mendadak.⁴¹

Namun, karena jiwa besar dan rasa kasih kepada bangsanya, Soekarno memberi amnesti, pengampunan, memaafkan individu pemberontak dan para pemimpinnya yang mau kembali ke pangkuan NKRI. (Satu contoh tentang kebesaran jiwa dan kasih Soekarno kepada bangsanya adalah seperti kasus Jenderal

⁴⁰ <http://www.suarapembaruan.com/News/1998/04/240498/LuarNegr/ln04/ln04.html>

⁴¹ Julius Pour, Sumber: *Kompas Cyber Media*, Minggu, 13 Januari 2002.

A.H. Nasution yang menghadapkan moncong meriam ke Istana Merdeka pada 17 Oktober 1952 dan dimaafkan oleh Soekarno.)

Untuk lebih melengkapinya tentang bagaimana sepak terjang imperialis dalam membantu PRRI/Permesta, mari kita kutip tulisan Maruli Tobing yang dimuat dalam *Kompas*, 9 Februari 2001, yang berjudul “*Bung Karno di Tengah Jepitan CIA*” sebagai berikut:

“Tanggal 7 Desember 1957, pukul 19.39, Laksamana Felix Stump, panglima tertinggi Angkatan Laut (AL) AS di Pasifik, menerima perintah melalui radiogram dari Kepala Operasi Angkatan Laut (AL) Laksamana Arleigh Burke. Isinya, dalam empat jam ke depan gugus satuan tugas di Teluk Subic, Filipina, bergerak menuju selatan ke perairan Indonesia. “Keadaan di Indonesia akan menjadi lebih kritis,” demikian salah satu kalimat dalam radiogram tersebut.

Kesibukan luar biasa segera terlihat di pangkalan AL AS. Malam itu juga satuan tugas dengan kekuatan satu divisi kapal perusak, dipimpin kapal penjelajah *Pricenton*, bergerak mengangkut elemen tempur dari Divisi Marinir III dan sedikitnya 20 helikopter. “Berangkatkan pasukan, kapal penjelajah, dan kapal perusak dengan kecepatan 20 knots, yang lainnya dengan kecepatan penuh. Jangan berlabuh di pelabuhan mana pun,” bunyi perintah Laksamana Burke.

Inilah keadaan paling genting, yang tidak sepenuhnya diketahui rakyat Indonesia. Perpecahan dalam tubuh Angkatan Darat, antara mereka yang pro dan kontra Jenderal Nasution, serta yang tidak menyukai Presiden Soekarno, mencapai titik didih. Pada saat yang sama, beragam partai politik ikut terbelah memperebutkan kekuasaan.

Kabinet jatuh bangun. Usianya rata-rata hanya 11 bulan. Paling lama bertahan hanyalah Kabinet Juanda (23 bulan), yang merupakan koalisi PNI—NU. Situasi memanas menjalar ke daerah, benteng terakhir para elite politik di pusat. Daerah terus bergolak. Pembangkangan terhadap Jakarta dimulai sejak militer menyelundupkan karet, kopra, dan hasil bumi lainnya.

Militer Indonesia yang lahir dan berkembang dari milisi berdasarkan orientasi ideologi pimpinannya, bukanlah jenis pretorian. Mereka tetap kepanjangan dari parpol, entah itu PNI, PSI, Masyumi, PKI, dan seterusnya. Terlalu kekanak-kanakan jika dikatakan tindakan sekelompok perwira mengepung istana dan mengarahkan meriam pada 17 Oktober 1952 sebagai ekspresi ketidakpuasan semata, dan bukan percobaan “*kudeta*” terselubung. Demikian pula ketika Kolonel Zulkifli Lubis mencoba menguasai Jakarta, sebelum kemudian merencanakan pembunuhan atas Presiden Soekarno dalam Peristiwa Cikini, dengan eksekutor keponakan pimpinan salah satu parpol.

Bagi Gedung Putih, inilah saat tepat melaksanakan rencana tahap III, yaitu intervensi militer terbuka ke wilayah RI. Presiden Soekarno harus tamat segera. CIA di bawah Allen Dulles telah mematangkan situasi. Melalui jaringannya di Singapura, Jakarta, dan London, sebagaimana dikemukakan Audrey R. Kahin dan George McT. Kahin dalam bukunya yang sudah diterjemahkan ke bahasa

Indonesia, *Subversi sebagai Politik Luar Negeri*, agen-agen CIA berulang kali melakukan kontak khusus dengan Sumitro Djojohadikusumo, pencari dana untuk pemberontakan tersebut. Demikian pula dengan para perwira pembangkang seperti Kolonel Simbolon, Kolonel Ventje Sumual, dan sejumlah perwira dan tokoh parpol lainnya.

Namun, ketika perintah menggerakkan elemen Armada VII dikeluarkan, keputusan itu tampak tergesa-gesa yaitu kurang dua jam setelah pembicaraan melalui telepon antara Presiden Eisenhower dengan Menlu John Foster Dulles. Itu sebabnya ketika gugus tugas AL di Teluk Subic bergerak, barulah kedua tokoh ini sadar atas alasan apa intervensi nantinya dilakukan. Pemerintah Inggris, sekutu terdekat AS, sempat terperanjat dan menolaknya, sehingga kapal-kapal perang tersebut kembali ke pangkalannya. Namun, setelah lobi-lobi intensif, tanggal 23 Desember 1957, PM Harold Macmillan menyetujuinya dan membentuk kerja sama operasi untuk Indonesia.

Pertengahan tahun 1958, Gedung Putih akhirnya harus mengakui kegagalannya “menegakkan demokrasi” dan “membendung komunisme” di Indonesia. KSAD Jenderal A.H. Nasution yang disebut AS sebagai anti komunis, bergerak di luar perkiraan. Ia menerjunkan pasukan para merebut bandara Pekanbaru. Dari pantai timur, didaratkan marinir untuk menggunting pertahanan pemberontak. Alhasil, Dumai yang merupakan ladang minyak Caltex, berhasil diamankan. Pasukan Kolonel Ahmad Husein kocar-kacir, meninggalkan segala peralatan perang, termasuk senjata anti serangan udara yang belum sempat digunakan. Mereka tidak mengira serangan dadakan itu. Pesan rahasia dari Armada VII AS agar meledakkan Caltex tidak sempat lagi dipikirkan. Padahal inilah nantinya akan dijadikan kunci intervensi AS ke Indonesia. Dua batalyon marinir AS sudah siaga penuh. Dalam tempo 12 jam, marinir ini akan tiba di Dumai.

Sejak itu sesungguhnya tamatlah riwayat PRRI yang dimotori para kolonel pembangkang serta tokoh PSI dan Masyumi. Pentagon tercengang. Pasukan PRRI makin terdesak, walaupun Sumitro Djojohadikusumo sebagai wakil PRRI di pengasingan tetap optimis. Kota demi kota berhasil direbut TNI hingga akhirnya para pemberontak hanya mampu melakukan perang gerilya terbatas. Bersamaan dengan itu dukungan rakyat kepada pasukan Kolonel Simbolon, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Akhmad Husein, Kolonel Dahlan Djambek, dan sejumlah perwira menengah lainnya, makin menciut. Bahkan terjangkit perpecahan intern.

CIA gagal membaca situasi. Atas rekomendasi CIA pula sedikitnya AS telah mengedrop persenjataan bagi 8.000 prajurit pemberontak. Ini belum mencakup meriam, mortir, senapan mesin berat, dan senjata anti-tank. AS juga melatih sejumlah prajurit Dewan Banteng dan Dewan Gajah, yang diangkut dengan kapal selam menuju pangkalan militernya di Okinawa, Jepang. Keunggulan dalam sistem persenjataan dan pendidikan militer, ternyata bukan jaminan superioritas dalam setiap pertempuran. Penguasa Gedung Putih mulai patah semangat. Tanda

kekalahan kelompok yang dibantu, yang disebutnya “patriot” sejati itu, makin jelas. Tetapi, CIA dengan intelijen AL AS, tetap memasok informasi keliru. Dalam laporannya, kekalahan pemberontak anti komunis akan mengguncang Malaya, Thailand, Kamboja, dan Laos. Ini sangat berbahaya. Atas pertimbangan itu, AS akhirnya tetap melanjutkan bantuan pada pemberontak, khususnya Permesta di Sulawesi Utara.

Belajar dari kekalahan PRRI di Sumatera, di Sulawesi Utara penerbang AS dan Taiwan memberi perlindungan payung udara bagi Permesta. Pesawat pembom malang-melintang memutus jalur transportasi laut. Ambon, Makassar, bahkan Balikpapan dihujani bom. Korban terus berjatuhan. Namun, semua usaha ini juga menemukan kegagalan untuk menekan Jakarta. Ofensif dibalas dengan ofensif. Jenderal Nasution terus mengerahkan pasukan terbaiknya untuk merebut satu per satu pertahanan Permesta. Puncaknya ketika ALRI menembak jatuh pesawat pembom yang dikemudikan Allen Pope, warga negara AS, di Teluk Ambon pada 18 Mei 1958. Peristiwa ini tidak saja mengejutkan publik AS, tetapi juga masyarakat internasional. Apalagi Allen Pope mengaku bekerja untuk CIA. Kecaman terhadap agresi AS mulai mengalir.

Tanpa sedikit pun merasa bersalah, AS kemudian dengan gampang putar haluan. Dari membantu peralatan perang dan pelatihan pemberontak, serta menyebarkan informasi bohong mengenai ancaman komunis terhadap stabilitas Asia Tenggara jika pemberontak kalah, Gedung Putih kemudian memutuskan membantu ekonomi dan militer Indonesia. AS mulai merangkul sebagian pimpinan AD waktu itu. Sejak 1958, ribuan perwira AD kemudian dilatih di AS. AS menyebarkan banyak isu tentang PKI yang akan mengambil alih pemerintahan. Namun, kebijakan baru ini bukan berarti terputusnya hubungan dengan pemberontak yang disebutnya masih punya “masa depan” itu.

Melalui jaringan CIA, sejumlah senjata ringan masih dipasok bagi DI/TII di Sulawesi dan Aceh, serta Permesta di Sulut. Presiden Eisenhower menyebutnya sebagai “bermain di dua pihak”.

Kebijakan bermuka dua ini, tanpa peduli apa dan berapa banyak korban jiwa dan harta benda. Lantas di balik selubung bahaya ancaman komunisme, AS selalu berhasil memperdayai elite militer dan politik Indonesia.

Gambaran lebih jelas mengenai Indonesia dikemukakan Presiden Eisenhower dalam konferensi gubernur negara bagian AS tahun 1953. Ia mengatakan, sumbangan AS sebesar 400 juta dollar AS membantu Perancis dalam Perang Vietnam bukanlah sia-sia. Jika Vietnam jatuh ke tangan komunis, negara tetangganya akan menyusul pula. “Kita tidak boleh kehilangan Indonesia yang sangat kaya sumber daya alamnya,” ujarnya.

Bagi AS, di dunia ini hanya dikenal dua blok, yaitu komunis dan liberal. Di luar jalur itu dikategorikan sebagai condong ke komunis. Maka dengan kosmetik demikianlah bagi AS tidak ada ampun untuk seorang nasionalis seperti Soekarno. Tahap pertama operasi intelijen dengan membantu dana dua partai politik besar

yang disebutnya anti komunis, agar bisa merebut suara dalam Pemilu 1955. Perolehan suara ini diharapkan akan mengurangi dukungan bagi Soekarno.

Perkiraan ini meleset. PKI yang paling tidak disukai AS dan dianggap loyal terhadap Soekarno, justru memperoleh jumlah suara mengejutkan, hingga menempatkannya di urutan keempat. Padahal tujuh tahun sebelumnya, atau tahun 1948, PKI sudah dihancurkan dalam Peristiwa Madiun.

Peristiwa Madiun yang diprakarsai Muso tidak lama setelah kembali dari pengembaraannya di dunia Marxisme-Leninisme di Uni Soviet, mustahil dapat dipadamkan tanpa sikap tegas Bung Karno.

CIA tidak memahami ini. Bung Karno tetap dianggap condong ke blok komunis. Itu sebabnya setelah gagal mendanai dua partai politik dalam pemilu, CIA kemudian mencoba cara lain yang lebih keras, yaitu “menetralisir” Bung Karno.

Peristiwa penggranatan tanggal 30 November 1957 atau lebih dikenal dengan sebutan Peristiwa Cikini, misalnya, tidak bisa dilepaskan dari skenario CIA. Walaupun bukti dalam peristiwa yang menewaskan 11 orang dan 30 lainnya cedera masih simpang-siur, tetapi indikasi keterlibatan CIA sangat jelas.

Pengakuan Richard Bissell Jr., mantan Wakil Direktur CIA Bidang Perencanaan pada masa Allan Dulles, kepada Senator Frank Church, Ketua Panitia Pemilihan Intelijen Senat tahun 1975, yang melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, membuktikan itu. Ia menyebut sejumlah nama kepala negara, termasuk Presiden Soekarno, untuk “dipertimbangkan” dibunuh. Bagaimana kelanjutannya, ia tidak mengetahui. Bung Karno sendiri yakin CIA di belakang peristiwa ini. David Johnson, Direktur *Centre for Defence Information* di Washington, juga membuat laporan sebagai masukan bagi Komite Church.

Peristiwa Cikini yang dirancang Kolonel Zulkifli Lubis, yang dikenal sebagai pendiri intelijen Indonesia, bukanlah satu-satunya upaya percobaan pembunuhan atas Bung Karno. Maukar, penerbang pesawat tempur TNI AU, juga pernah menjatuhkan bom dan menghujani mitraliur dari udara ke istana presiden.

Presiden Eisenhower sendiri memutuskan dengan tergesa persiapan invasi ke Indonesia sepekan setelah percobaan pembunuhan yang gagal dalam Peristiwa Cikini. Ia makin kehilangan kesabaran. Apalagi peristiwa itu justru makin memperkuat dukungan rakyat pada Bung Karno.

Ketegangan Bung Karno dengan Gedung Putih mulai mengendur setelah Presiden J.F. Kennedy terpilih sebagai Presiden AS. Ia malah mengundang Bung Karno berkunjung ke Washington. Dalam pandangan Kennedy, seandainya pun Bung Karno membenci AS, tidak ada salahnya diajak duduk bersama. Kennedy yang mengutus adiknya bertemu Bung Karno di Jakarta, berhasil mencairkan hati proklamator ini hingga membebaskan penerbang Allan Pope.

Begitu Kennedy tewas terbunuh, suatu hal yang membuat duka Bung Karno, hubungan Jakarta—Washington kembali memanas. Penggantinya, Presiden Johnson yang disebut-sebut di bawah “todongan” CIA, terpaksa mengikuti

kehendak badan intelijen yang “mengangkatnya” ke kursi kepresidenan. Pada masa ini pula seluruh kawasan Asia Tenggara seperti terbakar.

CIA yang terampil dalam perang propaganda, kembali menampilkan watak sesungguhnya. Fitnah dan berita bohong mengenai Bung Karno diproduksi dan disebar melalui jaringan media massa yang berada di bawah pengaruhnya. Tujuannya, mendiskreditkan proklamator itu. Hanya di depan publik menyatakan gembira atas kebebasan Allan Pope, tetapi diam-diam diproduksi berita bahwa kebebasan itu terjadi setelah istri Allan Pope berhasil merayu Bung Karno. Sedang pengeboman istana oleh Maukar, diisukan secara sistematis sebagai tindak balas setelah Bung Karno mencoba menggoda istri penerbang itu.

CIA terus melakukan berbagai trik perang urat syaraf mendiskreditkan Bung Karno. Termasuk di antaranya Bung Karno berbuat tidak senonoh terhadap pramuria Soviet dalam penerbangan ke Moskwa. Jauh sebelum itu, Sheffield Edwards, Kepala Keamanan CIA pada masa Allan Dulles, pernah meminta bantuan Kepala Kepolisian Los Angeles untuk dibuatkan film cabul dengan peran pria berpostur seperti Bung Karno.

Dalam satu artikel di majalah *Probe*, Mei 1996, Lisa Pease yang mengumpulkan berbagai arsip dan dokumen, termasuk dokumen CIA yang sudah dideklasifikasikan, menyebut yang terlibat dalam pembuatan film itu Robert Maheu, sahabat miliarder Howard Hughes, serta bintang terkenal Bing Crosby dan saudaranya.⁴²

Karena telah terbukanya kedok imperialis AS/CIA yang membantu pemberontakan PRRI/Permesta, maka bagi kaum pemberontak, menerima amnesti presiden/pemerintah RI adalah satu-satunya jalan. Dan bagi individu pemberontak yang kembali ke pangkuan NKRI—seperti pengakuan seorang bekas tokoh PRRI—hak mereka dikembalikan sebagai bangsa Indonesia, dan bagi yang pegawai negeri tetap mendapatkan pensiun penuh di hari tuanya. Tokoh-tokoh militernya diampuni, bahkan tersebut Kolonel Achmad Hussein kemudian menjadi pedagang besar di Jakarta. Bahkan yang kembali dari luar negeri ada yang diberi kedudukan-kedudukan dan jabatan dalam pemerintahan. Dan menurut satu sumber, Sutan Syahrir ketika meninggal, dimakamkan dan diangkat sebagai pahlawan nasional. Akan tetapi, sangat penting dan harus diperhatikan bahwa tidak ada sedikit pun pembenaran dari Soekarno maupun dari Pemerintah NKRI atas berdirinya pemberontakan dan pemerintahan tandingan yaitu PRRI itu! Malahan, karena pimpinan partai, PSI dan Masyumi, yang tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap tokohnya yang terlibat PRRI/Permesta, maka PSI dan Masyumi, begitu juga GPII, dibubarkan dan dilarang berdasarkan Keputusan Presiden No. 200 dan No. 201 tahun 1960.⁴³

Amanah Bung Karno

SELESAI bertugas dalam Operasi 17 Agustus, A. Yani diangkat menjadi Deputi Kasad, kemudian, ketika Menteri Pertama Ir. Juanda meninggal dan *reshuffle* kabinet pada pertengahan tahun 1963, A. Yani menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Dalam kabinet yang baru di-*reshuffle* itu, Dr. Subandrio, Chaerul Saleh, dan Dr. J. Leimena diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I, II, dan III. Jenderal A.H. Nasution diangkat menjadi Menteri Koordinator (Menko) bidang Pertahanan dan Keamanan. D.N. Aidit dari PKI juga diangkat sebagai Menko.

Dengan keadaan yang rupa-rupanya dirasakan oleh Bung Karno, dia menyampaikan amanah kepada Jenderal A. Yani: “...kalau sampai terjadi apa-apa pada diri saya, engkau, Yani, supaya menggantikan saya.” Yani yang merasa belum siap menyarankan: “...apakah tidak sebaiknya diambil dari salah seorang Waperdam saja, Mas Ban, Mas Chaerul, atau Pak Leimena.” Bung Karno menjawab: “Bandrio itu *onbetrouwbaar* (tidak dapat dipercaya), Chaerul masih suka *ngoboy*, Pak Leimena cocok kalau jadi *dominee* di gereja, yang tepat adalah Engkau.”⁴⁴

Kalau kita mau meneliti lebih dalam lagi akan hal-hal yang terjadi di Sumatra, maka kita dapat melihat akan benarnya kesimpulan yang mengatakan bahwa: “Pertama: *Kejadian-kejadian di Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan adalah rentetan kejadian yang sengaja ditimbulkan oleh sebuah partai kecil yang kalah dalam pemilihan umum yang lalu yang berhasil mendalangi sebuah partai besar dan oknum-oknum liar, yang tidak melihat kemungkinan dengan jalan demokratis dapat duduk kembali dalam kekuasaan sentral, dan yang hanya melihat kemungkinan dengan jalan menggunakan saluran partai-partai lain, dengan jalan mempertajam pertentangan antara partai-partai agama dengan PKI dan PNI, dengan bikin-bikinan menimbulkan kemarahan rakyat di daerah-daerah supaya memberontak terhadap pemerintah pusat, dengan jalan mengadu domba suku satu dengan suku lainnya dan dengan jalan menghasut orang-orang militer supaya memberontak kepada atasannya.*”

Kedua: *Kejadian-kejadian tersebut terang sejalan dan berhubungan dengan rencana kaum imperialis, yang dipelopori oleh Amerika Serikat untuk menarik Indonesia ke dalam pakta militer Seato. Rencana-rencana dari pemberontak di Sumatra untuk memisahkan Sumatra dan Kalimantan dari pemerintah pusat dan untuk mendirikan negara sendiri yang mempunyai peralatan sipil dan militer sendiri, yang mempunyai hubungan luar negeri sendiri, adalah sepenuhnya sejalan dengan rencana Amerika Serikat yang diatur oleh Pentagon (Kementerian Pertahanan) dan State Department (Kementerian Luar Negeri) Amerika Serikat, oleh “jenderal-jenderal” DI/TII dan oleh aparat-aparat serta kakitangan-kakitangan Amerika Serikat yang ada di Indonesia.”⁴⁵*

Lebih jelas lagi, pada tahun-tahun sesudah 60-an, hal ini diakui oleh Edward Master, Staf Kedutaan Amerika di Jakarta tahun 1964—1968 yang mengatakan: “Mari kita akui, Amerika membuat kesalahan luar biasa di tahun 1957--1958 dengan

⁴² <http://us.geocities.com.edicahy/anti-imperialisme.cia1.html>.

⁴³ Baca juga *Demokrasi versus Militerisme* oleh Sulastomo—*Kompas*, 8 Mei 2004.

⁴⁴ *Charles van der Plas Connection*, <http://www.munindo.brd.de/artikel/vanderplas2.html>.

⁴⁵ Pidato D.N. Aidit di depan DPR-RI tanggal 11 Februari 1957.

mendukung gerakan kemerdekaan dalam wilayah Indonesia. Itu semua bencana ... kami seharusnya tidak pernah melakukan hal itu ... dan walaupun melakukannya seharusnya tidak dengan cara seperti itu....”⁴⁶

Van der Plas Connection

KETIKA pasukan Sekutu masuk dengan alasan untuk melucuti tentara Jepang yang menyerah setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda juga ikut membonceng masuk, baik militernya maupun ahli-ahli politik kolonialis. Salah satu di antara para tokoh Belanda itu adalah Charles Van der Plas, yang dalam masa pendudukan Jepang telah mengendalikan jaringan intel buat Sekutu di Indonesia dari Australia. Dia masuk kembali bersama Sekutu dan pada waktu itu dapat menjadi Gubernur Jawa Timur. Karena menguasai beberapa bahasa daerah, juga bahasa Arab, Cina, dan bahasa-bahasa Barat, maka dengan licik Van der Plas berhasil mendidik dan membina serta memasukkan ke dalam jaringannya, para keluarga bekas “abdi dan pengikut” Belanda dalam masa penjajahannya, yang disebut “*ambtenaar*” serta guru-guru agama, pesantren-pesantren dan organisasi keagamaan, dan juga militer, hingga dengan lihai mereka bisa dijadikan alat oleh Van der Plas, dan dikendalikan untuk kepentingan kolonialis.

Menemukan Jagonya

VAN DER PLAS Connection adalah jaringan riil yang canggih, hanya anggota-anggota inti tertentu yang sadar akan keberadaannya sebagai anggota jaringan, lainnya adalah oknum-oknum oportunist tanpa sadar, sekadar sebagai alat saja.

Kegagalan yang dialami Amerika—Inggris dengan proyeknya PRRI/Permesta, membuatnya sadar, setelah mendapat advis dari Belanda, bahwa usaha dari daerah untuk menyingkirkan Presiden Soekarno adalah kesalahan yang fatal dan sulit untuk dapat berhasil. Karenanya, Sekutu mulai melakukan usaha dan pendekatan ke Pusat. Kepada Jakarta ditawarkan pesawat angkut raksasa Hercules, bantuan komunikasi kuat dan modern (dengan demikian Sekutu bisa “menyadap” semua perintah-perintah dari pusat maupun daerah), perwira-perwira Indonesia diberi kesempatan dan para sarjana serta mahasiswa diberi beasiswa untuk belajar di Amerika. Para kader Dr. Soemitro Djojohadikusumo berbondong-bondong berangkat belajar ke Amerika dan menggondol gelar-gelar yang diperlukan untuk mengajar di universitas.

Prof. Guy Pauker, tokoh dan otak CIA di Indonesia, sangat berperan di Seskoad (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat), yang menentukan pengiriman

2.100 orang perwira menengah dan tinggi TNI—Polri belajar di AS selama periode 1960—1965.⁴⁷

Bersamaan dengan dilaksanakannya program-program tersebut, dengan diam-diam dilakukan *talent scouting* (mencari calon jago berbakat) oleh perwira tinggi bagian sandi yang ternyata berada dalam jaringan Van der Plas. Calon jago adalah perwira-perwira dengan kriteria: avonturir, berani malu, berani mati, doyan duit, berpengalaman dan berhasil dalam berpetualang serta telah menikmatinya. Ditemukanlah seorang perwira yang memenuhi kriteria tersebut, ialah seorang kolonel asal Jawa Tengah dan pernah menduduki posisi tertinggi di tempatnya sebagai panglima divisi, yaitu Kolonel Soeharto. Malahan padanya ditemukan faktor lain yang sangat penting, yaitu menaruh dendam kesumat kepada para perwira atasannya, terutama anggota Tim Pengusut MBAD dan rival beratnya, A.Yani, juga kepada Presiden Soekarno yang menandatangani surat keputusan pemecatannya sebagai Panglima Divisi Diponegoro. Maka terpilihlah Kolonel Soeharto untuk dijadikan jago utamanya.

Setelah Soeharto menjadi Panglima Kostrad dengan pangkat mayjen, terjadilah G30S sesuai agenda waktu dari *Van der Plas Connection* (atas pesanan Amerika dan sekutunya). Dari peristiwa G30S tersebut, terlihat dengan jelas adanya jalur-jalur konspirasi kaum eks. kolonialis, yang sampai kini masih merajut dengan jalur-jalurnya pada sistem kekuasaan negara Indonesia.⁴⁸

Situasi Tanah Air

KENDATIPUN belang Amerika yang mendukung pemberontakan PRRI/Permesta telah *terblejeti*, namun imperialis tetap tidak mau tinggal diam dalam menggoyang NKRI terutama Bung Karno yang memang tidak mereka sukai. Berbagai cara digunakan oleh imperialis untuk menjatuhkan Soekarno. Dari percobaan-percobaan pembunuhan sampai kepada pengedaran film-film yang menggambarkan manusia lelaki yang memakai topeng wajah Soekarno melakukan adegan porno, dan lain-lain. Sementara itu, di dalam negeri terutama para wakil-wakil rakyat dalam Konstituante terpecah dan tidak ada kesepakatan dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan NKRI. Hanya golongan nasionalis dan komunis yang mati-matian mempertahankan Pancasila dan NKRI sebagai satu-satunya pilihan. Karena kebuntuan dalam segala rumusan di sidang Konstituante, pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden, yaitu kembali kepada UUD 1945. PKI dan PNI menjadi pendukung setia dan terkuat, karena golongan lain menghendaki dasar negara yang bukan Pancasila.

Dukungan ini terwujud antara lain bukan saja dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, namun juga Manipol-Usdek, perebutan Irian Barat, pengganyangan Malaysia.

⁴⁶ Ucapan langsung Edward Master yang direkam dalam film dokumen *Shadow Play*.

⁴⁷ Jenderal Soeharto Menuju Tahta Kekuasaan. <http://www.progind.net/modules/wfsection/article.php?articleid=76.10/11/2005>

⁴⁸ Charles van der Plas Connection, <http://www.munindo.brd.de/artikel/vanderplas2.html>.

Kecuali itu, keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) tahun 1960 didukung sepenuhnya oleh PKI dan PNI, namun di lain pihak banyak yang tidak senang Bung Karno intim dengan PKI, terutama golongan kanan dan neokolonialis termasuk Amerika Serikat yang ingin meluaskan pengaruhnya di Indonesia dengan menjanjikan bantuan namun ditolak Bung Karno dengan kata-katanya yang terkenal *go to hell with your aid*.⁴⁹

“Sesuai dengan program umumnya, PKI menggunakan semaksimal hak legal yang ada dengan konsekwen menyokong setiap gagasan, politik dan tindakan maju Presiden Soekarno. Pengaruh PKI makin luas di dalam masyarakat Indonesia; kenyataan ini tidak hanya diakui oleh kawan dan sahabat tetapi juga oleh lawan dan musuh PKI. Hal ini tercermin tidak saja pada organisasi PKI yang tersebar luas di seluruh negeri dan jumlah anggotanya yang besar, tetapi juga secara konkret dalam pemilihan umum pertama, ketika PKI telah keluar sebagai salah satu dari empat partai terbesar di Indonesia. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, peranan dan posisi PKI dalam percaturan politik Indonesia meningkat dalam batas tertentu. Hal ini terlihat dari kenyataan, bahwa anggota-anggota PKI atau tokoh-tokoh yang didukung PKI dapat menduduki posisi penting dalam lembaga-lembaga negara dan pemerintahan, seperti selaku Wakil Ketua MPRS, Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua DPA, Dewan Perancang Nasional, Front Nasional, menteri-menteri, duta besar, dan pejabat-pejabat di berbagai departemen. Di daerah ada yang menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur/kepala daerah tingkat I, wakil ketua DPRD, kepala daerah tingkat II, walikota atau wakil walikota, dan lain-lain.

Presiden Soekarno yang dengan konsisten mengusahakan persatuan seluruh bangsa Indonesia, menganggap kekuatan komunis sebagai bagian yang tak dapat dikurangi dari persatuan itu. Hal ini antara lain termanifestasi dalam ucapan beliau dalam penutupan Kongres VI PKI tanggal 16 September 1959,⁵⁰ yaitu: *‘Yo sanak yo kadang, yen mati aku sing kelangan*.⁵¹ Hal ini membuat kaum reaksioner dalam negeri dan imperialis sangat tidak puas.”⁵²

Bung Karno Dijadikan Presiden Seumur Hidup

MELIHAT besarnya kekuatan PKI yang tumbuh pesat menjadi partai komunis yang terbesar di dunia setelah Soviet dan Tiongkok, maka pihak nekolim khawatir bila pemilu digelar, PKI akan menang mutlak dan otomatis presidennya juga dari orang PKI. Oleh karena itu pihak Angkatan Darat melalui Jenderal A.H. Nasution dengan mengajak Suwiryo (ketua PNI waktu itu) mengusulkan agar Bung Karno dijadikan presiden seumur hidup, agar tidak perlu dilakukan pemilu, sehingga dengan demikian tertutuplah kesempatan bagi orang PKI menjadi presiden, dan ini

⁴⁹ Fakta Kebenaran Korban Tragedi 65 oleh LPRKROB, YPKP65, dan Pakorba. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

⁵⁰ Yang beliau ulangi lagi dalam sambutan pada hari ulang tahun PKI 23 Mei 1965—Pen.

⁵¹ Ya sanak ya saudara, jika mati akulah yang kehilangan.—Pen.

⁵² Y. Pohan: *“Siapa Sesungguhnya yang Melakukan Kudeta terhadap Pemerintahan Presiden Soekarno?”* <http://www.munindo.brd.de/archiv/pohan.htm>.

adalah sebuah akal licik dari Angkatan Darat (hal ini juga diakui sendiri oleh Brigjen. Suhardiman). Mengenai Pembubaran Partai Masyumi dan PSI, banyak kalangan pimpinan partai tersebut menuduh bahwa ini adalah karena politik PKI, sehingga menambah ketegangan dan rasa permusuhan secara horisontal antara lain dengan timbulnya Peristiwa Kanigoro di Kediri, di Jawa Tengah, dan di tempat-tempat lainnya.⁵³

Nasakom

SESUAI dengan ajaran dan pendirian sejak mudanya, yang tertuang dalam tulisannya *Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme*, Soekarno ingin menyatukan semua kekuatan dan aliran politik di Indonesia dalam satu wadah, sebagai dasar dari persatuan nasional untuk menghantam kaum imperialis dan kaum reaksioner dalam negeri dengan satu kekuatan nasional, yang dengan kata yang cukup terkenal yaitu *“samenbundeling van alle revolutionaire krachten”*, persatuan semua kekuatan revolusioner di Indonesia. Pada tahun 1960, Soekarno mulai menggunakan slogan baru untuk ajaran dan pendiriannya tentang persatuan antara nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme dalam satu kata yaitu: *“nasakom”*, kependekan dari sebutan nasionalis, agama, dan komunis. Rakyat didorong untuk menyadari tentang adanya tiga kekuatan besar di dalam masyarakat yang harus bersatu untuk mencapai tujuan revolusi Indonesia. Sementara itu, pada tahun itu Nikita Krushchev, pemimpin komunis dan negara Uni Sovyet berkunjung ke Indonesia, dan kurang dari setahun kemudian Soekarno berkunjung ke Amerika dan bertemu dengan Presiden J.F. Kennedy.

Tahun 1960-an Soekarno mengambil kebijakan anti nekolim⁵⁴, yang artinya ketergantungan ekonomi kepada negara-negara blok Barat diputuskan. Indonesia pun mulai melirik ke blok-blok Timur. Soekarno membentuk hubungan poros Jakarta—Peking—Moscow, negara-negara Timur yang sosialis dan komunis. Akibatnya, ajaran sosialis, komunis, Marxis, dibebaskan. Bukannya salah untuk mempelajari semua ideologis yang ada, namun cita-cita luhur Soekarno yang ingin mempersatukan Indonesia dengan semua ideologinya tidak mungkin ketika ideologi itu saling bertentangan. Kalangan agama menuduh kalangan komunis tidak bertuhan, lalu kalangan komunis menuduh kalangan nasionalis pro dengan liberalisme, dalam hal ini Amerika dan Inggris. Ketika ‘perang’ ideologis saling tarik-menarik di kalangan masyarakat Indonesia saat itu, pihak-pihak yang memang menghendaki kekuasaan Soekarno diakhiri karena dianggap sesudah terlalu lama berkuasa, mencoba memanfaatkan situasi tersebut.⁵⁵

“Politik anti imperialis dan anti kaum reaksioner dari Presiden Soekarno itu mendapat sokongan dan kekuatan untuk lebih lanjut mengembangkan diri. Akan

⁵³ Fakta Kebenaran Korban Tragedi 65 oleh LPRKROB, YPKP65, dan Pakorba. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

⁵⁴ anti neokolonialisasi, liberalisme, dan imperialisme

⁵⁵ Diyah Wara, <http://www.sekitarkita.com/comments.php?id=122070c>

tetapi, satu kekurangan penting pada masa itu adalah, bahwa program ekonomi pemerintah Soekarno mengalami kegagalan yang cukup berat. Usaha-usaha perbaikan yang dilakukan Presiden Soekarno tidak mencapai hasil yang diharapkan karena intrik dan sabotase dari kabir-kabir⁵⁶ untuk menggagalkan program-program ekonomi tersebut. Tindakan pemerintah Soekarno yang bersifat anti-imperialis dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan dan perkebunan-perkebunan asing juga tidak membawa perbaikan ekonomi, bahkan melahirkan kabir-kabir baru di kalangan Angkatan Bersenjata yang menganggangi perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu dengan menggunakan kesempatan baik bagi mereka dengan adanya SOB, *Staat van Oorlog en Beleg*/Keadaan Darurat Perang. Dengan menempati kedudukan sebagai presdir-presdir (presiden direktur), perwira-perwira tinggi Angkatan Darat itu tidak saja menjadi OKB-OKB (Orang Kaya Baru), tetapi juga telah menjadi satu lapisan tersendiri yang menganggangi sektor-sektor penting ekonomi Indonesia. Kapitalisme birokrat pada mulanya berhubungan erat dengan pertumbuhan perusahaan negara. Ketika kepentingan perusahaan Belanda dinasionalisasi pada tahun 57–58, sebagian perusahaan itu berada di bawah militer. Demikian pula tindakan Presiden Soekarno yang dalam batas tertentu bersifat anti feodal dengan mengeluarkan UUPA (Undang Undang Pokok Agraria) dan UUPBH (Undang Undang Pokok Bagi Hasil) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena disabot dan dihalangi oleh tuan-tuan feodal dan kaum reaksioner lainnya.”⁵⁷

Pada 26 September 1961, Menteri Luar Negeri Belanda Luns menyatakan dalam Sidang Umum PBB bahwa Belanda akan menyerahkan pengurusan Irian Barat ke dalam administratif PBB, namun Subandrio, menyatakan dalam Sidang Umum PBB kemudian, bahwa Indonesia akan menggunakan kekerasan jika jalan damai gagal, untuk memperoleh kembali Irian Barat, yang masih dikanggangi Belanda semenjak Perjanjian KMB tahun 1949. Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumumkan pembentukan “TriKora” untuk perjuangan merebut kembali Irian Barat. Jenderal Nasution dan A. Yani bertanggung jawab atas komando aksi untuk Irian Barat ini, sedang komando Mandala dikepalai oleh Mayjen. Soeharto.

Pada Januari 1962, terjadi lagi percobaan pembunuhan atas Soekarno ketika berkunjung ke Sulawesi. Sementara itu dua buah kapal perang Belanda terlibat dengan 4 buah torpedo boat Indonesia di Laut Banda, satu boat tenggelam dan satu rusak, sedang Komodor Laut Yos Sudarso, menjadi korban dan meninggal dalam pertempuran itu. Pihak Militer Indonesia mengumumkan kepada pers bahwa operasi militer telah mulai di Irian barat.

Robert F. Kennedy, Jaksa Agung USA, datang ke Jakarta pada 11 Februari 1962 untuk bernegosiasi tentang Irian Barat, dan selanjutnya ke Negeri Belanda dan

⁵⁶ kabir=kapitalis birokrat—Pen.

⁵⁷ Y. Pohan: “Siapa Sesungguhnya yang Melakukan Kudeta terhadap Pemerintahan Presiden Soekarno?” <http://www.munindo.brd.de/archiv/pohan.htm>.

memberitahukan pemerintah Belanda bahwa USA tidak akan memberikan bantuan kepada Belanda apabila persengketaan meningkat. Pada 1 Mei 1963, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerahkan penguasaan atas Irian Barat kepada Indonesia. Liu Shao Chi, Presiden Republik Rakyat Tiongkok mendarat di Jakarta dari Beijing untuk melakukan perundingan dengan Soekarno, sementara demonstrasi anti Cina meningkat di Bandung.

Dengan berdirinya “Malaysia” yang dianggap sebagai “nekolim” yang mengelilingi Indonesia, proyek dari Kerajaan Inggris, pada saat memberi sambutan atas meninggalnya Perdana Menteri Djuanda, Soekarno mendeklarasikan pengganyangan Malaysia dan membentuk Kogam, Komando Ganyang Malaysia. Dengan meninggalnya Perdana Menteri Ir. Djuanda, maka kedudukannya digantikan oleh 3 orang Wakil Perdana Menteri (Waperdam), yaitu Dr. Subandrio, Chaerul Saleh, dan Dr. Leimena.

Pembentukan proyek nekolim Malaysia yang mengelilingi Indonesia, politik ekonomi yang tidak menentu sehingga rakyat menjadi sengsara, penyerangan Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur serta pembakaran gambar Soekarno, meningkatkan kemarahan rakyat Indonesia. Sebagai balasan, demonstrasi rakyat, mengobrak-abrik dan membakar Gedung Kedutaan Inggris di Jakarta, dilanjutkan kemudian dengan penasionalisasian milik Inggris di Indonesia seharga ±400 juta dolar. Namun karena birokrasi dan salah urus di kalangan para pejabat, ekonomi Indonesia tetap tidak ada kemajuan, sehingga Soekarno meminta supaya rakyat bersabar dalam saat-saat kekurangan beras. Rakyat yang marah dan lapar, tidak mau tinggal diam dengan semua ulah imperialis dan kaki tangannya di dalam negeri. Demonstrasi ke demonstrasi terus berlanjut. Bahkan pada 25 Maret 1964, Soekarno dalam pawai umum, menyatakan kepada Duta Besar Amerika: “*go to hell with your aid*”, yang kemudian berlanjut dengan demonstrasi rakyat yang melakukan penyerangan dan pembakaran Gedung *Information Service* Amerika di Jakarta dan Surabaya.⁵⁸

Dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia pada bulan Mei 1964 dibentuk Komando Mandala Siaga (Kolaga) yang dipimpin oleh Menpangau Laksdya Omar Dani, sebagai wakilnya, Brigjen. Achmad Wiranata Kusuma. Achmad kemudian digantikan oleh Mayjen. Soeharto yang juga merangkap sebagai Pangkostrad. Terjadi friksi antara Omar Dani dengan Soeharto, bahkan Soeharto menyatakan kepada Presiden Soekarno bahwa Omar Dani tidak cocok sebagai Panglima Kolaga. Soeharto sebagai Wakil Pangkolaga juga melakukan sabotase berupa penyelundupan dan menghambat pengiriman pasukan ke Malaysia terutama dilakukan melalui Kemal Idris. Di samping itu juga melakukan pengkhianatan dengan cara mengirim pasukan yang tidak siap (Diponegoro) dan memberitahukan kepada Inggris pasukan-pasukan yang diselundupkan ke Malaysia sehingga pasukan-pasukan itu dengan mudah ditangkap atau dihancurkan. Hal ini semua

⁵⁸ *Free Encyclopedia Wikipedia*

tentu sepengetahuan pimpinan AD, tetapi pimpinan AD tidak berbuat apa-apa karena memang mengikuti skenario nekolim. Dari 546 tentara yang ditahan Malaysia, hanya 21 dari AD.⁵⁹

Sebenarnya telah lama terjadi pertentangan antara faksi-faksi di kalangan internal AD, yaitu sejak Rera Angkatan Perang dalam pemerintahan Hatta. Pertentangan itu terutama antara profesionalisme model Barat yang dibumbui oleh pembelajaran politik sebagai bagian dari keikutsertaannya dalam kekuasaan negara, dengan semangat revolusioner warisan revolusi 1945 yang masih kental di kalangan perwira menengah AD.

Pada tahun 1965, AD telah terpecah dalam dua kubu, yaitu kubunya Jenderal Ahmad Yani yang loyal kepada Presiden Soekarno, dan kubunya Jenderal A.H. Nasution—Soeharto yang tidak mendukung kebijakan Presiden Soekarno tentang persatuan nasional terutama tentang nasakom dan pengganyangan Malaysia.

Dengan lihaihnya Soeharto bertindak seolah-olah loyal terhadap kepemimpinan Nasution maupun Yani dan sekaligus pendukung Soekarno, namun di lain pihak Soeharto merangkul kelompok perwira yang ingin menyelamatkan Bung Karno, dan kemudian kelompok tersebut diorganisasi dan dimanfaatkan untuk menghancurkan kelompok Yani maupun Nasution, menghancurkan PKI, yang kemudian merebut kekuasaan.⁶⁰

Bagaimana parahnya keadaan ekonomi Indonesia pada saat itu, dapat kita lihat dari keterangan yang diberikan oleh Prof. Ben Anderson antara lain: “Mulai kira-kira tahun 1961—62, inflasi di Indonesia melejit secara mengerikan. Saat itu saya sendiri ada di Indonesia. Saya lihat saban minggu itu harga barang bisa berlipat ganda. Duit tidak ada arti sama sekali. Khususnya bagi orang-orang gajian itu menimbulkan suasana yang panik. Kalau pejabat gajinya tidak berarti lagi, mereka cepat-cepat lari ke dunia korupsi, catut, dsb. Orang melarikan duitnya untuk beli tanah. Karena tanah dianggap sesuatu yang bisa mempertahankan harganya. Keadaan ekonomi waktu itu menimbulkan suatu kegelisahan di seluruh Indonesia. Orang merasa masa depannya sangat gelap, tidak normal, dan serba tak tentu. Terus, ada kemiskinan yang luar biasa. Saya ingat waktu itu jalan-jalan di Yogya—Solo, banyak orang yang gelesapan di pinggir jalan. Orang yang mati karena busung lapar. Bung Karno sendiri tidak malu untuk bikin propaganda supaya orang makan tikus sawah. Dan dia sendiri mengaku pernah makan tikus sawah. Saya sendiri *nggak* percaya. Tapi itu penting. Keadaan alam juga ikut mempengaruhi. Kemarau panjang menyebabkan gagalnya panen, hama tikus yang merusak dan menimbulkan kelaparan, dan menghilangnya dari pasaran bahan-bahan pokok, minyak, dan sebagainya, sehingga tidak heran, kalau kemudian pihak

militer terpaksa digunakan untuk mengontrol antrean dalam pembagian beras kepada rakyat.⁶¹

Mengenai konflik antara kelompok agama dengan kelompok PKI, Prof. Ben Anderson mengatakan, “Ini timbul sebagai akibat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH). PKI memperjuangkan *land reform* justru ketika tanah menjadi sangat penting, beras menjadi sangat penting, pembagian hasil menjadi sumber konflik yang luar biasa. Apalagi dalam hal *land reform*, salah satu pengecualian yang penting adalah tanah-tanah yang menjadi milik dari lembaga agama—umpamanya masjid, surau, gereja, dsb.—tidak boleh diganggu gugat. Dalam suasana seperti itu, orang-orang yang punya tanah lebih, supaya bisa tetap pegang tanahnya, lebih sering justru menyerahkannya kepada wakaf kalau Islam. Dan lembaga yang seperti itu juga untuk yang Kristen. Di mana dia bisa ikut sebagai pimpinan.

Jadi seperti dilaporkan oleh Lance Castles dengan artikelnya dalam majalah *Indonesia* pada tahun 1966 itu, kita ambil contoh pesantren Gontor. Dalam satu tahun tanah yang dimiliki oleh Gontor ini bisa bertambah sepuluh kali. Jadi dengan mendadak lembaga agama menjadi tuan tanah yang terbesar. Kalau orang-orang kiri, orang-orang yang pro-*land reform*, mau ribut soal tanah ini, mereka langsung berhadapan bukan dengan individu tuan tanah, tapi langsung menghadapi lembaga agama. Banyak orang tergugah untuk membela. Mereka bukannya mau melindungi tuan tanah tapi bagaimanapun mereka pasti mau melindungi atau membela lembaga agama mereka.”⁶²

Dengan situasi yang sedemikian rupa, di mana hidup manusia Indonesia seolah-olah tidak ada harga sama sekali, pihak-pihak kapitalis birokrat dan imperialis tetap menggoyang dan mengobok-obok Indonesia dan berusaha untuk menghancurkan-leburkan NKRI.

Sebagai protes atas masuknya Malaysia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, mulai 1 Maret 1965 Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan PBB. Hal ini dilanjutkan dengan perintah Soekarno agar semua perusahaan milik asing dinasionalisasi. D.N. Aidit, Ketua PKI, dalam satu pembicaraannya mengusulkan, untuk menghadapi proyek nekolim Malaysia, supaya rakyat, buruh, dan tani, dilatih dan dipersenjatai, dan dijadikan Angkatan Ke-5, di samping AD, AU, AL, dan Kepolisian. Pada 17 Mei, Soekarno meminta agar Angkatan Ke-5 dari buruh dan tani segera diorganisir, sedang D.N. Aidit menyarankan agar diadakan pemilihan umum di Indonesia. Mayjen. Ahmad Yani menganjurkan agar “nasakom” dipromosikan di dalam militer, namun dalam pembicaraannya di Manado kemudian menyatakan bahwa mempersenjatai rakyat yang disebut Angkatan ke-5, sebagai

⁵⁹ Fakta Kebenaran Korban Tragedi 65 oleh LPRKROB, YPKP65, dan Pakorba. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

⁶⁰ Fakta Kebenaran Korban Tragedi 65 oleh LPRKROB, YPKP65, dan Pakorba. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

⁶¹ Prof. Ben Anderson, *Tentang Pembunuhan Massal 65 dan Tentang Matinya Para Jenderal*

⁶² Prof. Ben Anderson, *Tentang Pembunuhan Massal 65 dan Tentang Matinya Para Jenderal*

tidak perlu, yang juga diikuti dengan pernyataan Jenderal A.H. Nasution yang menolak “mempersenjatai rakyat”.⁶³

Sementara itu, awal tahun 1965, terbongkar sebuah dokumen yang kemudian disebut dokumen “*Gilchrist*”. Gilchrist adalah Duta Besar Inggris di Indonesia pada waktu itu, yang bertindak sebagai pelaksana operasi intelijen Inggris dan Amerika, yang menulis dokumen yang berisikan situasi palsu tentang konsolidasi TNI-AD, yang disebutnya sebagai *dewan jenderal*.⁶⁴ Oleh Chaerul Saleh, tokoh Partai Murba, dokumen ini dibawa kepada Soekarno, Subandrio, dan akhirnya kepada Aidit.

Dalam sebuah pesta di Eropa sebelumnya, Gilchrist pernah berkata bahwa “*satu kali tembakan akan mengubah Indonesia*”. Belakangan baru terungkap, Dubes Inggrislah yang mempersiapkan skenario operasi anti-PKI dengan isu amoral, asusila, dan anti agama yang kemudian dilansir ke sejumlah koran ibukota seperti *Merdeka*, *Berita Yudha*, dan *Angkatan Bersenjata*. Hal ini terungkap karena ada satu dokumen telegram kampanye dengan isu tersebut ke redaksi *Merdeka*.

Menurut sumber, menanggapi situasi yang digambarkan dalam *Dokumen Gilchrist* itu, Soekarno memerintahkan untuk segera mengatasi persoalan itu.⁶⁵

Terlepas ada atau tidaknya *Dokumen Gilchrist* ini, namun menurut tulisan Mr. Y. Pohan pada Januari 1985 dengan judul “*Siapa Sesungguhnya yang Melakukan Kudeta terhadap Pemerintahan Soekarno?*”, mengenai isu dewan jenderal antara lain disebut:

“Dari uraian mengenai situasi Indonesia sebelum terjadinya Peristiwa 30 September akan terlihat jelas adanya sejumlah besar perwira tinggi AD yang komunisto-phobi, yang pro-Barat dan sembunyi-sembunyi manyabot dan menentang politik-politik dan gagasan maju Presiden Soekarno. Mereka itu tidak saja aktif di bidang militer, tetapi juga di bidang politik, dan di bidang ekonomi telah muncul lapisan kapitalis birokrat berbaju hijau yang menganggangi sektor-sektor ekonomi yang penting. Melalui mereka inilah kaum reaksioner Indonesia dan imperialis AS hendak mewujudkan ambisi jahatnya yang sudah lama dicita-citakan, yaitu menegakkan kekuasaan pro-Barat di Indonesia dan menggulingkan Soekarno. Untuk lebih jelasnya ada baiknya dikemukakan fakta-fakta berikut ini:

(1). “Pada bulan Januari 1965, Jenderal A.Yani dan 4 jenderal lainnya telah mengadakan rapat-rapat bersama secara rahasia untuk mendiskusikan situasi politik (yang dikatakan memburuk). Di kalangan AD ini dikenal sebagai “*General Yani’s Braintrust*” (Badan Inti Politik).⁶⁶ Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh salah seorang yang ikut menegakkan orde baru, katanya: “Konon kabarnya untuk memecahkan berbagai masalah itu sejak beberapa waktu ini di kalangan Markas Besar AD dibentuk *braintrust* yang terdiri dari 4 orang. Di samping itu ada badan

yang diwujudkan oleh para panglima yang jumlahnya 16 orang. Sehingga ada sebutan 4 ditambah 16 perwira tadi merupakan semacam *Great Council* atau Dewan Besar pihak tentara yang kalau hendak dicari analoginya dalam kehidupan partai merupakan politbiro.”⁶⁷

(2). “Pada tanggal 27 dan 28 Mei, Jenderal A. Yani sendiri sebagai Pangad pernah dalam rapat para Panglima Daerah AD menyatakan bahwa telah dibentuk dewan jenderal yang tugasnya memberikan penilaian politik.”⁶⁸

(3). “Pada tanggal 8 Juni 1965 di tempat kediaman Chairul Saleh dilangsungkan pertemuan antara Jenderal A. Yani dan Jenderal Haryono dengan tokoh-tokoh PNI. Dalam pertemuan itu diusulkan oleh Jenderal A. Yani dan Jenderal Haryono serta Jenderal Soekendro untuk membentuk kerja sama antara PNI—FM dengan TNI/AD untuk melawan PKI. Usul itu ditolak dan tidak mendapat sambutan dari tokoh-tokoh PNI.”⁶⁹

(4). “Dalam sidang mahmilub terungkap fakta bahwa pada tanggal 21 September 1965 di AHM (Akademi Hukum Militer), Jalan Dr. Abdulrachman Saleh Jakarta berlangsung rapat pleno dewan jenderal. Rapat ini dipimpin oleh Jenderal S. Parman dan Jenderal Haryono serta mengesahkan rencana komposisi Kabinet Dewan Jenderal dan menetapkan waktu kudeta, yaitu sebelum Hari Angkatan Perang 5 Oktober 1965.”⁷⁰

Pada 5 Agustus, Soekarno dikatakan pingsan dalam satu acara resepsi. Pingsannya Soekarno di suatu acara publik ini menimbulkan bermacam-macam isu. Ada desas-desus bahwa ginjalnya tidak berfungsi. “*Keadaan ini menimbulkan pertanyaan ... apa yang akan terjadi kalau Soekarno meninggal ... siapa akan mengambil alih ... akankah PKI melakukannya ataukah tentara ... tak seorang pun tahu,*” begitu ucapan Hugh Tovar, *CIA Head of Station* Jakarta 1964—1966 yang direkam dalam film dokumen *Shadow Play*.

Namun, dua hari kemudian Soekarno memutuskan hubungan dengan IMF, World Bank, dan Interpol. Sementara ketegangan dan pertikaian antara pengikut PNI/NU di satu pihak dan PKI di pihak lain makin memanas di Jawa Tengah dan Jawa Timur, disebabkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH), seperti yang dikatakan Prof. Ben Anderson di atas.

Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1965, Soekarno tegas-tegas mengatakan akan meningkatkan kerja sama dan persekutuan anti imperialis dengan RRT dan Negara Asia lainnya, serta akan mempertimbangkan mengambil ide untuk mempersenjatai rakyat, dan memperingatkan agar supaya pihak militer tidak ikut

⁶³ *Free Encyclopedia Wikipedia*

⁶⁴ Yang dalam beberapa tulisan disebut sebagai “*our local army*”—Pen.

⁶⁵ Nusantara SH, *Dokumen CIA: Melacak Penggulingan Soekarno dan Konspirasi G30S*, Sinar Harapan, 30/9/2002. <http://www.polarhome.com>

⁶⁶ [CIA/USA: *Research Study Indonesia, The Coup That Backfired*, Hal.290/ Y.Pohan-2].

⁶⁷ [Rosihan Anwar: *Sebelum Prahara*, Hal.35/Y.Pohan-3].

⁶⁸ [Sudisman: *Uraian Tanggung Jawab: “Pledooi di Depan Mahmilub”*, Juli 1967/ Y.Pohan-4]

⁶⁹ [“*Gerakan 30 September*” di *Hadapan Mahmilub I (Perkara Nyono)*, Penerbit Pusat Pendidikan Kehakiman AD (Ahm—Pthm), Hal.277/Y.Pohan-5]

⁷⁰ [“*Gerakan 30 September*” di *Hadapan Mahmilub I (Perkara Nyono)*, Penerbit Pusat Pendidikan Kehakiman AD (Ahm—Pthm), Hal.277/Y.Pohan-5]

campur tangan. Kalau sebelumnya Jend. Ahmad Yani menganjurkan agar “nasakom” dipromosikan di kalangan militer, maka pada 27 September 1965, Jend. Ahmad Yani jelas-jelas menyuarakan menentang nasakom di dalam militer dan juga menentang ide untuk “mempersenjata rakyat”.⁷¹

Situasi di Kalangan Militer

DENGAN situasi yang nampak membara itu, pihak militer juga menjadi terpecah. Harold Crouch dalam bukunya *The Army and Politic in Indonesia* (1978) menulis: “...menjelang 1965, SUAD (Staf Umum Angkatan Darat) pecah menjadi dua faksi. Kedua faksi ini sebetulnya sama-sama anti-PKI, tetapi berbeda sikap dalam menghadapi Presiden Soekarno. Yang pertama adalah faksi tengah yang loyal terhadap Presiden Soekarno, dipimpin oleh Men/Pangad Mayjen. A. Yani, hanya menentang kebijakan Soekarno tentang persatuan nasional yang di dalamnya PKI termasuk. Sedangkan kelompok kedua, faksi kanan, bersikap menentang kebijakan Yani yang bernafaskan Soekarnoisme. Di dalam faksi ini terdapat Jenderal Nasution dan Mayjen. Soeharto. Menjelang 1965, Soekarno mencium faksionalisme di dalam tubuh AD itu, dan mulai memecah-belah kedua kubu tersebut.”⁷²

“Sebaliknya, menurut Prof. Ben Anderson, perwira-perwira bawahan seperti kolonel, letkol., mayor dibantu oleh kapten, letnan, sersan, dsb., menuduh bahwa jenderal-jenderal ikut serta dengan CIA dalam mendongkel Bung Karno, serta hidup bermewah-mewah, suka perempuan dan tidak menghiraukan nasib prajurit bawahannya. Terjadi konflik antara tentara bawahan yang umumnya miskin, dan tokoh-tokoh jenderal yang kaya dan berduit. Waktu itu di Jakarta hanya ada satu mobil Lincoln Continental berwarna putih, dan pemiliknya adalah Jenderal Ahmad Yani. Padahal Indonesia saat itu miskinnya bukan main! Ini dapat dilihat di daerah Jawa Tengah yang terkenal sebagai daerah yang paling miskin dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal lain lagi, juga kultur di Jawa Tengah di mana patriotisme kejawa-jawaan sangat kuat. Sejak dulu sudah ada persaingan antara Tentara Diponegoro dan Tentara Siliwangi. Perwira Siliwangi dianggap orang yang statusnya lebih tinggi, biasa menggunakan bahasa Belanda di antara mereka sendiri dan suka kebarat-baratan dan paling dekat dengan Amerika, sedang perwira Jawa Tengah sebagian besar berasal dari Peta, bikin zaman Jepang. Waktu revolusi mereka merasa diri sebagai orang Yogya, orang yang mempertahankan nilai-nilai dari Revolusi 45, patriotisme Jawa, dsb.”⁷³

Massa prajurit dan perwira Angkatan Darat, umumnya adalah patriotik, anti imperialisme dan kolonialisme. Kekuatan yang pro-Barat cumalah segelintir perwira tinggi saja, oleh karena itu, di dalam tubuh Angkatan Darat terpendam kekuatan yang anti jenderal dan konsekwen berdiri dan pro-rakyat, setia akan

ajaran Bung Karno. Mereka ingin mendobrak segala rintangan dan kemacetan serta sabotase kaum reaksioner terhadap politik dan gagasan Bung Karno dan dengan penuh kejujuran berhasrat mengubah kehidupan rakyat yang berat ketika itu.⁷⁴

Dalam pertengahan tahun 1965, kaum reaksioner yang berintikan dewan jenderal dan yang mendapat sokongan dari kaum imperialis AS semakin merasa tidak puas dengan situasi politik di Indonesia yang semakin kiri serta pukulan gencar terhadap mereka. Ulah PKI ke-45 mereka anggap sebagai “pamer kekuatan” dan mereka mulai memantapkan persiapan yang sudah lama dilakukannya, yaitu memukul PKI dan menggulingkan Soekarno, menindas PKI dan menegakkan pemerintah yang pro-Barat.

Musuh-musuh rakyat Indonesia dan Presiden Soekarno di dalam dan di luar negeri paham benar bahwa rintangan yang terutama bagi mereka untuk mengambil alih semua kekuasaan di negara Republik Indonesia adalah PKI sebagai suatu kekuatan politik yang paling berpengaruh dan terorganisasi di Indonesia di zaman Presiden Soekarno.⁷⁵

Hal ini dapat dilihat dengan jelas sejak pertemuan antara Presiden Kennedy dengan PM Inggris Harold McMillan, pada April 1962, di mana keduanya sepakat tentang kehendak untuk melikuidasi Soekarno pada saatnya yang tepat, untuk itu dinas intelejen (CIA dan MI6) bekerja sama saling isi-mengisi untuk merealisasikannya.

Dalam bulan Desember 1964, seorang Duta Besar Pakistan di Eropa melaporkan kepada Menlu Zulfikar Ali Bhutto tentang hasil percakapannya dengan seorang perwira intelijen Belanda yang bertugas di NATO yang menginformasikan sejumlah dinas intelijen Barat sedang menyusun suatu skenario akan terjadinya kudeta militer yang terlalu dini yang dirancang untuk gagal, dengan begitu terbukalah secara legal bagi AD Indonesia untuk menghancurkan kaum komunis dan menjadikan Bung Karno sebagai tawanan Angkatan Darat. Indonesia akan jatuh ke pangkuan Barat laksana sebuah apel busuk.

Hal senada pun telah dilaporkan oleh wartawan *Der Spiegel* bernama Godian Troeller bahwa akan terjadi perebutan kekuasaan oleh militer dalam waktu dekat.

Dalam bulan April 1965, Elswort Bunker, utusan khusus Presiden AS Johnson menghabiskan waktu 15 hari di Indonesia guna melakukan evaluasi AS paling tidak menghadapi 6 pilihan untuk membuat perhitungan terhadap Indonesia dan Presiden Soekarno seperti ditulis oleh David Johnson.⁷⁶

Menurut David T. Johnson (1976) ada enam skenario yang dapat dijalankan AS dalam menghadapi situasi yang memanas di Indonesia menjelang 1965, yaitu: 1. membiarkan saja, 2. membujuk Soekarno mengubah kebijakan, 3. menyingkirkan Soekarno, 4. mendorong Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan, 5. merusak

⁷¹ Free Encyclopedia Wikipedia

⁷² Dr. Asvi Warman Adam, *Pengadilan Sejarah terhadap Soeharto*. <http://arus.kerjabudaya.org/htm/sejarah>

⁷³ Prof. Ben Anderson, *Tentang Pembunuhan Massal 65 dan Tentang Matinya Para Jenderal*.

⁷⁴ Y. Pohan.

⁷⁵ Y. Pohan.

⁷⁶ Fakta Kebenaran Korban Tragedi 65 oleh LPRKROB, YPKP65, dan Pakorba. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

kekuatan PKI, 6. merekayasa kehancuran PKI sekaligus kejatuhan Soekarno. Ternyata skenario terakhir yang dianggap paling menguntungkan dan tepat untuk dilaksanakan.⁷⁷

Dengan ditemukannya *Dokumen Gilchrist* yang mengarah kepada isu dewan jenderal yang diduga akan melakukan kudeta terhadap Bung Karno pada Hari Angkatan Bersenjata RI tanggal 5 Oktober 1965, membuat para perwira menengah menjadi gundah dan resah dan mereka mempersiapkan satu “gerakan” yang katanya untuk membela dan menyelamatkan Bung Karno dan menggagalkan “dewan jenderal” yang akan melakukan kudeta.

Untung—Latief—Supardjo dan Soeharto

“MENURUT Brigjen Supardjo,⁷⁸ tanggal 16 September 1965 telah terbentuk susunan untuk suatu gerakan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Pasukan Pengawal Presiden, Cakrabirawa, untuk menyelamatkan Bung Karno dan menggagalkan kudeta dewan jenderal yang diduga akan berlangsung pada 5 Oktober 1965. Kolonel Latief, yang adalah Komandan Brigade Infanteri 1 Kodam V Jaya, semula keberatan Letkol. Untung menjadi pimpinannya dan meminta supaya gerakan dipimpin seorang jenderal. Tetapi karena Kamaruzaman (Syam) mempertahankan supaya tetap Untung, karena ia adalah pengawal presiden, maka akhirnya Letkol. Untung yang memimpinnya.”⁷⁹

Sebelum “gerakan” itu melancarkan aksinya, Letkol. Untung yang tidak asing bagi Soeharto, mendatanginya dan melaporkan rencananya. Soeharto mengatakan sikap itu sudah benar. “*Bagus kalau Kamu punya rencana begitu. Sikat saja, jangan ragu-ragu,*” demikian kata Soeharto menurut Letkol. Untung, seperti yang diceritakan kepada dan kemudian dikisahkan kembali oleh Subandrio, yang selama orba ditahan bersama Letkol. Untung. Malahan, menurut penjelasan Untung, Soeharto menawarkan bantuan pasukan. “*Kalau perlu bantuan pasukan akan saya bantu. Dalam waktu secepatnya akan saya datangkan pasukan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.*”⁸⁰

“Tiga minggu sebelum meletusnya G30S, Letkol. Untung dan Kol. Latief masing masing sebagai Komandan Batalyon 1 Cakrabirawa dan Komandan Brigade Infanteri 1 Kodam V Jaya, sudah merundingkan dengan Soeharto langkah-langkah yang perlu diambil, sebab Untung dan Latief kedua-duanya bekas anak buah Soeharto dan persahabatan mereka terus berkelanjutan.”⁸¹

Selaku Panglima Kostrad, Soeharto memberi perintah dengan telegram No. T.220/9 pada tanggal 15 September 1965 dan mengulangnya lagi dengan radiogram No. T.239/9 tanggal 21 September 1965 kepada Yon 530 Brawijaya Jawa Timur dan Yon 454 Banteng Raider Diponegoro Jawa Tengah untuk datang ke Jakarta dengan

kelengkapan tempur penuh. Ketika datang ke Kostrad, diterima oleh Soeharto dan juga dilakukan inspeksi pasukan pada tanggal 29 September 1965. Sedangkan Yon 328 Siliwangi datang dengan tanpa peluru. Tanggal 30 September 1965 jam 17.00, Yon 454 diperintahkan ke Lubang Buaya untuk bergabung dengan pasukan lainnya guna melakukan gerakan pada malam harinya.⁸²

Ali Murtopo mempunyai kedekatannya dengan Dul Arip, yang kemudian memimpin pasukan Pasopati, dan demikian juga dengan Jahurup yang memimpin penculikan yang gagal di rumah Jenderal Nasution. Setelah kejadian, Jahurup kemudian membubarkan pasukannya di Tambun Bekasi, sedang Dul Arip melarikan diri ke Brebes. Kedua orang itu kemudian menghilang dan tak pernah muncul di depan mahmilub.⁸³

Kapten Kuncoro, Kepala Staf Batalyon 454/Diponegoro yang kemudian ditahan satu sel dengan A. Karim DP. di blok isolasi Blok N Penjara Salemba (Jakarta), menceritakan bahwa ketika batalyonnya tiba di Jakarta menumpang serentetan kereta api panjang memuat prajurit, kendaraan, senjata ringan dan berat, serta peluru yang cukup untuk pertempuran 10 hari sebagaimana diinstruksikan, Soeharto datang mengucapkan “selamat datang” dan menginspeksi pasukan serta perlengkapan-perengkapannya. Kendaraan yang sudah tua diganti dengan yang baru, begitu juga senjata-senjatanya.

Kunjungan Latief kepada Soeharto

KOLONEL A. Latief, Komandan Brigade Infanteri 1 Kodam V Jaya, salah seorang pemimpin gerakan, dalam kesaksiannya mengatakan: “Dari sekian banyak kunjungan, seingat saya sekitar tanggal 18 September 1965 saya sekeluarga berkunjung seperti biasanya ke rumah keluarga Jenderal Soeharto/Pangkostrad di Jalan Agus Salim, Jakarta. Dalam kesempatan berdua, saya bertanya kepada Jenderal Soeharto: ‘Apakah benar ada Dewan Jenderal AD yang hendak melakukan kup merebut kekuasaan dari tangan Presiden RI Bung Karno?’ Jenderal Soeharto menjawab: ‘Ya, saya sudah tahu dan sudah mendengar dari bekas anak buah Mayor CTN/Vet. Soebagyo dari Yogyakarta.’ Saya bertanya lagi: ‘Siapa jenderal itu dan di mana?’ Jenderal Soeharto menjawab lagi: ‘Akan diselidiki dulu.’ Mendengar jawaban Jenderal Soeharto demikian, saya berkata kepada Jenderal Soeharto: ‘Kalau benar ada yang mau kup terhadap Presiden RI Bung Karno, saya siap menghadapinya!’”⁸⁴

“Seperti biasanya pada tanggal 28 September 1965 sekitar pukul 20,00 (malam hari), saya dan istri berkunjung ke rumah Jenderal Soeharto/Pangkostrad di Jalan Agus Salim Jakarta”. Dari dua kali kunjungan ini yang barangkali disatukan oleh Latief dalam pledoinya ketika ia dihadapkan ke mahmilub pada tahun 1978, yaitu:

⁷⁷ Dr. Asvi Warman Adam, *Berbagai Kisah G30S*, Kompas, 30 September 2002.

⁷⁸ Tempo, 1 Oktober 1988.

⁷⁹ <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/08/08/0001.html>

⁸⁰ <http://www.wirantaprawira.net>.

⁸¹ http://www.geocities.com/arsip_nasional/politik/politik12.htm.

⁸² Fakta Kebenaran Korban Tragedi 65 oleh LPRKROB, YPKP65, dan Pakorba. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

⁸³ Dr. Asvi Warman Adam, *Pengadilan Sejarah terhadap Soeharto*, <http://arus.kerjabudaya.org/htm/sejarah>

⁸⁴ Kolom Ibrahim Isa, *Pengakuan Kol. Latief*, 2003, www.kabarindonesia.com.

“... Dua hari sebelum peristiwa tanggal 1 Oktober 1965, saya beserta keluarga mendatangi ke rumah keluarga Bapak Jenderal Soeharto di rumah Jl. H. Agus Salim, yang waktu itu beliau masih menjabat sebagai Panglima Kostrad, di samping acara keluarga, saya juga bermaksud: ‘menanyakan dengan adanya info dewan jenderal, sekaligus melaporkan kepada beliau.’ Oleh beliau sendiri justru memberitahukan kepada saya, bahwa sehari sebelum saya datang ke rumah beliau, ada seorang bekas anak buahnya berasal dari Yogyakarta, bernama Soebagy, memberitahukan tentang adanya info Dewan Jenderal AD yang akan mengadakan *coup d’etat* terhadap kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno. Tanggapan beliau akan diadakan penyelidikan. Oleh karena itu tempat/ruangan tersebut banyak sekali tamu, maka pembicaraan dialihkan dalam soal-soal lain, antara lain soal rumah. Saya datang ke rumah Bapak Jenderal Soeharto bersama istri saya dan tamu istri saya berasal dari Solo, Ibu Kolonel Suyoto dan dalam perjamuan di ruangan beliau ada terdapat Ibu Tien Soeharto, orang tua suami-istri Ibu Tien, tamu Ibu Tien Soeharto berasal dari Solo bersama Bapak Dul dan Ibu Dul, juga termasuk putra bungsu laki-laki Bapak Jenderal Soeharto, yang kemudian harinya ketimpa sup panas.”⁸⁵

Dalam pengakuan tambahan yang diberikan oleh Kolonel Latief pada tahun 2003, dikatakannya: “Di saat itu sewaktu berdua dengan saya, Jenderal Soeharto menegaskan pada diri saya bahwa Jenderal Soeharto *menghendaki* (kata yang ditekankan kepada diri saya) Presiden Soekarno diganti, karena selalu membikin ribut. Saya jawab: ‘Tidak mungkin, karena Bung Karno didukung rakyat!’⁸⁶

Kolonel Latief memberi kesaksian: “Pada tanggal 29 September 1965, antara pukul 09.00—10.00 (siang hari) saya menemui Jenderal Soeharto yang di saat itu sedang menunggu putranya yang tersiram sup panas yang sedang dirawat di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, di situ saya melapor kepada Jenderal Soeharto, bahwa kami akan menculik para jenderal Angkatan Darat untuk dihadapkan kepada Pangti-ABRI Presiden Soekarno, dan yang akan dilaksanakan besok malam (sehari berikutnya) tanggal 30 September 1965; Menanggapi laporan saya itu, Jenderal Soeharto bertanya: ‘Siapa komandan operasinya?’ Saya jawab: ‘Letkol. Untung’ (yang saya mengetahui Letkol. Untung telah dikenal baik oleh Jenderal Soeharto). Seterusnya Jenderal Soeharto lalu berkomentar: ‘Ya sudah, saya mau istirahat.’ Selanjutnya kami berdua berpisah.”⁸⁷

Pada tanggal 30 September, jam 11.00 malam hari, Kolonel Latief mengunjungi Jenderal Soeharto di RSPAD Gatot Subroto untuk melaporkan situasi “gerakan” yang bakal dimulai empat jam lagi. Soeharto kala itu berada di rumah sakit, menemani istrinya menunggu anaknya yang sedang dirawat karena tergyur sup panas. Inilah kontak terakhir pelaksana gerakan⁸⁸, untuk melaporkan bahwa akan

segera dilaksanakan (4 jam kemudian), yang diterima Soeharto dengan penuh keseriusan.

Belakangan, Kolonel Latief mengakui dalam bukunya edisi ke-2 bahwa laporan yang sama disampaikan juga kepada Panglima Kodam V Jaya, Umar Wirahadikusuma.

Menurut seorang saksi, segera sesudah itu Soeharto segera berangkat ke Kostrad untuk konsolidasi pasukan dan keliling kota melihat-lihat keadaan, lewat di depan RRI, kantor Telkom, dan TVRI.⁸⁹

Soeharto menggalang persekutuan dengan Letkol. Untung, Kolonel Latief, dan Brigjen. Supardjo yang merupakan sebuah “trio” yang dipergunakannya untuk membahas rencana dewan jenderal yang diduga akan menggulingkan Bung Karno. Ini terbukti dari pengakuan Kol. Latief bahwa kedatangannya ke RSPAD malam tanggal 30 September 1965 untuk melapor kepada Soeharto itu adalah dengan persetujuan Untung dan Supardjo.

Dari kesaksian, kunjungan-kunjungan, dan pengakuan-pengakuan yang tersebut di atas, dapat dilihat berapa jauh dan berapa besarnya keterlibatan dan pengetahuan Jenderal Soeharto atas gerakan yang dipimpin oleh Letkol. Untung, Kolonel Latief, dan Brigjen. Supardjo, yang tidak lain merupakan orang-orangnya Jenderal Soeharto sendiri dalam Kodam VII Diponegoro dan Kostrad.

Gerakan 30 September

PAUL H. SALIM dari Calgary Kanada, dalam tulisannya mengatakan bahwa untuk melaksanakan gerakan penculikan yang dipimpin oleh Kolonel Latief yang beberapa jam lagi akan beraksi itu, dalam masa antara 14 Agustus dan 30 September 1965, telah dibentuk 3 pasukan, yang menggunakan nama sandi perwayangan:

1. Pasukan Pasopati, yang bermarkas di Senko I berada di bawah komando Letnan Doel Arief (dari Resimen Cakrabirawa di bawah Kolonel Untung) dengan beranggotakan prajurit dari Batalyon I Kol. Untung dan dilengkapi dengan dua peleton dari Brigadir Infanteri I Kodam V Jaya dan sebuah unit dari Pasukan Gerak Cepat.
2. Pasukan Priggodani, yang bermarkas di Senko II, di bawah komando Mayor Sujono, yang bertanggung jawab menjaga Lapangan Angkatan Udara Halim, mempunyai 2 anggota yang berpengaruh, Syam (alias Kamarusaman) dan Pono (alias Bono), yang “diduga” adalah dari PKI.
3. Pasukan Bimasakti, yang bermarkas di Senko I, berada di bawah Komando Kolonel Latief, terdiri dari 2 bagian; bagian pertama terdiri dari Divisi 454 Diponegoro dan Divisi 530 Brawijaya, ditambah dengan unit kecil; bagian

⁸⁵ Prof. Ben Anderson: *Tentang Pembunuhan Massal 65 dan Tentang Matinya Para Jenderal*

⁸⁶ Sayang sekali. Kolonel Latief tidak menaruh perhatian akan ucapan Soeharto yang “menghendaki” Presiden Soekarno diganti ini, sehingga Latief sebagai prajurit, sebagai bawahan tetap melanjutkan gerakan yang sudah mereka rencanakan.—Pen.

⁸⁷ Kolom Ibrahim Isa, *Pengakuan Kol. Latief*, 2003, www.kabarindonesia.com.

⁸⁸ Latief—Pen.

⁸⁹ Subandrio, Karim DP, <http://www.progind.net>, “Apa sebab....”

kedua yang terdiri dari “tim siaran radio” dikepalai oleh Kapten Suradi dari Bagian Intel dalam Brigade Kolonel Latief.⁹⁰

Menurut Asvi Warman Adam dalam satu tulisannya mengatakan, pasukan-pasukan yang dibentuk dengan nama sandi yang akan melaksanakan gerakannya itu, Pasukan Pasopati yang akan bertindak melakukan penculikan, dan menyerahkannya kepada Pasukan Pringgondani yang mengoordinir gerakan di daerah Lubang Buaya, dan Pasukan Bimasakti yang akan menguasai Radio Republik Indonesia.

Selama kekuasaannya, Soeharto dengan bangga telah membukukan biografinya yang bertemakan “*Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*”. Kalau tema ini kita terapkan dengan kejadian-kejadian di atas, maka kita akan bisa melihat dengan terang sekali jalur-jalur yang dengan jelas memperlihatkan di mana posisi Soeharto yang sesungguhnya.

Pikiran: Soeharto mengetahui, menyetujui, dan gembira dengan tindakan yang bakal diambil oleh perwira-perwira maju dalam Angkatan Darat, seperti Letkol. Untung, Kol. Latief, dan Brigjen. Supardjo. Ini terbukti tidak ada sepatah kata pun penolakan, bantahan, larangan, ataupun laporan kepada atasannya (Jenderal A.Yani ataupun Jenderal A.H. Nasution) atas rencana yang bakal dilakukan oleh para perwira itu, untuk menangkap dan menghadapkan kepada presiden, para anggota dewan jenderal yang diduga akan melakukan kup terhadap Bung Karno, yang semua mereka adalah musuh-musuh Soeharto, yang menjatuhkannya dari kedudukannya sebagai Panglima Kodam VII Diponegoro beberapa tahun sebelumnya, yaitu Mayjen. Suprpto, Mayjen. S. Parman, Mayjen. Haryono M.T., Brigjen. Sutoyo, dan Brigjen. Panjaitan, serta Jenderal A.H. Nasution, begitu juga Jenderal A. Yani yang pernah menempeleng Soeharto karena peristiwa penyelundupan yang dilakukannya sewaktu ia menjabat Pangdam Diponegoro. Dan dengan komplotan ini, berarti Soeharto akan bisa mengambil keuntungan karena dia adalah mayjen. dan Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, jabatan yang berada setingkat di bawah Pangad. Dan ada konsensus bahwa jika ada “apa-apa” terhadap Pangad, berhalangan misalnya, maka Pangkostrad akan menggantikannya. Soeharto memahami hal ini! Dan semua pikiran ini kemudian dapat diketahui dengan *follow-up* dari segala ucapan dan tindakan Soeharto yang sangat jelas sekali memperlihatkan kedudukannya dalam gerakan para perwira-perwira Angkatan Darat itu.

Di samping itu, Y. Pohan dalam tulisannya mengatakan: “Soeharto sesungguhnya sangat berkepentingan atas tindakan yang diambil oleh Letkol. Untung. Untung bersama kawan-kawannya bertindak terhadap sejumlah jenderal pada tanggal 30 September malam itu. Karena jenderal-jenderal itu adalah rival-rival Soeharto, khususnya Jenderal A. Yani, rival utama yang dianggap sebagai penghalang utama untuk memperoleh kedudukan tertinggi dalam AD. Bukanlah

rahasia umum lagi waktu itu di kalangan perwira-perwira AD bahwa Soeharto merasa sangat tidak puas dengan diangkatnya Jenderal A. Yani sebagai Pangad. Putusan Presiden Soekarno mengangkat Jenderal A. Yani tidak bisa diterima oleh Soeharto, karena sebagai perwira TNI ia merasa dirinya lebih senior. “Kekecewaan” Soeharto begitu hebatnya, sehingga ia mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari ABRI dan mohon berhenti kepada Presiden Soekarno. Permohonan itu tidak diterima dan ditolak oleh Presiden Soekarno, dan beliau mengatakan bahwa kelak Soeharto akan menerima gilirannya. Penolakan Presiden Soekarno itu demi kepentingan Soeharto sendiri, karena Soeharto tidak memiliki *skill* (kepandaian) lain kecuali sebagai seorang militer. Oleh karena itulah, dengan terbunuhnya Jenderal A. Yani, rasa dendam dan iri hati Soeharto dengan sendirinya telah terbalas, tanpa dia melakukan sendiri.”⁹¹

Ucapan: Ketika Letkol. Untung mendatangi Soeharto dan melaporkan rencananya untuk menangkap dan menghadapkan anggota dewan jenderal kepada Presiden Soekarno, Mayjen. Soeharto memberi dukungan dengan mengucapkan kata-kata kepada Letkol. Untung: “*Bagus kalau Kamu punya rencana begitu. Sikat saja, jangan ragu-ragu.*” Malahan, menurut penjelasan Untung, Soeharto menawarkan bantuan pasukan. “*Kalau perlu bantuan pasukan akan saya bantu. Dalam waktu secepatnya akan saya datangkan pasukan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.*”⁹²

Tindakan: Soeharto menerima kedatangan-kedatangan Kolonel Latief pada tanggal 18 September, 28 September, 29 September, dan 30 September 1965 malam hari di RSPAD, yang melaporkan, membicarakan, dan mematangkan rencana gerakan yang bakal diambil, tanpa ada pencegahan atau larangan dari Soeharto, adalah merupakan bukti persetujuan Soeharto. Bahkan untuk memenuhi ucapannya kepada Letkol. Untung yang tidak lain adalah “anak mantu angkat”-nya, maka selaku Panglima Kostrad, Soeharto, memanggil, memberi perintah dengan telegram No. T.220/9 pada tanggal 15 September 1965 dan mengulangnya lagi dengan radiogram No. T.239/9 tanggal 21 September 1965 kepada Yon 530 Brawijaya Jawa Timur dan Yon 454 Banteng Raider Diponegoro Jawa Tengah untuk datang ke Jakarta dengan kelengkapan tempur penuh. Ketika datang ke Kostrad, diterima oleh Soeharto dan juga dilakukan inspeksi pasukan pada tanggal 29 September 1965. Sedangkan Yon 328 Siliwangi datang dengan tanpa peluru. Tanggal 30 September 1965 jam 17.00, Yon 454 diperintahkan ke Lubang Buaya untuk bergabung dengan pasukan lainnya guna melakukan gerakan pada malam harinya.⁹³

Bagaimana dan di mana kedudukan Soeharto dalam aksi gerakan yang akan dilakukan oleh para perwira itu? Apakah Soeharto yang mayor jenderal akan tunduk dan menjadi “bawahan” dari seorang letnan kolonel, kolonel, atau brigadir

⁹⁰ <http://www.isnet.org/~djoko/G30S/salim01.html-copied 25/06/02>

⁹¹ Y. Pohan: “*Siapa Sesungguhnya yang Melakukan Kudeta terhadap Pemerintahan Presiden Soekarno?*” <http://www.munindo.brd.de/archiv/pohan.htm>.

⁹² <http://www.wirantaprawira.net>

⁹³ Fakta Kebenaran Korban Tragedi 65 oleh LPRKROB, YPKP65, dan Pakorba. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

jenderal seperti Untung, Latief, dan Supardjo? Tentu saja tidak bukan? Apalagi, Sumpah Prajurit/Sapta Marga TNI, Tentara Nasional Indonesia, mengharuskan bawahan untuk “patuh dan taat kepada pimpinan”,⁹⁴ dan “taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.”⁹⁵ Jadi, siapa atasan, siapa pimpinan?

Nah, siapa “atasan” militer dalam hal ini? Tentu mayor jenderal bukan? Dan yang mayor jenderal di antara mereka adalah Soeharto! Jadi, adalah mustahil Soeharto “tunduk pada perintah bawahan”, sebab menurut hukum, bawahanlah yang mesti tunduk kepada atasan. Dalam hal ini, Untung, Latief, dan Supardjo mesti tunduk pada “perintah atasan” yaitu Soeharto! Karena itu, tidak akan berlebihan kalau dijabarkan bahwa Soeharto adalah “otak”, pemikir dan sekaligus adalah “penggerak” atau “pemimpin” atau sekurang-kurangnya “menggunakan” dan mencari keuntungan dari gerakan yang akan dilakukan oleh Untung, Latief, dan Supardjo itu. Mereka hanyalah sekadar perwira bawahan, pelaksana, pion-pion yang digunakan. Jadi Untung—Latief—Supardjo ini semata-mata adalah alatnya Soeharto, sang atasan!

Menarik sekali apa yang diuraikan oleh Mr. Y. Pohan dalam tulisannya “*Siapa Sesungguhnya yang Melakukan Kudeta terhadap Pemerintahan Presiden Soekarno?*”, antara lain mengatakan bahwa: Gerakan 30 September dalam aksinya sesungguhnya juga menggunakan pasukan reguler Kostrad yaitu Batalyon 454 dan Batalyon 530 yang sejak tanggal 30 September pagi telah berada di Lapangan Merdeka, di muka Istana Merdeka. Tetapi selanjutnya pasukan-pasukan yang berada di bawah Kostrad juga, yaitu RPKAD, digunakan untuk menumpas Gerakan 30 September. Komandan Kostrad pada waktu itu adalah Soeharto sendiri.

Dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Soeharto mengetahui akan adanya gerakan yang dilakukan oleh perwira-perwira muda pada tanggal 30 September malam. Semula ia menempatkan diri sebagai orang yang berlayar di atas dua perahu; tetapi ia dengan sangat licik menutup dirinya kepada kedua belah pihak yang sedang bertentangan. Kalau tindakan yang dilakukan perwira-perwira muda itu berhasil menggagalkan kup dewan jenderal, ia buat sementara waktu akan turut dengan mereka, menggunakan keberhasilan mereka untuk meningkatkan dan memperkuat kedudukan dan kekuasaannya, sambil menunggu saat yang paling menguntungkan untuk merebut semua kekuasaan, memukul PKI dan menyingkirkan Soekarno. Kalau dewan jenderal berhasil dengan kupnya, karena dia sendiri adalah jenderal, maka dia ikut menang, kedudukan dan posisinya tentu juga akan meningkat, untuk selanjutnya menunggu saat mengambil alih kekuasaan ke tangannya dan kliknya sendiri.”

⁹⁴ *Sapta Marga*, ayat 5

⁹⁵ *Sumpah Prajurit*, ayat 3

SESUAI dengan yang mereka rencanakan, maka setelah Kolonel Latief menemui Soeharto di RSPAD, lewat tengah malam 30 September, pada subuh hari 1 Oktober 1965 terjadilah penculikan para jenderal untuk dihadapkan kepada presiden, yang diduga hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno, yaitu:

1. Jenderal Ahmad Yani, Menteri/Panglima Angkatan Darat
2. Mayjen. Suprpto, Asisten II Men/Pangad
3. Mayjen. Haryono M. T., Asisten III Men/Pangad
4. Mayjen. S. Parman, Asisten I Men/Pangad
5. Brigjen. D.I. Panjaitan, Asisten IV Men/Pangad
6. Brigjen. Sutoyo Siswomiharjo, Oditur Jenderal Angkatan Darat.

Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Bersenjata RI, berhasil meloloskan diri, namun ajudannya, Letnan P. Tendean, dan anak Jenderal A.H.Nasution, Ade Irma Suryani, menjadi korban.

Penangkapan dan penculikan anggota dewan jenderal, yang semula mereka rencanakan untuk “dihadapkan kepada presiden” berlangsung dan berakhir dengan pembunuhan. Para jenderal yang mereka culik dan bunuh, mereka bawa ke suatu tempat yang bernama Lubang Buaya di daerah Pondok Gede. “Lubang Buaya” Pondok Gede ini, menurut penuturan Laksamana Muda Udara Sri Mulyono Herlambang seperti yang diceritakan dalam Kesaksian Pangau Omar Dhani, adalah tanah milik Angkatan Darat. “Tanah tempat pembunuhan itu milik Kodam. Kebun Karet yang sekarang untuk monumen itu adalah wilayah Angkatan Darat sendiri.” Banyak orang tidak tahu bahwa ada dua tempat yang bernama Lubang Buaya. Lubang Buaya lokasi tempat pembunuhan para jenderal itu adalah Lubang Buaya di daerah Kebun Karet Pondok Gede, yang tidak termasuk wilayah Halim Perdanakusuma dan jaraknya jauh sekali (3½ km) dari Lapangan Udara Halim. Sementara, Lubang Buaya yang sehari-hari dikenal warga AURI di Halim adalah wilayah untuk ‘*dropping-zone*’-pendaratan terjun payung.⁹⁶ “Yang kami namakan Lubang Buaya itu adalah lapangan golf di Halim sekarang. Namun Kostrad menyebarkan opini sedemikian rupa hingga rakyat yang tidak tahu menganggap bahwa Lubang Buaya tempat pembunuhan jenderal itu berada dalam wilayah AURI, padahal yang sebenarnya adalah Lubang Buaya Pondok Gede, milik dan wilayah Kostrad,” demikian penjelasan Omar Dhani.⁹⁷

Hal ini bisa menjadi lebih jelas sekali, karena sebelumnya, ketika Pangkostrad menerima kedatangan pasukan Yon 454 Diponegoro dan Yon 530 Brawijaya serta pasukan 328 Siliwangi, pada tanggal 30 September 1965 jam 17.00, Yon 454 diperintahkan ke Lubang Buaya untuk bergabung dengan pasukan lainnya guna melakukan gerakan pada malam harinya.⁹⁸

⁹⁶ apakah ada sumur tua di tempat ‘terjun payung’ ini?—*Pen.*

⁹⁷ <http://www.wirantaprawira.net>

⁹⁸ Fakta Kebenaran Korban Tragedi 65 oleh LPRKROB, YPKP65, dan Pakorba. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

Apakah Soeharto mengirimkan pasukannya, Yon 454, ke “Lubang Buaya” di daerah AURI? Tentu tidak, bukan? Mustahil bagi Kostrad untuk memerintahkan pasukannya bergabung dengan pasukan lainnya ke suatu tempat yang bukan daerahnya, ke daerah yang berada di bawah kuasa angkatan lain? Jadi, hal ini dapat dilakukan, karena Lubang Buaya di Pondok Gede, di mana Yon 454 “bergabung dengan pasukan lainnya” adalah milik Kodam Jaya dan di bawah Kostrad. Dengan demikian Pangkostrad sewaktu-waktu tentu akan mudah melakukan kontrol, apa dan bagaimana yang terjadi dengan pasukan Kostrad Yon 454 yang ada di Lubang Buaya.

Dan Sersan Boengkoes (serdadu yang menembak mati Mayjen. M.T. Haryono) memberikan kesaksian kepada pers, bahwa saat ia datang ke “Lubang Buaya” membawa jenazah M.T. Haryono, ia sama sekali tidak melihat adanya kawan sipil di sana. Boengkoes menyaksikan, bagaimana tentara-tentara menembak jenderal-jenderal yang masih hidup. Ketiadaan kawan sipil di situ, menurut Omar Dhani, disebabkan karena latihan di Lubang Buaya Pondok Gede ditutup oleh Suyono pada tanggal 26 September 1965.⁹⁹ Jadi ini berarti bahwa *tidak ada* Gerwani atau Pemuda Rakyat yang latihan di situ pada saat itu, sebagaimana yang difitnahkan oleh kliknya Soeharto. Karena ketiadaan “kawan sipil” ini, membuka kesempatan dan memungkinkan buat “pasukan” Yon 454 Diponegoro/Kostrad datang dan berada di daerah Lubang Buaya itu.

Sementara itu, gerakan yang melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal itu, menguasai RRI, Radio Republik Indonesia, yang pada jam 7.20 pagi menyiarkan pengumuman, tentang adanya sebuah gerakan yang mereka namakan “Gerakan 30 September” di bawah Komandan Letkol. Untung yang juga merupakan Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa. Pengumuman yang sama kemudian diulangi lagi pada pukul 08.15 WIB. Dalam penjelasannya, Komando Gerakan 30 September mengatakan bahwa gerakan tersebut semata-mata merupakan gerakan dalam tubuh Angkatan Darat yang ditujukan kepada dewan jenderal, yang kini anggota-anggotanya telah ditangkap, sedangkan Presiden Soekarno berada dalam keadaan selamat.

Untuk lebih mempertegas keberadaannya, tepat pukul 14.00 WIB, Komando Gerakan 30 September kembali mengeluarkan sebuah pengumuman berupa Dekrit No.I tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia, yang disusul dengan dua buah keputusan penting: *Pertama*, susunan Dewan Revolusi Indonesia, di samping komandan, para wakil komandan Gerakan 30 September, juga tercantum nama-nama seperti Mayjen. Basuki Rahmat, Brigjen. Amir Mahmud, Dr. Subandrio, Dr.J.Leimena, Surachman (Golongan Nasionalis), Fatah Yasin (Golongan Agama), K.H. Sirajuddin Abbas (Golongan Agama), Tjugito (Golongan Komunis), dan Mayjen. Umar Wirahadikusuma (Pangdam V Jaya), dan lain-lain, yang semua berjumlah 45 orang. Dan pengumuman *kedua* adalah tentang penurunan dan

kenaikan pangkat. Tidak ada pangkat yang mengatasi pangkat Untung, yaitu letnan kolonel.¹⁰⁰

Menurut satu sumber, “naskah pengumuman tentang G30S disiapkan oleh Syam Kamaruzaman dan ditandatangani oleh Untung dan Brigjen. Supardjo yang menyatakan penyelamatan Presiden Soekarno dari kudeta dewan jenderal. Sedang, naskah pengumuman II dan naskah-naskah lain dibuat oleh Syam namun tidak ditandatangani oleh Untung meski namanya disebutkan, jadi tidak sah dan terbukti bahwa nama Letkol. Untung telah dicatut oleh Syam Kamaruzaman. Justru pengumuman ke-2 ini yang isinya bertentangan 180 derajat dengan pengumuman I, yaitu mendemisionerkan Kabinet Dwikora, kekuasaan berpindah kepada Dewan Revolusi, kenaikan pangkat bagi pelaksana gerakan. Isi pengumuman ini sungguh telah memojokkan G30S dan kemudian digunakan alasan untuk menghancurkannya.”¹⁰¹

Soeharto, yang menurut biografinya, dari RSPAD tanggal 30 September 65, pulang dengan menyetir jeepnya sendirian, yang dicurigai oleh Subandrio sebagai “tidur” di markas Kostrad untuk memonitor situasi, dan keliling kota melihat keadaan, kemudian pada pagi 1 Oktober 65, dengan dalih “dibangunkan” oleh tetangganya Mashuri yang menceritakan soal penculikan para jenderal, dan ‘Jenderal Yani serta beberapa jenderal telah terbunuh’, lalu Soeharto berangkat ke Kostrad dengan mengendarai mobil sendirian, melalui Kebon Sirih, Merdeka Selatan, tanpa pengawalan, karena dia sudah tahu benar siapa sasaran G30S, lagi pula markas Kostrad tidak “dijaga” oleh G30S karena tentunya telah ada kesepakatan.¹⁰²

Menurut Prof. Ben Anderson, “Operasi G30S dini hari 1 Oktober 1965 tidak akan terjadi, sekiranya Jenderal Soeharto mencegahnya atau melarangnya, misalnya dengan segera menangkap Kolonel Latief dan komplotannya! Juga operasi itu tidak akan terjadi sekiranya Jenderal Soeharto melaporkan kepada Jenderal A. Yani, atau kepada Nasution bahkan kepada Presiden Soekarno! Dengan demikian tidak akan terbunuh 6 jenderal itu. Peranan Jenderal Soeharto sangat menentukan dalam hal berlangsung atau tidak berlangsungnya operasi G30S di pagi 1 Oktober 1965 itu.

Satu-satunya kemungkinan adalah: Jenderal Soeharto berkepentingan terbunuhnya Jenderal Yani. Dengan terbunuhnya Jenderal Yani, otomatis Panglima Kostrad menggantikannya.”

Kontra Aksi

YOGA SUGAMA yang tahun 50-an pernah dikirim oleh Zulkifli Lubis mengikuti pendidikan intel pada MI-6 Inggris, pada pagi hari 1 Oktober 65 itu, mengaku lebih dahulu sampai di Kostrad. Sebagai Asisten I Kostrad/Intelijen, atas kejadian pagi

⁹⁹ *Tempo Interaktif*, No. 48/XXIX/29 Jan—4 Feb 2001

¹⁰⁰ Reiza D. Dienaputra: Penelusuran kembali Peristiwa G30S 1965, <http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-Oktober/000424.html>

¹⁰¹ Fakta Kebenaran Korban Tragedi 65 oleh LPRKROB, YPKP65, dan Pakorba. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

¹⁰² Subandrio, Karim DP, <http://www.progind.net>, “*Apa sebab...*”

subuh 1 Oktober itu, serta-merta Yoga Sugama menyatakan bahwa hal itu pasti perbuatan PKI. Ketika pengumuman RRI Jakarta pada jam 07.00 menyampaikan tentang Gerakan 30 September di bawah Letkol. Untung, maka Yoga pun memerintahkan, "Siapkan semua penjagaan, senjata, bongkar gudang. Ini PKI berontak." Yoga Sugama memperkuat "kesimpulannya" itu, karena Untung pernah menjadi anak buahnya dalam RTP II waktu bertugas menumpas PRRI di Sumatra Barat dan dianggap kiri. Begitu juga Ali Murtopo yang pernah training di CIA, dengan gembira menyokong ucapan Yoga Sugama itu.

Dalam kesempatan itu, Jenderal Soeharto dengan licik bertanya kepada Yoga Sugama, "Apa kira-kira Presiden Soekarno terlibat dalam gerakan ini?" Langsung dijawab oleh Yoga Sugama, "Ya". Hal ini sangat membesarkan hati Soeharto,¹⁰³ karena dengan demikian rencananya untuk menghancurkan PKI dan menggulingkan Presiden Soekarno, "mendapat dukungan dari bawah."¹⁰⁴

Dan pada jam 9.00 pagi itu Soeharto memberikan *briefing*¹⁰⁵ dan mengatakan bahwa "Saya banyak mengenal Untung sejak dulu. Dan Untung sejak 1945 merupakan anak didik tokoh PKI Pak Alimin."¹⁰⁶ Timbul pertanyaan: Mengapa Soeharto mengatakan hal ini sekarang, sesudah Untung melaksanakan gerakannya menculik para jenderal. Mengapa tidak sebelum hal itu terjadi Soeharto mempunyai pikiran dan berkata begitu? Bukankah beberapa waktu sebelumnya Untung menghadap Soeharto dan menceritakan rencananya, di mana Soeharto sangat menyetujui dan memberikan jawaban: "*Bagus kalau Kamu punya rencana begitu. Sikat saja, jangan ragu-ragu. Kalau perlu bantuan pasukan akan saya bantu. Dalam waktu secepatnya akan saya datangkan pasukan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.*"¹⁰⁷

Bahkan kemudian, untuk memenuhi ucapannya kepada Untung, Soeharto memanggil ke Jakarta Yon 454 Diponegoro dari Semarang, Yon 530 Brawijaya dari Madiun, dan Yon 328 dari Bandung. *Ya*, mengapa? Tidakkah ini menunjukkan bahwa semua sudah dipersiapkan dan direkayasa dengan sangat matang dan sempurna oleh Soeharto bersama kliknya yaitu Yoga Sugama dan Ali Murtopo yang berjasa kepada Soeharto sejak di TT-IV Jawa Tengah dulu dan merupakan satu "trio": Yoga—Ali—Soeharto? Bahkan tentang ucapan Soeharto, bahwa Untung menjadi anak didik Pak Alimin tahun 1945, juga Soeharto melakukan pengibulan, karena Alimin tahun 1945 tidak ada di Indonesia. Dia baru kembali ke Indonesia tahun 1946. Juga nampaknya, bukan satu kebetulan kalau Syam Kamaruzaman mempertahankan Untung sebagai Ketua G30S, karena nama Untung itu suatu ketika bisa digunakan sebagai senjata untuk menghancurkan PKI. Dan ini memang ternyata kebenarannya. Sedang Syam Kamaruzaman sendiri adalah orang

misterius. Secara formal, dia adalah orangnya Aidit (PKI), namun sesungguhnya dia adalah orangnya Soeharto, yang sejak tahun 1946 bersama Soeharto dalam PSI, semenjak dari grup Pathuk-Yogya. Dan Syam yang PSI ini ternyata bertugas untuk menghancurkan PKI dari dalam. Tidak heran kalau dia disebut sebagai "*double agent*"^{108 109}

"Pada tanggal 30 September 1965 malam, Aidit diculik oleh militer yang berseragam Cakrabirawa yang tidak dikenalnya dengan dalih dipanggil ke istana, namun ternyata dibawa ke Halim dan diisolasi di rumah Serda. Suwardi, hanya bisa berhubungan dengan Central Komando I di Penas melalui kurir yaitu Syam Kamaruzaman sendiri, sehingga praktis dia tidak bisa apa-apa, semuanya tergantung Syam, intel AD dan CIA yang berhasil menyusup ke tubuh PKI untuk menghancurkan PKI. Kemudian D.N. Aidit diambil dari tempat isolasinya di rumah Sersan Suwardi di Halim selanjutnya dipaksa oleh Syam untuk terbang ke Yogyakarta untuk akhirnya jatuh dalam kekuasaan agen intel AD tamatan sekolah intel AD di Bogor bernama Sriharto Harjomiguno yang telah menyusup dalam Biro Khusus PKI. Awal November 1965, Aidit ditangkap dan dieksekusi oleh Kolonel Yasir Hadibroto atas perintah Soeharto."¹¹⁰

Seperti telah tertulis dalam sejarah, pada 1 Oktober 1965, pasukan pengawal istana meluncurkan Soekarno ke Halim Perdanakusuma karena keadaan Jakarta yang mencurigakan. Sesuai dengan prosedur standar Cakrabirawa,¹¹¹ untuk menyelamatkan presiden adalah dengan membawanya ke Halim atau ke tempat kapal laut kepresidenan Baruna I-II berlabuh.

Soekarno yang berada di Halim dan mendengar gugurnya para perwira tinggi AD, tidak mau mendukung gerakan itu dan memerintahkan Brigjen. Supardjo menghentikan gerakannya, dan Supardjo mematuhinya. Selanjutnya, Presiden Soekarno, selaku Pangti ABRI, setelah mendengar meninggalnya Jenderal Ahmad Yani, telah mengeluarkan Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia yang menyatakan: "*Pimpinan Angkatan Darat RI sementara berada langsung dalam tangan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI. Bahwa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat ditugaskan untuk sementara Mayor Jenderal TNI Pranoto Reksosamudro Ass III/Pangad....*" Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI itu dikeluarkan pada 1 Oktober 1965, dan memerintahkan ajudan beliau Kol. KKO Bambang Widjanarko memanggil Pranoto Reksosamudro dan Umar Wirahadikusuma Pangdam V Jaya untuk menghadap.

Kalau kita mau sedikit menoleh ke belakang, nampaknya Peristiwa G30S ini ada kemiripannya dengan Peristiwa 3 Juli 1946 di Yogyakarta, teristimewa perihal ke-"tokoh"-an Soeharto. Bonnie Triyana dalam komentarnya atas buku Asvi Warman Adam yang berjudul *Soeharto, Sisi Gelap Sejarah Indonesia*, yang menyorot

¹⁰³ tentunya dia tersenyum—*Pen.*

¹⁰⁴ Ingat ucapannya kepada Kolonel Latief pada 28 September 65, yang mengatakan "Presiden Soekarno mesti diganti"—*Pen.*

¹⁰⁵ *Tempo*, 1 Oktober 1998.

¹⁰⁶ Alimin, Ketua PKI di Madiun.

¹⁰⁷ <http://www.wirantaprawira.net>

¹⁰⁸ atau juga barangkali "*triple agent*", agennya Aidit, agennya Soeharto, dan agennya CIA—*Pen.*

¹⁰⁹ <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/08/08/0001.html>

¹¹⁰ Fakta Kebenaran Korban Tragedi 65 oleh LPRKROB, YPKP65, dan Pakorba. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

¹¹¹ lihat memoar Komandan Cakrabirawa Mangil Martowidjojo, *Kesaksian tentang Bung Karno 1945—1967*.

Peristiwa 3 Juli 1946 mengatakan: "Begitu pelaku kudeta ditindak, maka dengan cepat dan lihai, Letkol. Soeharto segera turut serta menangkapi para pelaku lainnya, sehingga tampaknya seolah-olah dia sebagai pahlawan penyelamat."

Sedang Dr. Subandrio, mantan Wakil Perdana Menteri RI yang ditangkap dan ditahan oleh Soeharto tahun 1966, dalam tulisannya yang berjudul "*Kesaksianku tentang G30S*", mengenai peristiwa 3 Juli 1946 antara lain menyatakan: "Tetapi percobaan kudeta ini ternyata gagal. Para pelakunya ditangkap dan ditahan. Persis pada saat itu Soeharto berbalik arah. Ia yang semula berkomplot dengan penculik, berbalik menangkapi komplotan penculik. Ia berdalih, keberadaannya sebagai anggota komplotan penculik merupakan upaya Soeharto mengamankan penculik."

Tidakkah kedua peristiwa itu, Peristiwa 3 Juli 1946 dan Peristiwa G30S 1965, mempunyai kemiripan? Dalam G30S, Soeharto kelihatan jelas bersekutu dengan Untung, Latief, dan Supardjo untuk menenyapkan musuh-musuh lamanya semasa dalam Divisi Diponegoro, dengan dalih sebagai dewan jenderal, dan setelah berhasil, setelah musuh-musuhnya ditumpas sesuai dengan "sumpah Soeharto untuk menenyapkan mereka", maka dengan cepat dan tangkas Soeharto berbalik arah, menangkap dan menenyapkan orang-orang yang membantunya. Apakah Soeharto juga memberikan dalih seperti Peristiwa 3 Juli 1946, bahwa dalam Peristiwa G30S tahun 1965 ini, "keberadaannya sebagai anggota komplotan penculik merupakan upaya Soeharto mengamankan penculik?"

Kelicikan dan Pembangkangan Soeharto

MENGENAI G30S, menurut Tornquist (1984:230), "Soeharto menunggu sambil melihat apa yang terjadi, dan kemudian pada saatnya dipecundangnya baik Soekarno maupun Nasution."¹¹²

"Begitu melihat bahwa perkembangan Peristiwa 30 September memungkinkan dia dan kliknya untuk segera melakukan kup yang menurut pertimbangannya akan berhasil, maka Soeharto dengan menggunakan sekutu yang buat sementara dapat dikelabui, maka ia segera memukul Gerakan 30 September. Menggunakan tangan Gerakan 30 September untuk memukul dan menghancurkan rival-rivalnya sesama jenderal, dengan demikian memudahkan dia naik ke jenjang tertinggi kekuasaan, dan kemudian dia menggunakan terbunuhnya 6 jenderal sebagai dalih untuk menghancurkan Gerakan 30 September, memukul PKI dan menggulingkan Presiden Soekarno. Inilah tindakan pertama yang sangat licik dan keji dari Soeharto."¹¹³

Ketangkasan Mayjen. Soeharto meredam aksi G30S memancing kecurigaan Ratna Sari Dewi Soekarno, istri ketiga Bung Karno yang berasal dari Jepang. Katanya: "*Sepertinya Soeharto sudah tahu semua, seakan telah direncanakan.... Bagaimana*

dia bisa memecahkan masalah yang terjadi pada malam 30 September dan segera bertindak. Begitu cepat. Kalau belum tahu rencana G30S, ia tak mungkin bisa melakukannya."

Menurut Ratna Sari Dewi, "*Bapak tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi.... Tanggal 1 Oktober, Bapak masih ada di Jakarta dan saya bisa mengunjungi dia di Halim. Jadi hari itu Bapak tidak kirim surat. Ini surat tanggal 2 yang dikirim dari Istana Bogor. Isinya, dia baik-baik saja, sedang sibuk menghadiri pertemuan dengan para petinggi militer guna menyelesaikan konflik militer. Bapak membantah keterlibatan PKI dan hanya menyebut konflik dua kelompok militer."*

Dikatakannya juga bahwa beberapa hari sebelum 30 September, Presiden Soekarno memanggil Jenderal Yani. Bung Karno bertanya, "*Saya mendapat informasi tentang dewan jenderal yang mau bikin kudeta pada 5 Oktober. Apakah kau tahu?"* Jenderal Yani menjawab: "*Saya tahu. Mereka sudah ada di tangan saya. Bapak enggak usah khawatir."* Bung Karno percaya Yani. Tetapi nyatanya, Jenderal Yani menjadi salah satu korban penculikan dan pembunuhan oleh G30S.¹¹⁴

Sejalan dengan itu, Mike Head yang menulis dalam *Sydney Morning Herald*, 19 Juli 1999, mengatakan: "*The speed with which Soeharto moved on October 1 support the conclusion that, acting in concert with the US agencies, he engineered the whole operation to eliminate his rivals and provide a pretext for moving against Soekarno and the PKI."*

Segera setelah G30S diperintahkan untuk membubarkan diri oleh Bung Karno, dan Brigjen. Supardjo mematuhi, kekuasaan militer diambil alih oleh Soeharto. Semua koran dilarang terbit kecuali beberapa koran yang dikuasai oleh Soeharto, dkk. melalui Departemen Penerangan di bawah pimpinan Mayjen. Achmadi. Lalu disebarlah fitnah dan propaganda bohong serta keji lewat televisi, radio, koran-koran milik Angkatan Darat dan CSIS, sebuah lembaga penelitian milik Jenderal Ali Moertopo (yang sebelumnya bersama Jenderal Yoga Sugama dan Jenderal Benny Moerdani telah mendapatkan pendidikan intelejen dari CIA Amerika Serikat). Media massa sepenuhnya dikontrol oleh Angkatan Darat. Koran-koran militer seperti *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha* dipenuhi berita-berita sensasional bahwa para jenderal dan perwira korban pembunuhan G30S dibawa ke Lubang Buaya, dibuang ke sumur setelah sebelumnya disiksa dan disayat-sayat dalam pesta seksual "Harum Bunga" yang diadakan para anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat.¹¹⁵

Setelah meletusnya Peristiwa 30 September, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1965, sejumlah perwira tinggi AD berkumpul di Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat) melakukan kegiatan yang menentang Presiden/Panglima Tertinggi Soekarno. Kegiatan itu antara lain yaitu tidak diperbolehkannya Jenderal Umar Wirahadikusuma yang pada waktu itu sebagai Pangdam V Jaya/Jakarta Raya, yang juga merupakan salah seorang yang dipanggil Presiden Soekarno. Soeharto dengan

¹¹² <http://www.arus.kerjabudaya.org>

¹¹³ Y. Pohan: "*Siapa Sesungguhnya yang Melakukan Kudeta terhadap Pemerintahan Presiden Soekarno?"* <http://www.munindo.brd.de/archiv/pohan.htm>.

¹¹⁴ Surat Soekarno kepada Ratna Sari Dewi, <http://www.progind.net>

¹¹⁵ [Indymedia-jakarta] *Mass Grave in Indonesia*

galak dan angkuh mengatakan kepada kurir pribadi Presiden Soekarno dalam bahasa Belanda: “Jenderal Umar blijft hier!”¹¹⁶

“Sesuai dengan rencananya, maka Soeharto pada 1 Oktober 1965 itu, tanpa sepengetahuan apalagi seizin Soekarno, Presiden/Pangti ABRI, dalam *briefing* para jenderal di Markas Kostrad, mengangkat dirinya menjadi pimpinan TNI-AD, mengambil alih jabatan yang dipangku oleh Jenderal A. Yani, yang sudah barang tentu diketahuinya, telah terbunuh. Padahal jabatan panglima suatu angkatan di dalam ABRI adalah jabatan politik, yang merupakan hak prerogatif presiden untuk menentukannya.

Dalam kaitan ini, Soeharto dan kliknya menggunakan dalih bahwa tindakan itu “sesuai dengan SOP¹¹⁷ yang berlaku.” Dan Soeharto sendiri menyatakan: “... karena saya adalah satu-satunya panglima lapangan yang masih dalam keadaan dapat bertindak. Saya pernah ditugaskan sebagai Pejabat Kepala Staf Angkatan Darat pada waktu Jenderal Yani tidak ada di tempat.”

Karena perintah Presiden/Pangti ABRI yang menyatakan pimpinan Angkatan Darat sementara berada langsung dalam tangan Presiden/Pangti ABRI, maka SOP yang diandalkan Soeharto itu tidak mempunyai dasar dan kekuatan lagi. Dan ketika itu juga Presiden Soekarno telah mengirim Laksamana E. Martadinata ke markas Kostrad dengan perintah agar Jenderal Soeharto menghadap presiden. Tetapi, Jenderal Soeharto menolak perintah itu.¹¹⁸

Penolakan dan dikesampingkannya hak Presiden/Pangti ABRI tersebut, diakui Soeharto dalam 4 “petunjuk” kepada Presiden Soekarno yang harus disampaikan oleh Kol. KKO Bambang Widjanarko yang datang ke Kostrad pada 1 Oktober itu untuk memanggil Jenderal Pranoto Reksosamudro yang telah diangkat menjadi *caretaker* Menpangad oleh Presiden/Pangti, untuk datang ke Halim menemui Presiden Soekarno. Usaha Bambang Widjanarko untuk meminta Jenderal Pranoto Reksosamudro ke Halim itu dihalangi oleh Soeharto. Empat “petunjuk” Soeharto itu adalah:

1. Mayjen. Pranoto Reksosamudro dan Mayjen. Umar Wirahadikusuma tidak dibenarkan menghadap Presiden Soekarno “untuk tidak menambah korban.” (Ini berarti Soeharto menuduh Presiden Soekarno sebagai yang bertanggung jawab atas penculikan sejumlah jenderal. Ucapan Soeharto ini sesuai dengan jawaban Yoga Sugama pada pagi hari di Kostrad, tentang keterlibatan Presiden Soekarno, karena Ketua Dewan Revolusi adalah Kol. Untung, pasukan Pengawal Presiden)
2. Mayjen. Soeharto telah mengambil oper pimpinan TNI-AD berdasarkan perintah tetap Menpangad. (Ini berarti perintah tetap Menpangad,

maksudnya konsensus dalam TNI-AD, lebih tinggi dari hak prerogatif presiden dalam menentukan siapa yang harus memangku jabatan panglima suatu angkatan.)

3. Diharapkan agar perintah-perintah Presiden Soekarno selanjutnya disampaikan melalui Mayjen. TNI Soeharto. (Ini berarti Mayjen. TNI Soeharto yang mengatur Presiden Soekarno untuk berbuat ini atau itu, meskipun dibungkus dengan kata-kata “diharapkan”. Semestinya presiden yang mengatur Mayjen. Soeharto, bukan sebaliknya! Presiden adalah Panglima Tertinggi ABRI).
4. Mayjen. TNI Soeharto memberi petunjuk kepada Kolonel KKO Bambang Widjanarko agar berusaha membawa Presiden Soekarno keluar dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, karena pasukan Kostrad akan membersihkan pasukan-pasukan pendukung G30S yang berada di Halim, sebelum tengah malam 1 Oktober 1965. (Ini berarti Soeharto “memerintah” Soekarno meninggalkan Halim, karena Halim akan diserbu. Padahal sebelumnya, Presiden Soekarno telah memerintahkan Brigjen. Supardjo untuk menghentikan operasi militernya. Namun, situasi ini digunakan oleh Soeharto untuk melakukan “gerakannya pada satu Oktober” itu, yang kemudian disebut Gestok, singkatan dari Gerakan Satu Oktober, itu untuk “memukul” G30S. Jadi dua gerakan militer, yang satu G30S dan yang satu lagi Gestok.)

Dengan 4 petunjuk Mayjen. Soeharto kepada presiden melalui Kolonel Bambang Widjanarko itu, memperlihatkan bahwa Soeharto, dengan menggunakan G30S (Untung, Latief, Supardjo) dan Gestok (Soeharto, Yoga Sugama, dan Ali Murtopo), mulai 1 Oktober 1965, secara *de facto* menjadi penguasa di Indonesia, sebagai langkah awal untuk secara *de jure* menguasai Indonesia. Beginilah Soeharto melakukan dan memulai kudetanya, namun PKI yang dituduh melakukan pemberontakan!”¹¹⁹

Perlu menjadi perhatian, bahwa tindakan Soeharto melakukan pembangkangan terhadap perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI ini, adalah benar-benar melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI. Juga, “Gerakan Satu Oktober” Soeharto yang disebut oleh Bung Karno sebagai Gestok, dalam menghancurkan G30S memang bertindak sangat cepat dan tangkas sekali. Seolah-olah semua skenario sudah di dalam tangan dan tahu ke mana “pion” akan dilangkahkan dan kelanjutannya.

Dan kalau kita ikuti penjelasan Mr. Y. Pohan, bahwa sesungguhnya Soeharto berlayar di atas ‘dua perahu’, maka baik G30S maupun Gestok adalah berada dalam pimpinan Soeharto, atau dengan kata lain, Soeharto adalah otaknya G30S dan juga otaknya Gestok.

¹¹⁶ Y. Pohan: “Siapa Sesungguhnya yang Melakukan Kudeta terhadap Pemerintahan Presiden Soekarno?” <http://www.munindo.brd.de/archiv/pohan.htm>.

¹¹⁷ *Standard Operating Procedure—Pen.*

¹¹⁸ Y. Pohan: “Siapa Sesungguhnya yang Melakukan Kudeta terhadap Pemerintahan Presiden Soekarno?” <http://www.munindo.brd.de/archiv/pohan.htm>.

¹¹⁹ Sulangkang Suwalu, “G30S/Soeharto, bukan G30S/PKI”, <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/08/08/0001.html>

Dalam tulisannya yang berjudul “*Malam Jahanam*”, Harsutejo menjelaskan:

“Perlu ditambahkan bahwa rencana pengambilan [penculikan] para jenderal telah diketahui beberapa hari sebelumnya serta beberapa jam sebelum kejadian berdasarkan laporan Kolonel Abdul Latief, bekas anak buah Soeharto yang menjadi salah seorang penting dalam G30S. Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrad tidak mengambil langkah apa pun, justru hanya menunggu. Kenyataan ini membuat kecewa dan dipertanyakan salah seorang bekas tangan kanan Soeharto yang telah berjasa mengepung Istana Merdeka pada 11 Maret 1966, Letjen. (Purn.) Kemal Idris. Masih dapat ditambahkan lagi bahwa keenam jenderal yang dibunuh tersebut memiliki riwayat permusuhan internal dengan Soeharto karena Soeharto melakukan korupsi sebagai Pangdam Diponegoro.

Ada fakta sangat keras, dua batalyon AD dari Jateng dan Jatim yang didatangkan ke Jakarta dengan senjata lengkap dan peluru tajam yang kemudian mendukung pasukan G30S, semua itu atas perintah Panglima Kostrad Mayjen. Soeharto yang diinspeksinya pada 30 September 1965 jam 08.00. Tentunya dia pun mengetahui dengan tepat kekuatan dan kelemahan pasukan tersebut beserta jejaring intelijennya, di samping adanya tali-temali dengan intelijen Kostrad lewat tangan Kolonel Ali Murtopo. Tentu saja masalah ini tak pernah diselidiki, jika dilakukan hal itu dapat membuka kedok Soeharto menjadi telanjang di depan korps TNI AD ketika itu. Mungkin saja jejaring Soeharto yang telah melumpuhkan logistik kedua batalyon tersebut, hingga Yon 530 dan dua kompi Yon 434 melapor dan minta makan ke markas Kostrad pada sore hari 1 Oktober 1965. Kedua pasukan ini bersama pasukan Letkol. Untung dihadapkan pada pasukan RPKAD. Itulah sejumlah indikasi kuat keterlibatan Jenderal Soeharto dalam G30S, ia bermain di dua kubu yang dia hadapkan dengan mengorbankan 6 jenderal.”

Tanggal 1 Oktober 1965 malam hari, RRI (Radio Republik Indonesia) diserahkan kepada pasukan RPKAD (Kostrad) tanpa terjadi tembakan-menembak (damai) dan pasukan yang tadinya menguasai RRI (Yon 530) bergabung ke Kostrad kembali kepada induk kesatuan yang memerintahkannya.^{120 121}

RRI dikuasai oleh Kostrad dan pengumuman-pengumuman dari Soeharto berkumandang, sedang pengumuman dari presiden/pemerintah dihalangi, tidak pernah disiarkan. Mayjen. Umar Wirahadikusuma mengumumkan jam malam di Jakarta, mulai pukul 18.00 sampai 06.00 pagi dan menutup semua koran kecuali *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha*. Koran-koran lain tidak boleh terbit dan beredar selama seminggu. Waktu sepekan ini dimanfaatkan pers militer untuk mengampunahkan bahwa PKI ada di belakang G30S.

¹²⁰ Fakta Kebenaran Korban Tragedi 65 oleh LPRKROB, YPKP65, dan Pakorba. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

¹²¹ Batalyon 454 dan 530 yang disebut-sebut punya peranan penting dalam peristiwa G30S/PKI itu adalah pasukan-pasukan yang mendapat training khusus dari Pentagon. Hal ini diungkapkan secara detail oleh Peter Dale Scott dalam tulisannya yang berjudul “*The United States and the Overthrow of Soekarno 1965—1967*”. Bahkan Brigjen. Supardjo dan Kolonel Suherman belum lama pulang dari pendidikan militer di Amerika Serikat.

Kalangan militer di bawah koordinasi Pangkostrad Mayjen. Soeharto melakukan gerakan penumpasan sambil memperkenalkan “teorinya” tentang keberadaan PKI sebagai dalang G30S. Isu keterlibatan PKI sebagai aktor utama G30S yang dikembangkan Soeharto ternyata mampu menumbuhkan simpati dan dukungan kuat masyarakat terhadap gerakan penumpasan yang dipimpinnya. Para pengikut Soeharto membuat rekayasa tentang keberadaan anggota-anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat di Lubang Buaya (karena tempat itu adalah tempat latihan Sukarelawan Ganyang Malaysia, namun ditutup sejak 26 September 1965), dan menebarkan isu dan fitnah bahwa anggota-anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat menyiksa para jenderal sebelum dibunuh di Lubang Buaya.

Pada tanggal 2 Oktober 1965, Soeharto didampingi oleh Yoga Sugama dan anggota kelompok bayangannya mendatangi Bung Karno di Istana Bogor meminta agar Bung Karno memberikan kuasa kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan. Surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa pertama yang mengawali kemenangan Soeharto dan cikal bakal terbentuknya Kopkamtib (kemudian berubah menjadi Bakorstanas), yang merupakan alat palu godam rezim Soeharto untuk melibas siapa saja yang menentang kekuasaan rezim orde baru Soeharto.¹²²

Fitnah dan Rekayasa

“SEJAK 4 Oktober 1965, ketika dilakukan penggalian jenazah para jenderal di Lubang Buaya, maka disiapkanlah skenario yang telah digodok dalam badan intelijen militer untuk melakukan propaganda hitam terhadap PKI dimulai dengan pidato fitnah Jenderal Soeharto tentang penyiksaan kejam dan biadab, Lubang Buaya sebagai wilayah AURI. Hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan dongeng horor fitnah keji tentang perempuan Gerwani yang menari telanjang sambil menyilet kemaluan para jenderal dan mencungkil matanya. Ini semua bertentangan dengan hasil visum dokter yang dilakukan atas perintah Jenderal Soeharto sendiri yang diserahkan kepadanya pada 5 Oktober 1965. Kampanye hitam terhadap PKI terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan oleh dua koran AD, *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha*, RRI dan TVRI yang juga telah dikuasai AD, sedang koran-koran lain diberangus. Ketika sejumlah koran lain diperkenankan terbit, semuanya harus mengikuti irama dan pokok arahan AD. Seperti disebutkan dalam studi Dr. Saskia Eleonora Wieringa, mungkin tak ada rekayasa lebih berhasil untuk menanamkan kebencian masyarakat daripada pencitraan Gerwani (gerakan perempuan kiri) yang dimanipulasi sebagai “pelacur bejat moral”. Kampanye ini benar-benar efektif dengan memasuki dimensi moral religiusitas manusia Jawa, khususnya kaum adat dan agama.¹²³

Mengenai penggalian jenazah para jenderal di Lubang Buaya ini, rasanya kita bisa mengajukan pertanyaan, mengapa baru dilakukan pada tanggal 4 Oktober,

¹²² Fakta Kebenaran Korban Tragedi 65 oleh LPRKROB, YPKP65, dan Pakorba. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

¹²³ Harsutejo: *Jejak Hitam Soeharto, Sejarah Gelap G30S dan Sekitar G30S* <http://kontak.club.fr/index.htm>

yang berarti 3 hari setelah para jenderal diculik dan dibunuh dan jenazah dimasukkan ke dalam sumur berair yang tentunya selama 3 hari itu jasadnya tentu telah membusuk. Apakah ini juga merupakan suatu kesengajaan, rekayasa dan taktik Soeharto, agar pada saat penggalian (pengangkatan jenazah), foto-foto buram yang diambil di Lubang Buaya bisa ditampilkan untuk membakar kemarahan masyarakat? Fitnah itu dengan sengaja disebar karena Soeharto, dkk. sebagai pemegang skenario, sudah tahu yang sebenarnya, dan lebih daripada itu Soeharto pasti tahu bahwa para jenderal dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur Lubang Buaya, karena pada 30 September 65 jam 17.00 justru Soeharto yang mengirim pasukan Kostrad Yon 454 Diponegoro, pasukan Soeharto, ke Lubang Buaya! Jadi tidak ada alasan buat timbulnya pertanyaan seperti misalnya “di mana para jenderal yang diculik” dan sebagainya, karena sudah pasti bahwa Soeharto tentu telah mengantongi laporan bawahannya! Semua seperti telah diatur!

Ir. Stanley yang memberi sambutan dalam seminar sehari “Tragedi Nasional 1965” yang diadakan Masyarakat Sejarawan Indonesia pada 8 September 1999 di Gedung Dewan Riset Nasional, Kompleks Puspitex, Serpong, antara lain mengutip segala fitnah keji yang ditulis dan diberitakan oleh surat kabar *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha*:

“Melihat mangsanya datang, anggota PR dan Gerwani yang sudah diindoktrinasi dengan kebencian dan kedengkian berteriak-teriak histeris. Sambil menari-nari, mengelilingi para pahlawan revolusi itu, anggota-anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat, BTI, SOBSI, dan lain-lain menyanyikan lagu-lagu revolusioner ciptaan komponis-komponis Lekra, antara lain lagu-lagu ‘Ganyang Kabir’, ‘Ganyang 3 Setan Kota’ ciptaan Soebroto K. Atmodjo, dan lagu pop yang sedang menjadi top hits pada waktu itu, ‘Genjer-Genjer’.

Untuk memanaskan suasana, banyak di antara anggota PR dan Gerwani itu bahkan menari ... tanpa busana. Itulah apa yang mereka namakan ‘pesta harum bunga’. Pesta harum bunga seperti ini memang sudah beberapa malam mereka lakukan dalam rangka mengakhiri masa latihan. Pada saat-saat itu batas-batas moral dianggap tidak ada lagi. Hubungan seks secara liar di antara para anggota PR dan Gerwani memang sengaja dibiarkan oleh pimpinan latihan kemiliteran, untuk memberi semangat. Seorang dokter bersama Dokter Ceropeloka telah memberikan suntikan-suntikan yang diduga berisi obat perangsang.

Anggota-anggota PR, Gerwani, dan anggota-anggota ormas PKI lainnya yang sudah kemasukan setan itu kemudian diperintahkan untuk menyiksa para tawanan tersebut, sebelum diselesaikan. Nyonya Jamilah yang baru berumur 17 tahun itu mengisahkan bahwa mula-mula sukarelawan-sukarelawan memukuli para korban yang berteriak-teriak kesakitan. Kemudian disusul sukarelawati-sukarelawati Gerwani dan PR beraksi. Mereka yang sudah kehilangan sifat-sifat kemanusiaannya itu menusuk-nusukkan pisau ke tubuh para korban. Bahkan para korban yang sudah tak berpakaian itu dipotong kemaluannya dengan silet dan dimasukkan ke mulut. Ada 100 orang lebih sukarelawati yang melakukan penyiksaan di luar batas kemanusiaan itu sebelum para korban diseret ke tepi sebuah sumur tua.”

Membaca berita *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha* itu, sungguh, tak ada yang bisa membayangkan bahwa ada manusia yang bisa berbuat kejam di luar batas kemanusiaan seperti itu. Banyak di antara mereka yang membayangkan para perempuan pelaku kekejaman itu bukan manusia. Mereka lebih mirip sebagai setan perempuan yang jahat, kuntilanak (sundel bolong). Apalagi belakangan, ditambah dengan pemberitaan tentang meninggalnya Ade Irma Suryani Nasution akibat berondongan peluru para pembunuh pimpinan Angkatan Darat, Jenderal A.H.Nasution, yang menyasar. Sungguh, rekayasa yang sangat membakar emosi rakyat.

Kutipan di atas “konon” dimuat oleh berbagai media massa untuk mengutuk G30S, dan dikutip lagi oleh berbagai surat kabar, dengan sejumlah tambahan seperti mata dicungkil dan lain-lain, yang betul-betul membuat pembaca mual, marah, sekaligus bergidik.

Di kemudian hari, kutipan ini juga menjadi terkenal karena banyak penulis mengutip ulang, termasuk penggambaran adegan dalam film “Pengkhianatan G30S/PKI” yang disutradarai Arifin C. Noer.^{124 125}

Menanggapi “berita” tersebut, Mayjen. Soeharto menambah dan membumbui dengan mengatakan, “Jelaslah bagi kita yang menyaksikan dengan mata kepala, betapa kejamnya aniaya yang telah dilakukan oleh petualang-petualang biadab dari apa yang dinamakan Gerakan 30 September.”

Untuk lebih memberi penekanan “betapa kejam dan biadabnya” G30S seperti yang diucapkan Soeharto itu, maka Kolonel Haji Sugandi, Pemimpin Harian *Angkatan Bersenjata*, tanpa mengikuti hukum dan peraturan bahasa Indonesia, memutar balik sebutan *Gerakan Tiga Puluh September*, menjadi *Gerakan September Tiga Puluh*, yang disingkatnya menjadi *Gestapu*. Ini dimaksudkan untuk lebih membakar kebencian rakyat terhadap G30S yang disamakannya dengan *Gestapo*, Polisi Rahasia Jerman, yang menjadi pembunuh kejam waktu Perang Dunia II. Di setiap kesempatan dan acara, nama G30S yang diembel-embeli dengan PKI di belakangnya, mereka sebut dan populerkan sebagai *Gestapu*—PKI.

Dr. Asvi Warman Adam mengatakan, “Kita tahu, gerakan ini menyebut diri sebagai *Gerakan Tiga Puluh September*. Karena itu, lebih objektif bila peristiwa itu disebut sebagai G30S, bukan *Gestapu* dan bukan pula *Gestok*.”¹²⁶

Akan tetapi, dalam pidato *Pelengkap Nawaksara* di Istana Merdeka pada 10 Januari 1967, Presiden Soekarno dengan jelas menyebut pembunuhan para jenderal itu dengan *Gestok* lalu dilanjutkan dengan bertemunya tiga sebab: (a) keblingernya pimpinan PKI, (b) kelihaihan subversi nekolim, (c) adanya oknum “yang tidak benar”.

¹²⁴ Secara detail, kutipan ini bisa dibaca kembali pada Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai*, Penerbit Antar Kota, Jakarta, September 1989, hal.219 dan 228—edisi buku saku.

¹²⁵ www.geocities.com/edica/hy/marxist/pki/1965/stanley.htm

¹²⁶ *Kompas*, Senin, 30 September 2002.

Soekarno mengakui, ada oknum PKI yang bersalah. Tapi dia ingin menyelidiki dulu secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan tentang tragedi itu. Ia mengibaratkan, kalau ada tikus yang mencuri kue di rumah, jangan sampai rumahnya dibakar. Tentang nekolim, belakangan terjabarkan lewat teori keterlibatan CIA. Sedang oknum tidak bertanggung jawab lebih dekat dengan teori konflik internal Angkatan Darat.¹²⁷

Dalam dokumen yang disebut “*Dokumen Slipi*” yang berisi hasil pemeriksaan Bung Karno sebagai saksi ahli dalam perkara Subandrio dan merupakan kesaksian terakhir Bung Karno (1968), “...1 Oktober 1965 bagi saya adalah malapetaka, karena gerakan yang melawan G30S pada 1 Oktober 1965 itu telah melakukan pembangkangan terhadap diri saya, sejak saat itu gerakan yang melawan G30S tidak tunduk pada perintah saya, maka saya berpendapat G30S lawannya Gestok...”¹²⁸

Autopsi Jenazah Para Jenderal

FOTO-FOTO buram yang diambil di Lubang Buaya ditampilkan untuk membakar kemarahan masyarakat. Fitnah itu dengan sengaja disebarkan karena Soeharto, dkk. sudah tahu bahwa itu sama sekali tidak benar, namun untuk lebih mendukung segala ucapan dan kampanyenya, Soeharto memerintahkan para dokter militer untuk melakukan autopsi atas jenazah para jenderal. Barangkali, pengangkatan jenazah dari dalam sumur berair setelah lewat masa 3 hari, dimaksudkan agar wajah-wajah dan tubuh yang membusuk yang difoto akan dapat membakar kemarahan rakyat, dan kalau diautopsi, kemungkinan bisa ditemukan “bukti-bukti” menurut apa yang diinginkan Soeharto.

Sementara itu, tim kesehatan dokter Angkatan Darat yang diperintah oleh Soeharto melakukan autopsi jenazah para jenderal, bekerja tanpa mengingat lelah.

Hasil autopsi, yang menyatakan *tidak ada pencungkilan mata dan tidak ada pemotongan alat kelamin*, diserahkan kepada Soeharto. Namun, karena hasil autopsi ini tidak sesuai dengan keinginan Soeharto serta segala cerita bohong yang telah diberitakan koran-koran *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha*, maka Soeharto tidak mengumumkan hasil autopsi itu.

Namun, Presiden Soekarno, dalam kesempatan pidatonya tanggal 12 Oktober 1965 mengatakan, bahwa *tidak ada* kemaluan yang dipotong dan *tidak ada* mata yang dicungkil. Alat pencungkil mata yang dihebohkan itu, adalah alat penakik getah yang digunakan oleh setiap pekerja perkebunan karet, dan bukannya pencungkil mata! Nampak sekali kebohongan, rekayasa dan pembodohan rakyat yang dilakukan oleh klik Soeharto.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hal ini, dengan ini kita kutip tulisan Prof. Ben Anderson, yang berjudul “*Tentang Matinya Para Jenderal*”, sbb.:

¹²⁷ Asvi Warman Adam, *Arus Balik Suara Yang Hilang*, <http://www.mesias.8k.com/>

¹²⁸ Harsutejo: *Jejak Hitam Soeharto, Sejarah Gelap G30S dan Sekitar G30S*, <http://kontak.club.fr/index.htm>

“Orang sering menjadi terkesima ketika membongkar-bongkar gudang yang bertimbun dan berdebu. Sementara iseng membolak-balik ratusan halaman fotokopi rekaman stenografis dari sidang pengadilan Letkol. AURI Atmodjo di depan mahmilub, saya temukan dokumen-dokumen yang saya terjemahkan di bawah ini, yang aslinya merupakan lampiran-lampiran pada berkas sidang pengadilan itu. Dokumen itu adalah laporan yang disusun oleh sebuah tim terdiri dari lima orang ahli kedokteran forensik, yang telah memeriksa mayat-mayat enam orang jenderal (Yani, Suprpto, Parman, Sutoyo, Haryono, dan Panjaitan), dan seorang letnan muda (Tendean) yang terbunuh pada pagi-pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Laporan mereka yang lugas merupakan lukisan paling objektif dan tepat yang pernah kita miliki, tentang bagaimana tujuh orang itu mati. Mengingat kontroversi yang telah lama tentang masalah ini, dan berita-berita yang disajikan oleh surat kabar dan majalah umum berlain-lainan, maka saya memandang perlu menerjemahkan dokumen-dokumen tersebut sepenuhnya untuk kepentingan kalangan ilmiah.

Bagian atas setiap *visum et repertum* (autopsi) menunjukkan bahwa tim tersebut bekerja pada hari Senin tanggal 4 Oktober, atas perintah Mayjen. Soeharto selaku Komandan Kostrad ketika itu, kepada kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). Tim terdiri dari dua orang dokter tentara (termasuk Brigjen. Roebiono Kertopati yang terkenal itu), dan tiga orang sipil ahli kedokteran forensik pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di antara ketiga orang ini yang paling senior ialah Dr. Sutomo Tjokronegoro, ketika itu ahli paling terkemuka dalam kedokteran forensik di Indonesia. Tim bekerja sama selama 8 jam, yaitu dari pukul 4.30 sore tanggal 4 Oktober sampai 12.30 lewat tengah malam tanggal 5 Oktober, bertempat di Kamar Bedah RSPAD. Jelas mereka harus bekerja cepat, oleh karena dari berita-berita pers kita ketahui mayat-mayat itu baru bisa diangkat dari lubang sumur di Lubang Buaya (di mana para pembunuh telah melemparkannya) menjelang siang tanggal 4 Oktober, lebih 75 jam setelah pembunuhan terjadi. Dalam jangka waktu itu, dalam iklim tropis bisa diperkirakan mayat sudah sangat membusuk. Dan sesudah hari siang, Selasa tanggal 5 Oktober, mayat-mayat itu dimakamkan dengan upacara militer di Taman Pahlawan Kalibata. Satu hal yang pasti patut diperhatikan. Mengingat bahwa autopsi itu dilakukan atas perintah langsung Mayjen. Soeharto, maka kiranya tidak akan mungkin jika laporan para dokter tersebut tidak segera disampaikan kepadanya, segera setelah tugas dilaksanakan.

Tujuh buah laporan itu masing-masing disusun menurut bentuk yang sama:

1. pernyataan adanya perintah Mayjen. Soeharto kepada lima orang ahli itu;
2. identifikasi atas mayat;
3. deskripsi tubuh, termasuk pakaian atau hiasan-hiasan badan;
4. uraian rinci tentang luka-luka;
5. kesimpulan tentang waktu dan penyebab kematian;
6. pernyataan di bawah sumpah dari kelima ahli itu,

7. bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sepenuh-penuhnya dan sebagaimana mestinya.

Karena gambaran umum tentang matinya tujuh tokoh itu, kita, sebagaimana halnya masyarakat pembaca di Indonesia tahun 1965, harus banyak bersandar pada apa yang diberitakan oleh dua surat kabar tentara, yaitu *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha*, serta dinas informasi ABRI yang memasok surat kabar tersebut. Walaupun ada beberapa surat kabar non-militer yang tetap terbit, namun pers kiri telah ditindas pada petang hari tanggal 1 Oktober, sedangkan radio dan televisi yang dikuasai negara, dan telah ada di tangan militer sepenuhnya menjelang 1 Oktober, tidak mengudara. Karena itu perlu diperbandingkan berita-berita yang disajikan oleh surat kabar tentara tersebut, dengan ini laporan dari para ahli kedokteran yang ditunjuk militer yang selesai tersusun pada hari Selasa tanggal 5 Oktober, yang bisa kita simpulkan dari dokumen-dokumen lampiran itu.

Mengingat bahwasanya dua surat kabar tersebut adalah harian-harian pagi, sehingga edisi 5 Oktober mereka mungkin sudah “ditidurkan”, sementara para dokter masih menyelesaikan pekerjaannya, maka tidak aneh bila pemberitaan mereka tentang hari itu barangkali tergesa-gesa, tanpa memanfaatkan informasi yang panjang lebar itu. *Angkatan Bersenjata* memuat beberapa buah foto kabur mayat-mayat yang telah membusuk, dan menggambarkan pembunuhan tersebut sebagai “perbuatan biadab berupa penganiayaan yang dilakukan di luar batas perikemanusiaan.” *Berita Yudha* yang selalu lebih garang, mengatakan bahwa mayat-mayat itu penuh dengan bekas-bekas penyiksaan. “Bekas-bekas luka di sekujur tubuh akibat siksaan sebelum ditembak masih membalut tubuh-tubuh pahlawan kita.” Mayjen. Soeharto sendiri dikutip menyatakan, “jelaslah bagi kita yang menyaksikan dengan mata kepala (jenazah-jenazah itu), betapa kejamnya aniaya yang telah dilakukan oleh petualang-petualang biadab dari apa yang dinamakan ‘Gerakan 30 September’.” Surat kabar itu meneruskan dengan menggambarkan saat-saat terakhir kehidupan Jenderal Yani, mengatakan bahwa sesudah ditembak roboh di rumahnya, ia dilemparkan hidup-hidup ke dalam sebuah truk dan terus-menerus disiksa sampai “penyiksaan terakhirnya di Lubang Buaya.” Bukti-bukti tentang penyiksaan ini ditunjukkan dengan adanya luka-luka pada leher dan mukanya, dan kenyataan bahwa “anggota-anggota tubuhnya tidak sempurna lagi”. Apa yang dimaksud oleh kata-kata yang agak kabur itu menjadi lebih jelas pada hari-hari berikut. Pada hari Kamis tanggal 7 Oktober, *Angkatan Bersenjata* menyatakan bahwa “matanya (Yani) dicungkil”. Berita ini dikuatkan dua hari kemudian oleh *Berita Yudha* dengan menambahkan bahwa muka mayat itu ditemukan terbungkus dalam sehelai kain hitam.

Pada tanggal 7 Oktober itu juga *Angkatan Bersenjata* melukiskan lebih lanjut, tentang bagaimana Jenderal Haryono dan Jenderal Panjaitan tewas oleh berondongan tembakan senjata api di rumah masing-masing, lalu mayat mereka dilempar ke dalam sebuah truk yang menghilang dalam kegelapan malam dengan

“deru mesinnya yang seperti harimau haus darah”. Sementara itu *Berita Yudha* memberitakan tentang bekas-bekas siksaan pada kedua tangan Haryono.

Pada tanggal 9 Oktober, *Berita Yudha* memberitakan, bahwa meskipun muka dan kepala Jenderal Suprpto telah dihancurkan oleh “peneror-peneror biadab”, namun ciri-cirinya masih bisa dikenali. Pada Letnan Tendean terdapat luka-luka pisau pada dada kiri dan perut, lehernya digorok, dan kedua bola matanya “dicungkil”. Hari ini pada hari berikutnya mengutip saksi mata pengangkat mayat bulan Oktober itu, yang mengatakan bahwa di antara korban beberapa ada yang matanya keluar, dan beberapa lainnya “ada yang dipotong kelaminnya, dan banyak hal-hal lain yang sama sekali mengerikan dan di luar perikemanusiaan.” Pada tanggal 11 Oktober, *Angkatan Bersenjata* menulis panjang lebar tentang matinya Tendean, dengan menyatakan bahwa ia mengalami siksaan luar biasa di Lubang Buaya, sesudah diserahkan kepada para anggota Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). Ia dijadikan benda “permainan jahat” perempuan-perempuan ini, digunakan sebagai “bulan-bulanan sasaran latihan menembak sukwati Gerwani.”

Begitu surat kabar tentara memulai, maka yang lain pun segera serta-merta mengikuti. Misalnya *Api Pantjasila*, organ partai IPKI yang bernaung di bawah militer, pada tanggal 20 Oktober memberitakan, bahwa “alat pencungkil” yang digunakan untuk jenderal-jenderal itu telah ditemukan oleh pemuda-pemuda anti komunis, ketika mereka menyerbu gedung-gedung Partai Komunis, di desa Harupanggung di luar kota Garut. Walaupun tanpa diterangkan, mengapa partai tersebut memandang desa itu cocok untuk menyimpannya. Pada tanggal 25 Oktober, surat kabar ini juga memuat pengakuan seseorang bernama Djamin, anggota organisasi pemuda Partai Komunis, Pemuda Rakyat, yang mengatakan telah menyaksikan bagaimana Jenderal Suprpto telah disiksa “di luar batas kesusilaan” oleh anggota-anggota Gerwani. Pengakuan-pengakuan serupa itu dimuat berturut-turut, dan memuncak pada cerita menarik tentang Nyonya Djamilah, disiarkan pada tanggal 6 Oktober oleh Dinas Penerangan ABRI kepada seluruh kalangan pers. Nyonya Djamilah diceritakan sebagai hamil tiga bulan, pimpinan Gerwani dari Pacitan berumur lima belas tahun, mengaku bahwa ia dan kawan-kawannya di Lubang Buaya telah menerima pembagian pisau kecil serta silet dari anggota-anggota pasukan Gerakan 30 September. Lalu mereka, yang seluruhnya berjumlah seratus orang itu, mengikuti perintah orang-orang itu pula, mulai memotong dan menyayat-nyayat kemaluan jenderal-jenderal yang telah mereka tangkap itu.¹²⁹ Malahan tidak berhenti di situ saja. *Antara* yang telah dikuasai militer itu, pada tanggal 30 November melukiskan bagaimana orang-orang Gerwani itu dengan mudahnya telah menyerahkan tubuh mereka kepada para personil AURI yang ikut serta dalam Gerakan 30 September. Sementara itu pada tanggal 13 Desember, *Angkatan Bersenjata* melukiskan mereka bertelanjang menarikan “Tarian Bunga Harum” di bawah pimpinan Ketua Partai Komunis Dipa

¹²⁹ *Api Pantjasila*, 6 November 1965.

Nusantara Aidit, sebelum terjun dalam pesta pora massal bersama para anggota Pemuda Rakyat.

Di dalam cerita-cerita yang memenuhi surat kabar selama bulan-bulan Oktober, November, dan Desember ini—sementara itu pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang yang berhubungan dengan Partai Komunis terus berjalan—terkandung dua hal yang sangat menarik diperhatikan. *Pertama*, ditiup-tiupkan bahwa tujuh korban itu mengalami siksaan yang mengerikan—khususnya dicungkil mata dan dipotong kemaluan mereka; *kedua*, ditonjolkan bahwa pelaku-pelaku kejahatan adalah orang-orang sipil dari organisasi yang berafiliasi dengan komunis.

Apakah yang diberitakan kepada kita oleh laporan para ahli forensik pada tanggal 5 Oktober itu? *Pertama*, dan terutama, bahwa tidak ada satu biji mata pun dari para korban yang telah dicungkil, dan bahwa semua kemaluan mereka pun masih utuh. Kepada kita bahkan diberitakan bahwa empat berkhitan dan tiga tidak berkhitan.¹³⁰

Kondisi Jenazah

KECUALI itu, barangkali perlu korban-korban itu dibagi ke dalam dua golongan: mereka yang dengan sebagian besar bukti non-forensik menunjukkan telah dibunuh dengan ditembak selagi masih di rumah oleh para penculik mereka, yaitu Jenderal Yani, Jenderal Panjaitan, dan Jenderal Haryono; dan mereka yang dibunuh sesudah dibawa ke Lubang Buaya, yaitu Jenderal Parman, Jenderal Suprpto, dan Jenderal Sutoyo, serta Letnan Tendean.

Golongan I. Berita paling lengkap tentang kematian mereka terbit jauh sesudah peristiwa terjadi: tentang Yani dalam *Berita Yudha* tanggal 5 Desember; Panjaitan dalam *Kompas* tanggal 25 Oktober; *Berita Yudha* Minggu tanggal 21 November, dan *Berita Yudha* tanggal 13 Desember; dan Harjono dalam *Berita Yudha* Minggu tanggal 28 November. Semua pemberitaan menunjukkan bahwa jenderal-jenderal itu telah dibunuh dengan mendadak dan seketika di rumah dengan berondongan tembakan yang dilakukan oleh anggota-anggota Resimen Kawal Cakrabirawa, di bawah pimpinan operasi Lettu. Doel Arief. Gambaran demikian hanya sebagian saja dibenarkan oleh laporan forensik. Para ahli forensik itu menyatakan bahwa luka-luka pada tubuh Yani sajalah yang merupakan sepuluh luka tembak masuk dan tiga tembus. Panjaitan mengalami tiga luka tembak pada kepala, serta luka robek kecil di tangan. Pada luka-luka yang dialami Haryono timbul tanda tanya, karena tidak disebut-sebut sebagai akibat tembakan. Penyebab kematiannya rupanya adalah torehan panjang dan dalam pada bagian perut, luka yang lebih mungkin disebabkan oleh bayonet ketimbang pisau lipat atau silet. Sebuah luka serupa yang tak mematikan terdapat pada punggung korban. Cedera lain satu-satunya digambarkan “pada tangan dan pergelangan tangan kiri, luka-luka disebabkan oleh

barang tumpul.” Tak ada cara lain yang lebih tepat untuk menafsirkan luka-luka ini kecuali harus mengatakan, bahwa luka-luka tersebut tidak mungkin karena siksaan—jarang penyiksa memilih pergelangan kiri dalam melakukan pekerjaan mereka—dan luka itu barangkali karena mayat itu dilempar ke dalam sumur di Lubang Buaya yang 36 kaki dalamnya.

Golongan II. Cerita lengkap tentang matinya korban-korban ini terdapat dalam surat kabar berikut: Parman, *Berita Yudha* 17 Oktober dan juga *Berita Yudha* serta *Angkatan Bersenjata* tanggal 2 Desember; Suprpto, *Berita Yudha* Minggu tanggal 5 Desember; Sutoyo, *Berita Yudha* Minggu tanggal 21 November. Terhadap empat orang inilah berita-berita tentang siksaan biadab dan seksual paling banyak diberikan. Apa yang diungkapkan oleh laporan forensik adalah sebagai berikut:

1. S. Parman mengalami lima luka tembak, termasuk dua yang mematikan pada kepala; dan di samping itu, “robek dan patah tulang pada kepala, rahang, dan kaki kiri bawah, semuanya sebagai akibat benda tumpul dan keras—popor bedil atau dinding dan lantai sumur—tetapi jelas bukan luka-luka “siksaan”, juga tidak sebagai akibat silet atau pisau lipat.
2. Suprpto mati oleh karena sebelas luka tembak pada berbagai bagian tubuhnya. Luka-luka lain berupa enam luka robek dan patah tulang sebagai akibat dari benda tumpul pada kepala dan muka; satu disebabkan oleh benda keras tumpul pada betis kanan; luka-luka dan patah tulang itu “akibat benda tumpul” yang sangat keras pada bagian pinggul dan pada paha kanan atas; dan tiga sayatan yang, melihat pada ukuran dan kedalamannya, mungkin disebabkan oleh bayonet. Sekali lagi “benda tumpul” mempertunjukkan terjadinya benturan dengan benda-benda keras yang besar dan berbentuk tak menentu (popor bedil dan batu-batu sumur), dan bukannya silet atau pisau.
3. Sutoyo mengalami tiga luka tembak (termasuk satu yang fatal pada kepala), sedang “tangan kanan dan tempurung kepala retak sebagai akibat benda tumpul keras”. Sekali lagi kombinasi ganjil antara tangan kanan, tulang tengkorak, dan benda pejal berat yang memberikan kesan popor bedil atau batu-batu sumur.
4. Tendean mati akibat empat luka tembak. Kecuali itu para ahli tersebut menemukan luka gores pada dahi dan tangan kiri, demikian juga “tiga luka akibat trauma pejal pada kepala.”

Tak terdapat sepatah kata pun di laporan-laporan ini tentang adanya siksaan yang tak tersangkal, dan tak ada juga bekas silet atau pisau kecil apa pun. Bukan saja karena hampir semua luka-luka bukan tembakan itu dilukiskan sebagai akibat dari benda pejal dan keras, tetapi karena pembagiannya secara jasmaniah pun—pergelangan kaki, tulang kering, pergelangan tangan, paha, pelipis dan lain-lain—pada umumnya tampak sembarangan. Adalah sangat menarik, bahwa sasaran para penyiksa yang lazim yaitu pelir, dubur, mata, kuku, telinga, dan lidah, tidak disebut-sebut. Maka dengan cukup meyakinkan bisa dikatakan bahwa enam orang

¹³⁰ berkhitan=bersunat—*Pen.*

dari korban-korban itu mati oleh tembakan senjata api (perihal Haryono yang mati di dalam rumahnya tetap membingungkan); dan jika tubuh mereka mengalami tindak kekerasan lain adalah akibat pemukulan dengan gagang bedil yang memuntahkan peluru-peluru mematikan itu, atau cedera yang mungkin diakibatkan karena jatuh dari ketinggian 36 kaki—yaitu kira-kira tiga tingkat lantai—ke dalam sumur yang berinding batu.

Perlu juga dikemukakan, bahwa dalam pidatonya tanggal 12 Desember 1965 kepada Kantor Berita Indonesia *Antara*, Presiden Soekarno mengutuk para wartawan yang telah membesar-besarkan pernyataan mereka, dan menegaskan bahwa dokter-dokter yang telah memeriksa mayat para korban menyatakan, tentang tidak adanya perusakan mengerikan pada mata dan alat kelamin seperti telah diberitakan dalam pers.^{131 132}

Sebagai tambahan, perlu disebutkan bahwa 5 orang dokter ahli yang melakukan autopsi dan VR (*visum et repertum*) atas jenazah para jenderal itu, adalah:

1. Dr. Roebiono Kertopati, Brigadir Jenderal TNI, pimpinan tinggi kedua pada Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat,
2. Dr. Frans Pattiasina, Kolonel TNI, Korps Kesehatan Militer NRP. 14253, perwira kesehatan pada RSPAD,
3. Dr. Sutomo Tjokronegoro, profesor pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, ahli penyakit dan kedokteran forensik,
4. Dr. Liauw Yan Siang, ahli Kedokteran Forensik Universitas Indonesia,
5. Dr. Lim Joe Thay, dosen pada Kedokteran Forensik Universitas Indonesia.

Adapun VR (*visum et repertum*) yang dibuat adalah untuk:

1. VR Nomor H-103, adalah visum untuk Letjen. TNI Ahmad Yani,
2. VR Nomor H-104, adalah visum untuk Mayjen. TNI R. Suprpto,
3. VR Nomor H-105, adalah visum untuk Mayjen. TNI M.T. Haryono,
4. VR Nomor H-106, adalah visum untuk Mayjen. TNI S. Parman,
5. VR Nomor H-107, adalah visum untuk Brigjen. TNI D.I. Panjaitan,
6. VR Nomor H-108, adalah visum untuk Brigjen. TNI Sutoyo Siswomiharjo,
7. VR Nomor H-109, adalah visum untuk Letnan TNI P. Tendean.

Kelima dokter ahli yang tersebut di atas menjalankan autopsi itu atas perintah tertulis yang ditandatangani oleh Mayjen. TNI Soeharto, tertanggal 4 Oktober 1965, Nomor PRIN-03/10/65, yang ditujukan kepada Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat.

Dan di akhir setiap lembaran “*Visum et Repertum*” ditandatangani oleh kelima dokter ahli tersebut, disaksikan oleh Ahli Hukum Militer, yang juga membubuhkan tanda tangannya, yaitu: Hamzil Rusli, Bc.Hk., Kapten CHK—NRP.303840 dan

Soedarjo, Bc.Hk., Letnan Satu Angkatan Udara / 473726, sekretaris dari Letkol. Heru Atmodjo Angkatan Udara.¹³³

Namun, sebagaimana ditulis di atas, Soeharto tidak mengumumkan *Visum et Repertum* para jenderal tersebut, karena hasilnya berlawanan dengan keinginan Soeharto dan juga berlawanan dengan apa yang telah dikampanyekan oleh Angkatan Darat melalui surat kabar, radio, dan TV.

Pengalaman dalam Melakukan Autopsi

DR. LIM JOE THAY yang kemudian menggunakan nama sebagai Dr. Arif Budianto, menuturkan pengalamannya dalam melakukan autopsi, sebagai berikut:

“Hari itu 4 Oktober 1965, sekitar pukul 20.00 datang satu truk dengan lebih dari 20 tentara ke rumah saya, di kawasan Kampung Angus, Gelondongan, Glodok Kota. Waktu mereka datang, ibu saya kaget setengah mati. Ibu pikir saya dijemput karena terlibat gerakan komunis. Waktu itu kan sedang gencarnya pembersihan. Tidak tahunya, tentara itu membawa surat dari Prof. Soetomo Tjokronegoro. Dalam surat itu disebutkan saya diminta datang ke RSPAD Gatot Subroto untuk membantu beliau memeriksa mayat tujuh pahlawan yang terbunuh pada 30 September.

Jadilah, setelah saya berpakaian, saya berangkat dengan truk itu ke RSPAD. Waktu itu suasana Jakarta sangat mencekam. Jam malam juga masih berlaku dan di beberapa tempat ada pos penjagaan. Kami diharuskan berhenti dan pengantar-pengantar saya menyebut satu kata sandi. Dan, setiap berhenti di satu pos, baik yang menjemput saya maupun yang di pos, siap-siap mengokang bren-gun nya.

Saya waktu itu takut sekali. Itu truk tentara yang pakai terpal; dan saat itu saya duduk di depan. Untunglah, semuanya berjalan dengan lancar dan kami sampai dengan selamat di RSPAD Gatot Subroto. Saya masih ingat pasukan yang menjemput saya bukan RPKAD [Resimen Para Komando Angkatan Darat], tapi pasukan Kostrad [Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat].

Ketika saya sampai di kamar autopsi RSPAD, di sana sudah ada profesor saya, Soetomo, dan senior saya yang lain dari Forensik FKUI, Dr. Ferry Liauw Yan Siang. Kelulusan saya dan Dr. Ferry cuma beda lima bulan. Saya ditunjuk Dr. Soetomo untuk membantu dia karena memang dia inilah yang paling senior. Saya malah paling muda di antara mereka. Dr. Ferry lulus lima bulan lebih dulu dari saya. Saya lulus dari FKUI tahun 1957 dan setelah itu langsung mengambil spesialis forensik.

Di kamar autopsi, saya melihat, secara umum kondisi mayat memang sudah membusuk. Memang tidak berulat, tapi kulit arinya sudah ngelotok. Tidak juga terlalu kembung, tapi sedikit berlendir dan kulitnya kekuningan. Semua mayat masih berpakaian lengkap seperti yang dipakai terakhir. Itu sebabnya tim kami mendata benda-benda yang melekat di tubuh mayat.

¹³¹ Lihat *Suara Islam*, 13 Desember 1965, dan *FBIS*, 13 Desember 1965.

¹³² Prof. Ben Anderson, *Tentang Pembunuhan Massal 65 dan Tentang Matinya Para Jenderal*.

¹³³ catatan Paul H Salim, Calgary Kanada, berdasarkan tulisan Prof. Ben Anderson, <http://www.antenna.nl/wvi/eng/ic/pki/sal/myst.htm>

Saya memeriksa mayat pertama mulai dari giginya. Di antara dua gigi serinya, juga gigi taringnya, ada gigi kecil dan aneh. Itu kelainan, namanya mesio dentist. Saya melihat keanehan itu. Lalu, saya tanyakan ke dokter Angkatan Darat, "Dokter. Giginya, adakah yang punya gigi begitu. Dia langsung bilang, 'Oh, ini Jenderal Yani!'"

Ketika memeriksa mayat Jenderal Yani ada satu hal yang saya paling ingat. Bola matanya sudah copot dan mencelat keluar. Itu terjadi karena, ketika dimasukan ke sumur, kepalanya lebih dulu. Di dasar sumur itu ada air, jadi kepalanya terendam di sana.

Saya juga masih bisa mengenali pakaian Jenderal Yani. Dia mengenakan pakaian piyama loreng-loreng biru-putih-biru. Kemeja piyamanya penuh pecahan kaca. Dia kan ditembak di depan pintu kaca rumahnya. itu sebabnya sisa pecahan kacanya masih berhamburan ke mana-mana. Selain mayat Ahmad Yani, saya memeriksa jenazah M.T.Haryono.

Kami bekerja sepanjang malam itu sampai dini hari. Di ruang autopsi itu digunakan dua buah meja autopsi. Kami tanyakan waktu itu, apakah mayat para jenderal akan diautopsi lengkap atau tidak. Para jenderal yang hadir, termasuk Pak Harto, bilang tidak usah.

Tentang Pak Harto, sewaktu kami sedang sibuk-sibuknya melakukan autopsi, beliau juga datang. Ada beberapa jenderal yang masuk ke ruangan autopsi saat itu. Pak Harto tidak bicara apa-apa ketika itu; dan saya juga tidak sempat memperhatikan karena saya sedang sibuk bekerja. Yang saya ingat, saya sedikit mengangkat kepala mayat yang sedang saya periksa dan baru sadar Pak Harto ada di ruangan. Dia mengenakan battle dress (pakaian tempur). Kabarnya, RSPAD dari malam sampai pagi dijaga ketat pasukan Kostrad, tapi, kepada kami tidak ada tekanan apa pun, khususnya kepada saya. Itu sebabnya saya berani bicara seperti itu kepada rekan-rekan yang lain.

Di luar, kami sudah mendengar berita yang menyeramkan soal kondisi penis korban. Karena itu, kami melakukan pemeriksaan yang lebih teliti lagi tentang hal ini.

Tapi, apa yang kami temukan malah kondom di kantong salah satu korban yang bukan jenderal. Ada juga korban yang ditemukan tidak disunat. Kami periksa penis-penis para korban dengan teliti. Jangankan terpotong, bahkan luka iris saja juga sama sekali tidak ada. Kami periksa benar itu, dan saya berani berkata itu benar. Itu faktanya.

Satu lagi, soal mata yang dicongkel. Memang kondisi mayat ada yang bola matanya copot, bahkan ada yang sudah kotal-katil. Tapi, itu karena sudah lebih tiga hari terendam, bukan karena dicongkel paksa. Saya sampai periksa dengan seksama tepi matanya dan tulang-tulang sekitar kelopak mata, apakah ada tulang yang tergores, ternyata tidak ditemukan.

Kalau dikatakan sama sekali tidak ada penyiksaan itu juga tidak betul. Mayat-mayat itu ditembaki berkali-kali. Pergelangan mayat Haryono malah jelas sekali hancur karena bebatan perekat yang direkat kuat-kuat dan diikat sejak dari Lubang Buaya. Saya tak percaya, mayat yang dijatuhkan ke sumur bisa hancur pergelangan tangannya dan telapak tangan seperti itu. Kepala mayat Jenderal Sutoyo pecah. Itu juga kami tidak bisa bilang karena penyiksaan, karena kami tak ada di sana, tapi, yang jelas itu luka tembak. Seluruh korban memang ada,

namun karena kondisi mayatnya sendiri sudah busuk, kami tak bisa bedakan lagi apakah kondisi mayat sesudah mati atau sebelum mati.

Seperti dikatakan tadi, kami sampai was-was setelah selesai memeriksa mayat karena kami tidak menemukan penis yang dipotong; sehingga waktu membuat tulisan visum, semua anggota tim forensik ini ketakutan. Bagaimana ini dilakukan? Sementara itu, di luar sudah berkembang sangat santer cerita-cerita yang tidak benar dan terlalu dilebih-lebihkan soal kondisi mayat perwira.

Saya sebagai yang termuda di kelompok tim forensik cukup tahu diri. Saya bicara paling akhir, setelah senior-senior saya. Waktu itu, saya bilang, ini adalah tugas negara, bolehlah kami anggap negara adalah wakil dari Yang Maha Kuasa. Karena itu, kebenaran-Nyalah yang harus dikemukakan. Kalau sampai itu yang dipersalahkan, biarlah kami yang tujuh orang ini masuk penjara. Tapi, saya yakin itu tak mungkin terjadi. Kenapa? Karena, kami melakukan yang benar. Hal yang benar itu memang tak pernah terungkap di surat kabar di sini, tapi di koran-koran Amerika pernah diungkapkan kebenaran ini.

Buat saya, selama melakukan autopsi, saya belum mendengar pemberitaan yang luaran itu. Saya murni bekerja objektif. Objektivitas saya seratus persen. Cuma, saya tidak tahu anggota yang lain. Saya baru tahu berita-berita itu waktu selesai tugas di dini hari tanggal 5 Oktober, kami duduk di ruangan besar di RSPAD membicarakan hasil tadi.

Setelah selesai diperiksa, semua mayat itu dimasukkan ke dalam peti dan dibawa ke Markas Besar Angkatan Darat yang di Jalan Veteran. Mula-mula saya dibawa ke Kostrad dulu, yang berada di depan Gambir. Upacara berlangsung di Markas Besar Angkatan Darat. Setelah itu saya pulang. Jadi, saya melakukan autopsi dari malam 4 Oktober sampai pagi 5 Oktober 1965.¹³⁴

Akan tetapi, hasil autopsi para dokter ahli forensik atas jenazah para jenderal, tentang tidak adanya bekas-bekas penyiksaan seperti pemotongan penis, pencongkelan mata dan sebagainya, yang laporan lengkapnya diserahkan kepada Soeharto, tidak pernah disiarkan Soeharto kepada umum! Bahkan Soeharto sengaja membiarkan propaganda media massa, terutama harian *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha*, untuk mempengaruhi persepsi umum, yang merupakan alat ampuh bagi Soeharto untuk menyapu G30S, di samping menggunakan Angkatan Darat terutama RPKAD, untuk membersihkan dan menghabiskan lawan-lawan politiknya, terutama PKI.

Situasi Jakarta

PROPAGANDA bohong melalui media massa segera memicu kemarahan dan kebencian massa organisasi-organisasi yang sebelumnya memilih politik yang berseberangan dengan PKI dan ormas-ormas kiri pada umumnya. Terutama mereka yang mempunyai kepentingan yang berbeda, seperti dalam pelaksanaan *land reform* pada awal tahun 60-an. PKI mendukung *land reform* tapi banyak

¹³⁴ Sapta Nugraha, *Seputar September 1965*, <http://forum.kafegaul.com/archive/index.php/t-28614.html>, lihat juga film dokumen *Shadow Play*.

kekuatan politik yang menentang reformasi pertanahan pada waktu itu. Ini masih ditambah dengan penyebaran isu-isu bohong bahwa PKI sudah lama berencana mengambil alih pemerintahan yang sah dan membuat daftar nama ulama dan tokoh masyarakat yang akan dibunuh setelah mereka menang. Situasi panas ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh golongan keagamaan, terutama NU, Muhammadiyah, dan Partai Katolik untuk membentuk Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September (KAP Gestapu), di bawah pimpinan Subchan Z.E. (NU) dan Harry Tjan Silalahi (Katolik), yang melalui Adam Malik mendapat curahan Rp50 juta dari Kedubes AS di Jakarta untuk mengganyang PKI. Partai-partai lain, berikut ormas-ormas yang selama ini bersaing dengan PKI untuk memperoleh dukungan massa, seperti PSII, Partai Kristen Indonesia, bahkan PNI yang menjadi tumpuan Soekarno, bergabung dalam aksi pengganyangan ini, secara langsung maupun tidak. KAP Gestapu mengadakan demonstrasi-demonstrasi panas menghujat dan menuntut pembubaran PKI.

Para demonstran menghancurkan Universitas Res Publica (sekarang Universitas Trisakti) dan rumah-rumah para pimpinan PKI di Jakarta, menuntut pembersihan kabinet, parlemen, MPRS, dan semua lembaga-lembaga negara dari unsur-unsur komunis dan simpatisannya. NU juga mengeluarkan tuntutan pembubaran PKI pada tanggal 5 Oktober 65.¹³⁵

Mereka seperti kerasukan dan seperti kehilangan keseimbangannya, dan menulis, menempelkan slogan-slogan di tembok, memekik dan meneriakkan yel-yel kemarahan seperti: "Bubarkan PKI", "Gantung Aidit", "Ganyang PKI", "Aidit Pahlawan Gestapu", "Salibkan Aidit", "Gerwani Cabul", "Gantung Gerwani", "PKI Anti Tuhan", "Aidit Setan", juga tak ketinggalan teriak "Ganyang Baperki", "Go to Hell with PKI".

Dapat juga diceritakan bahwa 500 demonstran membakar Universitas Res Publik pada 14 Oktober 65, dan menganiaya 100 mahasiswa yang menjaga gedung yang ditutup itu, di mana 40 mahasiswa yang menjaga Res Publik kemudian ditangkap oleh para demonstran.¹³⁶

Kedutaan RRT tidak luput dari amukan demonstran. Hubungan negara tirai bambu dengan RI yang tadinya begitu mesra, berubah menjadi musuh mengerikan. Para demonstran menjarah harta milik etnis Tionghoa, membakar rumah dan gedung-gedung mereka, memerkosakan perempuan dan membunuh orang-orang Tionghoa dengan tuduhan komunis. Hubungan diplomatik diputuskan, suatu hal yang sangat didambakan AS untuk membendung pengaruh RRT.¹³⁷

Setelah peristiwa G30S, Soekarno berusaha mengendalikan keadaan melalui pidato-pidatonya. "Saya komandokan kepada segenap aparat negara untuk selalu membina persatuan dan kesatuan seluruh kekuatan progresif revolusioner. Dua,

menyingkirkan jauh-jauh tindakan-tindakan destruktif seperti rasialisme, pembakaran-pembakaran, dan perusakan-perusakan. Tiga, menyingkirkan jauh-jauh fitnahan-fitnahan dan tindakan-tindakan atas dasar perasaan balas dendam."

Ia juga menyerukan, "Awasi domba antar-angkatan, jangan mau dibakar. Jangan gontok-gontokan. Jangan hilang akal. Jangan bakar-bakar, jangan ditunggangi."

Dalam pidato, ia menyinggung *Trade Commission* Republik Rakyat Tiongkok di Jati Petamburan yang diserbu massa karena ada isu Juanda meninggal diracun dokter RRT. Padahal, beliau wafat akibat serangan jantung. Soekarno menentang rasialisme yang menjadikan warga Tionghoa sebagai kambing hitam.

Dalam pidato 20 November 1965 di depan keempat panglima angkatan di Istana Bogor, BK mengatakan, "Ada perwira yang bergudul. Bergudul itu apa? Hei, Bung apa itu bergudul? Ya, kepala batu." Tampaknya ucapannya itu ditujukan kepada Soeharto. Pada kesempatan yang sama Soekarno menegaskan, "Saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima Besar Revolusi. Terus terang bukan Subandrio. Bukan Leimena.... Bukan engkau Soeharto, bukan engkau Soeharto," dan seterusnya (berbeda dengan nama tokoh lain, Soeharto disebut dua kali dan secara berturut-turut).¹³⁸

Telegram Duta Besar Amerika Serikat

DALAM situasi yang demikian, Marshall Green, Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1965, mengirim telegram Nomor 868 yang ditujukan kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, menyatakan:

"Inilah saat yang tepat untuk mengenyahkan komunisme dari Indonesia. Namun bantuan harus secara diam-diam", "Army now has opportunity to move against PKI if it act quickly.....Momentum is now at peak with discovery of bodies of murdered army leaders. In short, it's now or never..."

Selanjutnya, Green memberikan beberapa panduan tentang sikap AS/CIA: *Hindari keterlibatan yang terang-terangan karena seiring berkembangnya perebutan kekuasaan. *Secara sembunyi, sampaikan dengan jelas kepada tokoh-tokoh kunci di ABRI seperti Nasution dan Soeharto tentang keinginan kita membantu apa yang kita bisa, sementara di saat bersamaan sampaikan kepada mereka asumsi kita bahwa kita sebaiknya menjaga agar setiap bentuk keterlibatan atau campur tangan kita tidak terlihat. Pertahankan dan jika mungkin perluas kontak kita dengan militer. *Sebarkan berita mengenai kesalahan PKI, pengkhianatan dan kebrutalannya (prioritas ini mungkin paling membutuhkan bantuan kita segera, yang dapat kita berikan kepada ABRI jika kita menemukan jalan untuk melakukannya tanpa diketahui bahwa hal itu merupakan usaha AS) ... Spread the story of PKI's guilt, treachery dan brutality (this priority effort is perhaps most-needed immediate assistance we can give army if we can find way to do it without identifying it as solely or largely US effort)."¹³⁹

¹³⁵ [Indymedia-jakarta] *Mass Grave in Indonesia*

¹³⁶ Paul H. Salim, Calgary, Canada, lihat juga film dokumen *Shadow Play* dan *Riding The Tiger*.

¹³⁷ lihat juga film dokumen singkat "Komnas Perempuan".

¹³⁸ Soekarno Menggugat oleh Asvi Warman Adam, *Harian Kompas*, 6 Juni 2003.

¹³⁹ Rita Uli Hutapea, *Misteri CIA di Seputar G30S*, detik.com, 08/8/2001.

Ternyata, “panduan” Duta Besar AS/CIA, Marshall Green itu, terutama perihal menyebarkan “kesalahan PKI, pengkhianatan dan kebrutalannya”, serta penghancurannya, menjadi garis utama para perwira Angkatan Darat, yang kemudian menjadi panutan dan *policy* Angkatan Darat dan pemerintahan militer. Hal ini terbukti, sebagaimana yang dikatakan Duta Besar Green dalam telegramnya “prioritas ini membutuhkan bantuan kita segera ... tanpa diketahui bahwa hal itu merupakan usaha AS ... secara sembunyi sampaikan dengan jelas kepada tokoh-tokoh kunci di ABRI seperti Nasution dan Soeharto tentang keinginan kita ... seiring dengan berkembangnya perebutan kekuasaan...”¹⁴⁰

Pada tanggal 5 Oktober itu juga, *Phoenix Park Singapore* (Kedutaan Inggris) mengirim telegram ke Departemen Luar Negeri di London, yang berbunyi: “...we should have no hesitation in doing what we can surreptitiously to blacken the PKI in the eyes of the people of Indonesia.”¹⁴¹

Dengan nada dan irama yang sama, hal tersebut diperjelas dalam rapat para jenderal militer di Kostrad pada tanggal 5 Oktober 1965 yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto dan Jenderal A.H. Nasution, yang menghasilkan panduan perihal pelaksanaan dari rencana penghancuran PKI. (Robinson, p.283, n.25). Tanggung jawab atas rencana dan segala cara-cara pelaksanaan operasi militer ini diakui dengan bangga oleh Jenderal Soeharto, melalui pernyataan yang tertulis dalam bukunya *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, 1989, halaman 136, yang berbunyi: “Sejak menyaksikan ... apa yang didapat di Lubang Buaya, kegiatan saya yang utama adalah menghancurkan PKI, menumpas perlawanan mereka di mana-mana, di ibukota, di daerah-daerah, dan di pegunungan tempat pelarian mereka...”¹⁴²

Semenjak “ucapan” Soeharto, Pangkostrad yang mengangkat dirinya menjadi Pangad, dan bertekad untuk menghancurkan dan menumpas PKI, yang menjadi panutan dan *policy* militer (penguasa/pemerintah), maka pasukan-pasukan Angkatan Darat, terutama pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, menggalang milisi-milisi terutama dari organisasi-organisasi keagamaan seperti Banser NU, Pemuda Muhammadiyah, untuk memusnahkan anggota, simpatisan, bahkan anggota keluarga yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Para pemuda dipersenjatai, dilengkapi dengan alat komunikasi dan transportasi, dan didorong untuk melakukan tindakan-tindakan keji dan brutal terhadap orang-orang yang masih belum jelas apa salahnya, dan tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta. Banyak korban jatuh justru setelah mereka diwajibkan melapor dan ‘diamankan’ di kantor-kantor polisi, militer atau institusi-institusi negara lainnya, seperti kecamatan atau kelurahan dan kemudian, tanpa diadili, dengan berbagai cara, dibunuh begitu saja.

¹⁴⁰ Jadi, tanggal 5 Oktober 1965 itu, Duta Besar Green sudah tahu tentang “berkembangnya perebutan kekuasaan” oleh Soeharto dan Nasution—*Pen*.

¹⁴¹ dari film dokumen *Shadow Play*

¹⁴² Wiyanto Rahman, S.H., dalam Sarasehan Leuven Belgia: Peristiwa G30S dalam Tinjauan Ulang, http://arus.kerjabudaya.org/htm/1965_Seminar_Leuven.htm

Seterusnya, dengan segala kelicikannya, Soeharto dalam bukunya itu mengatakan, “Mereka masih mencoba mendirikan kubu pertahanan sewaktu kami mengejar mereka. Tetapi saya tidak mau melibatkan Angkatan Darat langsung ... kecuali pada saat-saat tepat dan terpaksa. Saya lebih suka memberikan bantuan kepada rakyat untuk melindungi dirinya sendiri dan membersihkan daerahnya masing-masing dari benih-benih yang jahat.”¹⁴³

Dalam Forum Diskusi Sejarah Indonesia yang bertemakan “Peristiwa September 1965 dalam Tinjauan Ulang”, yang berlangsung pada 23 September 2000 di Leuven Belgia, salah seorang pembicara, Paul Mudigdo, S.H., yang pernah mengajar di Universitas Parahyangan Bandung, bahkan pernah menjadi anggota KASI (Komando Aksi Sarjana Indonesia) pada awal orde baru, dalam menanggapi perkataan Soeharto, tentang melibatkan rakyat dalam operasi penghancuran PKI, satu dan lain, adalah agar rakyat tidak melawan maupun mencegahnya, malah berbalik dan mendukung dan membantu Angkatan Darat. Manuver ini dilakukannya dengan cara dan langkah-langkah berikut:

1. Mengindentikkan G30S dengan PKI;
2. Mengingkari kemanusiaan orang komunis, dan menggambarkan mereka sebagai makhluk kejam, asusila dan ateis;
3. Menyalahgunakan rasa keagamaan untuk menghasut dan menanam kebencian terhadap komunis; dan
4. Menggerakkan demonstrasi massal menuntut pembubaran dan/atau pembasmian PKI.

Langkah pertama dilakukan antara lain dengan cara media massa kiri dilenyapkan. Tiga surat kabar tentara: *Berita Yudha*, *Angkatan Bersenjata*, dan *Api Pantjasila*, serta seluruh media pers yang ada di bawah ancaman pemberangusan setiap hari menyiarkan berita-berita yang disiapkan oleh Angkatan Darat. Operasi konyol G30S di Jakarta terus-menerus digambarkan sebagai upaya kudeta yang didalangi oleh PKI, ataupun sebagai pemberontakan PKI untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Gerakan 30 September tidak disingkat dengan akronim G30S, melainkan dengan G30S/PKI, sehingga pada PKI dilekatkan cap pemberontak brutal.

Langkah kedua yaitu mengingkari kemanusiaan orang komunis, penggambaran mereka sebagai makhluk kejam, asusila dan ateis. Dilukiskan dengan rinci tentang pembentukan pendapat umum mengenai kebengisan, kelicikan, dan kebiadaban PKI dengan merujuk kepada Polisi Rahasia Nazi Jerman, Gestapo.

Laporan pemeriksaan bedah mayat para jenderal, tertanggal 5 Oktober 1965 dari tim lima dokter ahli ilmu kedokteran kehakiman, yang dibentuk atas perintah Presiden Soekarno, yang melukiskan di bawah sumpah secara terperinci kondisi jenazah, disampaikan juga kepada Soeharto, diumumkan oleh Presiden Soekarno

¹⁴³ Wiyanto Rahman, S.H., dalam Sarasehan Leuven Belgia: Peristiwa G30S dalam Tinjauan Ulang, http://arus.kerjabudaya.org/htm/1965_Seminar_Leuven.htm

pada tanggal 9 Oktober 1965, tetapi *tidak pernah disiarkan* kepada masyarakat, baik oleh pemerintah maupun oleh media massa. *Visum et Repertum* ini jelas mengingkari adanya luka-luka karena sayatan atau pencongkelan mata dan menyebut antara lain tentang keutuhan alat kelamin para korban. Sebaliknya, bermunculan foto mayat-mayat yang sudah mulai membusuk dan rusak di TV, koran dan majalah, disertai uraian bahwa tanda-tanda bekas penganiayaan di sekujur tubuh korban, membuktikan kekejaman dan kebiadaban G30S/PKI. Bahkan juga Jenderal Soeharto pribadi memberi pernyataan seperti itu. Fitnah semacam ini, tentang kebiadaban, kekejian dan keasusilaan anggota PKI maupun simpatisan PKI berfungsi untuk meniadakan rasa salah rakyat, apabila kemudian mereka dilibatkan untuk menganiaya, bahkan membunuh makhluk biadab dan asusila tersebut.

Langkah ketiga, yaitu penyalahgunaan rasa keagamaan untuk menghasut, dan menanam kebencian terhadap komunis. Tidak jarang komunis disebut tidak bertuhan, ateis, malah musuh Tuhan. Pandangan ini mengabaikan kenyataan bahwa hampir semua anggota PKI, seperti juga semua bangsa Indonesia beragama. Akan tetapi, hasutan-hasutan di atas memang bukan bermaksud menggambarkan kebenaran, melainkan menanamkan kebencian, menabur gagasan bahwa memerangi PKI adalah wajib hukumnya, bahkan tidak haram untuk mengalirkan darah orang komunis.

Langkah keempat, yaitu menggerakkan demonstrasi massal menuntut pembubaran dan/atau pembasmian PKI. Terhitung mulai 2 Oktober 1965 dengan dorongan Angkatan Darat, didirikan Kesatuan Aksi Penggayangan Gestapu (KAP-Gestapu) dan organisasi-organisasi KAMI, KAPPI, dll., yang memelopori demonstrasi mahasiswa/pelajar/pemuda yang terus-menerus mengutuk "Gestapu/PKI" dan semua organisasi komunis. Angkatan Darat kemudian mengadakan operasi penangkapan tokoh, kader dan anggota PKI, dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya."

Sebagai orang yang ikut mengalami peristiwa di atas, sebagai kriminolog, meninjau secara retrospektif, rekayasa pembangkitan dan peningkatan rasa kebencian dan kemarahan rakyat terhadap PKI dan organisasi pendukungnya, Paul Mudigdo, S.H. mengakui dengan sejujurnya bahwa "rekayasa semacam itu sangat efektif."¹⁴⁴

Api menyala. Darah pun tumpah. Ketika kemarahan dan kebencian sudah meluas, pembunuhan massal diorganisir dan terjadi secara sangat sistematis, seiring dengan pergerakan RPKAD. Di Jakarta, rumah dan gedung-gedung yang diduga milik anggota atau simpatisan komunis dirusak dan dibakar. Orang-orang yang dituduh komunis, ditangkap dan diarak oleh demonstran, dan dalam keadaan

tak berdaya, di tengah-tengah massa demonstran, korban ditusuk dan dibunuh dengan pedang panjang, sedang pihak militer hanya melihat dan menonton.¹⁴⁵

Telegram Green, Duta Besar AS di Jakarta ke Washington tanggal 20 Oktober mengatakan: "*Beberapa ribu kader PKI dilaporkan telah ditangkap di Jakarta ... beberapa ratus di antaranya telah dibunuh. Kami mengetahui hal itu ... pimpinan PKI Jakarta telah ditangkap dan barangkali telah dibunuh.... RPKAD tidak mengumpulkan tawanan, mereka langsung membunuh PKI.*"

Green melanjutkan: "pembersihan oleh AD berlanjut di kampung dan tempat-tempat lain di daerah Jakarta. Pemuda Muslim "membantu" mengawani pasukan militer. Sumber mengatakan "beberapa" pembunuhan merupakan hasil dari pembersihan ini. Fakta lebih jauh tentang hubungan militer dengan kumpulan yang terorganisir dalam kampanye anti PKI ini, dapat dilihat dari pertemuan antara Kolonel Ethel (CIA) dan pembantu dekat Jenderal Nasution, yang mengatakan bahwa demonstrasi anti PKI akan meningkatkan pengganggangan menjadi anti Tionghoa. Dan perusakan dan pendudukan kantor perdagangan Kedutaan Tiongkok di Cikini, bukan dilakukan oleh AD akan tetapi oleh "mereka yang bertindak untuk kita", yaitu Muslim dan Ansor. Hanya 3 bulan semenjak kampanye anti PKI, CIA melaporkan: "Hampir semua anggota Politbiro PKI ditangkap, banyak di antara mereka telah dibunuh, termasuk tiga pimpinan tertinggi partai. Berita besar hari ini, adalah: ditangkap dan dibunuhnya Ketua PKI D.N. Aidit. Sedang pembunuhan terhadap anggota dan simpatisan PKI di Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, terus berlangsung...." Bagi AS dan sekutunya, keberhasilan Angkatan Darat Indonesia menghancurkan PKI adalah merupakan suatu kemenangan besar." Demikian Marian Wilkinson menulis dalam *Sydney Morning Herald*, 10 Juli 1999.

Aidit Dibunuh!

TANGGAL 2 Oktober 1965, setelah mendengar berita tentang "kup", Kolonel Yasir Hadibroto, waktu itu Komandan Kesatuan Infanteri IV Kostrad di Sumatra Utara, datang, langsung menghadap komandannya di Markas Besar Kostrad di Jakarta, Mayjen. Soeharto. Dia ditanyai oleh Soeharto: "Di mana kamu ketika pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948?" "Saya baru saja dipindahkan ke Jawa Barat. Pasukan saya diperintahkan untuk menghadapi 3 batalyon komunis di Wonosobo," Yasir menjawab. "Orang yang berontak hari ini adalah keturunan dari PKI Madiun. Pergi, bereskan mereka semua. D.N. Aidit di Jawa Tengah. Bawa pasukanmu ke sana!" perintah Panglima Kostrad Mayjen. Soeharto. Di Jawa Tengah, D.N. Aidit, Ketua PKI, ditangkap, dibawa ke markas Batalyon Kostrad di Boyolali dan dibunuh!

Pukul 3.00 sore tanggal 24 November 1965, Kolonel Yasir diterima oleh Soeharto di Istana Yogyakarta. Dia melaporkan segala sesuatu berkenaan dengan

¹⁴⁴ Wiyanto Rahman, S.H., dalam Sarasehan Leuven Belgia: Peristiwa G30S dalam Tinjauan Ulang, http://arus.kerjabudaya.org/htm/1965_Seminar_Leuven.htm

¹⁴⁵ Silakan lihat film dokumen Australia Broad Casting: *Riding The Tiger*.

penangkapan PKI dan cara membereskan Aidit. Setelah memberikan laporannya, Kolonel Yasir memberanikan diri untuk bertanya: “Waktu Bapak mengatakan ‘bereskan’ tentang D. N. Aidit, apakah itu yang Bapak maksud?” Panglima Kostrad, Mayjen. Soeharto hanya *tersenyum*.^{146 147}

Setelah lebih dari dua minggu propaganda hitam terhadap PKI dan organisasi kiri lain berjalan tanpa henti, ketika emosi rendah masyarakat bangkit dan mencapai puncaknya dengan semangat anti komunis anti PKI yang disebut sebagai golongan manusia anti-agama dan anti-Tuhan, kafir, dst., yang darahnya halal, maka situasi telah matang dan tiba waktunya untuk melakukan pembasmian dalam bentuk pembunuhan massal. Dan itulah yang terjadi di Jawa Tengah setelah kedatangan pasukan RPKAD di bawah Kolonel Sarwo Edhie Wibowo sesudah minggu ketiga Oktober 1965, selanjutnya di Jawa Timur pada minggu berikutnya, dan Bali pada Desember 1965—Januari 1966. Sudah sangat dikenal pengakuan Jenderal Sarwo Edhie yang membanggakan telah membasmi 3 juta jiwa manusia.

Pembunuhan di Daerah-Daerah

“KELOMPOK-KELOMPOK paramiliter pemuda didorong untuk melakukan pembunuhan terhadap sejumlah orang dan diberi dukungan moral dan logistik oleh Angkatan Darat.¹⁴⁸ Di Jawa Timur, Gerakan Pemuda Anzor yang berafiliasi ke NU merupakan tulang punggung utama Angkatan Darat, sementara di Medan adalah Pemuda Pancasila, dan di Bali adalah gerakan Pemuda Anzor dan kelompok-kelompok pengamanan masyarakat anti-PKI yang didukung oleh Partai Nasional Indonesia.”¹⁴⁹

Aceh dan Sumatra Utara

PENDUDUK Muslim di Aceh sangat gairah dalam menghabiskan kaum komunis. Mereka memotong leher orang-orang PKI dan menancapkan kepalanya di sepanjang jalan buat tontonan. Pimpinan organisasi Pemuda Pancasila mengatakan kepada pejabat Konsulat Amerika di Medan bahwa organisasi mereka (Pemuda Pancasila) akan membunuh setiap anggota PKI yang dapat mereka tangkap. Organisasi itu tidak akan menyerahkan orang PKI itu kepada penguasa/pemerintah, sebelum mereka mati atau hampir mati. Kantor-kantor PKI, toko, dan rumah-rumah dibakar. Ratusan dan mungkin ribuan kader dan aktivis PKI¹⁵⁰ ditahan di penjara atau di tempat-tempat yang dijadikan tempat tahanan.¹⁵¹

¹⁴⁶ Paul H. Salim dari Calgary, Canada, menulis: “*The extra-judicial killing of D. N. Aidit will probably remind us of the killing of Lee Harvey Oswald, the “alleged” killer of US President J. F. Kennedy. As a result, both the Gestapo “coup” and the assassination of JFK would probably remain mysterious, unless more evidences are sought.*”

¹⁴⁷ *Mystery Almost Solved!!* by Paul H. Salim, Calgary, Canada, <http://www.antenna.nl/wvi/eng/ic/pki/sal/myst.html>

¹⁴⁸ baca: RPKAD yang kemudian menjadi Kopassus—Pen.

¹⁴⁹ Elizabeth Fuller Collins, “*Indonesia: Sebuah Budaya Kekerasan?*”

¹⁵⁰ yang belum sempat dibunuh—Pen.

¹⁵¹ Marian Wilkinson, *Sydney Morning Herald*, 10 Juli 1999

American Free Press menulis: “*In Aceh, for example, the civilian were ‘decapitated and their heads were placed on stakes along the road’. The bodies often repeatedly slashed with knives or sword. Then thrown into the river that they would not ‘contaminate Aceh soil’.*”¹⁵²

Sehingga sehari-hari, berminggu-minggu dan bulan, rakyat tidak berani memakan ikan sungai, karena banyaknya mayat-mayat tak berkepala yang mengambang memenuhi sungai-sungai di Aceh dan Sumatra Utara.

Korban buruh perkebunan di Sumatra Utara sedikitnya 100.000 tewas. Sedang di Tapanuli, Utara, Selatan, dan Simalungun, tatanan adat terjungkal setelah milisi Komando Aksi Penumpasan G30S mulai bergerak mengganyang elemen-elemen komunis. Mereka tidak peduli apakah korban adalah paman, satu marga, atau keluarga istrinya. Mereka tidak peduli kendatipun hubungan yang dibentuk hierarki adat itu adalah simpul keutuhan sosial.

Riau

“SEORANG staf Kedutaan Besar Amerika di Jakarta melaporkan tentang teror militer-muslim yang langsung ditujukan melawan kaum buruh dalam perusahaan minyak vital Caltex: “Muslim dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak militer menjarah rumah-rumah komunis di dalam kota dan menutup gedung-gedungnya di daerah-daerah. Pihak militer menggerebek rumah-rumah pimpinan PKI dan memberitahukan pihak pimpinan perusahaan minyak Caltex pada 29 Oktober 65, akan rencana militer, yang bakal menangkapi anggota-anggota dan pimpinan buruh komunis Perbum, yang menjadi tulang punggung dan kekuatan PKI di Provinsi Riau.”¹⁵³

Pada tanggal 18 November 1965 (20 hari setelah pemberitahuan pihak militer kepada Manajer Caltex), maka pihak militer, dengan dibantu oleh organisasi-organisasi buruh muslim dan lokal, melakukan operasi penangkapan atas anggota dan pimpinan organisasi buruh minyak Perbum (Persatuan Buruh Minyak), di seluruh daerah perusahaan Caltex. Ratusan buruh, baik staf maupun non staf, ditangkap dan dikumpulkan dalam satu tempat tahanan yang bernama RTM, Rumah Tahanan Militer, di ibukota provinsi, Pekanbaru. Bagi perusahaan minyak asing Caltex, bukan hal yang sulit untuk mengetahui siapa yang menjadi anggota Perbum, karena semenjak 1 Mei 1964, telah ditandatangani suatu Persetujuan Bersama antara kaum buruh dan majikan, yang disebut CLA (*Collective Labour Agreement*), di mana kaum buruh diwajibkan memberi surat pernyataan yang ditandatangani kepada majikan untuk memotong gajinya Rp100/bulan guna diserahkan kepada organisasi yang dipilih oleh buruh. Dengan demikian, seluruh buruh minyak yang menjadi anggota Perbum, yang merupakan 75% dari jumlah semua buruh, terdaftar namanya pada perusahaan minyak Caltex! Dan ketika tiba

¹⁵² <http://www.americanfreepress.net>

¹⁵³ Mike Head/Marian Wilkinson, *Sydney Morning Herald*, 20 Juli 1999

saat militer yang dibantu organisasi buruh muslim dan lokal (PPC, Persatuan Pegawai Caltex), dengan mudah menangkapi anggota-anggota Perbum yang dituduh sebagai organisasi buruh komunis.

Di seluruh pelosok daerah, pihak militer menangkapi orang-orang yang diduga PKI, dan menjadi anggota atau simpatisan organisasi Pemuda Rakyat, Gerwani, Sobsi, BTI, Lekra, dan sebagainya. Rumah Tahanan Militer menjadi penuh sesak, namun penangkapan terus berlangsung. Dari daerah-daerah kabupaten atau kecamatan, penangkapan berjalan terus, dan para tahanan tersebut, dikatakan, dikirim ke Pekanbaru, ke Rumah Tahanan Militer, namun kenyataannya tidak pernah sampai, hilang lenyap dalam perjalanan, tak tahu kabar beritanya.

Sebagai bukti, dapat dijelaskan, dari Kabupaten Bengkalis, 50 orang ditangkap dan dibawa dengan kapal motor menuju Pekanbaru, namun tidak seorang pun yang sampai dan tidak diketahui kabar beritanya; dari Bagan Siapi-api, 40 orang ditangkap dan dibawa dengan kapal motor, namun hanya seorang yang sampai dan dimasukkan ke Rumah Tahanan Militer Pekanbaru; dari Selatpanjang, 30 orang ditangkap dan dibawa dengan kapal motor, dan tak seorang pun yang sampai; dari Rengat, 50 orang yang ditangkap dan dibawa dengan truk, dan tak seorang pun yang sampai ke Pekanbaru; dari Tembilahan, 30 orang ditangkap dan dibawa dengan truk, juga tidak ada yang sampai ke Pekanbaru; di Pasir Pengaraian, 50 orang langsung dibunuh tanpa melalui proses. Dari dalam Rumah Tahanan Militer di Pekanbaru sendiri, dalam periode 15 Februari 1966 sampai 16 September 1968, 40 orang tahanan diambil malam dan hilang, dibunuh! Di antara mereka yang diambil dan dibunuh ini banyak yang sebelumnya menjadi pegawai tinggi pada perusahaan minyak asing Caltex, bahkan seorang yang sedang dikirim oleh Caltex belajar di Amerika, dipanggil pulang, dijebloskan ke dalam tahanan, kemudian diambil malam dan dibunuh! Menurut berita yang tersiar di dalam tahanan, seseorang yang berhasil membunuh seorang tahanan komunis ketika itu, mendapat imbalan “uang jasa” sebanyak Rp50.- (lima puluh rupiah) dari “organisasi”. Apakah ini merupakan pembagian “dana” yang diberikan oleh Amerika Serikat melalui perantara Adam Malik, yaitu “bantuan” sebanyak Rp50 juta(?)—seperti yang diberitakan kepada KAP (Kesatuan Aksi Pengganyangan) Gestapu, yang dipimpin oleh Subchan Z.E. dari NU dan Harry Tjan Silalahi dari Katolik untuk pembantaian komunis?

Sumatra Barat

DI Sumatra Barat, negeri yang punya budaya “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” juga tak urung melakukan kekejaman-kekejaman pembunuhan terhadap rakyat yang tidak melakukan kesalahan, kecuali dianggap sebagai anggota atau simpatisan PKI. Keadaannya, sama seperti ketika tahun 1958, di mana PRRI menangkapi semua orang yang dianggap komunis, sehingga tak salah kalau dikatakan bahwa orde baru/Soeharto sebenarnya adalah penerusan PRRI dalam skala global, dari Sabang sampai Merauke. Di setiap kampung dan negeri terjadi

pembunuhan-pembunuhan terhadap kaum komunis. Bahkan, kaum alim ulama Minangkabau yang berpikiran maju, dari partai Islam Perti, PSII misalnya, juga dibunuh, kemudian difitnah bahwa mereka dibunuh oleh PKI, sehingga menambah kebencian dan kemarahan yang membara dari masyarakat yang menelan bulat-bulat fitnah dan rekayasa pihak militer. Pihak militer orde baru, bersama para milisi dari segala macam organisasi komando aksi, mengharubirukan negeri Minangkabau. Seperti contoh, dapat diceritakan keadaan yang terjadi di satu kampung dan kota, Salido dan Painan di pesisir selatan Sumatra Barat:

“Setelah kejadian peristiwa awal Oktober 1965 di Jakarta, dalam menanti dan menunggu pidato dari Presiden Soekarno, yang kiranya dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, rakyat yang dalam ketidaktahuan, tiba-tiba saja dikejutkan oleh kehadiran Komandan Kodim Painan, Letkol. Purnomo Sipur, yang meneror masyarakat di kota Painan dan sekitarnya. Pasukan Kodim itu dengan kejam dan brutal melakukan penangkapan atas beratus-ratus pemuka masyarakat, rakyat dan ninik mamak di pesisir selatan Kerinci. Beliau-beliau yang ditangkap itu, digiring seperti menggiring hewan ternak, dimasukkan ke dalam penjara-penjara dan digunduli. Sebagian disuntik oleh dokter, yang adalah seorang wamilda (wajib militer darurat) dan dimuat ke sebuah dump truk yang biasa digunakan buat mengangkut sampah, tanah, atau pecahan batu, dan dibawa ke Bukit Pulai, sekitar 10 km di luar kota Painan. Di sana, para pemuka rakyat yang dijubelkan dalam dump truk itu, dituangkan dari dump truk seperti menuangkan sampah. Dan manusia-manusia yang berjatuh di belakang truk yang bak bagian depannya dinaikkan itu, atas perintah dan komando Letkol. Purnomo Sipur, diberondong dengan tembakan senjata api. Jerit, pekik dan lolong manusia-manusia tak berdosa, menyebut nama Allah, menggema di Bukit Pulai pada tanggal 9 November 1965 itu. Tubuh-tubuh korban yang secara paksa dihabisi nyawanya itu, bergelimpangan bermandi darah, diiringi dengan sorak-sorai dan tawa ria serdadu-serdadu brutal dan biadab pengikut Jenderal Soeharto, di bawah komando Letkol. Purnomo Sipur. Tidak terhitung jumlahnya anak-anak bangsa, yang di antaranya adalah pejuang Perintis Kemerdekaan RI, ninik mamak dan alim ulama Minangkabau, direnggut secara paksa hak hidupnya oleh rezim biadab orde baru/Soeharto.

Syamsudin, seorang bekas anggota Mobrig (Mobile Brigade—TNI), ditangkap oleh militer rezim Soeharto. Tangan dan kakinya diikat pada dua buah pedati yang kemudian ditarik oleh dua ekor kerbau dengan arah yang berlawanan. Tubuh Syamsudin hancur berkecai. Potongan tubuh bertebaran dengan darah yang berserakan membasah bumi Minangkabau! “Pesta” militer yang brutal dan biadab ini mereka lakukan di depan anak dan istri Syamsudin, yang dipaksa untuk menyaksikan “kebudayaan AD/orde baru Jenderal Soeharto!

Nurhayani, seorang gadis remaja yang baru saja tamat SMP, ditangkap, karena dia menghalang-halangi Letkol. Purnomo Sipur yang akan menangkap ayah si gadis. Perwira ABRI/Jenderal Soeharto yang gagah perkasa ini, memasukkan Nurhayani ke dalam karung dan mengikatnya, dan melemparkannya ke Batang

(Sungai) Nilam di Air Hadji. Para militer yang hebat dan perkasa itu, tertawa terbatak-batak, sambil minum air kelapa muda, melihat karung yang berisi tubuh Nurhayani menggelepar-gelepar dibawa arus air. Setelah pahlawan-pahlawan rezim Soeharto itu berlalu, keluarga dan sanak saudara Nurhayani, dengan raung dan tangis, mengambil mayatnya dari Sungai Nilam dan mengebukannya sesuai dengan adat istiadat Minangkabau.”

Pengungkapan di atas hanya dari satu daerah kecil Salido dan Painan di pesisir barat Sumatera Barat. Bagaimana dengan daerah, kota dan kabupaten-kabupaten lain seperti Agam, Limapuluhkota, Pasaman, Kerinci, Pesisir Selatan. Dan Padang Pariaman, dll.¹⁵⁴

Jawa Barat

DI Jawa Barat, pembunuhan massal juga terjadi, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil karena militer di Jawa Barat cukup patuh pada perintah Presiden Soekarno untuk tidak saling membunuh. Tapi basis-basis PKI di Subang, Indramayu, dan Cirebon tetap diluluhlantakkan, dibumi-hanguskan, dan dihancurkan. Puluhan ribu orang mati dibunuh hanya dalam tempo dua bulan.

Kenapa pembunuhan di Jabar tidak “sehebat” di Jateng atau Bali misalnya? Dalam hal ini, Prof. Ben Anderson sempat berwawancara dengan Pangdam Siliwangi, Jenderal Ibrahim Ajie, dan bertanya: “Kenapa tidak ada pembunuhan besar-besaran di Jawa Barat?” Jenderal Ajie menjawab: “Sebenarnya memang ada, umpamanya di Indramayu, tetapi tidak meluas. Itu sebabnya karena saya tidak ingin ada pembantaian di Jawa Barat. Karena merasa bagaimanapun ini sebagian besar orang biasa, orang-orang kecil. Akan mengerikan kalau mereka itu dibunuh. Saya sudah kasih perintah kepada semua kesatuan di bawah saya, orang ini ditangkap, diamankan. Tapi jangan sampai ada macam-macam.” Ternyata kewibawaan si Adjie yang terkenal jenderal kanan, yang dekat dengan Amerika, itu berlaku penuh, namun pada waktu itu dia dianggap sebagai saingannya Soeharto, lalu dibuang ke London jadi dubes di sana.¹⁵⁵

Pasukan RPKAD Sarwo Edhi Wibowo, setelah mengharubirukan Jakarta, setelah membunuh dan menangkapi orang-orang kiri terutama komunis, mulai bergerak masuk Jawa Tengah pada bulan Oktober itu, lalu menyebar ke Jawa Timur di bulan November dan kemudian menyebar ke Bali untuk melakukan pembunuhan di bulan Desember 1965.

Jawa Tengah

MENURUT yang diceritakan dalam film dokumen *Shadow Play*, pasukan Sarwo Edhi Wibowo, pertama-tama ke Jawa Tengah, membersihkan, menghilangkan para perwira dalam Divisi Diponegoro yang bersimpati kepada G30S.

Prof. Ben Anderson dalam satu wawancara mengatakan, bahwa kelompok pimpinan Kodam Diponegoro yang mendukung G30S, Kolonel Suherman—asisten satu, Kolonel Maryono—asisten tiga, Letkol. Usman—asisten empat, dsb, untuk selama kira-kira 48 jam, menguasai hampir seluruh Jawa Tengah, kemudian mereka juga hilang. Tidak pernah di antara mereka ada yang diadili, diajukan ke pengadilan, dsb. Mereka hilang tanpa bekas, dan itu tidak pernah diisukan. Malah kalau membaca laporan dari *Buku Putih* apa yang terjadi di Jawa Tengah sama sekali tidak menjadi masalah. Jadi semua perhatian dengan sengaja dipusatkan pada apa yang terjadi di Jakarta. Dan, siapa yang tahu tentang mereka yang hilang ini? Kita harus tanyakan kepada pemerintah Indonesia, Suherman di mana? Maryono, Usman di mana? Dan sebagainya. Banyak sekali tokoh-tokoh dari G30S hilang tanpa bekas. Yang tahu bagaimana nasibnya, ya tentara sendiri.¹⁵⁶

Di Boyolali, 21 Oktober 1965, menjadi awal pembantaian massal, ribuan orang ditembak dan digorok secara biadab. Kuburan massal hasil galian paksa para korban tercipta mendadak. Orang-orang yang menolak membunuh atau menggali kuburan, diancam akan ikut dibunuh. Tubuh-tubuh tanpa kepala bergelimpangan di desa dan kampung perkotaan sekitar Solo, Blora, dan Prambanan. Di Blora sendiri tak kurang 5.000 orang dibantai dengan sadis. Sungai Bengawan Solo, Kali Wedi Klaten, dan Sungai Brantas di Jawa Timur penuh dengan mayat bertubuh tak utuh. Kali jadi merah. Orang ketakutan. Tak jelas siapa kawan, siapa lawan.

Jawa Timur

LAPORAN dari misionaris Katolik di Kediri menyebut 3 ribu orang tewas dibantai pada November 1965.

Jenderal Soemitro, Pangdam Brawijaya mengatakan bahwa “1 orang nyawa jenderal harus ditebus 100 ribu nyawa PKI.” Ia pun mengiringi pembantaian massal di berbagai wilayah di Indonesia. Dia pulalah yang memimpin penangkapan, pengorokan, penembakan ratusan massa sekaligus dan membuang mayat mereka ke dalam lubang yang digali oleh para korban itu sendiri. Diperkirakan 250.000 korban mati atau hilang di Jawa Timur.¹⁵⁷

Peristiwa pembantaian di Jawa Timur diungkapkan Soekarno dalam pidato di depan HMI di Bogor 18 Desember 1965. Soekarno mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan sadis, orang bahkan tidak berani menguburkan korban. “*Awas kalau kau berani ngrumat jenazah, engkau akan dibunuh. Jenazah itu diklelerkan saja di bawah pohon, di pinggir sungai, dilempar bagai bangkai anjing yang sudah mati.*”¹⁵⁸

¹⁵⁴ Silakan baca: “*Kebiasaan Rezim Soeharto di Sumatra Barat*”, www.kabarindonesia.com tanggal 14/2/08

¹⁵⁵ Prof. Ben Anderson, *Tentang Pembunuhan Massal 65 dan Tentang Matinya Para Jenderal*.

¹⁵⁶ Prof. Ben Anderson, *Tentang Pembunuhan Massal 65 dan Tentang Matinya Para Jenderal*.

¹⁵⁷ [Indymedia-jakarta] *Mass Grave in Indonesia*

¹⁵⁸ *Soekarno Menggugat* oleh Asvi Warman Adam, *Harian Kompas*, 6/6/03

Bali

DI Bali, pembantaian massal dimulai setelah RPKAD mendarat pada awal Desember 1965. Mereka menggalang milisi-milisi binaan PNI yang disebut Tameng. Mereka juga datang bersama segerombolan milisi Jawa—Madura yang berasal dari Banyuwangi. Pola pembantaian pun kurang lebih sama biadab dengan di Jawa, bahkan mungkin lebih menggila karena ketegangan antara PNI dengan PKI merasuk sampai ke ranah-ranah pribadi di dalam keluarga-keluarga besar. Dengan memanfaatkan adat dan ritual, di beberapa tempat terjadi pembantaian seluruh garis keluarga dengan anggapan akan menghilangkan dendam turunan. Laki-laki berusia 17 tahun ke atas, apalagi kalau ia pandai, tak bakal selamat.

Bali harus dibersihkan dari malapetaka, diupacarai dengan banjir darah agar Pulau Dewata suci kembali. Mayat-mayat pun dipotong, dipisahkan tangan, kaki dan kepala dari badan dan dibuang di berbagai tempat supaya unsur-unsur jahat tak bersatu. Rumah demi rumah di suatu desa dibakar, kadang-kadang dengan penghuninya secara hidup-hidup. Kuburan massal yang berisi ratusan mayat bertebaran hampir di seluruh bagian pulau cantik ini. Terkirakan sekitar 80.000—100.000 jadi korban pembantaian.

Tim Pencari Fakta yang dibentuk oleh Bung Karno mencatat laporan resmi para penguasa, antara 80.000—100.000 jiwa telah menjadi korban di Jawa dan Bali. Tetapi di balik itu, para penguasa sendiri menduga korbannya 10 kali lebih besar dari yang mereka laporkan.¹⁵⁹ Pembunuhan di Bali ini diperkirakan 5% dari jumlah penduduk Bali sendiri.¹⁶⁰

Dr. Robert Cribb, dosen sejarah pada Australian National University Melbourne, mengatakan: *“Kadang-kadang tentara sendiri masuk ke desa membunuh orang, tapi biasanya orang ditangkap, ditahan, dan dikeluarkan di tangan milisia, di tangan organisasi-organisasi yang diadakan oleh tentara untuk dibunuh. Sarwo Edhi yang memimpin RPKAD mengatakan bahwa di Jawa rakyat harus dihasut untuk membunuh orang komunis. Dari saksi, jelas, bahwa di Bali juga RPKAD punya peranan besar menghasut rakyat...”*¹⁶¹

“Ditangkap di satu desa dan dibawa ke desa lain dan dibunuh, supaya orang yang ditangkap tidak kenal dengan si pelaku.... Untuk ini perlu kordinasi. Nah, saya ingin tahu siapa kordinator ini?” tanya Prof.Dr. Henk Schulte Merdbolt, sejarawan Amsterdam University, Netherland.¹⁶²

Dalam penyelidikan rakyat Bali sendiri, diketahui beberapa tempat yang menjadi lokasi kuburan massal di Pulau Bali, seperti: di Desa Sangsit, Kabupaten Buleleng, di Desa Rendang dan Nongan Kabupaten Karangasem, di Pantai Masceti Kabupaten Gianyar, di Desa Kapal Kabupaten Badung. Umumnya mereka yang dibantai di Desa Kapal, adalah orang-orang yang ditahan, diambil, dan dikeluarkan

dari kamar tahanan dan dibunuh. Di antara mereka adalah Ketut Kandel, Anom Dede, Ir. Sataya Bandem Wirka, Bandem Pageh, I Gede Puger, Anak Agung Kencana, Wayan Duma, Anak Agung Tiaga, Ida Bagus Dupem, Ida Bagus Warjana, Ketut Nadi, Harto Setiadi. Di antara mereka, ada yang ditembak, belum mati lantas dibuang ke lubang dan ditimbun, bahkan ada yang tubuhnya dicincang dan dipotong-potong, leher, kaki dan tangan diceraiberaikan seperti yang mereka lakukan atas I Gede Puger, tokoh veteran pejuang Bali. Pulau Bali benar-benar bersimbah darah! Hanya dalam beberapa minggu di bulan Desember 1965, antara 80—100 ribu orang mati dalam pembantaian, merupakan 5% dari jumlah penduduk Pulau Bali.¹⁶³

Di seluruh Indonesia, dalam waktu beberapa bulan dari mulai Oktober 1965 sampai 3 bulan pertama 1966, menurut perkiraan umum ada sekitar 800 ribu sampai sejuta orang dibunuh dengan berbagai cara. Digorok, disiksa, dipenggal dan kepalanya ditancapkan di pagar rumah korban, dibantai dan ditembak secara massal, dibakar hidup-hidup bersama rumah dan kampungnya, dibuang ke jurang, sungai dan lautan. Tanah dan harta para anggota PKI atau golongan kiri pun dijarah dan dikuasai oleh tentara dan milisi-milisi ciptaannya macam KAMI, KAPI, KAPPI, dst. Kebencian rasial pun dikobarkan. Kantor, sekolah, rumah, tanah dan daerah pertokoan yang dimiliki kaum etnis Tionghoa, baik yang tergabung dalam Baperki atau tidak, direbut kemudian diduduki sebagai markas tentara, rumah jenderal, kantor Golkar atau markas milisi orba, sampai sekarang. Puluhan ribu orang dipekerjakan di Pulau Buru dan Nusakambangan, memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagai orang buangan, dan kebutuhan para perampok kehidupan mereka.¹⁶⁴

Hampir di setiap kota provinsi dan kabupaten didirikan tempat-tempat tahanan orang-orang yang ditangkap dengan tuduhan “ada indikasi” terlibat langsung maupun tak langsung dengan G30S. Ratusan ribu tahanan ditempatkan di dalam kamp-kamp yang sangat tidak memadai dan di bawah standar kemanusiaan. Tempat, kesehatan, makanan, dan lain-lain yang sangat minim yang semuanya itu hanya bertujuan untuk melenyapkan secara pelan dan bertahap, mengikot apa yang diucapkan Soeharto: *“Kalau ditahan terus, siapa yang memberi makan?”* Karena kenyataannya, di samping para tahanan yang mati karena sakit, kurang makan dan tekanan batin, dsb., banyak di antaranya yang diambil malam dari tempat tahananannya dan dibunuh. Inilah praktik kekejaman kemanusiaan, kebiadaban, yang dilakukan oleh rezim orba/Soeharto.

Penggolongan Tahanan Politik

HARDOYO, mantan anggota DPRGR/MPRS 1960—1965 dari Fraksi Golongan Pemuda, eks. tapol 10 Nov. 1966—9 Des. 1979, dalam pembicaraannya tanggal 16

¹⁵⁹ Memoar Oey Tjoe Tat

¹⁶⁰ [Indymedia-jakarta] *Mass Grave in Indonesia*

¹⁶¹ film dokumen: “*Kawan Tiba Senja*”, LPKP 65 Bali & JK 6

¹⁶² film dokumen: “*Kawan Tiba Senja*”, LPKP 65 Bali & JK 6

¹⁶³ film dokumen: “*Kawan Tiba Senja*”, LPKP 65 Bali & JK 6

¹⁶⁴ [Indymedia-jakarta] *Mass Grave in Indonesia*

November 2000 di Jakarta, menjelaskan: “Pada Juni 1966, Instruksi Komando Ganyang Malaysia (Kogam) No.9 mengklasifikasikan para tahanan politik yang jumlahnya melebihi satu juta orang yang memenuhi semua kamp-kamp tahanan yang sebenarnya tidak layak disebut sebagai kamp tahanan.

Menurut Kogam Nomor 9/1966 itu, para tahanan diklasifikasikan ke dalam golongan A, B, dan C. Golongan A adalah kategori buat mereka yang dianggap “terlibat langsung” dalam gerakan militer G30S/65, dan harus diadili.

Golongan B, yang terbagi dua yaitu B1 dan B2 ialah mereka yang dianggap kader partai atau aktivis ormas kiri. Mereka umumnya ditahan dan sebagian besar diasingkan ke Pulau Buru. Mereka dianggap “terlibat secara tidak langsung”.

Golongan C, terbagi atas: C1 bagi mereka eks. Peristiwa Madiun 1948; C2 untuk mereka yang dianggap “simpatisan”; sedang C3 adalah massa. Mereka ini ada yang ditahan, dan diberhentikan dari pekerjaannya, atau dijadikan sebagai tahanan kota dan harus wajib lapor.

Mengikuti kategori Kogam ini, maka Jenderal Soeharto jelas dapat dimasukkan ke dalam Golongan “A” karena dia “terlibat langsung” dengan G30S, dengan arti kata mengetahui sebelumnya, menyetujui, dan membantu pelaksanaannya dengan mendatangkan militer lengkap dengan persenjataannya untuk pelaksanaan G30S.¹⁶⁵

Predikat “terlibat secara tidak langsung” ini hebat sekali dampaknya. Ada 9 macam pekerjaan yang tertutup untuk mereka dan anak-cucunya pun terkena pembatasan untuk sekolah dan mencari pekerjaan bahkan untuk kawin! Seorang anak dari keluarga yang dicurigai ada indikasi dengan PKI, dilarang kawin dengan militer, polisi, ataupun pegawai negeri! Terlalu banyak istilah pada saat itu, seperti litsus, bersih diri, bersih lingkungan, serta keterpengaruhan. Persis seperti zaman fasis Dai Nippon, kalau dalam satu pasukan atau kampung ada seorang yang salah, maka semua kena *sa-seng* atau hukuman.¹⁶⁶

Seorang staf Kedubes AS, Josef Lazarsky, Kepala Perwakilan Stasiun CIA di Jakarta, yang datang ke Kostrad dan melihat begitu banyak manusia yang ditahan di berbagai tempat, bertanya pada Soeharto tentang proses hukumnya. Soeharto menjawab singkat, “*kalau ditahan terus, siapa nantinya yang akan memberi makan mereka?*”¹⁶⁷

Ini artinya, tidak lain bahwa semua tahanan itu akan dibunuh. Dan ini juga tentu sejalan dengan daftar 5.000 orang tokoh dan kader PKI yang harus dibunuh, yang menurut Cathy Kadane, wartawan Amerika dalam tulisannya yang mengungkap rahasia ini, mengatakan bahwa daftar tersebut disusun oleh Robert J. Marten, mantan staf seksi politik di Kedubes AS di Jakarta yang ditugaskan,

¹⁶⁵ Using Soeharto's own categorisation of crime related to 1965, his prior knowledge of the alleged coup places him in 'Category A' involvement—the same as those who faces execution or life imprisonment, <http://www.serve.com/inside/edit57/poulg.htm>

¹⁶⁶ <http://www.wirantaprawira.net>

¹⁶⁷ Jenderal Soeharto Menuju Tahta kekuasaan, <http://www.progind.net/modules/wfsection/article.php?articleid=76>, copied 10/11/2005 dan Maruli Tobing, Kompas, 9 Februari 2001, “Perang Urat Syaraf...”

kemudian diserahkan oleh Edward Master, Kepala Seksi Politik Kedubes AS di Jakarta kepada sekretarisnya Adam Malik yang selanjutnya disampaikan ke markas Soeharto di Kostrad. Jadi tidak heran kalau ribuan tahanan, diambil oleh militer dari kamp tahanan dan dibunuh. Dan setiap saat Kedubes AS selalu mendapat laporan dari markas Jenderal Soeharto mengenai “realisasi” daftar itu.

Jumlah Korban

TIM pencari fakta yang dibentuk oleh Bung Karno mencatat laporan resmi para penguasa, antara 80.000—100.000 jiwa telah menjadi korban di Jawa dan Bali. Tetapi di balik itu, para penguasa sendiri menduga korbannya 10 kali lebih besar dari yang mereka laporkan.¹⁶⁸

Dr. Robert Cribb, dosen sejarah pada Universitas Nasional Australia di Melbourne, memperkirakan jumlah korban berkisar antara 78.000 hingga 2 juta jiwa.

John Hughes dalam bukunya “*Indonesian Upheaval*” (1967), memprediksikan antara 60.000 hingga 400.000 orang.

Donald Hindley, dalam tulisannya, “*Political Power and the October Coup in Indonesia*” (1967), memperkirakan sekira setengah juta orang.

Prof. Guy Pauker, agen CIA yang sangat dikenal dan tidak asing lagi di Seskoad (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat), dalam tulisannya “*Toward New Order in Indonesia*” memperkirakan 200.000 orang yang dibunuh.

Yahya Muhaimin dalam bukunya *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945—1966*, memprediksikan sekira 100.000 orang.

Ulf Sundhaussen, dalam bukunya *The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945—1967* (1982), khusus untuk Jawa Barat, tanpa menyebut angka, mengatakan bahwa dari seluruh anggota komunis yang dibunuh di Jawa barat, bisa jadi hampir seluruhnya dibantai di Subang.¹⁶⁹

Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, Komandan RPKAD, pembunuh berdarah dingin yang melakukan pembersihan di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, kepada Panitia Pencari Fakta, mengaku “telah membunuh 3 juta komunis”.

Pramoedya Ananta Toer, sastrawan dan bekas tapol dari Pulau Buru, dalam ucapannya sebelum meninggal dunia, yang direkam dalam film dokumen “*Shadow Play*” mengatakan: “*Sampai sekarang tidak jelas berapa jumlahnya yang dibunuh. Soedomo [Kopkamtib] mengatakan 2 juta yang dibunuh, Sarwo Edhie [RPKAD] mengatakan 3 juta yang dibunuh. Yang jelas tidak ada yang tahu sampai sekarang.*”

Presiden Amerika Serikat Barack Obama, ketika masih menjadi senator, dalam satu tulisannya mengatakan: “*In 1965, under the leadership of General Suharto, the military moved against Sukarno, and under emergency powers began a massive purge of*

¹⁶⁸ *Memoar Oey Tjoet Tat*

¹⁶⁹ Reiza D. Dienaputra, *Penelusuran kembali Peristiwa G30S 1965*—<http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-Oktober/000424.html>

communists and their sympathizers. According to estimates, between 500.000 and one million people were slaughtered during the purge, with 750.000 others imprisoned or forced to exile.”¹⁷⁰

Sedang Bertrand Russel, pemikir besar liberalisme, menyebut pembunuhan massal ini sebagai hal yang amat mengerikan yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia. (*Perang Urat Syaraf...Kompas*, 9 Februari 2001). “*Dalam empat bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, lima kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun.*” (“*In four months, five times as many people died in Indonesia as in Vietnam in twelve years.*”)^{171 172}

Kolonel Sarwo Edhi Wibowo

PADA tanggal 19 November 1965, Kedutaan Australia dengan bangga melaporkan aksi pembunuhan itu dipimpin oleh seorang perwira lulusan latihan Australia, Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, lulusan angkatan tahun 1964 setelah 18 bulan latihan di Staf Akademi Militer di Queenscliff, dekat Melbourne.

Pada 10 November 1965, hanya setahun setelah lulus latihan, Sarwo Edhi memimpin 400 pasukan RPKAD yang ditakuti (Resimen Penggempur Komando Angkatan Darat, sekarang dikenal sebagai Kopassus—Komando Pasukan Khusus), melakukan pembersihan di Jawa Tengah, untuk memburu dan menghabiskan lawan-lawannya.¹⁷³

Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, pembunuh berdarah dingin atas orang-orang yang diindikasikan sebagai anggota PKI, dianggap “tokoh” dan menjadi legendaris ketika pasukan RPKAD yang dipimpinnya bergerak dari Jakarta menuju Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, pada Oktober, November, dan Desember 1965. Dua hari sebelum Natal 1965, Kedutaan Australia di Jakarta memperkirakan, pukul rata, 1.500 orang telah dibunuh setiap hari semenjak 30 September 1965.¹⁷⁴ Sehingga tidak salah kalau rakyat biasa yang ketakutan, secara sembunyi mengartikan dan menjuluki “RPKAD” adalah sebagai Resimen Pembunuh Komunis Angkatan Darat....

Ditunggingi...

KETIKA pasukan pembunuh RPKAD memasuki suatu kampung di Jawa Tengah, dan membunuh manusia seenaknya, seorang wanita yang melihat kekejaman

¹⁷⁰ Barack Obama, *The Audacity of Hope. Thoughts on Reclaiming The American Dream. First published (2006) in New York, the U.S. by The Crown Publishers; Chapter 8, The World Beyond Our Borders, page 272—273. Paperback edition, by Canongates Book, 2008.* (Sumber: Dari Catatan Ibrahim Isa-Nederland)

¹⁷¹ Bertrand Russel, 1966/Kathy Kadane, *State News Service*, 1990.

¹⁷² Catatan: Sebagian dari nama-nama para korban yang dapat diingat dan dikumpulkan oleh Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru—LPRKROB—dari berbagai daerah di Indonesia dapat pembaca lihat dan telusuri dalam lampiran di halaman-halaman akhir tulisan ini.

¹⁷³ *New light on Australia's active involment by Mike Head—21 Juli 1999.* http://www.wsws.org/articles/1999/jul1999/indo3-j21_prm/shtml

¹⁷⁴ Paul H. Salim, Calgary, Canada.

pasukan itu, memprotes dengan cara mengangkat kain sarungnya dan menunggingkan pantatnya ke arah mereka. Sarwo Edhi yang memimpin langsung operasi itu, memerintahkan menembak mati perempuan tersebut di tempat, yang dengan gampang dituduhnya sebagai Gerwani. Para penduduk kampung berdatangan dan memprotes tindakan pasukan militer yang sewenang-wenang itu. Namun, mereka juga semua ditembak mati. Pasukan RPKAD menjelajah kampung demi kampung mencari korbannya, memuatnya ke dalam truk dan dibunuh. Banyak di antaranya, sebelum dibantai, diperintah untuk menggali kuburan mereka sendiri, karena sebagaimana telegram Green, Dubes AS di Jakarta, ke Washington tanggal 20 Oktober mengatakan: ... *RPKAD tidak mengumpulkan tawanan, mereka langsung membunuh PKI.*¹⁷⁵

“Suatu waktu, pada pukul 6.30 pagi, pasukan Sarwo Edhi memasuki sebuah kampung di kaki Gunung Merapi, di daerah Boyolali, 40 km arah timur laut Yogyakarta, melakukan percobaan menembak ke udara. Antara 100 dan 200 orang, banyak di antaranya perempuan dan kanak-kanak, muncul di tepi jalan. Menurut satu laporan yang dikirimkan ke Canberra (Australia), orang-orang kampung itu mendekati paramiliter sambil meneriakkan kata-kata *nekolim* yang berarti *neo-kolonialisme dan imperialisme*. Dikatakan, bahwa mereka bersenjata bambu runcing, pisau, dan ‘satu atau dua senjata api’.”¹⁷⁶

“Mereka ditembak, diberondong oleh pasukan RPKAD, membunuh tujuh orang dan mencederai 17 orang,” demikian laporan wartawan India, B.K. Tiwari yang menghabiskan waktu 11 hari bersama Sarwo Edhi Wibowo, mengikuti operasi pembantaian yang dilakukan pasukannya. Laporan Tiwari itu juga menjelaskan bahwa pihak militer telah melatih milisia muslim. Dalam wawancara dengan wartawan India itu, Kolonel Sarwo Edhi mengatakan bahwa, latihan yang dia berikan kepada kelompok muslim adalah untuk bertindak sebagai “mata dan telinga pihak militer, penunjuk jalan untuk operasi dan informasi”.

Sementara banjir darah berlangsung di Indonesia, Duta Besar Australia di Jakarta, K.C.O. “Mick” Shann menganjurkan pemerintah Australia melakukan kontrol dan pembatasan atas siaran radio Australia, dan supaya radio Australia “jangan memperlihatkan simpati kepada Presiden Soekarno.”¹⁷⁷

Pengakuan Sarwo Edhi

DENGAN jumlah yang demikian besar yang dibunuh oleh pasukan RPKAD. Kolonel Sarwo Edhi Wibowo yang pernah dilatih di Sekolah Staf Militer di Australia selama 18 bulan, merasa puas dan berbangga diri.

¹⁷⁵ *Southwood and Flanagan*, 1983, p.77, Paul H. Salim, Canada.

¹⁷⁶ Sebelum meneruskan membaca kisah itu dan menelan bulat-bulat cerita di atas, perlu dipertimbangkan masak-masak, mungkinkah “rakyat Indonesia begitu bodoh”, mencoba “melawan” pasukan militer pembunuh yang bersenjata lengkap, hanya dengan bambu runcing, pisau dan ‘satu—dua senjata api’? Apakah hal itu bisa masuk akal sehat kita, ataukah tentang “satu-dua senjata api” itu hanya isapan jempol si wartawan?—Pen.

¹⁷⁷ Mike Head, *Sydney Morning Herald*, 21 Juli 1999: *US orchestrated Soeharto's 1965—1966 slaughter in Indonesia.*

Hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta, yang lebih dikenal sebagai Komisi Lima yang dipimpin oleh menteri dalam negeri saat itu, Mayjen. Dr. Soemarno, dengan anggota-anggota: Moejoko (Polri), Oei Tjoe Tat, S.H., Mayjen. Achmadi (eks. Brigade XVII/TP), dan seorang lagi tokoh Islam, menyebut bahwa jumlah korban pembunuhan yang dilakukan atas perintah Soeharto sekitar 500.000 orang. Bahkan menurut pengakuan mendiang Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, Panglima RPKAD, kepada Permadi, S.H., jumlah yang dibunuh mencapai sekitar 3.000.000 (*baca: tiga juta!*) orang. "Itu yang ia suruh bunuh dan ia bunuh sendiri," kata sumber itu.¹⁷⁸

Jaket Kuning dan Nasi Bungkus

JARANG yang tahu organisasi utama penggalang aksi-aksi ini, KAMI, Komando Aksi Mahasiswa Indonesia, sebenarnya dibentuk oleh tentara melalui tangan Menteri Pendidikan Brigjen. Sjarif Thajeb; bahwa untuk melancarkan aksi-aksi mereka, ada hubungan terus-menerus antara pimpinan-pimpinannya dengan Kepala Staf Kostrad, Brigjen. Kemal Idris; dan bahwa jaket-jaket kuning yang dibangga-banggakan para mahasiswa, dibiayai oleh pemerintah AS, melalui orang-orang penghubung dengan CIA, melalui perusahaan-perusahaan Amerika di Indonesia.^{179 180}

Dan tidak bisa dilupakan begitu saja, mantan Wapres Indonesia Jusuf Kalla yang adalah mantan Ketua Umum Golkar, menurut catatan sejarah, adalah juga bekas Ketua Umum KAMI bagian Timur Indonesia pada tahun 1965 itu.¹⁸¹ Sebagai Ketua KAMI, apakah tangannya bersih dari darah bangsa Indonesia?

Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda/Pelajar (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, dan berbagai kesatuan aksi lainnya lengkap dengan laskar-laskar dan *backing* ABRI, setiap harinya terus-menerus melakukan demonstrasi sambil menghujat Bung Karno, dengan mendapat ransum tiap hari 5.000 (lima ribu) nasi bungkus lengkap dengan lauk-pauknya dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang mengalokasikan dana satu juta US\$, yang ditukar dengan rupiah di pasaran gelap. Demikian disinyalir oleh Bung Karno, menurut pengakuan Dr. Subandrio.¹⁸²

Pada 7 November 1965, konsul Amerika di Surabaya, Ted Heavner, mengirim telegram ke Washington memberi informasi bahwa Angkatan Darat melakukan pertemuan dengan Pimpinan Pemuda Islam dan mengatakan kepada mereka supaya siap menghadapi PKI dan bersedia untuk "membunuh atau dibunuh". Sedang Duta Besar Amerika di Bangkok, James Wilson, mengirim telegram ke

¹⁷⁸ <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/08/26/0011.html>

¹⁷⁹ [Indymedia-jakarta] *Mass Grave in Indonesia*

¹⁸⁰ (Apakah Golkar yang memakai dan menggunakan seragam "jaket kuning" sebagai lambang dan tanda pengenal partai sekarang ini adalah penerusan dari lambang dan gerakan mahasiswa yang dibiayai CIA itu yang tujuannya cuma satu yaitu: "menggulingkan pemerintahan Soekarno demi masuknya modal asing ke Indonesia?"—*Pen.*)

¹⁸¹ Wilson Lalengke: *Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla*, harian online *Kabar Indonesia*, 28/10/07

¹⁸² Kolektif(i)nfocoup d'etat 65"kolik65@progind.net

Washington, mengatakan: "Sekarang ini menjadi sangat jelas bahwa militer menggunakan pemuda-pemuda muslim dan Kristen menjadi 'regu pembunuh'."¹⁸³

Angkatan Darat membuat situasi menjadi sangat mencengkam, dengan kata-kata semboyan "membunuh atau dibunuh" ("*kill or to be killed*"), seperti yang diucapkan Konsul Amerika itu. Namun, menurut Harsutejo dalam tulisannya, *Sekitar G30S*, hal itu adalah tidak benar. "Dalam khazanah sejarah G30S ada gambaran yang disesatkan bahwa situasinya seolah waktu itu 'dibunuh atau membunuh' seperti dalam perang saudara. Ini sama sekali tidak benar, tidak ada buktinya. Hal ini dengan sengaja diciptakan, sesuai dengan kepentingan rezim militer Soeharto guna melegitimasi kekejaman mereka. Situasi telah dimatangkan oleh propaganda hitam pihak militer di bawah Jenderal Soeharto beserta segala peralatannya yang menyinggung nilai-nilai moral dan agama tentang perempuan sundal Gerwani sebagai yang digambarkan dalam dongeng horor Lubang Buaya. Emosi ketersinggungan kaum agama beserta nilai-nilai moralnya ditingkatkan sampai ke puncaknya untuk menyulut dan memuluskan pembantaian anggota PKI dan kaum kiri lainnya yang disebut sebagai kaum kafir yang dilakukan pihak militer dengan memperalat sebagian rakyat yang telah terbakar emosinya."

Kebenaran atas tulisan Harsutejo ini dapat ditunjukkan fakta dan buktinya bahwa yang dibunuh adalah orang-orang yang dianggap komunis, yang sejak terjadinya Peristiwa 30 September 65, diperintahkan untuk melapor dan mendaftarkan namanya ke badan-badan dan kantor pemerintah, kantor camat, kantor penghulu, kantor polisi, kantor Kodim, kantor Front Nasional, dan sebagainya, kemudian mereka itu ditahan dan sebagian besar lalu diangkut dengan truk dan dibunuh, serta orang-orang yang dianggap PKI, yang diambil dari rumahnya dan dibunuh oleh Angkatan Darat dan para komando aksi pengganyangan. Dan bukannya perang saudara, bukannya PKI yang membunuh, tetapi PKI yang tak melawan yang dibunuh. Ini fakta!

Namun, menurut Hilmar Farid dalam suatu arena diskusi, halnya bisa saja begitu, karena dengan sangat sederhana bisa dijelaskan apa yang dimaksud Angkatan Darat, yaitu "membunuh PKI berarti kamu golongan *kita* (Angkatan Darat). Kalau kamu menolak, berarti kamu PKI dan mesti dibunuh!" Jadi, "membunuh atau dibunuh". Dan memang kenyataannya, Ansor yang tidak mau membunuh juga mati dibunuh karena dituduh PKI. Di Bali, PKI mati, PNI juga mati karena dituduh PKI sebab tidak mau membunuh PKI. Dan masa itu, dalam satu keluarga, ada beberapa aliran partai. Dan karena Angkatan Darat, mereka semua saling membunuh!" demikian Hilmar Farid.

Akan tetapi, yang jelas dan pasti, yang dibunuh adalah PKI. Apakah PKI yang asli dan sebenarnya, atukah golongan yang di PKI-kan! Yang mati ada yang PNI, ada yang Baperki, ada yang Perti, Partindo, dsb., yang semuanya itu dituduh sebagai PKI. Jadi, sekali lagi, yang dibunuh adalah PKI dan/atau yang dianggap

¹⁸³ Marian Wilkinson, *Sydney Morning Herald*, 10 Juli 1999.

PKI. Sebab, saat itu, untuk melenyapkan lawan, atau seseorang yang tidak disukai dengan cara mudah, adalah dengan men-cap dan menuduhnya sebagai PKI. Tidak akan ada yang menghukum kalau membunuh seseorang yang dituduh PKI, karena di Indonesia tidak ada hukum dan keadilan! Seperti apa yang dikatakan oleh Howard Fenderspiel, ahli Indonesia di *State Department's Bureau of Intelligence and Research* di tahun 1965: "Tidak ada yang peduli, kalau mereka dibantai, asal mereka adalah komunis, tidak ada yang bakal menyelidikinya."¹⁸⁴

Bahkan, sampai hari ini, juga masih dilakukan cara-cara yang sama untuk mengucilkan atau menjatuhkan seseorang dari jabatannya. Katakan saja bahwa kakek atau neneknya, atau ibu—bapaknya, atau sanak keluarganya adalah PKI dan terlibat G30S, bekas tapol, atau yang bersangkutan pernah sekolah di sekolah PKI, maka kontan dia akan jatuh menjadi warga negara kelas kambing dan dikucilkan! Ini disebabkan karena pemerintah sekarang masih menjalankan dan meneruskan peraturan-peraturan diskriminatif, yang diwariskan oleh orba.

Sebelum kita maju lebih jauh, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu tokoh-tokoh yang pegang peranan di dalam peristiwa G30S. Kita tahu sejak permulaan bahwa "perwira maju" yang paling menonjol dalam gerakan ini adalah: Letkol. Untung, Kolonel A. Latief, dan Brigjen. Supardjo, dan beberapa orang lagi yang akan kita bicarakan di bawah ini satu per satu.

Letnan Kolonel Untung

LETKOL. Untung bin Syamsuri, tokoh kunci Gerakan September 1965 adalah salah satu lulusan terbaik Akmil. Pada masa pendidikan ia bersaing dengan Benny Moerdani, perwira muda yang sangat menonjol dalam lingkup RPKAD.¹⁸⁵ Mereka berdua sama-sama bertugas dalam operasi perebutan Irian Barat dan Untung merupakan salah satu anak buah Soeharto yang dipercaya menjadi Panglima Mandala.

Sebelum ditarik ke Resimen Cakrabirawa, Untung pernah menjadi Komandan Batalyon 545/Banteng Raiders yang berbasis di Sronol, Semarang, dalam Divisi Diponegoro di bawah Soeharto. Dia juga pernah dikirim tugas menghancurkan PRRI tahun 1958 dalam RTP II di Bukittinggi Sumatra Barat. Batalyon 545/Banteng Raiders di bawah Untung ini memiliki kualitas dan tingkat legenda yang setara dengan Yonif Linud 330/Kujang dan Yonif Linud 328/Kujang II. Kelak dalam peristiwa G30S, Banteng Raiders ini akan berhadapan dengan pasukan elite RPKAD di bawah komando Sarwo Edhi Wibowo.

Dalam era awal kemerdekaan, Untung juga pernah menjadi anggota "Kelompok Pathuk" di Yogya meskipun bukan dalam kelas yang sama dengan Soeharto atau Syam. Mereka berpisah pada tahun 1950, kemudian bertemu kembali pada tahun 1962 ketika bersama bertugas merebut Irian Barat, ia berada di garis

depan. Mendengar kisah keberaniannya selama bertugas di medan Irian, ia dianugerahi Bintang Penghargaan oleh presiden, lalu ditarik menjadi Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa, suatu kedudukan cukup strategis.¹⁸⁶

Harian *Kedaulatan Rakyat* (Yogya) tanggal 7–10 Mei 1963, mengutip kata-kata Untung tentang harapannya "agar keluarga dari para prajurit yang gugur dalam perjuangan pembebasan Irian Barat percaya dan tetap beriman kepada Allah Yang Maha Esa."¹⁸⁷

Letkol. Untung menikah pada umur yang agak terlambat pada akhir 1964. Acara perkawinannya dilaksanakan di tempat cukup jauh di daerah udik di desa terpencil Kebumen. Sekalipun demikian, Mayjen. Soeharto memerlukan hadir bersama istrinya ke tempat yang ketika itu tidak begitu mudah dicapai. Ia merupakan satu-satunya perwira tinggi yang datang, ini merupakan kehormatan besar bagi Untung dan menunjukkan hubungan keduanya cukup akrab. Bahkan yang mempertemukan Untung dengan calon istrinya ialah Ibu Tien Soeharto. Soal kehadiran Soeharto ini tidak pernah diungkapkan olehnya sendiri yang memiliki ingatan tajam itu, tetapi *toh* terekam dalam sebuah berita koran *Pikiran Rakyat*.¹⁸⁸

Letkol. Untung pernah dikirim belajar ke AS, tentunya CIA memiliki cukup catatan tentang dirinya sehingga ia dapat direkomendasikan. Seperti tercantum dalam catatan laporan CIA tertanggal 1 Oktober 1965 dalam *CIA*, 2001:300, memorandum untuk Presiden Johnson bahwa Untung memiliki "*military police background and was trained in the United States.*" Sementara orang menyebut catatan CIA ini tidak akurat karena Untung tidak pernah belajar ke AS. Banyak pihak menyatakan ia seorang muslim yang taat, sangat muak dengan korupsi dan tingkah laku kehidupan sejumlah perwira tinggi.¹⁸⁹

Sebelum pelaksanaan G30S, Untung pernah menemui Soeharto membicarakan rencana melakukan gerakan untuk mengambil dan menghadapkan kepada presiden, para jenderal yang dipercayainya akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno, di mana rencana Untung ini mendapat pujian dan janji bantuan militer dari "bapak mertua angkat"-nya, Panglima Kostrad, Mayjen. Soeharto.

Pada 1 Oktober 1965, Untung tampil sebagai pemimpin Gerakan 30 September yang menculik para jenderal AD, yang ternyata kemudian dibunuh. Pembunuhan para jenderal ini, ternyata dianggap menyimpang dari rencana mereka semula, yang hanya akan menangkap dan menghadapkan para jenderal kepada presiden.

Setelah G30S meletus dan gagal dalam operasinya, Untung melarikan diri dan menghilang beberapa bulan lamanya sebelum kemudian ia tertangkap secara tidak sengaja oleh dua orang anggota Armed di Brebes, Jawa Tengah. Ketika tertangkap, ia tidak mengaku bernama Untung. Anggota Armed yang menangkapnya pun tidak menyangka bahwa tangkapannya adalah mantan Komando Operasional

¹⁸⁴ *Free Encyclopedia Wikipedia*

¹⁸⁵ kelak Benny Moerdani menjadi tokoh legendaris dalam misteri tragedi Tanjung Priok.

¹⁸⁶ Harsutejo, *Jejak Hitam Suharto, Sejarah Gelap G30S dan Sekitar G30S* <http://kontak.club.fr/index.htm>

¹⁸⁷ *Kudeta Militer Suharto dibongkar*, <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/08/26/0011.html>

¹⁸⁸ Harsutejo, *Jejak Hitam Suharto, Sejarah Gelap G30S dan Sekitar G30S* <http://kontak.club.fr/index.htm>

¹⁸⁹ Harsutejo, *Jejak Hitam Suharto, Sejarah Gelap G30S dan Sekitar G30S* <http://kontak.club.fr/index.htm>

G30S. Setelah mengalami pemeriksaan di markas CPM Tegal, barulah diketahui bahwa yang bersangkutan bernama Untung.

Setelah melalui sidang mahmilub yang kilat, Untung pun dieksekusi di Cimahi, Jawa Barat pada tahun 1969, 4 tahun setelah G30S mengobarkan pemberontakannya.

Bagi Soeharto, Untung bukanlah orang lain. Hubungan keduanya cukup erat apalagi dulunya Soeharto pernah menjadi atasan Untung di Kodam Diponegoro. Indikasi kedekatan tersebut terlihat pada resepsi pernikahan Untung yang dihadiri oleh Soeharto beserta Ny. Tien Soeharto. Pernikahan tersebut berlangsung di Kebumen beberapa bulan sebelum G30S meletus. Kedatangan komandan pada resepsi pernikahan anak buahnya adalah hal yang jamak, yang tidak jamak adalah tampak ada hal khusus yang mendorong Soeharto dan istrinya hadir pada pernikahan tersebut mengingat jarak Jakarta—Kebumen bukanlah jarak yang dekat, belum lagi ditambah pada masa tahun 1965 sarana transportasi sangatlah sulit.¹⁹⁰

Menurut David Johnson, Letkol. Untung bukanlah tergolong pada apa yang disebut “perwira progresif”, ia pun bukan tergolong perwira yang tidak puas. Ia lebih tergolong sebagai seorang militer profesional yang berhasil. Ia pun menunjukkan tanda-tanda memiliki pandangan anti komunis. Selama beberapa bulan berkumpul di Penjara Cimahi, Bandung, Subandrio mencatat bahwa Untung bukan orang yang menyukai masalah politik, ia tipe tentara yang loyal kepada atasan. Ia risau dengan adanya isu Dewan Jenderal yang hendak menggulingkan Presiden Soekarno. Kepribadiannya polos dan jujur, hal ini antara lain dibuktikan dengan kenyataan, sampai detik terakhir sebelum eksekusinya, ia masih percaya vonis mati terhadap dirinya tidak mungkin dilaksanakan. “Percayalah Pak Ban, vonis buat saya itu hanya sandiwara,” ujarinya kepada Subandrio. Ia percaya Soeharto mendukung tindakannya terhadap para jenderal dan akan memberikan bantuan seperti dijanjkannya.

Dalam persidangan Letkol. Untung, terungkap ia baru mengenal Syam dan Bono ketika dipertemukan oleh Mayor Udara Suyono kepada sejumlah perwira dalam pertemuan pertengahan Agustus 1965 sebelum gerakan. Untung yang tidak pernah sepenuhnya percaya kepada Syam, mencoba melakukan penyelidikan tentang hubungan rahasianya dengan ketua PKI. Hal ini tidak berlanjut, dan menganggap lebih bijak untuk tidak menantang Syam berhubung ia terdesak waktu bagi penyelesaian agendanya sendiri. Bagi Letkol. Untung, agenda mereka adalah mengambil langkah-langkah untuk menggagalkan kudeta Dewan Jenderal serta melindungi Presiden Soekarno. Kudeta itu diyakininya akan terjadi pada 5 Oktober 1965.

Berdasarkan kesaksian Mayor AU Suyono, maka dapat disimpulkan adanya berbagai pertentangan di antara tokoh gerakan dengan ketegangan yang kian meningkat serta bermacam perbedaan pendapat selama berjalannya waktu yang

mendekat. Letkol. Untung menjadi cemas dan mungkin mempertimbangkan untuk menghentikan semuanya. Rencana gerakan semula adalah tanggal 25 September, tetapi karena pasukan dari Jawa Timur belum tiba, maka gerakan ditunda sampai 30 September.

Dapat disimpulkan Untung bukanlah seorang komunis bawah tanah. Jika ia seorang komunis semacam itu, ia mungkin sekali akan mendapatkan akses lebih mudah untuk menghubungi langsung ketua PKI D.N. Aidit untuk memastikan kedudukan Syam yang sebenarnya. Andaikata ia seorang komunis demikian maka dalam kedudukan dan pangkat yang disandangnya ia bakal memiliki serangkaian pendidikan dan pengalaman politik yang cukup memadai yang akan dengan mudah membuang ilusi pribadi terhadap Jenderal Soeharto, bahwa Soeharto telah berkhianat terhadapnya bagi keuntungan diri dan kelompoknya. Dengan begitu ia akan menyadari kesalahan analisisnya terhadap Soeharto. Ia seorang prajurit yang setia kepada Bung Karno. Dokumen yang terkenal dengan *Cornell Paper* menyebutkan sebelum peristiwa telah bertahun-tahun, Soekarno, para jenderal [AD], pimpinan komunis, dan golongan lain telah terjerat dalam manuver politik yang rumit. Semua itu secara keseluruhan menyebabkan Letkol. Untung melakukan aksinya.

Letkol. Untung dieksekusi mati pada tahun 1969 di Cimahi. Demikianlah nasib seorang prajurit yang naif politik itu tetap memendam ilusi pribadi besar sampai saat terakhir, yang pundaknya telah menjadi panjatan sang manipulator. Adakah itu memang realitas kehidupan di sepanjang sejarah. Pemeo menyatakan itulah politik dalam kenyataan telanjangnya, menghalalkan segala cara.

Suatu misteri yang tak terpecahkan sampai sekarang, apakah hubungan Soeharto dengan Untung dan kaitannya dengan Peristiwa September 1965.¹⁹¹

Kolonel A. Latief

MENURUT riset dan tulisan Harsutejo dalam “*Sekitar G30S*”, pada awal tahun-tahun kemerdekaan, A. Latief, yang pada waktu itu berpangkat kapten, pernah menjadi komandan kompi dari kesatuan di bawah pimpinan Letkol. Soeharto di Yogyakarta. Dalam Serangan Umum 1 Maret di Yogya, menurut A. Latief, sangat banyak korban yang jatuh. Pasukan Kapten Latief yang masuk ke Yogya dari Godean, bergabung dengan Laskar Pesindo yang sudah bersiap di dalam kota di bawah pimpinan Supeno dan Pramuji, menurut A.M. Hanafi merupakan kekuatan militan dalam serangan umum tersebut. Letkol. Soeharto tidak banyak mengambil bagian dalam SU itu, ia hanya enak-enak berada di garis belakang yang aman sembari makan soto di warung.

Belakangan, Latief menjadi Komandan Brigade Infanteri I Kodam Jaya, suatu kedudukan yang strategis. Sebagai Komandan Kostrad pun Soeharto mendekati Kolonel Latief antara lain dengan mendatangi rumahnya ketika Latief

¹⁹⁰ Harsutejo, *Jejak Hitam Suharto, Sejarah Gelap G30S dan Sekitar G30S* <http://kontak.club.fr/index.htm>

¹⁹¹ Harsutejo, *Jejak Hitam Suharto, Sejarah Gelap G30S dan Sekitar G30S* <http://kontak.club.fr/index.htm>

mengkhitankan anaknya. Menurut Subandrio hal ini merupakan suatu langkah “sedia payung sebelum hujan”, suatu saat ia akan dapat memanfaatkannya. Di samping itu “Latief mengantongi rahasia skandal Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949” seperti yang tercantum dalam pembelaannya di depan mahkamah pada 27 Juni 1978. Adegan ‘Soeharto makan soto babat’ itulah yang disebut Subandrio sebagai “skandal Soeharto”.

Hubungan Latief dengan Soeharto

LATIEF sendiri menyatakan karier kemiliterannya nyaris selalu mengikuti jejak Soeharto. Pada gilirannya membuat hubungan Latief dan Soeharto bukan lagi sekadar bawahan dan atasan, melainkan sudah sebagai dua sahabat. Soeharto tahu Latief tak akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan dirinya. Sudah sejak setelah agresi kedua, Latief merasa selalu mendapatkan kepercayaan dari Soeharto sebagai komandannya yakni memimpin pasukan pada saat yang sulit. Ketika Trikora pun ia masih dicari bekas komandannya itu, tetapi Latief sedang mengikuti Seskoad. Pada bulan Juni 1965, Mayjen. Soeharto meminta agar Latief dapat memimpin suatu pasukan di Kalimantan Timur, akan tetapi Umar Wirahadikusuma menolak melepasnya karena tenaganya diperlukan untuk tugas keamanan di Kodam V Jaya.

Di luar dinas, Latief mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup akrab dengan Soeharto dan sering berkunjung ke rumahnya. Ketika Sigit, anak Soeharto dikhitan, istri Latief datang. Sebaliknya ketika Latief mengkhitankan anaknya, maka Soeharto dan Ibu Tien juga datang ke rumahnya. Bahkan pada 28 September 1965 ketika Latief berkunjung ke rumah Soeharto di Jalan H.A. Salim, ia membicarakan soal tukar-menukar rumah dinas. Latief menawarkan rumah dinas baginya di Jalan Jambu bekas kedutaan Inggris yang lebih besar untuk ditukar dengan kediaman Soeharto yang lebih kecil yang sedang ditempatinya.

Menurut Subandrio, Soeharto berhasil membentuk trio bersama kedua orang tersebut di atas, keduanya memiliki posisi strategis yang lebih tinggi dibanding trio yang pernah dibentuk sebelumnya bersama Ali Murtopo dan Yoga Sugama yang telah menghasilkan dirinya ditunjuk sebagai Panglima Diponegoro, lalu naik pangkat menjadi kolonel dengan menggeser calon kuat Kolonel Bambang Supeno yang pengangkatannya tinggal menanti tanda tangan saja.

Kolonel Latief: “Jenderal Soeharto Terlibat G30S!”

DALAM pembelaannya, Kol. Latief tetap menuduh Jenderal Soeharto sebagai ikut terlibat dalam G30S. Ia tidak memiliki ilusi apa pun terhadap Jenderal Soeharto yang sedang berkuasa, orang yang setiap saat dapat mengirimkan dirinya ke dunia lain atau membebaskannya, menilik dalam kenyataannya selama rezim militer orba, Jenderal Soeharto berada di atas hukum. Dapat disimpulkan ia memiliki suatu kesadaran politik cukup tinggi. Selama penahanannya, Latief mengalami siksaan

luar biasa seperti dipaparkan dalam pembelaannya. Menakjubkan, ia masih bertahan hidup meskipun badannya cukup rusak, semangat hidupnya luar biasa. Setelah tekanan berbagai pihak di dalam dan luar negeri, ia baru dibebaskan dari penjara pada permulaan 1999. Dengan keadaan badan yang rapuh, ia terkena *stroke*, akan tetapi semangat hidupnya tidak pernah pudar. Sejak itu ia harus dibantu seorang “penerjemah” untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sekalipun demikian, ia tetap aktif mengikuti berbagai pertemuan, seminar, menulis makalah. Dalam suatu kesempatan bertemu dengan penulis pada permulaan 2001, ia sedang menyelesaikan bukunya tentang SU 1 Maret 1949.

Berbagai pertanyaan timbul terhadap kenyataan bahwa seorang Latief tidak dihukum mati oleh pengadilan yang sekadar mementingkan proses formal dan mengabaikan pembuktian material. Bahkan untuk tokoh yang masih menjabat sebagai menteri pada tahun 1965 seperti Aidit dan Nyoto, dengan entengnya ‘dibereskan’ oleh penguasa militer orba. Rupanya pengadilan terhadap mereka tidak menguntungkan sang penguasa. Sebagian orang mencurigai Latief sebagai melakukan *deal* tertentu dengan Soeharto, sampai saat ini tanpa bukti, atau barangkali menurut logika intelijen. “Seseorang di suatu tempat dalam rezim tampaknya menghendaki ia tetap hidup,” begitu tulis Carmel Budiardjo. Seseorang itu tidak bisa lain kecuali Jenderal Soeharto. Untuk kepentingan apa ia menghendaki Latief hidup, bagian dari suatu *deal*? Macam apa kesepakatan itu, terlalu mahal untuk Latief dan terlalu riskan untuk Soeharto, ini bila ditinjau dari kacamata setelah G30S. Tentu saja Soeharto pun selama berkuasa dengan amat mudahnya setiap saat dapat menyalakan Latief bagai menepuk nyamuk.

Kenyataan bahwa Latief tidak dihukum mati, menimbulkan suatu spekulasi bahwa ia memiliki keterangan yang lebih sempurna yang disimpan di luar Indonesia dengan pesan supaya segera diumumkan jika ia dibunuh. Dalam majalah *Far Eastern Economic Review*, 2 Agustus 1990, diberitakan memoar Latief disimpan di sebuah bank. Keterangan Latief memang memenuhi syarat untuk menyeret Jenderal Soeharto sebagai terlibat G30S golongan A, sesuai Pasal 4 Keputusan Kopkamtib 18 Oktober 1965, semua orang yang terlibat secara langsung, mereka yang mengetahui rencana kup dan lalai melaporkan kepada yang berwajib.

Ada satu hal lagi yang amat mencolok, Kolonel Latief ditangkap sepuluh hari setelah kegagalan gerakan, tetapi ia diadili 13 tahun kemudian pada 1978. Sedang vonisnya baru mendapatkan kepastian hukum pada tahun 1982! Latief merupakan saksi kunci yang dapat menggoyahkan kedudukan Jenderal Soeharto. Pada masa permulaan bahkan pada tahun-tahun permulaan, pengikut BK masih cukup kuat, maka diperlukan waktu bagi Soeharto untuk mengkonsolidasikan diri dan kekuasaannya. Dengan kata lain Soeharto memerlukan waktu, pendeknya, faktor waktu amat penting dalam hal ini. Itulah sebabnya setelah usaha menyiksa dan mengisolasi Latief habis-habisan selama 10 tahun tidak juga membunuhnya, dengan berjalannya waktu ia tidak terlalu berbahaya lagi. Soeharto sudah cukup kuat dan mampu mengangkangi hukum dengan mudah. Demikian ulasan Joesoef

Isak yang sangat menarik, faktor waktulah yang diperlukan oleh rezim Soeharto untuk menaklukkan kesaksian dan bahan apa pun yang dimiliki Latief. Sudah jauh-jauh hari kenyataan ini telah dimanipulasikan dengan keterangan jurubicara militer yang menyatakan Latief dengan sengaja tidak mematuhi perintah dokter [berhubung luka-luka yang dideritanya], sehingga ia tidak cukup sehat untuk muncul di pengadilan, sebagai disiarkan *Kompas*, 26 Maret 1966.

Peran apa sebenarnya yang telah dimainkan oleh Kolonel Latief, semata-mata sebagai seorang militer yang setia kepada Presiden Soekarno, seseorang yang terseret masuk ke dalam perangkap Syam, atau orang Soeharto yang sebahnya dibuang setelah habis manis, atau yang lain? Kalau dia sebah yang dibuang seharusnya ia dilenyapkan setelah dikorek keterangan yang diperlukan kepentingan rezim, agar selanjutnya bungkam. Seseorang yang menamakan dirinya sebagai mantan intel tiga negara sekaligus RI—CIA—KGB men-sinyalir Latief sebagai agen ganda, karena itu ia selamat terus (*Detak*, 5 Oktober 1998:9). Masih dapatkah kita mengharapkan sesuatu yang lain di samping pledoinya di pengadilan, demi kepentingan sejarah bangsa? Sayang sampai meninggalnya tokoh ini pada 2005, tidak ada informasi baru yang disampaikannya.

Trio Sel Komunis?

DALAM berbagai diskusi informal tentang G30S, sebagian orang mengutuk Latief sebagai pengkhianat karena telah melaporkan gerakan yang diikutinya sendiri kepada Jenderal Soeharto. Hal ini perlu dipertanyakan apakah menemui Soeharto sebagai bekas komandannya dan orang yang cukup dekat dengan dirinya itu inisiatifnya sendiri? Kalau bukan, siapa yang memerintahkannya? Sebagian pihak menyatakan dia itu sebenarnya anggota trio sel bawah tanah PKI bersama Letkol Untung dan ... Jenderal Soeharto di bawah binaan Syam [atau Aidit?] sebagai bagian dari BC PKI. Dalam hubungan ini tak aneh jika ada pihak yang menyebut Jenderal Soeharto sebagai gembong PKI yang berkhianat. Ada cerita seorang tokoh yang tidak mau disebut namanya, pada permulaan Oktober 1965 menemui Aidit di Jawa Tengah ketika baru tiba dari Jakarta, D.N. Aidit menyatakan, "Wah celaka, kita ditipu oleh Soeharto!"

Di sepanjang kesaksiannya, Kolonel Latief tidak sekali pun menjatuhkan nama PKI, sangat kontras dengan Syam, Ketua BC PKI. Sayang hal-hal di atas tidak dapat dirujuk silang dengan narasumber lain maupun sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan [atau belum?]. Apakah kita akan mimpi mendapatkan tambahan keterangan dari Jenderal Besar (Purn.) Soeharto yang sedang didapuk sebagai koruptor hiu paling akbar di dunia dan baru memenangkan Rp1 triliun di Mahkamah Agung RI menghadapi majalah *Time*?¹⁹²

¹⁹² Harsutejo, *Jejak Hitam Suharto, Sejarah Gelap G30S dan Sekitar G30S* <http://kontak.club.fr/index.htm>

Kolonel Latief, Gembong atau Korban?

JIKA Latief semasa hidupnya sudi menjelaskan secara rinci, terbuka dan jujur dalam menjawab pertanyaan yang pernah diajukan kepadanya, mungkin akan lebih mudah mendudukan dirinya, meskipun tetap saja akan terbuka kemungkinan kontroversi. Apalagi keterangan sejujur dan serinci apa pun yang diberikan setelah sekian puluh tahun terjadinya suatu peristiwa sejarah, tetap terbuka kemungkinan kerancuan. Sayang, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, yang diajukan ketika dia masih dapat berkomunikasi dengan cukup, tidak pernah dijawabnya dengan jelas. Dapat saya tambahkan bahwa pada tahun-tahun akhir hidupnya dia sulit berkomunikasi karena serangan *stroke* yang telah menutup harapan adanya keterangan berharga yang lain dari pihaknya, kecuali jika ada peninggalan tertulis yang belum pernah dipublikasikan. Pertanyaan tersebut di antaranya meliputi:

(1) Dalam sejumlah pertemuan mereka yang menamakan diri perwira progresif (termasuk Latief) sebelum 1 Oktober 1965, dihadiri (bahkan dipimpin) sejumlah orang sipil yakni Syam, Pono, dan Bono dari BC PKI¹⁹³. Apakah ini berarti konsep G30S dari PKI (*baca: Syam/Aidit*)? Bagaimana sebenarnya hubungan orang-orang militer ini dengan BC? Apa sekadar karena sama-sama alat revolusi sesuai dengan ajaran Bung Karno (BK) dan pendukung BK? Atau suatu komplotan? Hubungan ini diungkapkan dalam buku putih orba sebagai komplotan PKI (atau sebenarnya komplotan Aidit?).

(2) Dalam salah satu pertemuan (ke-5 pada 17 September 1965), anak buah Latief, Mayor Inf. Agus Sigit, Danyon 203, mendebat arahan Syam tentang rencana G30S yang dipandangnya semrawut, tidak profesional. Usulan dia tentang penutupan jalan masuk ke Jakarta dari arah Bogor, Tangerang, dan Bekasi pada saat gerakan, ditolak sebagai kekiri-kirian. Ia menyampaikan pertanyaan tajam, apa sebab presiden tidak memerintahkan segera menangkap Dewan Djenderal (*DD, ejaan lama*)? Apa tidak mampu? Apa sebab orang-orang dalam pertemuan itu yang harus menangkapnya? Selanjutnya (karena tidak setuju), ia tidak lagi mengikuti pertemuan berikutnya, bahkan kemudian pasukannya tidak muncul.

(3) Sebelum 1 Oktober, Latief setidaknya menemui Jenderal Soeharto dua kali. Siapa yang menugaskan dirinya? Apa benar dia datang di RS Gatot Subroto bersama Syam yang berada di tempat agak jauh seperti kesaksian Syam?

(4) Latief sebagai Danbrigif I Kodam Jaya membawahi tiga batalyon tetapi yang ikut bergerak bersamanya cuma dua peleton Detasemen Kompi Markas. Lalu peran apa sebenarnya yang dilakukannya pada 1 Oktober 1965, namanya tidak tercantum dalam daftar Komando Gerakan, tetapi "hanya" sebagai anggota Dewan Revolusi, sedang dari segi pangkat dia nomor dua setelah Brigjen. Supardjo. Apa sebab gerakan dipimpin Letkol. Untung, kenapa bukan Brigjen. Supardjo yang paling tinggi pangkatnya?

¹⁹³ Biro Khusus=BC, ejaan lama.

(5) Berbagai macam persiapan (misalnya gerakan dipimpin Letkol. Untung yang baru lima bulan berada di pasukan Cakrabirawa/Jakarta, pasukan yang mengambil bagian dalam gerakan tidak jelas atau terlalu sedikit tidak seperti yang dilaporkan, logistik tidak memadai), dokumen-dokumen G30S tidak menyebut kedudukan BK. Dekrit No.1 menyebutkan, "Dengan jatuhnya segenap kekuasaan negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Dwikora dengan sendirinya berstatus demisioner"; dalam Keputusan No.2 disebut, "Berhubung segenap kekuasaan dalam Negara RI pada 30 September 1965 diambil alih oleh Gerakan 30 September..." lalu ada penurunan pangkat. Selanjutnya pasukan G30S membunuh tiga orang jenderal di tempat, membunuh sisanya di Pondokgede/Lubang Buaya. Semuanya ini mengarah pada suatu desain agar gerakan itu gagal.

(6) G30S tidak mempunyai rencana alternatif, tetapi hanya ada satu rencana, itu merupakan permulaan kegagalan dari kacamata militer maupun politik seperti ditulis Jenderal Nasution. Atau ini sebenarnya bagian dari skenario karena G30S memang dirancang untuk gagal? Mantan Kolonel Inf. Latief tidak pernah menjawabnya sampai maut menjemputnya pada 6 April 2005 di rumahnya di Tangerang. Kontroversi sejarah G30S masih akan panjang.¹⁹⁴

Pernyataan dan Tuntutan Kol. A. Latief

AKAN tetapi, sebelum meninggalnya, mantan Kolonel Angkatan Darat A. Latief, masih sempat menulis surat pernyataan dan tuntutan, yang dapat kita baca dan kutip dari *Kolom Ibrahim Isa*, dalam harian online *Kabar Indonesia*¹⁹⁵ sbb.:

A. LATIEF, Mantan Kolonel AD SURAT PERNYATAAN DAN TUNTUTAN

Hari ini Rabu tanggal 01 Januari 2003 di rumah Pak SAWITO Kartowibowo, sekali lagi secara tegas dan sejujurnya, demi Allah saya menyatakan, bahwa benar Jenderal SOEHARTO secara langsung TERLIBAT Gerakan Tiga puluh September 1965 yang lalu, dimana diri saya juga terlibat langsung di dalamnya.

Semula saya yakin sebagai pimpinan Angkatan Darat yang amat saya percayai, karena saya pun adalah anak buah andalan dan kepercayaan beliau, apalagi di medan laga yang kemudian terkenal dalam sejarah militer maupun perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai 'Serangan Satu Maret 1949' di Yogyakarta, dimana diri saya adalah komandan yang paling pegang peranan utamanya tetap percaya, bahwa pak Harto loyal terhadap Presiden Soekarno.

Sebagai bukti kepercayaan itu, sewaktu sebelum peristiwa 01 Oktober 1965, dua kali saya melapor kepada Jenderal Soeharto sebelum menculik para Jenderal yang menurut pendapat saya perlu dihadapkan pada Panglima Tertinggi ABRI BUNG KARNO, saya tidak diperingatkan, ditegor apalagi dilarang melakukan gerakan itu oleh Jenderal Soeharto, sehingga saya berpendapat Jenderal Soeharto masih loyal pada Bung Karno.

Ternyata setelah kejadian, pendapat saya itu sangat bertolak belakang dengan pendapat saya semula, justru sebaliknya, terbalik samasekali. Maka dari itu setelah terjadi peristiwa dan menghadapi kenyataan yang terjadi, saya sungguh merasa diri saya dikhianati oleh panglima

saya Jenderal Soeharto. Dan sejak saya diserang di Halim, saya lawan, sebab saya telah yakin Jenderal Soeharto berkhianat terhadap Presiden RI Soekarno.

Dalam pleidooi saya, pak SAWITO tahu, biarpun Jenderal Soeharto telah menjadi Presiden RI, tidak ada niat bagi saya untuk mohon grasi atau bentuk keringanan hukum apapun kepada Jenderal Soeharto, sebab saya tidak bakal minta grasi dll kepada pengkhianat terhadap Bung Karno.

Disaat ini yang penting karena saya amat yakin Jenderal Soeharto adalah pengkhianat bangsa khususnya terhadap Proklamator Bung Karno, kita wajib menuntut Jenderal Soeharto untuk diadili, terutama telah mengabaikan hak-hak asasi manusia, melakukan makar/menumbangkan Pemerintahan Presiden Sukarno yang sah.

Tentu saja untuk itu diri saya sanggup untuk dijadikan SAKSI di Pengadilan dalam negeri maupun luarnegeri bilamana diadili di Mahkamah Internasional, agar segalanya jujur sesuai apa yang sebenarnya terjadi.

Saya berharap penuntutan terhadap Jendral Suharto dapat terselenggara dengan secepatnya, dan saya juga tahu kalau Mr ISKAQ TJOKROHADISOERJO telah menayangkan KLACHT (gugatan) kepada Jaksa Agung RI yang memberi bukti-bukti keterlibatan Jenderal Soeharto dalam G.30.S. yang membunuh para Jenderal A. YANI cs. dan melakukan pemunuhan massal beratus ribu rakyat yang tiada dosa apapun yang justru dibantai dikorbankan oleh Jenderal Soeharto.

Semoga tulisan ini yang saya berikan kepada Pak SAWITO bisa dijadikan data/bukti yang meyakinkan masyarakat luas, dan bahwasanya idee penumpasan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang/masyarakat yang tidak disukai karena sangkaan mereka adalah pengikut Bung Karno adalah dari pribadi Jenderal Soeharto sendiri. Dan harap diketahui, dahulu Jenderal Soeharto itu saya ketahui dengan pasti termasuk 'kelompok Patuk' yang dirahasiakan, agar tidak terbongkar oleh masyarakat luas.

Dan yang penting agar diketahui, bahwa sebenarnya Jenderal Soeharto itu akan ditangkap oleh Jenderal A. YANI karena korupsi terutama di Jawa Tengah, dikenal dengan kasus penyelundupan. Sayangnya waktu itu Bung Karno tidak mengijinkan, dan sebagai tindakan penyelamatannya Jenderal Soeharto dimasukkan ke SESKOAD (Sekolah Staf & Komando AD) di Bandung, dipimpin oleh Kol. SOEWARTO. Ini saya ketahui, karena saya sendiri adalah Angkatan Kedua SESKOAD itu, sedangkan Jenderal Soeharto adalah Angkatan Pertama.

Heran saya, Jenderal Soeharto yang tahu betul kalau ditolong oleh Bung Karno. akhirnya justru mengecek leher Bung Karno, orang yang telah menolong dan menyelamatkannya.

Jelaslah Jenderal Soeharto benar-benar orang munafik (bicara dusta, janji tidak ditepati, dipercaya malah berkhianat). Jadi manusia dholim alias manusia jahat.

Demikianlah pernyataan dan tuntutan saya untuk menjadikan periksa bagi siapapun, yang saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab.

Terimakasih banyak.

Saya yang membuat pernyataan dan menuntut agar Jenderal Soeharto diadili, tertanda (pada materai): A. LATIEF
Alamat: LIPO KARAWACI
Taman Elok No 596 Tangerangang.
Tel (021) 598 6070

* * *

¹⁹⁴ Harsutejo, *Jejak Hitam Suharto, Sejarah Gelap G30S dan Sekitar G30S* <http://kontak.club.fr/index.htm>

¹⁹⁵ *Kolom Ibrahim Isa*, <http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com>.

KESAKSIAN TAMBAHAN ATAS PERNYATAAN DAN TUNTUTAN SAYA
TERTANGGAL 01 JANUARI 2003

Untuk melengkapi Pernyataan dan Tuntutan saya tertanggal 01 Januari 2003 dengan ini saya beri tambahan kesaksian sbb:

1. Bahwa benar sebelum terjadi pengkhianatan/makar Jenderal Soeharto terhadap Presiden RI/PANGTI ABRI BUNG KARNO, saya sekeluarga memiliki hubungan kekeluargaan yang amat akrab dengan Jenderal SOEHARTO sekeluarga, yang dengan sendirinya kami sering beranjangsana ke rumah beliau dan saling membantu
2. Dari sekian banyak kunjungan itu, seingat saya sekitar tanggal 18 September 1965 saya sekeluarga berkunjung seperti biasanya ke rumah keluarga Jenderal Soeharto/Pangkostrad di Jl Agus Salim, Jakarta. Dalam kesempatan berdua, saya bertanya kepada Jenderal Soeharto: 'Apakah benar ada Dewan Jenderal AD yang hendak melakukan kup merebut kekuasaan dari tangan Presiden RI BUNG KARNO?' Jenderal Soeharto menjawab: 'Ya, saya sudah tahu dan sudah mendengar dari bekas anak buah Mayor CTN/Vet. SOEBAGYO dari Yogyakarta'. Saya bertanya lagi: 'Siapa Jenderal itu dan dimana?' Jenderal Soeharto menjawab lagi: 'Akan diselidiki dulu.' Mendengar jawaban Jenderal Soeharto demikian, saya berkata kepada Jenderal Soeharto: 'Kalau benar ada yang mau kup terhadap Presiden RI Bung Karno, saya siap menghadapinya!'
3. Seperti biasanya pada tanggal 28 September 1965 sekitar pukul 20,00 (malam hari) saya dan istri berkunjung ke rumah Jenderal Soeharto/Pangkostrad di Jl Agus Salim Jakarta, di saat itu sewaktu berdua dengan saya, Jenderal Soeharto menegaskan pada diri saya bahwa Jenderal Soeharto MENHENDAKI (kata yang ditekankan kepada diri saya) Presiden SOEKARNO DIGANTI, karena selalu membikin ribut. Saya jawab: 'Tidak mungkin, karena BUNG KARNO didukung rakyat!'; ----
4. Pada tanggal 29 September 1965, antara pukul 09.00 - 10.00 (siang hari) saya menemui Jenderal Soeharto yang di saat itu sedang menunggu putranya yang tersiram sup panas yang sedang dirawat di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, disitu saya melapor kepada Jenderal Soeharto, bahwa kami akan menculik para jJenderal Angkatan Darat untuk dihadapkan kepada PANGTI-ABRI Presiden SOEKARNO, dan yang akan dilaksanakan besok malam (sehari berikutnya) tanggal 30 September 1965; Menanggapi laporan saya itu, Jenderal SOEHARTO bertanya: 'Siapa Komandan Operasinya?' Saya jawab: 'Letkol UNTUNG' (yang saya mengetahui Letkol Untung telah dikenal baik oleh Jenderal Soeharto). Seterusnya Jenderal Soeharto lalu berkomentar: 'Ya sudah, saya mau istirahat'. Selanjutnya kami berdua berpisah.
5. Kesaksian seperti yang tersebut diatas, sebetulnya juga telah saya kemukakan dalam pemeriksaan untuk B.A.P. (Berita Acara Pemeriksaan) maupun dalam persidangan sewaktu saya sendiri diajukan selaku TERDAKWA, tetapi tidak diurus sebagaimana seharusnya, termasuk permohonan saya selaku tertuduh, agar Jenderal Soeharto dapat diajukan di muka Pengadilan Militer itu selaku SAKSI UTAMA, selalu DITOLAK!

Demikian kesaksian tambahan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk melengkapi dan yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Pernyataan dan Tuntutan saya tertanggal 01 Januari 2003 untuk kesaksian dan bukti pengadilan terhadap tertuduh Jenderal Soeharto karena telah memimpin melakukan coup d'etat/makar dengan menggunakan kekuatan senjata militer terhadap Presiden R.I. yang sah BUNG KARNO, disertai membantai rakyat banyak yang

tidak berdosa yang saya tuntut dan ajukan demi tegaknya kedaulatan hukum, kebenaran dan keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jakarta, 07 Februari 2003
Saya yang membuat Pernyataan dan Kesaksian
tertanda (di atas materai)
A. LATIEF
Mantan Kolonel AD (Nrp. 10685)

Alamat:
LIPPO KARAWACI
Taman Elok No 596
Tangerang. Telp. (021) 5986070

"Sungguhpun begitu gamblangnya isi pembelaan Kolonel Latief di depan Mahmilti II Jawa Bagian Barat pada tahun 1978 bahwa Jenderal Soeharto terlibat langsung dalam G30S dan kemudian menggulingkan Presiden Soekarno, namun penguasa orde baru terus-menerus memprogandakan bahwa yang menjadi dalang G30S adalah PKI."¹⁹⁶

Brigjen Supardjo, G30S Dirancang untuk Gagal

IA berasal dari Divisi Siliwangi, pasukan Supardjo-lah yang telah berhasil menangkap gembong DI, Kartosuwiryo, dan mengakhiri pemberontakan DI di Jawa Barat. Kemudian ia ditugaskan ke Kostrad, lalu menjabat sebagai Panglima Kopur II Kostrad di bawah Jenderal Soeharto. Tokoh ini juga cukup dekat dengan Soeharto. Hampir dapat dipastikan bahwa tokoh ini pun, seperti kedua tokoh sebelumnya, yakni Letkol. Untung dan Kolonel Latief, seseorang yang memiliki kesetiaan tinggi kepada Presiden Soekarno.

Supardjo merupakan anggota kelompok yang biasa disebut kelompok Kolonel Suwanto (Seskoad Bandung), yang di dalamnya terdapat Alamsyah, Amir Makhmud, Basuki Rakhmad, Andi Yusuf, Yan Walandow. Yang terakhir ini seorang kolonel yang ikut pemberontakan Permesta, kemudian menjadi pengusaha. Ia mempunyai hubungan lama dengan CIA dan menjadi petugas Soeharto dalam mencari dana dari luar negeri. Ia pun anggota trio Soeharto—Syam—Latief, cs. [Untung, Supardjo], begitu tulis A.M. Hanafi. Ketika Mayjen. Soeharto melakukan perjalanan ke Kalimantan sebagai Wakil Panglima Kolaga, ia menyempatkan diri menemui anak buahnya, Brigjen. Supardjo. Sebagai komandan pasukan tempur dalam hubungannya dengan konfrontasi terhadap Malaysia, Supardjo sangat risau terhadap korupsi para pembesar militer AD dalam pengiriman suplai ke garis depan. Kenyataan itu sangat mengurangi kekuatan dan semangat pasukannya bahkan membuat frustrasi. Malahan dia tidak memiliki pasukannya sendiri yang dapat digerakkan dengan efektif.

¹⁹⁶ dikutip dari sebuah tulisan Dr. Willy R. Wirantaprawira, LL.M., Ph.D.

Peran apa pula yang dimainkan olehnya selain yang telah diumumkan oleh mahmilub? Adakah ketiga tokoh militer ini secara sendiri-sendiri ataupun bersama (serta sejumlah yang lain) telah masuk ke dalam perangkap yang dipasang Syam atas skenario Suwanto—Soeharto—CIA? Ia disebutkan sebagai memiliki hubungan erat dengan tokoh yang selalu ‘berada di mana-mana’, Syam Kamaruzaman. Sejauh mana apa yang disebut sebagai ‘hubungan erat’ itu tidak ada penjelasan lebih jauh. Perlu ditambahkan, Brigjen. Supardjo pernah mendapatkan pendidikan militer di Amerika yakni di Fort Bragg dan Okinawa. Tentulah pemilihannya selain berdasar kriteria di dalam negeri yakni pihak AD, juga telah melalui seleksi ketat baku yang dikendalikan oleh CIA. Sampai di mana tangan dinas rahasia CIA bermain dalam hubungan ini?

Di depan mahmilub, jenderal ini telah menantang agar bukan cuma G30S yang diadili, tetapi juga Dewan Jenderal (DJ). Untuk itu ia siap membuktikan keberadaan DJ, kegiatan mereka masa prolog yang menjurus pada Peristiwa G30S dan masa yang sama serta bahan-bahan setelah kejadian. Tentu saja permintaan semacam itu hanya menjadi suara di padang pasir tanpa gaung dalam situasi pengadilan penuh rekayasa serta tekanan politik dan penindasan fisik masif rezim orba. Sedang permintaan sederhana yang amat wajar dari Sudisman di mahmilub untuk menghadirkan Supardjo sebagai saksi tidak dipenuhi.

Ia pribadi yang disukai bawahannya, seorang militer yang setia kepada BK. Ketika ditahan di RTM Budi Utomo, Jakarta, dalam keadaan diisolasi ia mendapat simpati banyak orang, dari petugas maupun tahanan lain. Ia tidak mau diistimewakan meskipun ia seorang jenderal. Ia membagikan kiriman yang diterimanya kepada tahanan lain. Sikap dan tingkah lakunya pada hari-hari terakhirnya di RTM sangat mengesankan, jantan, bermutu jenderal, sopan dan ramah terhadap siapa pun. Demikian yang dicatat oleh Oei Tjoe Tat. Salah seorang putra Jenderal Supardjo mengisahkan detik-detik terakhir sebelum dia dieksekusi pada 16 Mei 1970. Ketika bertemu keluarganya, dia meminta mereka menggenggam dan menghancurkan sebuah apel, lalu dia memberikan ke masing-masing anaknya apel yang telah digigitnya untuk dihancurkan. “Kalau Kalian terdiri dari kepingan-kepingan kecil, akan gampang dihancurkan. Tapi jika kamu bersatu, mungkin akan hancur, tapi diperlukan kekuatan besar....” Pada saat terakhir, “Saya lihat ayah berjalan menuju tempat eksekusi. Dia mengenakan baju olahraga putih yang menurut dia bisa sekaligus untuk kafan. Ayah tenang berjalan menuju lapangan sambil menyanyikan lagu *Indonesia Raya*.” Demikian yang ditulis *Tempo*, 9 Oktober 2005.

Menurut ulasan David Johnson dari perjalanan karier ketiga tokoh G30S, maka hubungan mereka bukan karena mereka tergolong “perwira progresif”, tetapi karena keterpautan ketiganya dengan Jenderal Soeharto. Selanjutnya penetrasi intelijen AD dan CIA terhadap AU dan Yon Cakrabirawa sangat masuk akal seperti halnya penetrasi terhadap PKI. Menurut penulis yang sama, ketiga tokoh ini merupakan aktor komplotan yang cerdas dari rancangan CIA—Soeharto. Jika

demikian halnya, CIA juga akan melancarkan operasi perlindungan dan pemberian identitas baru bagi mereka untuk kemudian dimukimkan di luar Indonesia, suatu prosedur standar CIA. Akan tetapi risiko besar akan kebocoran menjadi lebih cocok jika mereka dlenyapkan setelah dimanfaatkan, David Johnson yang menulis makalahnya pada 1976 untuk keperluan penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Church pada Kongres AS seputar peran AS dalam pembunuhan massal di Indonesia 1965/1966, luput mengamati peran cukup penting sang agen yang sangat berpengalaman yang bernama Syam Kamaruzaman.

Sebagai diulas oleh Letkol. (Pnb.) Heru Atmodjo, jika G30S itu suatu gerakan militer yang serius, [bukan sekadar dirancang untuk gagal, HS], seharusnya dipimpin seorang jenderal seperti Brigjen. Supardjo yang secara intelektual maupun pengalaman lapangan memadai. Salah satu kupasan mutakhir sejarah G30S ialah buku John Roosa (2007) yang menganalisis apa yang disebut sebagai “Dokumen Supardjo” yang juga dijuluki sebagai “jenderal merah.” Dalam buku Jenderal Nasution (1988), dokumen ini telah diulasnya secara singkat, antara lain sbb.: (1) Tidak ada diskusi maupun rancangan Syam, dkk. menghadapi kegagalan gerakan, semuanya beres, pasti menang; (2) Setelah gagal, mereka bingung, tidak ada perintah jelas, pimpinan operasi tidak menarik kesimpulan apa pun; (3) Pasukan tidak mendapat makanan, bahkan ada yang minta ke Kostrad. Pasukan meninggalkan RRI tanpa ada instruksi; (4) Rapat memutuskan menghentikan perlawanan, masing-masing bubar, pulang, sambil menunggu situasi.

Dari butir pertama, Jenderal Supardjo memosisikan dirinya berada di luar Syam, dkk. Hal ini sesuai dengan kenyataan ia tidak ikut serta dalam serangkaian pertemuan persiapan yang dilakukan Syam, dkk. Dari butir ini dan selanjutnya menjurus dan memperkuat kesimpulan, G30S dirancang untuk gagal.¹⁹⁷

Lettu. Doel Arief

AKHIR petualangan Lettu. Doel Arief pun tak jelas. Sebagai komandan Pasukan Pasopati yang menjadi operator G30S, ia adalah tokoh kunci. Ia bertanggung jawab terhadap operasi penculikan jenderal-jenderal pimpinan AD. Tapi Doel Arief, yang ditangani langsung oleh Ali Moertopo, hilang bak ditelan bumi. Bentuk hukuman apa yang diberikan Ali Moertopo bagi Doel Arief? Mungkin saja ia langsung di-dor, seperti halnya D.N. Aidit oleh Kolonel Yasir Hadibroto. Atau, bukan tidak mungkin, ketidakjelasan Doel Arief lebih mirip dengan misteri tentang Syam Kamaruzaman.

Kalau dilihat secara holistik—dengan asumsi bahwa G30S betul-betul merupakan skenario kudeta—peran Doel Arief tidak begitu penting. Setidaknya, ia hanyalah pion yang dimainkan para elite di atasnya. Perannya hanya sebagai pelaksana untuk menculik para jenderal. Namun kalau diasumsikan bahwa G30S merupakan skenario genial untuk menabrakkan PKI dan AD guna memunculkan

¹⁹⁷ Harsutejo, *Jejak Hitam Suharto, Sejarah Gelap G30S dan Sekitar G30S* <http://kontak.club.fr/index.htm>

konstelasi politik baru di Indonesia, maka Lettu. Doel Arief adalah *key person*, seperti halnya Syam.

Dalam sebuah operasi intelijen, antara operator dan pengguna (desainer gerakan), tak ada struktur komando langsung. Yang ada hanyalah pivot atau penghubung secara tidak langsung, yang biasanya dimainkan oleh beberapa aktor kunci. Kalau Syam dianggap sebagai desainer G30S, dan Untung adalah pelaksana—maka tesis yang muncul adalah; Doel Arief sebagai pivot. Dalam istilah intelijen, ia adalah *faktor cut*—disadari atau tidak disadari oleh Doel Arief sendiri. Kalau operasi intelijen, ternyata gagal, *faktor cut* memang harus di-*cut* artinya di-dor agar tidak meninggalkan jejak. Berdasarkan atas asumsi di atas, dapat disusun rekonstruksi sebagai berikut. Syam mendesain gerakan yang dirancang untuk dilakukan Untung. Namun, ada pihak ketiga yang memanfaatkan Lettu. Doel Arief untuk mengacaukan gerakan. Cara kerjanya mirip dengan virus komputer yang dirancang untuk mengacaukan program/sistem. Kalau semula tidak ada perintah bunuh terhadap para jenderal, tetapi oleh Doel Arief (selaku komandan Pasukan Pasopati), diberikan instruksi “tangkap hidup atau mati”. Akhirnya gerakan menjadi kacau-balau.

Betulkah eks Lettu. Doel Arief merupakan *faktor cut* yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga? Lalu, siapakah pihak ketiga itu? Soeharto-kah ?

Sulit untuk menyimpulkan. Perkembangan yang terjadi sungguh-sungguh rumit. Lettu. Doel Arief bergabung bersama Pelda. Djahurub dalam operasi di rumah Nasution. Tetapi ternyata operasi itu gagal. Nasution lolos. Bahkan Pierre Tendean dan Karel Sasuit Tubun (pengawal di rumah Leimena) menjadi korban. Operasi penculikan di rumah Nasution itu sendiri sama sekali tidak elegan. Sebab dari awal sudah memancing keributan; yang berarti membuka kemungkinan untuk gagal.

Menurut keterangan yang diperoleh dari pengadilan Gathut Soekresno, sebetulnya diperoleh petunjuk tentang Doel Arief. Ketika ditanya hakim apa tindakan yang diambil Gathut (selalu petugas pengamanan basis di Halim, di bawah komando Mayor Sujono) setelah jenderal-jenderal itu dibawa ke Lubang Buaya, Gathut menjawab:

“Doel Arief memaksa meminta saya supaya dibereskan saja. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat, kemudian saya menulis surat kepada Mas Jono (maksudnya, Mayor Udara Sujono), yang disampaikan per kurir yang bunyinya ialah bagaimana mengenai para jenderal yang sudah ada di Lubang Buaya, terutama yang masih hidup. Oleh karena waktu itu kami dalam keadaan gugup, maka kami suruhkan kurir untuk membawa surat sampai kedua kali untuk minta keputusan Mas Jono, yang pada waktu itu berada di Penas (Gedung Penas). Lagi pula oleh karena Saudara Doel Arief waktu itu mengulangi lagi permintaannya, memaksa-maksa dan membentak-bentak, maka kami jawab kami belum mengerti bagaimana saya harus perbuat, karena ketentuan harus datang dari Mas Jono.”

“Mula-mula kita sepakati para jenderal itu dihadapkan kepada Presiden/Panglima Tertinggi Bung Karno di istana. Pelaksanaannya oleh Resimen Cakrabirawa yang dikomandoi Letkol. Untung. Komando pelaksanaannya Letnan Doel Arief. Tanpa sepengetahuan Brigjen. Supardjo dan saya sendiri, Sdr. Syam ikut Letkol. Untung. Kami baru tahu setelah selesai pelaksanaan atas laporan Letnan Doel Arief. Saya dan Brigjen. Supardjo kaget. “Kenapa sampai mati?” tanya Pak Pardjo. Letnan Doel Arief menjawab bahwa Syam menginstruksikan bahwa bila mengalami kesulitan menghadapi para jenderal, diambil saja hidup atau mati. Mereka melaksanakan perintah Syam karena tahu bahwa Syam duduk dalam pimpinan intel Cakrabirawa.”¹⁹⁸

Sersan Mayor Boengkoes

EKS Sersan Mayor Boengkoes adalah salah satu pelaku langsung dari Tragedi September 1965. Dia dibebaskan dari LP Cipinang pada tanggal 25 Maret 1999. Sebagai Komandan Peleton Kompi C Batalyon Kawal Kehormatan Cakrabirawa yang berada di bawah Untung, dia mengaku bahwa dia hanya menjalankan perintah atasannya, yaitu Lettu. Doel Arief.

Ia diperintahkan untuk ‘mengambil’ Mayjen. M.T. Haryono, hidup atau mati. Sebelum dilakukan pengambilan tersebut, dia diberi penjelasan oleh atasannya tersebut bahwa ada sekelompok jenderal yang menamakan dirinya “Dewan Jenderal” yang bertujuan meng-*coup* Presiden Soekarno.

Ketika ditanya apakah Boengkoes mengerti dengan yang dimaksud “Dewan Jenderal”, dia menjawab dalam masa G30S tersebut ada dua kubu yang tampaknya lagi berkonflik dalam kemiliteran terutama di Angkatan Darat. Yaitu apa yang disebut sebagai “Dewan Jenderal” dan “Dewan Revolusi”.

“Dewan Jenderal” adalah yang berniat melakukan *coup* pada Presiden Soekarno sedangkan “Dewan Revolusi” adalah yang berniat menyelamatkan Presiden Soekarno. Menurut Boengkoes ada ketidakserasian dalam Angkatan Darat tidak hanya menyangkut Soekarno.

Sekitar pukul setengah tiga dini hari semua unsur pasukan yang bertugas untuk melakukan penangkapan dikumpulkan dan diberi *briefing* akhir. Pasukan dibagi dalam tujuh sasaran dengan dalam tiap titik sasaran terdiri atas satu peleton pasukan. Waktu ‘pengambilan’ sangat singkat, antara 15—20 menit dan tidak dihitung dengan waktu berangkat. Dan sebelum pukul 06.00 harus sudah dibawa kesemua tujuh orang jenderal tersebut.

Waktu itu Serma. Boengkoes mendapat sasaran Mayjen. M.T. Haryono. Sebelum penangkapan, Serma. Boengkoes melakukan observasi dulu. Yang dia ingat adalah waktu itu pintu menghadap ke selatan. Setelah Boengkoes mengetuk pintu dan meminta izin untuk kedua kalinya, pintu ditutup dan dikunci dari dalam.

¹⁹⁸ Kolektif(i)noCoup d’etat 65”kolic65@progind.net

Waktu itu keadaan gelap sekali karena oleh pemilik rumah semua lampu dimatikan.

Dalam hati Boengkoes timbul pertentangan antara melanjutkan atau tidak tetapi sebagai seorang tentara dia teringat akan perintah komandannya yang harus dituruti. Akhirnya didobraknyalah pintu tersebut dan ketika itu Boengkoes terkejut karena melihat kelebatan bayangan putih dan secara refleksi dia menarik pelatuk dan terjadilah penembakan itu. Gugurlah satu bunga bangsa Mayjen. M.T. Haryono. Menurut pengakuan Boengkoes, pada saat dia melakukan penembakan, dia tidak mengetahui bahwa yang ditembaknya adalah Mayjen. M.T. Haryono.

Pukul 05.30 pagi tanggal 1 Oktober, Boengkoes dan pasukannya sudah tiba di tempat semula. Baru ketika matahari sudah panas dilakukanlah eksekusi terhadap para jenderal yang masih hidup. Dan itu pun dilakukan dengan sopan dengan dipapahnya para jenderal sampai bibir sumur dan baru kemudian ditembak.

Menurut pengakuan Boengkoes tidaklah benar kalau ada pesta dan nyanyi-nyanyi seperti yang ditampakkan pada film G30S tersebut. Suasana saat itu benar-benar sepi. Boengkoes mengatakan bahwa pada saat itu hanya terdengar tiga suara (yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telinganya jika mengingat kejadian tersebut), yaitu suara desiran angin di pepohonan, suara tangis bayi, dan suara ayam berkokok. Semua orang yang ada di situ terdiam dan tentara pun seperti robot, bahkan air putih pun terasa pahit.

Boengkoes mengatakan bahwa dia benar-benar merasakan penyesalan yang terdalam dan hatinya hancur begitu mengetahui semuanya. Bahkan ketika keluar dari penjara pun terbersit banyak pertanyaan apakah nanti ia mampu hidup layak dan wajar di tengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana disebut tadi, menurut pengakuan Boengkoes, waktu penembakan atau eksekusi para jenderal adalah jam setengah sembilan pagi.

Malam hari pada tanggal 1 Oktober, pasukan Boengkoes dipindah ke suatu tempat, entah ke mana. Yang jelas mereka melintasi lapangan udara. Tanggal 2 Oktober, Boengkoes pulang ke asrama. Setelah diterima oleh kepala asrama, kemudian Boengkoes dibawa ke suatu tempat yang ternyata adalah LP Cipinang.¹⁹⁹

Gembong G30S, Syam Kamaruzaman

TELAH lama beredar desas-desus, Syam Kamaruzaman, gembong G30S yang misterius itu masih hidup. Setelah jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998, desas-desus itu menjadi lebih gencar dalam alam keterbukaan. Bahkan ada yang mengaku pernah bertemu dengan Syam di Meksiko. Eksekusi 1986 bersama Supono Marsudijoyo alias Pono boleh jadi benar, tetapi Syam “yang lain”, begitu argumennya. Amat menarik, pihak AD telah mengidentifikasi paling tidak 3 (tiga) “Syam” seperti tersebut di bawah. Selama itu penampilan Syam berubah-ubah, ia misterius antara lain karena riwayat hidupnya yang tidak jelas. Konon ia

membujang sampai umur 40 tahunan, juga tidak diketahui bagaimana keluarganya. Nama aslinya ialah Syamsul Qomar bin Mubaidah, dalam dokumen 1960-an disebut Kamarusaman bin Ahmad Mubaidah. Nama samarannya Sjamsuddin, Djiman, Karman, Ali Muchtar, Ali Sastra. Nama terakhir ini tertera di dalam KTP pada saat ditangkap di Cimahi, 8 Maret 1967.

Menurut Letkol. Ali Said, S.H., Syam bukan tokoh PKI sepele, ia dapat disejajarkan dengan D.N. Aidit. Ia sebagai jenderal intel PKI yang menjadi anggota PKI sejak 1949. Teman-teman dekat Syam ketika muda tidak percaya ia memiliki kaliber semacam itu. Sejak pindah ke Yogya, riwayat yang sebenarnya menjadi buram. Ada yang mengatakan ia adik kelas Munir (kelak Ketua SOBSI) di Sekolah Dagang. Ada yang mengatakan ia di Taman Siswa karena menjadi anggota diskusi ‘Kelompok Pathuk’ 43 yang mayoritasnya dari Taman Siswa. Menurut Prof.Dr.Ir. Haryosudirjo, mantan menteri masa Bung Karno, Syam bersekolah di SMT(eknik).

Syam bertindak sebagai intel di Resimen 22 Brigade 10, Divisi Diponegoro dengan pangkat letnan satu, eks Laskar Gabungan Yogya. Begitu komentar spontan anggota tim mahmilub, Subono Mantovani, S.H., ketika melihat foto Syam; di masa Yogya itu Subono Mantovani juga berpangkat letnan satu, sebelumnya berada dalam satu Kelompok Pathuk bersama Letkol. Soeharto. Komandan resimennya ketika itu Mayor Haryosudirjo tersebut di atas. Berdasar pengakuan Syam yang diceritakan kepada Latief, ia berada dalam pasukan Soeharto ketika SU 1 Maret 1949.

Syam seorang pemuda yang mendapatkan arahan Johan Syahrullah, tokoh PSI di Kelompok Pathuk. Para pemuda Pathuk ini yang memprakarsai permintaan agar Sri Sultan mengajak anggota BKR Soeharto untuk berdiplomasi dengan Jepang guna menyerahkan senjatanya. Di antara para pemuda itu terdapat Sumantoro dan Syamsul Qamar Mubaidah. Bersama Soeharto mereka mendatangi markas Jepang pada masa kemerdekaan itu. Jadi Soeharto telah mengenal Syam sejak permulaan kemerdekaan. Demikian tulis A.M. Hanafi.

Sekitar 1947, Syam mulai berkenalan dengan D.N. Aidit yang mengajaknya untuk aktif di Pemuda Tani, afiliasi BTI. Sebagai intel pada Batalyon 10 Yogya, Lettu. Syam di bawah Letkol. Soeharto. Sejak itu Syam berhubungan dekat dengan Aidit maupun Soeharto. Hubungan persahabatannya dengan Soeharto berjalan selama 20 tahun. Soeharto tentu saja tak pernah menyinggung sedikit pun kalau ia telah mengenal orang misterius yang bernama Syam ini sudah sejak lama, seolah ia orang yang tak pernah tahu-menahu dengan tokoh ini. Pada tahun 1949, Syam pindah ke Jakarta membantu Munir di BTI. Sekitar 1950, Syam mendirikan SBP(elayaran) dan SBB(ecak) yang bermarkas di Jalan Guntur, Jakarta. Sebagai ketua SBP pada 1950 ia membantu pembebasan Aidit yang baru datang dari Vietnam [menurut mitos] yang ditahan di Tanjungpriok karena tidak punya tiket.

Pada tahun 1950—57, ia di SOBSI Jakarta, lalu sebagai sekretaris. Pada 1957 ia diangkat sebagai pembantu pribadi Aidit, Ketua PKI. Dalam setahun ia masuk

¹⁹⁹ Kolektif(i)nfoCoup d’etat 65”kolic65@proginet.net

kepengurusan sebagai anggota Departemen Organisasi. Ia disebut sebagai pernah menjadi informan Komisaris Polisi Mudigdo di Pati yang kelak menjadi mertua Aidit. Barangkali dari sini pulalah Aidit kemudian menjalin hubungan dekat dengan Syam, serta memberikan kepercayaan besar kepadanya. Peter Dale Scott menyebut Syam sebagai seorang kader PSI, pada tahun 1950-an ini juga ia sering datang dan menginap di rumah Soeharto di Yogya. Menurut Subandrio, yang juga Ketua Badan Pusat Intelijen (BPI), pada 1958, Syam perwira intelijen AD serta mitra lokal CIA. Dengan demikian Syam mempunyai hubungan tertentu dengan CIA, baik secara langsung atau pun tidak. Ketika Kolonel Soeharto memasuki Seskoad di Bandung, Syam ikut serta dalam kursus militer itu, demikian menurut penyelidikan Poulgrain. Hubungan mereka begitu rumit. Kolonel Suwanto dididik di Amerika, ia sahabat Guy Pauker, orang penting CIA dalam hubungan dengan Indonesia, pernah mengajar di Berkeley, konsultan RAND Corporation yang menitikberatkan kontak-kontaknya dengan kalangan militer AD Indonesia. Suwanto pernah diundang Pauker meninjau perusahaan tersebut pada 1962. Pauker mendapat tugas melakukan sapu bersih terhadap PKI. Antara lain lewat Suwanto-lah CIA melakukan operasinya misalnya dengan apa yang disebut *civic mission* AD, yang sebenarnya merupakan *civic action* CIA dalam melakukan kontak-kontak dengan kelompok anti komunis di kalangan AD. Rupanya lewat jalur inilah Soeharto pertama kali berhubungan dengan CIA.

Berdasar pemeriksaan dokumen-dokumen yang ada di AS, Belanda, dan Indonesia, dalam majalah resmi PSI, nama Syam tercantum sebagai Ketua PSI Ranting Rangkasbitung, Banten. Dalam arsip Belanda, Syam tercatat sebagai intel Recomba Jawa Barat. Recomba merupakan pemerintah federal boneka Belanda, bisa saja Syam menyelundup menjadi spion untuk mengorek rahasia Belanda, akan tetapi hal ini aneh. Dalam berbagai koran 1950-an, ia disebut sebagai informan dari Komando Militer Kota (KMK) Jakarta. Sejumlah narasumber perwira yang menjadi tapol di Salemba menyebutkan Syam pada tahun 1951 tercatat sebagai kader PSI yang mendapatkan pelatihan partai itu di antara 29 kader yang lain.

Syam – Sang Agen Ganda?

PADA 1960-an dengan bentuk lebih jelas pada 1964, Syam diangkat menjadi ketua Biro Khusus (BC), suatu jaringan intelijen PKI yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan Aidit selaku ketua Politbiro CC PKI. Tugas Syam, pertama mengumpulkan info untuk diolah dan diserahkan kepada Aidit. Kedua, membangun sel-sel PKI di tubuh ABRI dan membinanya. Tugas Syam yang lain mengadakan evaluasi dan melaksanakan tugas-tugas yang tak mungkin dilakukan alat-alat formal PKI. BC mempunyai aparatnya sendiri yang tidak diketahui oleh pimpinan formal PKI. Ia memberikan laporan, mengolah informasi dan menyampaikannya kepada Aidit secara langsung. Oleh Aidit, bahan-bahan dan keputusan disodorkan pada Politbiro untuk disetujui dan dilaksanakan.

Menurut orang-orang PKI yang pernah dekat dengan dirinya, ia dengan enteng mengeluarkan pistol dan meletakkannya di meja jika kehendaknya ditentang. Menurut seseorang yang mengaku sebagai mantan agen CIA, Soeharto mendapat perhatian cukup dari BC PKI dan dibina melalui Syam, Untung, dan Latief. Dalam hal ini Soeharto mendapat kategori sebagai 'orang yang dapat dimanfaatkan'. Hal ini cocok dengan keterangan Untung dan Latief bahwa Soeharto akan membantu gerakan mereka, dan dibuktikan dengan didatangkannya Yon 530 dan Yon 454 dalam keadaan siap tempur. Sedang yang lain menamainya sebagai trio sel PKI.

Pada tahun 1967, majalah *Ragi Buana* menamai Syam sebagai '*double agent*', ia menjadi informan Kodam Jaya sejak 1955 sampai kudeta 1965. Untuk memperdalam ilmunya pada 1962 ia dikirim ke RRT, Korea Utara, dan Vietnam, termasuk memperdalam bidang intelijen terutama menyangkut strategi mempersiapkan dan menggerakkan pemberontakan bersenjata. Di Vietnam ia melakukan pekerjaan praktik di lapangan. Majalah ini menyebut Syam dan Aidit telah terjebak ke dalam jaring-jaring spionase Washington, Peking, dan Moskow. Sebutan *double agent* digunakan koran-koran dan radio termasuk radio Nederland ketika itu, selanjutnya pers tidak lagi menggunakan istilah tersebut. Rupanya Kopkamtib kemudian sangat berkeberatan akan penggunaan istilah itu yang dapat merugikan Jenderal Soeharto, lalu melarangnya.

Sebagai Ketua BC PKI, Syam lapor langsung kepada Aidit. Karena Aidit satu-satunya pimpinan PKI yang membentuk BC serta mengetahui personilnya, maka BC ini merupakan partai dalam partai dengan Syam sebagai orang tertingginya. Seperti disebutkan oleh Sudisman, BC dibentuk tanpa persetujuan CC PKI, dalam hal ini Aidit telah melanggar konstitusi partai. Dengan demikian BC bukan aparat partai, tetapi aparat Aidit. Di pihak lain yang mengontrol seluruh struktur aparat dan sepak terjang BC bukan Aidit, tetapi Syam. Jika Syam seorang agen ganda, maka praktis seluruh struktur BC merupakan alat dalam kendali musuh PKI.

Peranan Syam Kamaruzaman

BANYAK saksi sejarah teman-teman Syam meragukan peran besarnya dalam G30S. Ia sama sekali tidak memberikan kesan sebagai pemikir, artinya ia sekadar wayang yang dimainkan oleh dalang mahir di balik layar sejarah. Di Yogya ia memang pernah berada di lingkungan olah pikir. Kadang-kadang ia datang ke kelompok diskusi Mahameru I, sebuah rumah di belakang SMA 3 Yogya, kemudian menjadi kantor PSI. Tempat itu untuk diskusi antara lain Sutan Syahrir dan H.A. Salim. Menurut Sumadi Mukajin, Syam dikenal pendiam, tertutup dan ... agak goblok. Sedang Kelompok Pathuk kemudian berkembang menjadi salah satu simpul terkuat jaringan politik bawah tanah Syahrir. Di situ buku-buku Marx, Adam Smith, Machiaveli, Gandhi, Lenin, dsb., menjadi bahan kajian.

Terdapat persamaan modus operasi antara percobaan kudeta 3 Juli 1946 yang telah menculik PM Syahrir dengan G30S. Mula-mula Letkol. Soeharto berada dalam

satu kubu dengan atasannya Komandan Divisi Mayjen. Soedarsono. Mereka, termasuk pasukan Soeharto menduduki RRI dan Kantor Telepon Yogya pada 2 Juli 1946. Anehnya kemudian Letkol. Soeharto berbalik menangkap kelompok yang mencoba melakukan kudeta. Ketika itu Syam sebagai intel Batalyon 10 pimpinan Letkol. Soeharto. Rupanya G30S merupakan ulangan permainan politik semacam itu.

Bagaimana sebenarnya hubungan Syam dengan Letkol. Untung, cs.? Menurut Kolonel Latief, Syam telah memotong jalur atau melakukan intersepsi terhadap pasukan Lettu. Doel Arief. Ia mengenal Syam sebagai intel pembantu atasannya, Letkol. Untung. Ketika Doel Arief bertanya bagaimana caranya mengajak para jenderal itu untuk menghadap Presiden Soekarno, maka Syam tegas menjawab dengan mantap, "Tangkap, hidup atau mati." Syam sendiri di mahmilub menyebutnya sebagai perintah Aidit, sesuatu yang bertentangan dengan perintah Letkol. Untung. Tidak ada bukti dan alasan apa pun juga yang dapat diketengahkan apa sebabnya G30S membunuh para jenderal yang diculiknya dalam keadaan terpaksa meskipun beberapa orang memang melawan. Dengan demikian ini merupakan skenario aslinya.

Siapakah sebenarnya yang memerintahkan Syam melakukan tindakan semacam itu? Yang pasti tindakan itu sama sekali tidak menguntungkan gerakan G30S. Berbagai pengumuman Dewan Revolusi termasuk pembentukan Dewan Revolusi itu sendiri yang sama sekali tidak menyebut nama Soekarno sangat tidak menguntungkan baik G30S secara keseluruhan maupun Untung, cs. dan Aidit. Dengan telah ditembakmatinya Aidit tanpa diajukan ke pengadilan maka Syam mempunyai kesempatan untuk memonopoli seluruh keterangan tentang G30S dalam hubungannya dengan PKI. Hanya Syam sebagai Ketua BC PKI dan Aidit sebagai Ketua Politbiro PKI yang mengetahui seluk-beluk biro tersebut dalam hubungan dengan peristiwa G30S serta hubungannya dengan sejumlah perwira militer.

Demikianlah keterangan-keterangan Syam dalam persidangan mahmilub, baik sebagai terdakwa maupun saksi telah memonopoli fakta-fakta yang seluruhnya menjurus kepada digiringnya Aidit dan PKI sebagai terdakwa yang sebenarnya, dengan pion-pionnya Letkol. Untung dan kawan-kawannya. Maka Syam bertindak baik sebagai dirinya maupun sebagai Aidit tanpa secuil pun keterangan Aidit. Nama Syam berada dalam daftar gaji Kodam Jaya. Di Kodam Jaya, Syam berhubungan dengan Latief, di samping hubungannya dengan Kostrad. Agar lebih meyakinkan maka dalam semua proses kemunculan Syam, ia dilukiskan sebagai seorang komunis sejati yang amat dekat dengan Ketua Aidit. Syam selalu mengakui dia yang memberikan perintah, dan perintah itu semuanya berasal dari Aidit. Pendeknya Aidit merupakan dalang seluruh peristiwa. Ia *toh* tidak akan membantahnya dari kubur.

Begitu Syam mempunyai kesempatan bicara, ia begitu bernafsu menceritakan apa saja yang ia ketahui tentang G30S. Di pengadilan ia menyombongkan dirinya

sebagai otak di belakang gerakan. *Buku Putih* menyebutkan salah satu pekerjaan Syam melakukan penyusupan ke tubuh Angkatan Bersenjata dan melakukan apa yang disebut pembinaan. Dalam kenyataannya ia telah melakukan pembinasaaan, bukan pembinaan terhadap sejumlah besar personil ABRI yang berhaluan kiri dan pendukung BK. Rupanya ia memang mempunyai misi melakukan infiltrasi ke tubuh ABRI untuk mencari tahu dan mengidentifikasi siapa-siapa yang termasuk 30% personil simpatisan PKI yang telah mencoblos palu-arit dalam pemilu 1955, untuk didepak, dihukum dan dilynepkan sebagai kelanjutan rasionalisasi yang tak tuntas masa pemerintahan Hatta. Dengan demikian ia membentuk BC sebagai partai dalam partai dengan pola yang sama seperti yang dilakukan AD yakni negara dalam negara. Demikian analisis M.R. Siregar tentang peran besar Syam bagi PKI.

Seluruh pengakuan dan "pengakuan" serta tindakan Syam tidak secuil pun merupakan pembelaan terhadap PKI atau Aidit. Sebaliknya ia terus-menerus mendiskreditkannya. Dengan demikian ia tidak bekerja untuk PKI atau Aidit. Maka tidak aneh jika banyak orang termasuk para pengamat dan pakar mempertanyakan orang misterius ini, dan untuk siapa ia bekerja. Seluruh proses mahmilub diarahkan untuk menggiring pembenaran tuduhan terhadap PKI serta menjeratnya dari segi hukum, sedang di lapangan dilakukan pembantaian tanpa ampun. Dengan demikian seolah segalanya dilandasi hukum.

Kegiatan Setelah Gagal

BERBEDA dengan tokoh PKI lain yang terus terbaca gerak-geriknya selama buron seperti ditulis *Buku Putih*, tampaknya buku ini "kesulitan" menjelaskan sepak terjang Syam di Jawa Barat sebelum ditangkap pada tahun 1967. Bersama itu intelijen militer mampu mengikuti terus kegiatan bawah tanah pimpinan PKI kecuali Syam. Begitu hebatkah jenderal intel PKI ini berkelit bagaikan siluman hingga kegiatannya tidak terdeteksi?

Baru saja didemonstrasikan betapa konyol dan cerobohnya rancangan dan jalannya peristiwa G30S, sejak dari penculikan, eksekusi para jenderal dan pengumuman-pengumuman RRI Jakarta atas nama Letkol. Untung dengan *Dewan Revolusi*-nya, buruknya logistik, dsb. Seperti disebut Jenderal Nasution, mereka tidak membuat rencana alternatif, dan ini berarti secara strategis sudah suatu kegagalan. Selanjutnya ketika komandan kontrol G30S menghubungi tiga sektor yang telah mereka bentuk, sebagai disebut Brigjen. Supardjo, semuanya kosong. Bukankah ini salah satu indikasi kuat Syam sebenarnya berada di kubu lain yakni kubu Jenderal Soeharto, yang kegiatan sebenarnya juga untuk sang jenderal? Dia sendiri yang melakukan sabotase terhadap gerakan yang dikendalikannya. Gerakan ini dirancang untuk gagal. Maka Latief berkeyakinan Syam tidaklah bertindak atas nama pribadi, dan yang dituding olehnya tak lain daripada Jenderal Soeharto.

Betapa rumitnya hubungan Syam yang konon pernah mengenyam pendidikan intelijen di Vietnam, Korea Utara, dan Cina ini, sekaligus pendidikan Seskoad.

Dunia intelijen memang selalu ruwet tidak sederhana, berliku-liku, terbuka untuk segala hal dan kemungkinan yang paling kontradiktif pun serta hampir-hampir mokal, tetapi tertutup rapat bagi dunia luar. Seorang ksatria pahlawan penumpas kudeta militer berlumuran darah mungkin sekali adalah salah satu pelaku utama di baliknya, suatu ironi yang menjungkirbalikkan segala hal. Dan itu bernama dunia intelijen.

Menurut keyakinan sementara orang seperti tersirat dalam buku Hanafi dan Subandrio, bertahun-tahun Syam sebenarnya telah memasang jebakan untuk Aidit dengan menjalin hubungan pribadi maupun hubungan organisasi partai. Hubungan itu terus meningkat dengan meningkatnya keterampilan Syam dalam bidang intelijen yang telah digaulinya sejak zaman revolusi fisik. Begitu hebatkah tokoh ini, atau dan begitu bodohnyaakah D.N. Aidit sebagai Ketua Politbiro beserta pendukungnya?

Ada 'Tiga Orang Syam'?

SYAM ditangkap pada 8 Maret 1967 di Cimahi. Berdasarkan dokumen-dokumen CIA yang telah dibuka untuk umum seperti dicatat oleh Peter Dale Scott, pesakitan itu merupakan orang ketiga yang diidentifikasi oleh pihak AD sebagai orang yang bernama 'Syam'. Jadi paling tidak ada tiga orang 'Syam'. Ia ditahan di RTM Budi Utomo Jakarta pada 27 Mei 1967. Beberapa bekas tahanan politik yang pernah berkumpul atau dekat dengan sel tempat Syam, menyatakan selama ditahan ia bertindak seperti seorang bos. Ia dapat mondar-mandir dengan leluasa di tahanan, mengenal banyak petugas militer seperti berada di lingkungannya sendiri. Banyak tahanan politik yang dianggap cukup penting dibawa ke RTM untuk dapat diidentifikasi oleh Syam agar bisa "mendapatkan tempat yang tepat". Sering ia tiba-tiba tidak berada di tempat tanpa diketahui oleh orang lain akan keberadaannya.

Sangat umum diketahui para tapol, ada sejumlah orang yang dekat dengan para pejabat, memberikan berbagai informasi yang benar maupun karangannya sendiri, ketika diminta atau tidak untuk meringankan dirinya sendiri dan memberatkan orang lain. Bahkan beberapa orang dijadikan interogator dan ikut menyiksa teman-temannya sendiri, ikut serta dalam operasi penangkapan, dsb. Orang semacam itu biasanya disebut pengkhianat, biasanya dengan cepat dapat diketahui oleh tapol yang lain. Syam jauh lebih rumit dan lebih "besar" daripada sekadar kelompok ini.

John Lumengkewas, seorang mantan Wakil Sekjen PNI dan ditahan selama 7 tahun menuturkan kesaksiannya ketika ditahan di RTM tentang tokoh Syam. Ia punya pengetahuan ensiklopedis bagi orang-orang yang dituduh PKI. Ia mendapat perlakuan istimewa di RTM, berbeda dengan tapol lainnya. Fasilitas di selnya mewah untuk ukuran waktu itu, menu makanannya berbeda, ia bebas berada di

luar sel, akrab berbincang-bincang dengan petugas. Dia sebentar-sebentar dipanggil oleh petugas dari pintu blok, lalu pergi ke kantor RTM. Nampak sekali Syam sudah lama berhubungan dengan kalangan ABRI tertentu. Oei Tjoe Tat, S.H., mantan menteri negara yang juga pernah ditahan di RTM, menggambarkan Syam sebagai orang yang tidak tahu diri. Kalau ia keluar untuk diperiksa, orang lain menjadi tidak tenteram karena ulahnya. Ia orang misterius yang dijauhi oleh para tahanan yang lain.

Syam dijatuhi hukuman mati oleh mahmilub pada 9 Maret 1968. Di tahun-tahun berikutnya ia menyombongkan diri kepada rekan-rekannya di penjara bahwa ia masih bertahan hidup meski sudah dijatuhi hukuman mati. Ia selalu memiliki informasi untuk diberikan dalam kesaksian terhadap orang lain yang diadili selama bertahun-tahun. Ia mulai masuk Penjara Cipinang pada 27 Oktober 1972. Menurut kesaksian para tapol, Syam dan komplotannya, Subono, masih bisa keluar penjara serta menulis laporan untuk kepentingan AD. Bahkan pada awal tahun 1980, ia keluar-masuk di berbagai instansi militer. Menurut keterangan seorang mantan perwira Kopkamtib, Syam memang dipakai sebagai informan militer.

Berdasarkan catatan, Syam diambil dari Cipinang pada 27 September 1986 jam 21.00 oleh petugas Litkrim Pomdam Jaya atas nama Edy B. Sutomo (NRP.27410), lalu dibawa ke RTM Cimanggis. Tiga hari kemudian tengah malam bersama dua kawannya ia dibawa dari Cimanggis dan pada jam 01.00 sampai ke Tanjungpriok. Mereka diangkut dengan kapal laut militer ke sebuah pulau di Kepulauan Seribu dan dieksekusi pada jam 03.00. Tak ada keterangan mengapa pelaksanaan eksekusi terhadap Syam—dan sejumlah tokoh yang lain—terus diulur-ulur hingga 14 tahun dihitung dari sejak masuk Cipinang, bahkan 18 tahun bila dihitung sejak vonis mahmilub.

Adakah itu Syam yang asli atau 'Syam' yang lain? Agaknya akan tetap menjadi misteri sebagaimana misteri berbagai hal seputar G30S. Menurut pengakuan Latief ketika ditahan di Cipinang pada 1990, ia berada satu blok dengan Syam. Sementara itu seorang pejabat di lingkungan Depkeh RI menyatakan Syam dikeluarkan dari Cipinang pada September 1986 atas izin Presiden Soeharto. Antara dua keterangan ini sekadar perbedaan waktu, mungkin saja Latief tidak akurat. Jalannya peristiwa menunjukkan peran agen Syam menjadi salah satu kunci penting keberhasilan operasi yang sedang dilancarkan oleh sahabat lamanya, Jenderal Soeharto. Mungkinkah orang yang agaknya tahu betul akan "isi perut" Soeharto dalam hubungan dengan G30S dibiarkan hidup bebas?²⁰⁰

Banyak-sedikitnya, kita dapat melihat dan mengetahui profil orang-orang yang pegang peranan dalam Gerakan 30 September 1965, seperti Letkol. Untung, Kol.A.Latief, Brigjen. Supardjo, Lettu. Doel Arief, Sersan Boengkoes, dan tokoh misterius Syam Kamaruzaman, yang merupakan gembong G30S. Kita juga bisa melihat dan menarik benang-benang halus, tentang hubungan antara mereka

²⁰⁰ Harsutejo, *Jejak Hitam Soeharto, Sejarah Gelap G30S dan Sekitar G30S*. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

dengan Panglima Kostrad Jenderal Soeharto, dan sudah tentu juga bisa melihat bagaimana “hubungan” antara Jenderal Soeharto dengan Gerakan 30 September 1965.

Karenanya, kurang lengkap, jika kita tidak menulis atau mengetahui tentang profil Jenderal Soeharto yang pegang peranan besar dalam G30S. Untuk ini, sekali lagi, kita berterima kasih atas hasil riset dan tulisan Harsutejo, yang kita kutip dari berita *Rakyat Merdeka*, Rabu, 17 Mei 2006, seperti di bawah ini.

Soeharto: Senyum yang Buram dari Manusia Langka

HARSUTEJO dalam tulisannya *Jejak Hitam Soeharto*, mengatakan: Sumber informasi tentang Jenderal Soeharto tentulah cukup melimpah, baik sumber “klasik” seperti karya O.G. Roeder, *Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto*, Prof.Dr. Donald W. Wilson, *The Long Journey From Turmoil To Self-Sufficiency*, tentu saja juga otobiografinya yang dituliskan oleh Brigjen. G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., dan masih banyak lagi, tentu termasuk buku yang dicetak luks, *Jejak Langkah Pak Harto*. Belakangan terdapat cukup banyak sumber “posmo” seperti *Soeharto, Ramuan Kecerdasan dan Masa Kecil yang Liat*, berisi kajian kepribadian dan tingkah laku politik, dan masih banyak lagi seputar Soeharto dalam hubungannya dengan pembahasan rezim orba dengan segala macam aspek dan tetek-bengeknya. Dan yang mutakhir adalah karya akademisi Australia Robert E. Elson, *Soeharto, A Political Biography* (Oktober 2001) yang diluncurkan di Jakarta pada 21 Januari 2002 di CSIS.

Hal ini amat berbeda bila kita hendak mencari informasi tentang D.N. Aidit, Syam Kamaruzaman, Letkol. Untung, dan yang lain. Apalagi bahan-bahan tentang mereka ini telah diringkus oleh penguasa orba, selama 32 tahun bagi mereka yang mencoba-coba hendak menyentuhnya serta-merta terkena palu subversi. Tentulah daya tarik Soeharto jauh lebih hebat, juga setelah tumbang, dengan bahan bertebaran di seluruh media massa selama 32 tahun kekuasaan dan sesudahnya.

Hal itu tidak berarti bahwa segala sesuatu tentang Jenderal Soeharto lalu menjadi terang benderang. Masih sederet masalah yang buram, atau barangkali sebagian akan tetap buram di sepanjang sejarah sampai ia meninggalkan kita semua. Mungkin menarik untuk dianalisis dari segi ilmu psikologi seperti yang dicontohkan oleh Laboratorium Psikologi Sosial Universitas Indonesia terhadap Soeharto berupa analisis psikobiografi dan analisis kualitatif terhadap pidato-pidato nonteksnya (Bagus Takwin, cs., 2001:8).

Mungkin saja Soeharto menikmati timbulnya keburaman sejarah seputar dirinya seperti soal Surat Perintah 11 Maret. Sedang keburaman tentang soal Serangan Umum 1 Maret 1949, belakangan dengan telak telah dibuktikan bahwa dengan sengaja telah disebar oleh Soeharto, pembengkokan dan pemalsuan sejarah yang dilakukannya sekadar untuk memberikan tambahan legitimasi terhadap dirinya.

Tidak berlebihan kalau sosok Soeharto disebut sebagai manusia langka. Selanjutnya muncul berbagai macam spekulasi akan latar belakang keluarga, budaya, pendidikan, serta strategi dan taktiknya untuk mendapatkan kekuasaan (Bagus Takwin, cs., 2001:11). Mungkin sekali hal ini berhubungan dengan berbagai keburaman yang sengaja atau tidak sengaja ditebar sekitar dirinya sebagaimana riwayat Ken Arok pun penuh misteri, yang melalui pundak kambing hitam Kebo Ijo telah melakukan kudeta terhadap Raja Jayakatwang dari Tumapel pada abad ke-13, bahkan sekaligus mempersunting permaisuri cantik jelita Ken Dedes.

Buku asli O.G. Roeder berjudul *The Smiling General, President Soeharto of Indonesia* (Gunung Agung, 1969), seperti kita ketahui di depan publik Soeharto memang boleh dibilang selalu tersenyum. Dalam kata pendahuluan ditulis, “Dengan senyum khas menyelubungi segala emosi yang sanggup membikin para diplomat kehilangan akal....” (Roeder, 1977:xiii).

Dalam buku lain yang dituliskannya, *Indonesia, A Personal Introduction* (1987), Roeder mengartikan senyum orang Indonesia dapat juga “*be ironical, cunning and tricky*” (“berarti kebalikannya, licik dan penuh tipu daya”), kita tidak tahu yang mana mungkin hendak diterapkan oleh Roeder untuk senyum Soeharto.

Soeharto memulai karier militernya sebagai kopral KNIL (*Koninklijk Nederlands-Indisch Leger*) alias tentara penjajah Belanda pada 1940-an di Batalyon XIII di Rampal, Malang. Karena prestasinya ia segera naik pangkat menjadi sersan. “Kariernya menjadi buah pembicaraan kawan-kawan sesama tentara, oleh karena umumnya orang-orang dari Jawa mengalami diskriminasi dalam KNIL jika dibandingkan dengan orang Maluku dan Sulawesi Utara yang dianggap ‘lebih setia’...” (Roeder, 1977:171).

Perjalanan karier yang cemerlang ini di samping karena ketekunan Kopral KNIL Soeharto tentunya juga kesetiannya menjadi pertimbangan penting. Pada saat yang sama, Bung Karno dan banyak pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda sedang mengalami pembuangan; bahkan seorang jurnalis perintis, pemimpin Sarekat Islam sekaligus sastrawan komunis Mas Marco telah beberapa tahun meninggal di pembuangan Boven Digul.^{201 202}

Semenjak 1 Oktober 1965, semenjak Mayjen. Soeharto mengangkat dirinya sendiri menjadi Panglima Angkatan Darat tanpa mengindahkan perintah Presiden/Pangti ABRI, pembunuhan-pembunuhan, penculikan, penangkapan, penahanan, dan pemerkosaan terhadap orang-orang komunis dan golongan kiri yang dikomunikasikan berlangsung terus-menerus di segenap pelosok dan penjuru tanah air. Hal ini diakui langsung oleh Brigjen. RPKAD Kemal Idris, yang

²⁰¹ Mas Marco [Kartodikromo] (1890—1935), pernah menjabat Sekretaris Sarekat Islam Sala, pendiri Inlandsche Journalisten Bond 1914. Karena artikel-artikelnya ia dijebloskan ke penjara pada 1917—1919. Ia masuk PKI bersama Semaun, Darsono, Tan Malaka, Alimin, dsb. Dibuang ke Boven Digul pada 1927 dan meninggal di sana pada 1935. Salah satu novelnya *Student Hijo* (1918) telah diterbitkan kembali pada tahun 2000 dalam dua versi masing-masing oleh Aksara Indonesia dan Bentang, keduanya dari Yogya.

²⁰² Harsutejo, *Jejak Hitam Soeharto, Sejarah Gelap G30S dan Sekitar G30S*. <http://kontak.club.fr/index.htm>.

mengatakan: “Soeharto memberi perintah untuk membersihkan semua ... maka ini yang saya lakukan. Saya perintahkan semua prajurit saya untuk patroli dan menangkap setiap orang PKI. Selama masih ada satu orang komunis di Indonesia, akan ada operasi militer melawan satu orang itu.”²⁰³

Bahkan Frank Palmos, koresponden *Herald Sun*, 1962–1972, mengatakan, “Saya melihat banyak mayat yang rusak dan terpotong-potong, anggota tubuh, kaki, lengan, di sungai ... ini berlangsung hari demi hari, malam demi malam. Ratusan jumlahnya.”²⁰⁴

Dan tak ketinggalan, Inggris juga membuat program propaganda “*Suara-suara dari Sumur*” yang disiarkan oleh stasiun radio yang dibangun di samping rumah Soeharto. Hal ini membuat manusia-manusia Indonesia yang tergabung dalam segala bentuk organisasi komando aksi di bawah perlindungan dan dorongan Angkatan Darat, ibarat serigala berbaju domba, lupa agama, lupa kemanusiaan, lupa moral dan lupa hukum, dengan segala kebrutalan dan kejahatan dan kebiadabannya, berpesta pora mencincang, membunuh manusia-manusia tak bersalah yang dituduh komunis. Entah kepercayaan apa, agama apa yang mereka anut sehingga mereka bisa berbuat dan bertindak di luar perikemanusiaan seperti itu?

Di seluruh Indonesia, dalam waktu beberapa bulan dari mulai Oktober 1965 sampai 3 bulan pertama 1966, menurut perkiraan, jutaan manusia dibunuh dengan berbagai cara. Digorok, disiksa, dipenggal dan kepalanya ditancapkan di pagar rumah korban, dibantai dan ditembak secara massal, dibakar hidup-hidup bersama rumah dan kampungnya, dibuang ke jurang, sungai dan lautan. Tanah dan harta para anggota PKI atau golongan kiri pun dijarah dan dikuasai oleh tentara dan milisi-milisi ciptaannya semacam KAMI, KAPI, KAPPI, dst. Kebencian rasial pun dikobarkan. Kantor, sekolah, rumah, tanah dan daerah pertokoan yang dimiliki kaum etnis Tionghoa, baik yang tergabung dalam Baperki atau tidak, direbut kemudian diduduki sebagai markas tentara, rumah jenderal, kantor Golkar, atau markas milisi orba, sampai sekarang. Puluhan ribu orang dibuang dan dipekerjakan di Pulau Buru dan Nusakambangan, bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagai orang buangan, dan kebutuhan golongan yang merampok kehidupan mereka!²⁰⁵

Mantan Direktur CIA Asia Timur Jauh, William Colby, menyebut “sukses menumpas komunis di Indonesia sebagai yang terbaik dan seperti dikehendaki.” Tahun 1965 atas perintah William Colby, pemancar bergerak sangat canggih dengan frekuensi tinggi, dikirim dari pangkalan Angkatan Udara AS Clark di Filipina dan ditempatkan di markas Kostrad Jenderal Soeharto.²⁰⁶

Setelah pembunuhan massal di desa-desa, aksi menggulingkan Bung Karno dilancarkan di kota-kota selama bulan Januari dan Februari. Di Jakarta, aksi-aksi mahasiswa yang kemudian dikenal dengan Angkatan ‘66 berlanjut, menghujat Soekarno, menuntut pembubaran PKI dan pembubaran kabinet. Mereka mengatasnamakan “Amanat Penderitaan Rakyat”, sementara rakyat dianiaya dan dibunuh di seluruh penjuru Indonesia. Dicituskanlah Tritura pada Januari 1966. Mereka yang tergabung dalam KAMI, KASI, KAPPI, Laskar ARH, dst., berdemonstrasi di siang hari, berpesta-pora di malam hari. Ketika Kolonel Sarwo Edhie Wibowo kembali dari tugas “pembersihan” di luar Jakarta, mereka mengadakan arak-arakan menyambut kedatangan sang penjagal. “Tiga juta orang telah dibantai,” katanya dengan bangga!²⁰⁷

Tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno memimpin sidang kabinet yang hanya bisa berlangsung 10 menit di Istana Merdeka. Soeharto tidak hadir dalam sidang kabinet di istana itu dengan alasan sakit, namun melangsungkan rapat di rumahnya di Jalan H. Agus Salim bersama 3 orang jenderal. Sementara itu, Istana Negara di mana sidang kabinet dilangsungkan, dikepung oleh pasukan bersenjata tak dikenal (tanpa memakai identitas) yang di kemudian hari diketahui adalah pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Kemal Idris atas perintah Soeharto.

Pengakuan Frans Seda, Kemal Idris, dan Sarwo Edhi dalam *Tempo*, 15 Maret 1986, mengatakan bahwa pengepungan Istana Merdeka itu adalah berdasarkan strategi Soeharto untuk membikin panik sidang kabinet dan kemudian menangkap Subandrio. Presiden Soekarno diterbangkan ke Bogor. Tiga orang jenderal suruhan Soeharto mengikuti Presiden Soekarno ke Bogor. Hasilnya, lahir Supersemar. Jadi, Supersemar adalah buah pengepungan istana oleh pasukan liar.

Di Istana Bogor, dalam kesaksian Dr. Subandrio, digambarkan unsur tekanan yang diberikan oleh ketiga orang jenderal utusan Soeharto itu kepada Presiden Soekarno.

Untuk lebih jelas, apa dan bagaimana tekanan para jenderal utusan Soeharto itu, dengan ini kita kutip pengakuan seorang saksi, yang pernah disiarkan oleh sebuah surat kabar di Jakarta, *SiaR*, pada 26/8/98, sbb.:

Letda.Inf.(Purn.) Soekardjo Wilardjito (71) yang mengaku sebagai seorang saksi mata, memberikan kesaksian bahwa penyerahan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) ke Soeharto merupakan hasil dari todongan pistol Jenderal Basuki Rahmat dan Jenderal Panggabean ke arah Soekarno di Istana Bogor. Menurut laporan harian *Bernas* dan *Surya*, Selasa, 24/8/98, Soekardjo mengaku menyaksikan sendiri aksi para jenderal suruhan Soeharto itu mengintimidasi Soekarno untuk menandatangani Supersemar.

“Waktu Jenderal Basuki Rachmat dan Jenderal Maraden Panggabean menodongkan senjata pistol FN 45 ke arah Bung Karno, sementara Jenderal M. Jusuf menyodorkan map warna merah muda berisi sebuah dokumen,” kata Soekardjo kepada wartawan di

²⁰³ Silakan lihat film dokumen: *Shadow Play*.

²⁰⁴ Silakan lihat film dokumen: *Shadow Play*.

²⁰⁵ [Indymedia-jakarta] *Mass Grave in Indonesia*

²⁰⁶ Maruli Tobing, *Kompas*, 9 Februari 2001, *Perang Urat Syaraf...*

²⁰⁷ [Indymedia-jakarta] *Mass Grave in Indonesia*

kediamannya di Kampung Gancangan 5, Sidomulyo, Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Menurut penuturan Soekardjo, dini hari itu Bung Karno cukup terkejut dengan cara yang dilakukan para jenderal. “*Lho, ini diktumnya kok militer,*” komentar Bung Karno yang ditirukan kembali oleh Soekarjo.

Saat itu Soekardjo adalah perwira *security* yang berdiri menjaga di belakang Bung Karno.

Di harian *Bernas* digambarkan posisi diagram duduknya BK dengan empat jenderal. Ketika melihat penodongan, Soekardjo akan mencabut pistolnya, tetapi dilarang oleh Bung Karno. Beberapa hari kemudian Soekardjo ditangkap oleh pasukan RPKAD dan Kostrad, kemudian ditahan dengan berpindah-pindah tempat sejak 1966 sampai 1977, tanpa surat penahanan.

Kesaksian Soekardjo di kantor LBH Yogyakarta ini dinilai oleh sejumlah kalangan sebagai pengakuan yang cukup berani setelah 32 tahun lebih tak seorang pun yang berani mengungkap misteri sejarah bangsa Indonesia pada September 1965—Maret 1966. Kalaupun ada, mungkin hanya berbentuk hasil penelitian atau kajian orang luar negeri yang beredar secara sembunyi-sembunyi di kalangan tertentu. “Pengakuan saksi mata belum ada. Pengakuan Soekardjo merupakan langkah awal untuk bisa membuka misteri 1965—1966,” kata sumber *SiaR*.

Sumber ini menyebut bahwa kudeta “Supersemar” ini kemudian dilanjutkan oleh Soeharto dengan mengadakan *witchhunt* berupa operasi militer besar-besaran terhadap anggota-anggota PKI dan para simpatisannya.²⁰⁸

Setelah kekuatan massa PKI dan ormasnya dihancurkan, teror dan ketakutan ditebar, para penentang dibungkam selama-lamanya, Jenderal Soeharto mengirimkan Jenderal Basuki Rachmat, Jenderal Amir Machmud, dan Jenderal Yusuf ke Istana Bogor untuk memaksa Soekarno, lewat todongan pistol, untuk menekan Bung Karno agar menyerahkan kekuasaan pada Soeharto. Bung Karno tidak bersedia. Tetapi dia memerintahkan Soeharto untuk “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi”. Surat itulah yang kemudian disebut dengan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret 1966), yang sekarang tak ketentuan rimbanya. Satu lagi penghilangan bukti sejarah.

Oleh Soeharto, perintah yang isinya jelas itu, “menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi”, disalahgunakan. Dia pakai untuk merebut kekuasaan dari Bung Karno selangkah demi selangkah. Berbekal Supersemar yang kemudian disalahgunakan, Jenderal Soeharto melempangkan jalan menuju pengambilan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya. Ia memerintahkan penangkapan dan penahanan paling tidak 100 anggota DPR-GR/MPRS dan 15 menteri dari kabinet yang sedang berkuasa. Lewat tekanan Jenderal Suhardiman, Wakil Sekber Golongan Karya yang dibentuknya, memaksa Jenderal Nasution sebagai pimpinan

MPRS/DPRGR untuk melaksanakan sidang umum. Lahirlah kemudian TAP MPRS 25/1966 yang intinya membubarkan PKI, menyatakannya sebagai organisasi terlarang, serta melarang penyebaran ideologi Marxisme dan Leninisme di seluruh Indonesia. Bung Karno ditangkap dan ditahan atas tuduhan *terlibat* G30S/PKI. Betapa, seorang presiden dituduh ikut mendalangi kudeta terhadap pemerintahan dirinya sendiri! Sesuatu hal yang tak masuk akal.

Sidang Istimewa MPRS pun menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI yang berkuasa penuh pada 1967. Kudeta yang merangkak itu pun tercapai. Undang-undang pertama di bawah pemerintahan Soeharto yang disahkan adalah UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing. Jalan bagi penjarahan, perkosaan, pembunuhan, dan perbudakan rakyat Indonesia akhirnya terbuka lebar, sampai *sekarang!*

Enver Masud, seorang *Engineering Management Consultant* untuk Bank Dunia dan penemu The Wisdom Fund, dalam tulisannya “*One Million Indonesian Died in US Backed Coup*” yang diterbitkan pada 15 September 1999, mengutip tulisan Deirdre Griswold, yang berjudul “*The Second Greatest Crime of the Century*” yang mengatakan:

“Antara 1 Oktober 1965, dan April atau Mei 1966, rezim militer golongan kanan Jenderal Nasution dan Soeharto merampas kekuasaan dan mengonsolidasi kekuatannya di Indonesia. Dalam waktu yang kurang dari 7 bulan, tidak kurang dari satu juta rakyat dibantai. Setelah dua puluh lima tahun berjuang melawan Jepang, Belanda, dan imperialis Amerika, kudeta 1965 dan pembantaian jutaan rakyat itu melicinkan jalan bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang datang berbondong-bondong untuk ‘berpesta pora’.

Unilever membangun perusahaan minyak dan bahan makanan. Uniroyal mendapatkan perkebunan karet dan perusahaan pabrik getahnya. Union Carbide, Mesin Jahit Singer, National Cash Register menerima kembali hartanya yang diambil alih dalam masa revolusi. Eastern Airlines bersekutu dengan Garuda Indonesia. Mobil Oil mendapat jaminan hak eksplorasinya.

Hanya untuk \$75 *million*, Freeport Sulphur mendapat kontrak untuk mengeksploitasi tembaga di Irian Barat, yang 20 kali jauh lebih kaya dibandingkan dengan tembaga yang terdapat di Arizona dan Utah (Amerika). Freeport mengaku telah membayar hampir \$1,7 *billion* dalam pembayaran langsung atas pajak, keuntungan saham, honorarium²⁰⁹ kepada pemerintah Indonesia.”²¹⁰

Undang-undang pertama di bawah pemerintahan Soeharto yang disahkan adalah UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing. Menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Soeharto terang-terang menjual dan menggadaikan kekayaan bumi persada tanah air kepada imperialis, sedang rakyat, terutama di Irian Barat tetap menderita dan jauh tertinggal. Apa yang dilakukan Soeharto, adalah benar-

²⁰⁸ *Kudeta Militer Suharto Dibongkar*, <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/08/26/0011.html>

²⁰⁹ uang sogok?—Pen.

²¹⁰ *The Wisdom Fund*—<http://www.twf.org>

benar bertolak belakang, berputar 180 derajat dari apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan revolusi Indonesia.

Menjelang kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Bung Karno pernah berkata:

“Dalam peperangan Asia Timur Raya ini, maka segenap kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya tekad harus kita tujukan kepada hancur leburnya [imperialisme] Amerika dan Inggris ini!” Sedang para anggota Peta (Pembela Tanah Air) yang berbaris berjalan tegap membawa spanduk yang terbentang bertuliskan: “*Hantjoerkan Moesoeh kita! Inggeris–Amerika!*”²¹¹

Sekarang? Sekarang justru Soeharto tidur bersama musuh! Berangkulan dengan imperialis! Jerih payah dan usaha para pemimpin Indonesia, para *founding father* Indonesia, perjuangan dan pengorbanan Soekarno dan rakyat Indonesia, dirusak-binasakan, dihancurkan-luluhkan oleh jenderal fasis dan licik Soeharto! Benar seperti kata para diplomat Barat, Indonesia jatuh ke dalam pangkuan imperialis seperti apel busuk!

Sebuah tragedi kemanusiaan terjadi. Di atas tanah yang kita pijak, di atas gedung-gedung pemerintah dan perusahaan multinasional bertumpuk tulang-belulang dari orang-orang yang tak berdosa. Kuburan-kuburan massal tanpa batu nisan membuka mata dunia bahwa peradaban Indonesia telah dibuka dengan banjir darah, perampokan mimpi dan harapan, serta penjarahan massal. Kita berhutang kepada para martir yang memperjuangkan kemandirian dan kebersahajaan bangsa dan negeri ini. Kita berhutang kepada para korban dan keluarganya yang masih berdiri tegak, tampilkan kemanusiaannya, di tengah kebejatan moral para jagal dan maling pengikut orde baru. Buat para individu maupun organisasi-organisasi perlawanan terhadap kapitalisme global, buat para pejuang dari berbagai latar belakang: agamis, nasionalis, sosialis, komunis, maupun anarkis: bersatulah. Kenalilah musuh sebenarnya, yaitu dajjal neo-liberalisme yang sudah menancapkan kuku-kukunya di seluruh penjuru dunia.²¹²

Usaha Soeharto setapak demi setapak telah menunjukkan hasil. Dengan kelicikan, penipuan dan kekejaman, serta kebiadabannya dengan menggunakan tangan orang lain, “*nglurug tanpa bala*”, Soeharto berhasil menjadi penguasa totaliter, yang tak seorang pun berani menantang atau menaikkan muka terhadapnya. Terpenuhiilah “sumpah” yang diucapkannya tahun 1957, untuk menghabisi orang-orang yang “mencelakakan” dirinya, ketika dia diturunkan dari jabatan Pangdam VII Diponegoro karena skandal korupsi yang dilakukannya. Semua musuh yang ingin menuntut dan memajukan dirinya ke pengadilan yaitu tim pengusut MBAD, sudah dibabat habis melalui G30S. Sekarang, para pengikut dan pendukung Soekarno semua sudah dibinasakan. Dengan dibantainya para jenderal tim pengusut MBAD serta dilucutinya kekuasaan Presiden Soekarno, telah lengkap dan tuntas terlaksana, sumpah Kol. Soeharto yang diucapkan tahun 1957.

Demikian pula dengan pembubaran PKI tanggal 12 Maret 1966, tugas pokok terakhir Kolonel Soeharto yang dibebankan padanya oleh induk jaringannya yang merekrutnya telah dilaksanakan Soeharto dengan tuntas.²¹³

Kini, tinggallah Soekarno sendiri yang terisolasi, tiada kawan, tiada pengikut, tiada pendukung. Ibarat pohon yang perkasa, yang sudah digunduli, tanpa cabang, tanpa ranting, tanpa daun, dan tanpa akar! Soeharto, dengan licik dan busuk memanipulasi Supersemar, Surat Perintah 11 Maret, yang tidak pernah diumumkan, tidak pernah diberitahukan kepada bangsa Indonesia akan poin-poinnya, kecuali memberitahukan kepada umum hasil plintiran dan rekayasanya bahwa “karena tidak bisa mengatasi situasi keadaan, Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Jenderal Soeharto.” Rakyat dikelabui, diperbodoh, dan tidak diberi kesempatan untuk mengetahui, apa sebenarnya isi Surat Perintah 11 Maret itu. Berkali-kali Bung Karno memberi pernyataan tentang apa sebenarnya isi Surat Perintah 11 Maret itu, “*Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority, padahal tidak. It is only a letter to secure order,*” ucap Bung Karno.... “*Pers asing mengatakan bahwa perintah ini adalah a transfer of authority to General Soeharto. Tidak. It is not a transfer of authority to General Soeharto. I repeat again, it is not a transfer of authority!*”²¹⁴

Namun, suara Soekarno tidak lagi didengar, hilang di padang gurun, karena para pengikutnya yang bersedia mendengarnya, telah dihancurkan-luluhkan oleh Soeharto, berserakan di seluruh pelosok tanah air menjadi tulang belulang dalam kuburan-kuburan massal tanpa batu nisan. Sesungguhnya, benarlah apa yang diucapkan oleh Bung Karno dalam kongres dan peringatan ulang tahun ke-45 PKI pada 23 Mei 1965, “*Yo sanak yo kadang, yen mati aku sing kelangan.*”²¹⁵ PKI mati, jutaan pengikutnya yang bakal mendengarkan, membela dan berdiri di belakang Soekarno telah mati dibunuh oleh Soeharto dan rezimnya. Tinggallah Soekarno dalam kesendirian. Dia benar-benar kehilangan! Benar sekali ucapan Prof. Ben Anderson bahwa: “Yang bisa menjadi penyokong Bung Karno yang paling kuat dan paling terorganisir adalah PKI. Kalau PKI sudah tidak ada, Bung Karno tidak punya kekuatan konkret yang terorganisir...”²¹⁶

Meski ada keberatan Presiden Soekarno, Jenderal Soeharto tetap merebut kendali pemerintahan dan kekuasaan dengan efektif, yang disambut gembira oleh pihak Barat. Dengan menggunakan SP 11 Maret, Soeharto membubarkan PKI, menangkap dan menahan belasan menteri kabinet, dan mengesahkan pembunuhan jutaan bangsa Indonesia yang dituduh komunis, dan semuanya itu dilakukan Soeharto “atas nama presiden”. Satu hal yang pasti tidak akan dilakukan oleh Bung Karno!

²¹³ Charles van der Plas Connection, <http://www.munindo.brd.de/artikel/vanderplas2.html>.

²¹⁴ Dr. Asvi, “*Arus Balik Suara yang Hilang*” dan film dokumen *Shadow Play*

²¹⁵ ya sanak ya saudara, jika mati aku yang kehilangan

²¹⁶ Tempo, 29 Januari 2001, <http://www.wirantaprawira.de/pakorba>

²¹¹ Silakan lihat film dokumentasi ABC: “*Riding The Tiger*”.

²¹² [Indymedia-jakarta] *Mass Grave in Indonesia*

Isi Supersemar:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SURAT PERINTAH

I. Mengingat:

- 1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik nasional maupun Internasional
- 1.2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966

II. Menimbang:

- 2.1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannya Revolusi.
- 2.2. Perlu adanya djaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi, ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannya

III. Memutuskan/Memerintahkan:

Kepada: LETNAN DJENDERAL SOEHARTO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Untuk: Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi:

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannya Pemerintahan dan djalannya Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar revolusi/mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan-Angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan-paut dalam tugas dan tanggung-djawabnya seperti tersebut diatas.

IV. Selesai.

Djakarta, 11 Maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI
/MANDATARIS M.P.R.S.
SOEKARNO

Menurut *Wikipedia Ensiklopedia*, Surat Perintah Sebelas Maret ini adalah versi yang dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat (AD) yang juga tercatat dalam buku-buku sejarah. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Supersemar sehingga masih ditelusuri naskah Supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor.²¹⁷

Ternyata kemudian segala apa yang dilakukan Soeharto, semua berlawanan dengan Surat Perintah 11 Maret itu, seperti:

1. Perlu adanya djaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi, ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannya.
2. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannya Pemerintahan dan djalannya Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.

Semua hal-hal tersebut di atas, perintah tertulis yang seharusnya dilaksanakan oleh Soeharto, tidak digubrisnya, dilanggarnya. Sebagai anggota militer, sejak semula, Soeharto memang telah melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, dengan mengingkari atasannya. Bahkan, Soeharto dengan menggunakan para pengikutnya, pemuda, mahasiswa, dan pelajar yang tergabung dalam organisasi milisia KAMI, KAPPI, dll., setiap hari, dengan jaket kuning dan ribuan jatah nasi bungkus lengkap dengan lauk-pauk dari imperialis Amerika, berdemonstrasi menuntut Soekarno, pemimpin bangsa dan pendiri negara Republik Indonesia, supaya diadili, dan menuduhnya sebagai "Gastapu Agung".

Dalam pengakuannya, Dr. Subandrio, Waperdam I, yang ditangkap dan ditahan oleh orde baru/Soeharto menjelaskan: "Esoknya, 12 Maret 1966, Soeharto langsung mengumumkan pembubaran PKI. Uniknya, pembubaran PKI itu menggunakan Surat Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1966. Saat diumumkan, juga dibacakan ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Enam hari kemudian, 15 menteri yang masih aktif ditangkap. Tentu saja Soeharto tidak melapor lebih dahulu kepada presiden. Untuk pembubaran PKI, surat malah baru sampai ke tangan Soeharto tengah malam, dan esok siang ia langsung mengambil kebijakan itu. Untuk penangkapan 15 menteri, alasannya adalah agar para menteri itu jangan sampai menjadi korban sasaran kemarahan rakyat yang tidak terkendali. Tetapi ia juga menyampaikan alasan yang kontradiktif, yakni: para menteri hanyalah pembantu presiden, bukan bentuk kolektif pemerintahan. Jadi bisa saja ditangkap. Yang jelas, begitu ditangkap, para menteri langsung ditahan. Tuduhannya gampang: *terlibat G30S/PKI*—tuduhan yang sangat ditakuti seluruh rakyat Indonesia sepanjang Soeharto berkuasa. Mengkritik kebijaksanaan pemerintahan Soeharto bisa dituduh PKI.

Surat Perintah 11 Maret 1966 sudah diselewengkan. Soeharto menafsirkannya sebagai: Bung Karno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto, bukan perintah memulihkan keamanan ibu kota. Sebagai orang yang tahu persis kondisi saat itu, saya sangat yakin tujuan Soeharto membubarkan PKI dan menangkap 15 menteri

²¹⁷ *Free Encyclopedia Wikipedia*

adalah rangkaian strategi untuk meraih puncak kekuasaan. Seperti disebut di muka, strategi Soeharto ada empat tahap:

- habisi para jenderal saingan,
- hancurkan PKI,
- copoti para menteri,
- jatuhkan Bung Karno.

Kini yang dicapai Soeharto sudah tiga tahap. Tinggal tahap terakhir.

Bung Karno pun bereaksi. Tidak benar jika Bung Karno diam saja. Beliau memerintahkan Leimena menemui Soeharto menanyakan hal itu: Bagaimana ini? Surat perintah hanya untuk mengamankan Jakarta, bukan untuk pembubaran PKI. *Kok* malah main tangkap, kata Leimena kepada Soeharto.

Tetapi Soeharto tidak menggubris. Seperti terjadi pada tanggal 3 Oktober 1965—saat Leimena protes pada Soeharto karena Bung Karno ditawan di Istana Bogor—Soeharto menyatakan: “Pak Leimena jangan ikut campur. Sekarang saya yang kuasa.”

Leimena kembali ke Istana Bogor melaporkan reaksi Soeharto. Dan Bung Karno terdiam, tetapi dari wajahnya kelihatan jelas bahwa beliau sedang marah. Dari laporan Leimena kami tahu bahwa saat itu situasi Jakarta sangat tegang: tank dan kendaraan lapis baja bersiaga di setiap ujung jalan, tentara ada di mana-mana. Mereka dikenali sebagai pasukan Kostrad dan Brigade Para 3 Yon Siliwangi. Kali ini untuk menakut-nakuti anggota PKI yang jumlahnya masih sangat besar saat itu. Mungkin pula ditujukan untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Bung Karno yang sudah kehilangan kuasa agar tidak menghalang-halangi pembubaran PKI atau mungkin juga ditujukan untuk kedua-duanya.

Para menteri kabinet yang ditangkap dan ditahan oleh Soeharto adalah:

1. Waperdam-I merangkap Menlu, merangkap Kepala BPI, Dr. Subandrio
2. Waperdam-II, Chaerul Saleh
3. Menteri Tenaga Listrik, Ir. Setiadi Reksoprodjo
4. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Sumardjo
5. Menteri Negara, Oei Tjoe Tat
6. Menteri Bank Sentral dan Gubernur BI, Jusuf Muda Dalam
7. Menteri Pertambangan, Armunanto
8. Menteri Irigasi dan Pembangunan Desa, Ir. Surachman
9. Menteri Perburuhan, Sutomo Martoprojo
10. Menteri Kehakiman, A. Astrawinata
11. Menteri Penerangan, Achmadi
12. Menteri Urusan Keamanan, Letkol. Imam Syafi'i
13. Menteri Sekretaris Front Nasional, J.K. Tumakaka
14. Menteri Transmigrasi dan Koperasi, Achadi
15. Menteri Dalam Negeri merangkap Gubernur Jakarta Raya, Soemarno Sastrowidjojo

Meskipun sudah menangkap 15 menteri yang masih aktif menjalankan tugas, namun Soeharto tanpa rasa malu sedikit pun menyatakan bahwa kekuasaannya diperoleh secara konstitusional. Padahal ketika menangkap para menteri, perintah Soeharto kepada tentara yang melaksanakan berbunyi demikian: “Tangkap dulu mereka, alasannya cari kemudian.”

Itulah filsafat Soeharto dalam logika kekerasannya. Persis seperti dilakukan Soeharto pada tragedi 1 Oktober 1965. Beberapa jam setelah para jenderal dibunuh, kelompok bayangan Soeharto langsung mengumumkan: G30S didalangi PKI. Lantas Soeharto memerintahkan: “Basmi dulu partai itu (PKI), bukti-bukti cari kemudian.” Apakah ini konstitusional seperti yang sangat sering dikatakan Soeharto ketika dia memerintah?²¹⁸

Tindakan Soeharto menyelewengkan Surat Perintah 11 Maret 1966 sangat menyakiti perasaan Bung Karno. Sejumlah petinggi militer yang masih setia pada Soekarno ketika itu pun merasa geram. Mereka meminta agar Soekarno bertindak tegas dengan memukul Soeharto dan pasukannya. Tetapi Soekarno menolak.

Soekarno tak mau terjadi huru-hara, apalagi sampai melibatkan tentara. Perang saudara, menurut Soekarno, adalah hal yang ditunggu-tunggu pihak asing—kaum kolonial yang mengincar Indonesia—sejak lama. Begitu perang saudara meletus, pihak asing, terutama Amerika Serikat dan Inggris akan mengirimkan pasukan mereka ke Indonesia dengan alasan menyelamatkan fasilitas negara mereka, mulai dari para diplomat kedutaan besar sampai perusahaan-perusahaan asing milik mereka. Sebagai contoh adalah pemberontakan PRRI, di mana armada AS telah bersiap sedia untuk masuk ke Dumai, Riau, guna “menyelamatkan” perusahaan minyak AS, Caltex, yang bakal dijadikan dalih buat intervensi imperialis dan memecah-belah NKRI.

Kehancuran hatinya, dan tiadanya pengobatan atas penyakit yang dideritanya, membuat tenggelamnya Soekarno. Sedang Soeharto dengan ditopang oleh Golkar sebagai partai politiknya, membenahi diri menjadi penguasa otoriter di Indonesia. Badan-badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti DPR, MPRS, dan badan-badan lainnya, semua diperbarui dengan orang-orang yang bersedia membebek dan tunduk kepada Soeharto. MPRS yang anggotanya semua adalah orang-orangnya Soeharto, yang dikuasai oleh Golkar, bersidang di bawah pimpinan Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution, untuk menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden.

DPRGR dan MPRS yang susunan keanggotaannya sudah direvisi oleh Soeharto, serta berbagai partai politik yang cepat berbalik menjadi anti Soekarno, semuanya serentak bergerak menyukseskan mahakarya dan program agung untuk menggulingkan Soekarno, serta menghujatnya habis-habisan, untuk menaikkan Soeharto yang mereka nilai sebagai “pahlawan dan pemimpin besar” yang baru muncul.

²¹⁸ Subandrio, “*Kesaksianku Tentang G30S*”

Partai Nasional Indonesia (PNI), partai yang didirikan oleh Bung Karno pada tahun 1927 dan terus-menerus mendukungnya, tiba-tiba dalam kongresnya di Bandung 28 April 1966, seperti Yudas mengkhianati Yesus, menyatakan mengingkari kepemimpinan Bung Karno. Bahkan dalam pernyataan kebulatan tekad, partai itu menyatakan tidak menghendaki lagi kembalinya Bung Karno dalam kepemimpinan nasional dan negara.²¹⁹

Melalui pidato pembukaan Sidang Istimewa MPRS tertanggal 7 Maret 1967, Jenderal Nasution secara berselubung “mendekritkan” perubahan kedudukan MPRS dari sebagai pembantu presiden, menjadi sepenuhnya seperti MPR, padahal belum ada pemilihan umum untuk memilih MPR seperti yang ditetapkan UUD 1945!

Dan ini bertentangan dengan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi:

“Sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.” MPR yang dimaksud Pasal IV itu belum terbentuk karena belum ada pemilihan umum. Yang ada hanya MPRS hasil Dekrit 5 Juli 1959 dari Presiden Soekarno. Rakyat bisa melihat dan mempertimbangkan bahwa “dekrit” Nasution itu tidak sah, melanggar UUD 1945.

Supersemar itu mereka anggap sebagai “pelimpahan kekuasaan”, padahal sebenarnya hanyalah pelimpahan “tugas pengamanan”.²²⁰

Dengan menyalahartafirkan Supersemar, mereka bubarkan PKI, mereka tangkap sejumlah menteri, mereka tangkap dan ganti anggota DPRGR/MPRS dari PKI, PNI, Partindo, dan pendukung Presiden Soekarno lainnya, diganti dengan kelompok pendukung Soeharto.

DPRGR yang “tidak konstitusional” inilah yang menuduh Presiden Soekarno melanggar GHBN, karena tidak membubarkan PKI dan menuntut MPRS (*baca: MPRSoeharto—YTT*) supaya melangsungkan sidang istimewa guna menyingkirkan Bung Karno dari kedudukannya sebagai presiden.

Sesungguhnya, yang melanggar GHBN adalah DPRGR sendiri, karena GHBN yang berlaku ketika itu ialah GHBN Manipol, GHBN yang memegang prinsip persatuan berdasarkan nasakom. Membubarkan PKI sama dengan artinya menentang GHBN Manipol, apalagi tidak ada bukti bahwa PKI yang mendalangi G30S seperti yang dikemukakan Dewi Soekarno dalam tabloit *Detik* No. 030 tahun 1993.

“Dekrit” Nasution itulah yang telah melapangkan jalan bagi keberhasilan kudeta merayap dari Jenderal Soeharto dari kekuasaan *de facto* yang dimulai 1 Oktober 1965 menjadi kekuasaan secara *de jure* tanggal 12 Maret 1967, menarik

mandat presiden dari tangan Bung Karno dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden!

Adanya kerja sama Nasution—Soeharto ini mudah dimengerti karena Nasution sangat berdendam kepada Soekarno, dengan peristiwa “kudetanya” 17 Oktober 1952, yang telah menghadapkan moncong meriam ke Istana Merdeka, dipatahkan Presiden Soekarno. Namun Soekarno hanya memaafkan Nasution. Sekarang setelah Nasution berkedudukan sebagai ketua MPRS (Soeharto), maka ia “mengadili” dan “menjatuhkan” Soekarno.

Kerja keras Amerika ini akhirnya sempurna setelah Ketua MPRS Jenderal A.H.Nasution menandatangani Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967, yang mencabut semua kekuasaan pemerintahan negara dari tangan Presiden Soekarno bahkan melarangnya melakukan kegiatan politik untuk akhirnya dijebloskan ke dalam tahanan. Bung Karno dituduh terlibat G30S/PKI.²²¹

“Jenderal Soeharto akhirnya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno *Nawaksara* ditolak MPRS yang keanggotaannya sudah diperbarui oleh Soeharto, diganti dengan orang-orangnya, baik sipil maupun militer, yang kemudian mendirikan apa yang disebut orde baru.”

Dengan MPRS yang dibersihkannya dari para pengikut Soekarno dan kaum progresif lainnya, serta diubah menjadi MPRS (MPRSoeharto), karena sesungguhnya, anggotanya bukanlah sejati wakil rakyat, namun wakil dan kaki-tangan Soeharto, yaitu kaum militer dan Golkar dan pembela-pembela Soeharto yang tiada berani bersuara atau mengangkat muka karena ancaman bedil, maka “Sesudah Soeharto berhasil didudukkan di singgasana kekuasaan, ia segera ditopang bukan saja oleh ABRI, tetapi secara politik oleh Golkar yang tidak lain dari partai politiknya Soeharto.”²²²

Dengan dibantainya para jenderal tim pengusut MBAD serta dilucutinya kekuasaan Presiden Soekarno, telah lengkap dan tuntas terlaksana sumpah Kol. Soeharto yang diucapkan tahun 1957. Demikian pula dengan pembubaran PKI tanggal 12 Maret 1966, tugas pokok terakhir Kolonel Soeharto yang dibebankan padanya oleh induk jaringannya (*Van der Plas connection*) yang merekrut dia telah dilaksanakannya dengan tuntas!

Beberapa pengamat politik baik dalam negeri maupun luar negeri mengatakan bahwa Soeharto membersihkan parlemen dari komunis, menyingkirkan serikat buruh dan meningkatkan sensor. Dia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok dan menjalin hubungan dengan negara Barat dan PBB. Dia menjadi penentu dalam semua keputusan politik.

Jenderal Soeharto dikatakan meningkatkan dana militer dan mendirikan dua badan intelijen—Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Bakin). Jutaan orang dieksekusi dalam

²¹⁹ A. Karim DP., *Apa Sebab Bung Karno Bisa Digulingkan*, <http://www.progind.net>

²²⁰ Lihat pidato kenegaraan Presiden Soekarno 17 Agustus 1966, film dokumenter *Shadow Play*.

²²¹ Manai Sophiaan: *Kehormatan bagi yang Berhak*, hal.215.

²²² A. Karim DP., *Apa Sebab Bung Karno Bisa Digulingkan*, <http://www.progind.net>

“pembersihan” massal dan ratusan ribu ditangkap dan ditahan dan sebagiannya dilepas hanya untuk dibunuh, hanya karena dicurigai sebagai komunis. Banyak yang ditangkap dan ditahan yang komunis, dan yang tersangka komunis dan yang disebut “musuh negara” dijatuhi hukum mati berdasarkan hukum dan keputusan yang sudah dipersiapkan dan direkayasa.²²³

Akhirnya, Jenderal Soeharto sampai ke puncak kekuasaan melalui jutaan mayat-mayat yang terhampar di persada tanah air, laksana karpet yang menjadi merah karena darah jutaan bangsa Indonesia, baik sipil maupun militer yang dibunuh oleh orang-orang suruhannya.

Soekarno Diusir

DENGAN Surat Perintah Presiden Soekarno untuk memulihkan keadaan keamanan pada tanggal 11 Maret itu, yang di kemudian disebut “Surat Perintah 11 Maret” yang dipopulerkan dengan nama “Supersemar”, hasil todongan ini, Soeharto membubarkan PKI pada 12 Maret 1966, dan menjadikan PKI serta semua ormasnya sebagai terlarang. Dengan prakarsa, tulang punggung, dan bantuan ABRI, sebagian kaum agama meneruskan pemburuan dan pembantaian orang-orang PKI, yang belum tertangkap dan orang-orang yang di-PKI-kan, membakar dan menghancurkan rumah dan gedung-gedung mereka. Bukan itu saja, bahkan Bung Karno yang memberi kuasa kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan, mereka tuduh sebagai melindungi PKI, dan men-capnya sebagai “Gestapu Agung”. Dengan licik Soeharto menggunakan dan memutarbalikkan arti dan maksud Surat Perintah Presiden itu.

Para pemuda, pelajar, dan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi yang dilindungi Angkatan Darat, seperti KAPPI dan KAMI, dipimpin oleh tokoh-tokoh muda yang namanya melejit ke atas, seperti Abdul Gafur, dll. Kaum milisi itu melakukan pengganyangan, penganiayaan, pemerkosaan, dan segala tindakan yang melanggar hak asasi manusia terhadap rakyat yang dituduh ada indikasi terlibat G30S. Mereka mendirikan batalyon-batalyon yang dilatih dan dipersenjatai oleh ABRI seperti Batalyon Abdul Rahman Hakim (ARH), dll. Kebrutalan dan kebiadaban mereka terhadap rakyat mendapat restu dari pihak Angkatan Darat dan Jenderal Soeharto selama kekuasaannya.

Mengenai Bung Karno, yang dipaksa oleh para jenderal antek-nya Soeharto untuk menandatangani surat perintah presiden itu, menurut informasi yang ditulis pada 12 April 2003 oleh A. Karim D.P., mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, dikatakan bahwa “Jenderal Soeharto, memerintahkan kepada Bung Karno supaya meninggalkan Istana Merdeka sebelum tanggal 17 Agustus 1967. Jelas nampak sekali kebiadaban dan tidak berperikemanusiaannya Jenderal Soeharto. Ambisi kekuasaan yang diperolehnya dengan segala cara yang tidak manusiawi, menonjol. Di balik segala senyumnya, terlihat kebinatangan

²²³ Free Encyclopedia Wikipedia

tindakannya, yang melibas semua kawan maupun lawan yang tidak mengikuti kemauannya. Jenderal Soeharto tampil sebagai “pimpinan” fasis, brutal, dan zalim meneruskan praktik-praktik Kaisar Nero di Itali dan Nazi Hitler di Jerman. Soeharto tampil sebagai seorang tokoh yang paling hipokrit di atas dunia. Dengan lidahnya dia memuja dan menyembah Tuhan, Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, namun dengan lidah itu juga dia memerintahkan pembantaian jutaan bangsanya sendiri demi kekuasaan! Bahkan menganiaya orang yang pernah memberikannya segala pangkat, jabatan dan kedudukan: Soekarno! Sungguh tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Soeharto adalah “serigala yang berbaju domba”.

Bung Karno beserta anak-anaknya pergi dari istana dengan berpakaian kaos oblong dan celana piyama dengan kaki hanya beralaskan sandal, menumpang mobil Volkswagen Kodok, satu-satunya mobil milik pribadinya yang dihadiahkan oleh Piola kepadanya, pergi ke Wisma Yaso, di mana kemudian menjadi tempat tahanannya sampai wafat. Semua kekayaannya, ditinggalkan di istana, tidak sepotong pun yang dibawa pergi kecuali Bendera Pusaka Merah Putih yang dibungkusnya dengan kertas koran. Anak-anaknya pun tidak diperbolehkan membawa apa-apa, kecuali pakaian sendiri, buku-buku sekolah, dan perhiasannya sendiri. Selebihnya, ditinggalkan semua di istana....²²⁴

Selama ditahan di Wisma Yaso, Bung Karno diperlakukan sangat tidak manusiawi sekali. Bung Hatta, mantan wakil presiden pertama RI, sahabat Bung Karno, menceritakan bagaimana permintaan Bung Karno kepada Soeharto untuk sekadar mengizinkan mendatangkan seorang dukun pijat, ahli pijat langganan Bung Karno dan juga langganan Bung Hatta, ditolak oleh Soeharto! Bung Karno mengharap dengan bantuan pijatan dukun ahli itu, penderitaannya bisa sedikit berkurang. Penolakan Soeharto itulah yang kemudian mendorong Bung Hatta menulis surat pada 15 Juli 1970 kepada Soeharto yang mengecam betapa tidak manusiawinya sikap Soeharto itu! Bung Hatta minta kepada Soeharto lewat Jaksa Durmawel, S.H., agar dilakukan pengadilan untuk memastikan apakah Bung Karno bersalah atau tidak. Sebab, jika Bung Karno meninggal dalam statusnya sebagai tahanan politik karena tidak diadili, rakyat yang percaya bahwa Bung Karno tidak bersalah, akan menuduh pemerintah Soeharto sengaja membunuhnya, kata Bung Hatta.²²⁵

Itikad Soeharto untuk melenyapkan Bung Karno, nampak juga ketika Soekarno menderita sakit di tempat tahanannya, di Wisma Yaso, di mana tiada pengurusan dan tiada pengobatan atas sakitnya itu. Untuk lebih jelas, di bawah ini kita kutip catatan Dr. Asvi Warman Adam, ahli peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sbb.:

²²⁴ A. Karim DP., *Apa Sebab Bung Karno Bisa Digulingkan*, <http://www.progind.net>

²²⁵ Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, <http://www.progind.net>

Saat Sakit, Resep Soekarno Disimpan di Laci²²⁶

Tanggal 12 Januari 2008 pukul 09.44 di Cendana, Ismail Saleh membagikan fotokopi tulisannya yang dimuat pada harian *Pelita* berjudul “Marilah Kita Bangsa Indonesia Wujudkan Petuah: Mikul Dhuwur Mendhem Jero”. Di dalam artikel yang ditulis mantan Jaksa Agung era orde baru itu dikatakan bahwa Soeharto mengangguk nama Soekarno dan mengubur dalam-dalam kesalahan Bung Karno.

Betulkah Soeharto melaksanakan prinsip menghormati orang yang lebih tua itu dalam kasus upaya pengadilan terhadap mantan Presiden Soekarno dan lebih-lebih dalam perawatan sang proklamator? Presiden Soekarno tidak dibawa ke pengadilan dengan alasan yang sangat strategis. Kalau dia disidangkan, tentu akan timbul protes dari para pendukung Bung Karno yang masih banyak. Di samping itu, pengadilan bisa membebaskannya karena tidak cukup bukti dia terlibat dalam upaya kudeta yang janggal itu.

Sementara itu, perawatan yang diberikan kepada Presiden Soekarno betul-betul tidak manusiawi. Bagai bumi dengan langit bila dibandingkan dengan perawatan sempurna yang diterima orang kuat orde baru itu. Selama 10 kali mengalami masalah kesehatan sejak berhenti jadi presiden pada 1998, Soeharto betul-betul memperoleh perhatian medis yang luar biasa.

Jenderal Besar Soeharto dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada ruang 536 yang seakan-akan sudah menjadi ruang khusus perawatan presiden. Bukan hanya dokter kepresidenan, tetapi juga dokter ahli lain dikerahkan sehingga sampai berjumlah puluhan orang. Maka, berdatanganlah para selebriti pemerintahan, dari mantan pejabat era orde baru sampai kepada presiden dan wakilnya. Awal Januari 2008 ketika Soeharto kembali masuk rumah sakit, dia memperoleh perhatian yang luar biasa dari kru televisi yang berbondong-bondong menunggu pengumuman hasil kesehatan setiap hari dan malam.

Berita medis itu berfluktuasi, kesehatan Soeharto menurun, membaik, membaik dari pagi tadi tetapi masih kritis, gawat tetapi masih bisa diatasi, tergantung dari alat-alat bantu. Bahkan, Menteri Kesehatan yang entah terselip lidah mengatakan bahwa Soeharto mengalami kehidupan semu karena fungsi-fungsi organ tubuhnya saat ini digantikan oleh mesin.

Perawatan Bung Karno

Soekarno pernah mengalami gangguan ginjal dan pernah dirawat di Wina pada 1961 dan 1964. Prof. Dr. K. Fellingner menyarankan agar ginjal kiri tersebut diangkat saja. Bung Karno menjawab, “Nanti saja, *ik moet mijn taak afronde* (Saya harus menyelesaikan tugas saja). Tugas yang belum selesai itu adalah mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI. Pada masa selanjutnya, pengobatan dengan ramuan tradisional Tiongkok/akupunktur diberikan dokter dari RRT.

Pada 4 Agustus 1965 terjadi suatu peristiwa yang ikut memicu pecahnya Gerakan 30 September, yaitu sakitnya Bung Karno. Beredar rumor bahwa Soekarno pingsan dan mengalami koma. Sebetulnya yang terjadi, Bung Karno mengalami TIA (*transient ischaemic attack*), yaitu *stroke* ringan akibat penyempitan sesaat (*spasme*) pada pembuluh darah otak. Bukan *stroke* karena perdarahan atau adanya bekuan darah dalam pembuluh darah otak. Dokter meminta Soekarno berbaring di kamar. Para

dokter menyarankan agar dia tidak usah berpidato pada 17 Agustus 1965 karena kondisi kesehatannya belum pulih. Seandainya dia berpidato, jangan lebih dari satu jam. Ternyata Presiden Soekarno berpidato lebih dari satu jam dan untungnya tidak terjadi apa-apa.

Awal 1969, Soekarno pindah dalam status bisa dikatakan “tahanan rumah” ke Wisma Yaso di Jalan Gatot Subroto (sekarang Museum Satria Mandala). Sementara itu, Presiden RI pertama itu terus diperiksa oleh Kopkamtib. Setelah sakit Soekarno makin parah, barulah Soeharto memerintahkan menghentikan interogasi.

Soekarno mendapat perawatan reguler seperti di rumah sakit biasa, dalam arti diukur suhu badan dan tekanan darah beberapa kali dalam sehari serta jumlah air kencing selama 24 jam. Pernah ada pemeriksaan rontgen. Tidak diberikan diet khusus seperti yang dilakukan terhadap pasien gangguan ginjal. Ketika kondisi Bung Karno kritis, Prof. Mahar Mardjono sempat menceritakan kepada Dr. Kartono Mohammad bahwa obat yang diresepkannya disimpan saja di laci oleh “dokter yang berpangkat tinggi”.

Hanya Diberi Vitamin

Menurut catatan perawat di Wisma Yaso, obat yang diberikan kepada Soekarno adalah vitamin B 12, vitamin B kompleks, Duvadilan, dan Royal Jelly (yang sebenarnya madu). Duvadilan adalah obat untuk mengurangi penyempitan pembuluh darah periferi. Kalau sakit kepala diberi novalgin, sekali-sekali kalau sulit tidur, Soekarno diberi tablet valium.

Ketika tekanan darahnya relatif tinggi, 170/100, tidak diberikan obat untuk menurunkannya. Juga tidak tercatat obat untuk melancarkan kencing ketika terjadi pembengkakan. Bung Karno telah ditelantarkan.

Pada 22 Mei 2006 bersama dr. Kartono Mohammad, saya berkunjung ke rumah Rachmawati Soekarnoputri di Jalan Jatipadang, Jakarta Selatan. Rachmawati bercerita tentang dr. Suroyo adalah seorang dokter dari dinas kesehatan Angkatan Darat berpangkat kapten (kemudian mayor) yang ditempatkan di Istana menjelang 1965.

Menurut Rachmawati, dr. Suroyo inilah yang biasanya merawat hewan-hewan yang ada di Istana Merdeka. Yang aneh pula, urine Soekarno diperiksa pada laboratorium Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. Entah tidak ada laboratorium yang lain waktu itu di Jakarta. Kami sempat melihat surat dari Pangdam Siliwangi Mayjen. H.R. Dharsono yang melarang seluruh warga Jawa Barat mengunjungi atau dikunjungi Soekarno. Selain itu, ada surat dari Pangdam Jaya Amir Machmud yang menetapkan bahwa seluruh dokter yang akan mengunjungi Bung Karno harus sepengetahuan dan didampingi dr. Kapten Suroyo.

Ketika kesehatan Soekarno semakin kritis, pipinya terlihat bengkak, gejala pasien gagal ginjal. Guruh dan Rachmawati sempat memotret ayahnya. Foto itu sempat beredar pada pers asing. Guruh dan Rachmawati kontan diinterogasi di markas CPM Guntur, Jakarta.

Kenyataan yang tidak banyak diketahui masyarakat tentang kondisi kesehatan dan perawatan Bung Karno sengaja dikemukakan di sini, sungguhpun teramat pahit, bukanlah untuk memelihara dendam. Ini demi menuruti pandangan beliau agar kita “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”. Bangsa ini perlu belajar dan memetik hikmah dari sejarah masa lampau agar lebih arif dan proporsional dalam menyikapi persoalan hari ini.

²²⁶ Dr. Asvi Warman Adam, *Jawa Pos*, Minggu, 13 Januari 2008.

Begitu dendam Soeharto kepada Soekarno, presiden yang menandatangani surat pencopotannya sebagai Pandam VII Diponegoro karena tindakan korupsinya yang ketahuan 10 tahun yang lalu. Sumpahnya untuk “menghabisi orang-orang yang mencelakakan dirinya” benar-benar dilaksanakannya!

Bahkan, seperti ditulis oleh Asvi Warman Adam di atas, “Soekarno, Presiden RI pertama itu, dalam status ‘tahanan rumah’ di Wisma Yaso di Jalan Gatot Subroto (sekarang Museum Satria Mandala), atas perintah terus diperiksa oleh Kopkamtib.” Hal ini dilakukan, karena Soeharto benar ingin menunjukkan “siapa dirinya” dan seperti yang pernah dikatakannya kepada Dr. J. Leimena: “Pak Leimena jangan ikut campur. Sekarang saya yang kuasa.”

Memang, sekarang Soeharto yang berkuasa. Dan dia ingin menunjukkan “kekuasaannya” kepada Soekarno dan para pengikut dan pendukungnya terutama kaum komunis. Soeharto tidak tanggung-tanggung, seperti yang pernah diucapkan oleh putri Drs. H. Mohammad Hatta, yang juga mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta, di mana dikatakannya bahwa, “Soeharto ketika masih menjabat merupakan presiden yang ahli strategi dan tahu apa yang harus dilakukan.”²²⁷

Sesungguhnya! Soeharto memang “ahli strategi dan tahu apa yang harus dilakukan!” Seperti yang dinyatakan oleh Dr. Subandrio, Soeharto melakukan kup tahap demi tahap. Dimulai dengan: menghabisi para jenderal saingannya dengan menggunakan G30S; memfitnah dan merekayasa dan melakukan pembantaian orang-orang PKI; dengan licik menggunakan surat perintah presiden untuk membubarkan PKI, dan melegalkan pembantaian jutaan rakyat dan penangkapan para menteri kabinet; kemudian dengan gampang sekali menjatuhkan bahkan membunuh Bung Karno, bapak bangsa dan rakyat Indonesia!

Dengan kelicikan dan kebusukan tanpa mengindahkan bahkan mengingkari falsafahnya sendiri “*mikul duwur mendhem jero*”, Soeharto berupaya dan berusaha membawa Presiden Soekarno ke depan pengadilan, ke depan mahmilub (mahkamah militer luar biasa) untuk diadili karena diduga terlibat G30S. Sementara para pengikut Soeharto, KAMI, KAPPI, dan massa dengan *backing* Angkatan Darat, berdemonstrasi dengan pesta pora menuntut agar Presiden Soekarno, Pemimpin Besar Rakyat Indonesia, *the founding father* kemerdekaan Indonesia, diadili karena “keterlibatannya” dengan G30S, yang dituduh melakukan kudeta terhadap pemerintahan Indonesia, terhadap Presiden Soekarno yang telah ditetapkan oleh MPRS sebagai presiden seumur hidup! Rakyat menjadi bodoh dan dikelabui Soeharto, mengapa Soekarno mengkup dirinya sendiri yang sudah ditetapkan menjadi presiden seumur hidup?

Ambisi Soeharto untuk “mengadili” Soekarno nampak dalam TAP No.XXXIII/MPRS/1967, Bab II, Pasal 6, yang menegaskan: “Menetapkan penyelesai-

²²⁷ Antara News, 06/01/08.

an persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr.Ir. Soekarno dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan keadilan dan menyerahkan pelaksanaannya pada pejabat presiden.”²²⁸

“Pada tahun 1967–1968, yakni setelah Bung Karno diberhentikan sebagai presiden, Jenderal Soeharto telah memerintahkan pembentukan suatu tim yang bertugas mengupayakan agar Bung Karno dapat diseret ke pengadilan mahmilub. Namun para anggota tim yang ditunjuk menolak perintah tersebut karena tidak terdapat dasar hukum yang kuat untuk mengadili Bung Karno. Akibat penolakan mereka ini, justru mereka dipecat, disiksa oleh orang-orangnya Soeharto, dan ditahan tanpa proses pengadilan. Beberapa anggota tim tersebut yang terdiri dari para eks perwira menengah, pada saat ini masih dapat menjadi saksi-saksi hidup.”

Dari kejadian penolakan anggota tim menolak perintah untuk “pembentukan suatu tim yang bertugas mengupayakan agar Bung Karno dapat diseret ke pengadilan mahmilub (mahkamah militer luar biasa),” rupanya, Jenderal Soeharto yang terkenal keji dan licik itu mendapat *inspirasi* (yang jitu dan brilian serta amat keji) mengambil keputusan justru *tidak memahmilubkan* Bung Karno!!!

Karena dengan memahmilubkan Bung Karno, justru Bung Karno akan bisa memberikan keterangan lengkap mengenai apa yang terjadi sebenarnya di sekitar peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, baik prolognya maupun epilognya.

Jadi faktanya adalah: Jenderal Soeharto *tidak memahmilubkan* Bung Karno atau dengan kata lain Jenderal Soeharto tidak menyeret Bung Karno ke pengadilan mahmilub (mahkamah militer luar biasa).

Dan sekali lagi di sinilah sebenarnya justru kelicikan dan kekejian Jenderal Soeharto itu!

Sudah lama disiarkan oleh sementara pihak, bahwa Soeharto adalah orangnya yang “mencegah” supaya mantan Presiden Soekarno tidak diadili, karena Soeharto sebagai orang yang bermartabat, beradat istiadat, lemah lembut, dan berpegang teguh pada falsafah Jawa: “*mikul duwur mendhem jero*”. Namun nyatanya, Jenderal Soeharto itulah orangnya yang mau, yang beritikad dan berusaha untuk menyeret Bung Karno ke pengadilan!”²²⁹

Untuk lebih jelas lagi, dengan ini kita kutip satu tulisan yang merupakan dokumen sejarah, dari Ir. Setiadi Reksoprodjo, mantan menteri Kabinet Dwikora, yang ditangkap dan ditahan oleh Soeharto bersama 15 orang menteri lainnya, yang ditunjukkan kepada Presiden Megawati pada tahun 2002, sbb:

Surat untuk Presiden Megawati

Sehubungan dengan maraknya wacana untuk memberikan pengampunan kepada mantan Presiden Soeharto, maka saya ingin menyampaikan beberapa fakta sejarah

²²⁸ www.geocities.com/edcahy/sej-ind/

²²⁹ tulisan A.Supardi Adiwidjaya, Netherland.

yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam suatu keputusan atas gagasan tersebut.

Pertama-tama saya ingin meluruskan pendapat yang mengatakan bahwa Jenderal Soeharto telah melakukan pencegahan terhadap upaya menyeret almarhum Presiden Soekarno ke muka pengadilan, sehingga seolah layaklah jika ia diampuni. (Pendapat ini juga disampaikan oleh seorang anggota DPR dalam wawancara di berbagai stasiun televisi).

Pendapat tersebut tidak benar, karena fakta sejarahnya adalah bahwa pada tahun 1967—1968, yakni setelah Bung Karno diberhentikan sebagai presiden. Jenderal Soeharto telah memerintahkan pembentukan suatu tim yang bertugas mengupayakan agar Bung Karno dapat diseret ke pengadilan mahmilub. Namun, para anggota tim yang ditunjuk menolak perintah tersebut karena tidak terdapat dasar hukum yang kuat. Akibatnya justru mereka dipecat, disiksa, dan ditahan tanpa proses pengadilan. Beberapa anggota tim tersebut yang terdiri dari para eks perwira menengah, pada saat ini masih dapat menjadi saksi-saksi hidup.

Hal kedua adalah fakta sejarah lainnya, yakni kenyataan bahwa almarhum Presiden Soekarno telah dizalimi di akhir hayatnya dan meninggal dalam status tahanan yang sangat tidak manusiawi dari rezim orde baru yang dipimpin oleh Jenderal Besar Soeharto. Status tahanan tersebut tidak pernah dicabut, tetapi gugur demi hukum karena wafatnya Bung Karno.

Hal ketiga yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan gagasan pengampunan terhadap mantan Presiden Soeharto adalah selaku bangsa yang beradab, menurut pendapat saya, tidak selaknyalah kita mengajukan mantan Presiden Soeharto ke muka pengadilan dalam keadaan sakit dan lemah secara fisik. Hal ini tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan.

Pengampunan terhadap mantan Presiden Soeharto dapat diberikan dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, yaitu setelah dilakukan ketetapan hukum terhadap tuntutan-tuntutan pidana maupun perdata yang ditujukan kepadanya.

Pengampunan terhadap mantan Presiden Soeharto, jika akan diberikan atas dasar kemanusiaan, sepatutnyalah juga dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Oleh sebab itu, seharusnya didahului dengan pencabutan Ketetapan (Tap) MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang pada hakikatnya merupakan tindakan kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim orde baru pimpinan Jenderal Soeharto terhadap almarhum mantan Presiden Soekarno.

Demikianlah pandangan saya menyampaikan fakta sejarah serta pertimbangan rasa kemanusiaan yang obyektif dan berimbang dengan rasa keadilan.

*Ir. Setiadi Reksoprodjo, Mantan Menteri Kabinet Dwikora di Jakarta.*²³⁰

Jadi, dengan tidak diadilinya Soekarno, bukanlah, sekali lagi bukanlah merupakan “kebaikan hati” Jenderal Soeharto, melainkan justru memperlihatkan kebusukan hati dan kelicikannya. Sebab, Soeharto yang licik akhirnya sadar, kalau Soekarno diadili, maka Soekarno akan mendapat kesempatan berbicara dan akan

terbukalah belang Soeharto! Sebagaimana pembunuhan atas D.N. Aidit oleh Yasir Hadibroto atas perintah Soeharto, jika Aidit sempat bicara, maka akan ketahuanlah apa hubungan Soeharto dan Syam Kamaruzaman dalam G30S.

Kalau Bung Karno dan Aidit, diadili atau diberi kesempatan bicara, maka akan terungkap dengan jelas bahwa di belakang G30S bukanlah PKI, bukan Bung Karno, tapi adalah Soeharto! Dan situasi akan berubah, pukulan balik akan diterima Jenderal Soeharto. Itu sebabnya, begitu ditangkap, Aidit langsung dibunuh, dan Bung Karno dibungkam, ditahan, tidak diberi kesempatan bicara hingga meninggal. Di sini nampak jelas sekali kelicikan dan kebusukan Jenderal Soeharto.

Saat Terakhir Bung Karno

BUNG KARNO yang penyakitnya tambah parah dalam tahanan rumahnya, tiada mendapat pengobatan yang wajar, bahkan resep pengobatan hanya disimpan di laci oleh seorang pejabat tinggi militer. Untuk ini, mari kita telusuri kisah putri Bung Karno, Rachmawati, “*Mengenang Saat Terakhir Mendampingi Bung Karno*” seperti yang diceritakan oleh Harian *Jawa Pos*.

AIR mata Rachmawati membasahi pipi. Meski sudah 38 tahun berlalu, anak ketiga Bung Karno dengan Fatmawati itu belum bisa melupakan kekecewaannya terhadap perlakuan pemerintahan Soeharto terhadap sang ayahanda di penghujung hayatnya.

“Bung Karno saat itu seperti dibiarkan mati perlahan-lahan,” katanya kepada Jawa Pos sambil mengusap air matanya dengan tisu saat ditemui di kediaman di kawasan Jakarta Selatan kemarin (19/1).

Menurut perempuan kelahiran Jakarta, 27 September 1950, presiden pertama RI itu dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, dalam kondisi kritis pada 11 Juni 1970.

Berbeda dengan Soeharto yang mendapat perawatan supermaksimal dari tim dokter kepresidenan beranggota 25 dokter, Bung Karno mendapat perawatan minimal pada hari-hari terakhir menjalani opname di rumah sakit milik TNI-AD itu. Kondisi ginjal salah satu proklamator RI waktu itu sudah sangat parah.

“Tapi, tak ada perawatan maksimal. Alat hemodialisis (cuci darah) untuk pengidap gagal ginjal pun tak diberi,” kenang wanita bernama lengkap Diah Pramana Rachmawati Soekarno yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu.

Saat Bung Karno sakit kritis, lanjut dia, Soeharto melakukan konsolidasi politik pasca G 30 S/1965. Tak heran bila saat itu dia sedang membersihkan tubuh birokrasi dan militer. Tidak hanya dari unsur-unsur PKI, tapi juga dari orang-orang Soekarno.

Asupan makan untuk Soekarno yang juga disebut pemimpin besar revolusi itu pun seadanya. Kendati juga didiagnosis mengidap darah tinggi, menu makanan untuk Bung Karno terasa asin saat dicicipi Rachmawati.

Adik kandung Megawati pun langsung protes dan baru setelah itu menu makanan diganti. “Bung Karno seperti dibiarkan mati perlahan-lahan,” imbuhnya.

²³⁰ harian *Kompas*, 4 Januari 2002 hal.4—5.

Gadis yang saat itu berusia hampir 20 tahun dan kuliah di Fakultas Hukum UI memang paling rajin membesuk di hari-hari terakhir sang Putra Fajar tersebut. Namun, soal membesuk juga bukan urusan mudah dan jangan dibayangkan seperti keluarga Cendana yang kini bisa hilir mudik ke Rumah Sakit Pusat Pertamina setiap saat.

Tak gampang mengakses tempat perawatan Bung Karno yang saat itu statusnya diibandingkan laiknya tahanan rumah. Bahkan, tak ada kolega Soekarno yang datang mengalir seperti yang terlihat pada Soeharto hari-hari ini.

Menjenguk Soekarno memang sulit. Sebab, ruang perawatan intensif RSPAD Gatot Subroto dipenuhi tentara. Serdadu berseragam dan bersenjata lengkap bersiaga penuh di beberapa titik strategis rumah sakit tersebut. Bahkan, petugas keamanan berpakaian preman juga hilir mudik di koridor rumah sakit hingga pelataran parkir.

Yang repot, kata Rachmawati, obat-obatan pun tak datang dari langit. Mereka harus membeli sendiri. “Pokoknya beda, beda banget. Ini perjalanan sejarah yang pahit,” sambung Rachmawati yang harus tidur di mobil jika hendak menunggu ayahnya yang dirawat di RSPAD.

Bahkan, Rachmawati yang pada 6 Juni 1970 sempat memotret Bung Karno yang saat itu diasingkan di Wisma Yaso (sekarang Museum Satria Mandala, Red), Jakarta Selatan, harus berurusan dengan polisi militer di Jl Guntur, Jakarta Pusat.

Pasalnya, foto yang menunjukkan kondisi terakhir Bung Karno itu dikirimkan Rachmawati ke Associated Press (kantor berita yang berpusat di Amerika) yang kemudian memublikasikannya ke seluruh dunia.

Salah seorang yang bisa menjenguk Bung Karno saat itu adalah mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Bung Karno sempat memegang tangan Bung Hatta, sahabat seperjuangan yang juga proklamator RI itu, kemudian menangis. Sehari kemudian, tepatnya Minggu pagi, 21 Juni 1970, beberapa saat setelah diperiksa dr Mardjono, salah seorang anggota tim dokter kepresidenan, Bung Karno akhirnya mengembuskan napas terakhir pada usia 69 tahun.

Setelah Bung Karno meninggal itulah, baru Soeharto datang ke RSPAD untuk melihat kondisi jenazah Soekarno. Pertemuan itu, menurut Rachmawati, adalah yang pertama antara ayahnya -yang telah tiada- dan Soeharto semenjak ayahnya jatuh dari kursi presiden dalam Sidang Istimewa 7 Maret 1967.

Orang kuat Orde Baru itu kembali datang ke Wisma Yaso saat jenazah Soekarno hendak diterbangkan ke Blitar melalui Malang, Jawa Timur.

Di Blitar, upacara pemakaman Soekarno dilaksanakan dengan sederhana dan singkat dipimpin Jenderal M. Panggabean. “Rasa-rasanya, hari itu begitu mencekam. Kami hanya menurut saja saat pemerintah memakamkan Bung Karno di Blitar. Bukan sesuai permintaannya di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat,” kenang mantan ketua umum Partai Pelopor itu.

Bendera setengah tiang pun berkibar di seluruh tanah air kendati setelah itu tak semua orang bebas datang ke kubur Bung Karno.

Rachmawati mengaku sama sekali tak menaruh dendam atas tindakan Soeharto kepada ayahnya. Secara pribadi dan sebagai manusia, dia malah memaafkan Soeharto. Tapi, dia tetap menuntut penyelesaian hukum kepada jenderal bintang lima yang berkuasa selama 32 tahun itu. Kalaupun pemerintah memutuskan untuk mencabut Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

dan Bebas KKN yang menyangkut Soeharto, Rachmawati juga meminta pencabutan Tap XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

Apakah karma Bung Karno yang kini menimpa Pak Harto? “Wallahu ’alam. Tapi, alhamdulillah, kalau Pak Harto kembali sehat sekarang,” jawabnya.

Kendati belum sempat membesuk, Rachmawati telah menghubungi dua putri Soeharto, Mamik dan Titik, serat mendoakan kesembuhan ayah mereka. “Kami bangga diwarisi Bung Karno dengan bekal ilmu kehidupan. Bukan harta berlimpah,” katanya lalu menyeka air mata.²³¹

Demikian wawancara dengan Rachmawati sebelum Jenderal Soeharto meninggal.

Bung Karno telah tiada, bapak bangsa dan rakyat Indonesia, pejuang kemerdekaan Indonesia telah pergi. Dia meninggal, mati dalam mempertahankan rakyatnya, bangsa dan negaranya agar tidak terpecah-belah.

Bung Karno pergi dengan meninggalkan warisan besar kepada Soeharto berupa pangkat jenderal setelah menyelamatkannya dari pengadilan militer karena korupsinya, kemudian Soeharto mengkhianatnya. Bung Karno mati mengikuti jalan yang telah dirintis oleh jutaan pengikutnya, yaitu dibantai Soeharto. Kita kehilangan seorang tokoh agung, seorang bapak, seorang penyambung lidah rakyat dan pemimpin besar revolusi Indonesia Bung Karno. Bung Karno, lahir, hidup, berjuang dan mati untuk rakyat dan bangsa Indonesia yang dicintainya! “*Yo sanak yo kadang yen mati aku sing kelangan!*” Bangsa Indonesia berhutang padanya dan rakyat akan senantiasa mengenangnya!

“Belum ada yang menandingi Soekarno sampai sekarang.... Dialah yang mengerti ‘nation’ Indonesia. Karena itu juga, Soekarno-lah yang tidak jemu-jemu nya menganjurkan tentang ‘nation and character building’.”²³²

Untuk mengenang hari-hari akhir Bung Karno, di bawah ini kita kutip tulisan Dr. Asvi Warman Adam yang berjudul *Soekarno Menggugat*, yang dimuat di harian *Kompas* tanggal 6 Juni 2003.

Soekarno Menggugat

Tidak banyak diketahui umum bahwa tahun 1965-1967 Presiden Soekarno sempat berpidato paling sedikit sebanyak 103 kali. Yang diingat orang hanyalah pidato pertanggungjawabannya, Nawaksara, yang ditolak MPRS tahun 1967. Dalam memperingati 100 tahun Bung Karno, tahun 2001 telah diterbitkan kumpulan pidatonya. Namun, hampir semuanya disampaikan sebelum peristiwa G30S 1965.

Kumpulan naskah ini diawali pidato 30 September 1965 malam (di depan Musyawarah Nasional Teknik di Istora Senayan, Jakarta) dan diakhiri pidato 15 Februari 1967 (pelantikan beberapa Duta Besar RI). Pidato-pidato Bung Karno (BK)

²³¹ Farouk Amaz-el, harian *Jawa Pos*, 20/1/08.

²³² Ucapan Pramoedya Ananta Toer dalam film dokumen *Shadow Play*.

selama dua tahun itu amat berharga sebagai sumber sejarah. Ia mengungkapkan aneka hal yang ditutupi bahkan diputarbalikkan selama Orde Baru. Dari pidato itu juga tergambar betapa sengitnya peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Di pihak lain, terlihat pula kegetiran seorang presiden yang ucapannya tidak didengar bahkan dipelintir. Soekarno marah. Ia memaki dalam bahasa Belanda.

Konteks pidato

Periode 1965-1967 dapat dilihat sebagai masa peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Dalam versi pemerintah, masa ini dilukiskan sebagai era konsolidasi kekuatan pendukung Orde Baru (tentara, mahasiswa, dan rakyat) untuk membasmi PKI sampai ke akarnya serta pembersihan para pendukung Soekarno.

Mulai tahun 1998 di Tanah Air dikenal beberapa versi sejarah yang berbeda. Selain menonjolkan keterlibatan pihak asing seperti CIA, juga muncul tuduhan terhadap keterlibatan Soeharto dalam "kudeta merangkak", yaitu rangkaian tindakan dari awal Oktober 1965 sampai keluarnya Supersemar (Surat perintah 11 Maret 1966) dan ditetapkannya Soeharto sebagai pejabat Presiden tahun 1967. "Kudeta merangkak" terdiri dari beberapa versi (Saskia Wieringa, Peter Dale Scott, dan Subandrio) dan beberapa tahap.

Substansi pidato

Setelah peristiwa G30S, Soekarno berusaha mengendalikan keadaan melalui pidato-pidatonya.

"Saya komandokan kepada segenap aparat negara untuk selalu membina persatuan dan kesatuan seluruh kekuatan progresif revolusioner. Dua, Menyingkirkan jauh-jauh tindakan-tindakan destruktif seperti rasialisme, pembakaran-pembakaran, dan perusakan-perusakan. Tiga, menyingkirkan jauh-jauh fitnahan-fitnahan dan tindakan-tindakan atas dasar perasaan balas dendam."

Ia juga menyerukan "Awat adu domba antar-Angkatan, jangan mau dibakar. Jangan gontok-gontokan. Jangan hilang akal. Jangan bakar-bakar, jangan ditunggangi". Dalam pidato ia menyinggung Trade Commission Republik Rakyat Tiongkok di Jati Petamburan yang diserbu massa karena ada isu Juanda meninggal diracun dokter RRT. Padahal, beliau wafat akibat serangan jantung. Soekarno menentang rasialisme yang menjadikan warga Tionghoa sebagai kambing hitam.

Dalam pidato 20 November 1965 di depan keempat panglima Angkatan di Istana Bogor BK mengatakan, "Ada perwira yang bergudul. Bergudul itu apa? Hei, Bung apa itu bergudul? Ya, kepala batu." Tampaknya ucapannya itu ditujukan kepada Soeharto. Pada kesempatan yang sama Soekarno menegaskan, "Saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima Besar Revolusi. Terus terang bukan Subandrio. Bukan Leimena... Bukan engkau Soeharto, bukan engkau Soeharto, dan seterusnya (berbeda dengan nama tokoh lain, Soeharto disebut dua kali dan secara berturut-turut).

Mengapa Soekarno tak mau membubarkan PKI, padahal ini alasan utama kelompok Soeharto menjatuhkannya dari presiden. Karena dia konsisten dengan pandangan sejak tahun 1925 tentang Nas (Nasionalisme), A (Agama), dan Kom (Komunisme). Dalam pidato ia menegaskan, yang dimaksudkan dengan Kom bukanlah Komunisme dalam pengertian sempit, melainkan Marxisme atau lebih tepat "Sosialisme". Meskipun demikian Soekarno bersaksi "saya bukan komunis". Bung

Karno juga mengungkapkan keterlibatan pihak asing yang memberi orang Indonesia uang Rp 150 juta guna mengembangkan "the free world ideology". Ia berseru di depan diplomat asing di Jakarta, "Ambassador jangan subversi."

Tanggal 12 Desember 1965 ketika berpidato dalam rangka ulang tahun Kantor Berita Antara di Bogor, Presiden mengatakan tidak ada kemaluan yang dipotong dalam peristiwa di Lubang Buaya. Demikian pula tidak ada mata yang dicungkil seperti ditulis pers.

Peristiwa pembantaian di Jawa Timur diungkapkan Soekarno dalam pidato di depan HMI di Bogor 18 Desember 1965. Soekarno mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan sadis, orang bahkan tidak berani menguburkan korban.

"Awat kalau kau berani ngrumat jenazah, engkau akan dibunuh. Jenazah itu diklelerkan saja di bawah pohon, di pinggir sungai, dilempar bagai bangkai anjing yang sudah mati."

Dalam kesempatan sama, Bung Karno sempat bercanda di depan mahasiswa itu, "saya sudah 65 tahun meski menurut Ibu Hartini seperti baru 28 tahun. Saya juga melihat Ibu Hartini seperti 21 tahun."

Gaya bahasa Soekarno memang khas. Ia tidak segan memakai kata kasar tetapi spontan. Beda dengan Soeharto yang memakai bahasa halus tetapi tindakannya keras. Di tengah sidang kabinet, di depan para menteri, Presiden Soekarno tak segan mengatakan "mau kencing dulu" jika ia ingin ke belakang. Ketika perintahnya tidak diindahkan, ia berteriak "saya merasa dikentuti". Pernah pula ia mengutip cerita Sayuti Melik tentang kemaluannya yang ketembak. Namun, di lain pihak ia mahir menggunakan kata-kata bernilai sastra, "Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2½ sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita."

Dalam pidato 30 September 1965 ia sempat mengkritik pers yang kurang tepat dalam menulis nama anak-anaknya. Nama Megawati sebetulnya Megawati Soekarnaputri, bukan Megawati Soekarnoputri. Demikian pula dengan Guntur Soekarnaputra.

Di balik pidato

Apa yang disampaikan Soekarno dalam pidato-pidatonya merupakan bantahan atas apa yang ditulis media. Monopoli informasi sekaligus monopoli kebenaran adalah causa prima dari Orde Baru. Umar Wirahadikusumah mengumumkan jam malam mulai 1 Oktober 1965, pukul 18.00 sampai 06.00 pagi, dan menutup semua koran kecuali Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Koran-koran lain tidak boleh beredar selama seminggu. Waktu sepekan ini dimanfaatkan pers militer untuk mengampunyekan bahwa PKI ada di belakang G30S.

Meski masih berpidato dalam berbagai kesempatan, pernyataan BK tidak disiarkan oleh koran-koran. Bila Ben Anderson di jurnal Indonesia terbitan Cornell mengungkapkan hasil visum et repertum dokter bahwa kemaluan jenderal tidak disilet dalam pembunuhan di Lubang Buaya 1 Oktober 1965, jauh sebelumnya Soekarno dengan lantang mengatakan, 100 silet yang dibagikan untuk menyilet kemaluan jenderal itu tidak masuk akal.

Dalam pidatonya terdengar keluhan. Misalnya, di Departemen P dan K orang-orang yang mendukung BK dinonaktifkan. Sebetulnya seberapa drastiskah merosotnya kekuasaan yang dipegangnya?

Presiden Soekarno masih sempat melantik taruna AURI dan berpidato dalam peringatan 20 tahun KKO. Paling sedikit Angkatan Udara, Marinir, dan sebagian besar tentara Kodam Brawijaya masih setia kepada Bung Karno. Tetapi kenapa ia hanya sekadar berseru "jangan gontok-gontokan antarangkatan bersenjata". Kenapa ia tidak memerintahkan tentara yang loyal kepadanya untuk melawan pihak yang ingin menjatuhkannya?

Soekarno tidak ingin terjadi pertumpahan darah sesama bangsa. Dalam skala tertentu, yang tidak diharapkan Bung Karno itu telah terjadi setelah ia meninggal. Demikian pula yang kita lihat hari ini di Aceh. Sebuah wilayah yang pada tahun 1945 para ulamanya menyerukan rakyat mereka untuk berdiri di belakang Bung Karno. (*Dr. Asvi Warman Adam, sejarawan LIPI*)²³³

Soekarno telah tiada, PKI telah tiada.... Soeharto menjadi penguasa otoriter di bumi Indonesia! Tidak seorang pun yang berani membantah, menolak, dan mendongakkan kepala terhadap Soeharto, melihat Soeharto bercumbu dan berangkul mesra dengan imperialis. Teori domino yang dicanangkan, telah dimenangkan oleh imperialis. Teori 'dewan jenderal' yang diisukan sejak semula, tidak pernah terdengar lagi, karena para jenderal di bawah Soeharto telah mendapat kedudukan-kedudukan yang empuk yang menguntungkan.

Segala fungsi dalam kabinet, lembaga-lembaga negara, seperti DPR, MPR, DPA, MA, BPK, presdir-presdir atau dirut-dirut perusahaan negara, gubernur-gubernur, duta-duta besar hampir semuanya didominasi oleh perwira-perwira tinggi ABRI, khususnya dari AD.

Sebagaimana disebutkan di atas, bukan hanya kedudukan tinggi tersebut yang didominasi Angkatan Darat, namun kedudukan-kedudukan di daerah seperti bupati, walikota, camat, penghulu, dan RK/RT, kebanyakan dijabat oleh militer.

Soeharto, dengan ditopang oleh bedil dan bayonetnya Angkatan Darat, berkuasa dari masa ke masa, tanpa ada yang berani menantanginya. Dengan bedil dan bayonet di belakangnya, Soeharto "mampu menyihir banyak orang pintar menjadi bebek-bebek, meneluh wakil-wakil rakyat menjadi gagu, dan membuat pers tiarap sekian lama," kata seorang pengasuh pesantren di Rembang.²³⁴

Tidak ada hukum dan kemanusiaan. Ucapan "melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekwen" adalah sekadar *lip-service*, sekadar permainan bibir pejabat orba/Golkar dan kroni-kroninya Soeharto. Mengumandangkan asas Pancasila, ketuhanan dan kemanusiaan, sementara jutaan manusia, rakyat Indonesia, dibantai untuk melanggengkan kekuasaan orde baru Soeharto/Golkar.

Di saat itu, di saat Indonesia berada di bawah bedil, di bawah pemerintahan otoriter diktator fasis militer, tidak seorang pun yang bisa mengoreksi, mengawasi, memprotes segala macam bentuk tindakan melanggar hukum dan hak asasi manusia. Penculikan, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, korupsi, menjadi merajalela. Segala dendam pribadi mendapatkan jalan penyalurannya dengan tuduhan "ada indikasi terlibat G30S/PKI". Di Indonesia benar-benar tak ada hukum kemanusiaan! Tidak ada yang dikhawatirkan oleh Soeharto yang bisa membuka rahasianya. Soekarno sudah mati, Aidit sudah mati. Para tokoh G30S, Untung, Latief, Supardjo, telah berada dalam penjara, menunggu hukuman mati. Di Indonesia, benar-benar tidak ada hukum. Yang ada hanya Soeharto. Soeharto-lah hukum. Dialah segalanya-galanya! Indonesia adalah Soeharto dan Soeharto adalah Indonesia! Rakyat hanyalah sekadar pengisi bumi persada yang bisa ditekan, dianiaya, ditakut-takuti, diancam masuk penjara dan dibunuh hanya dengan tuduhan murah, yaitu "komunis".

Untuk lebih jelas bahwa di Indonesia, terutama sekali di kala Soeharto berkuasa, memang tidak ada hukum, mari kita lihat tulisan tentang ini, yang tidak lama berselang (sebelum meninggalnya Soeharto) juga pernah dimuat di surat kabar harian online *Kabar Indonesia* (Hoki).

"Indonesia Bukan Lagi Negara Hukum!"²³⁵

30 September 1965, merupakan hari yang tidak bisa dilupakan oleh siapa pun, karena hari itu merupakan satu titik kemunduran drastis di dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia; merupakan satu langkah awal dari Jenderal Soeharto dalam usahanya merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno, merupakan langkah awal usahanya membasmi kaum progresif dan komunis dari permukaan bumi Indonesia; dan sekaligus merupakan awal pengkhianatan Jenderal Soeharto terhadap cita-cita pejuang kemerdekaan RI, yang mencita-citakan satu negara berdasarkan hukum dan demokratis. Negara RI telah berubah menjadi satu negara diktatur Jenderal Soeharto, di mana "hukum" dan "kebenaran" berada di pihak penguasa, menjadi satu negara "*law of the ruler*", demikian kesimpulan tepat Kol. Latief yang secara langsung merasakan tekanan-tekanan dan siksaan-siksaan berat yang tak berperikemanusiaan kekuasaan Jenderal Soeharto.

Dengan kata lain, bisa juga dikatakan bahwa 30 September 1965 adalah langkah pertama usaha Jenderal Soeharto menegakkan singgasana kekuasaannya di atas unggukan mayat jutaan kaum progresif, kaum komunis, dan simpatisannya! Jenderal Soeharto yang ketika itu menjabat Panglima KOSTRAD, praktis telah memainkan peranan aktif untuk menguasai keadaan. Tindakan-tindakan yang dilakukan jelas-jelas tidak lagi tunduk pada komando Panglima Tertinggi yang ketika itu secara resmi masih dipegang oleh Bung Karno! Dengan perlahan-lahan dan mantap, Jenderal Soeharto melakukan usaha-usahanya untuk memaksa Presiden Soekarno menandatangani SUPERSEMAR (Surat Perintah 11 Maret 1966), yang memudahkan baginya untuk bertindak atas nama Presiden tanpa persetujuan

²³³ Kompas, 6-6-03.

²³⁴ <http://jawapos.com/>

²³⁵ Adilus, <http://www.xs4all.nl/~peace/pubind/mb/ind1.html> dan <http://www.xs4all.nl/~peace/pubind/mb/ind2.html>; lihat juga Hoki, 26-Jan-2008)

Presiden Soekarno. Setelah Supersemar berada di tangan, keesokan harinya, tanggal 12 Maret 1966 Jenderal Soeharto segera mengeluarkan perintah melarang/membubarkan PKI. Melarang satu partai politik yang dalam sejarah perjuangan melawan penjajah Belanda termasuk partai politik yang berdiri paling depan dan paling tangguh dan setelah merebut kemerdekaan, PKI juga termasuk partai politik yang paling konsekwen membela kepentingan-kepentingan rakyat terbanyak, pembela demokrasi; dan tentu saja perintah melarang PKI ini diikuti dengan perintah pengejaran, penangkapan, pembunuhan massal terhadap massa anggota PKI dan simpatisan-simpatisannya, termasuk anak-anak yang tidak berdosa dan bayi-bayi yang masih digendong dalam pangkuan ibunya; Kemudian tanggal 18 Maret 1966, Jenderal Soeharto meneruskan langkahnya untuk menangkapi 15 menteri pendukung setia Presiden Soekarno dan akhirnya mengurung Presiden Soekarno dalam tahanan rumah.

Mengapa Jenderal Soeharto yang sudah tahu lebih dahulu rencana Gerakan 30 September dari Kol. Latief, tidak mencegahnya? Padahal dia sebagai Panglima KOSTRAD mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mencegah terjadinya penahanan 7 jenderal dari Dewan Jenderal. Dari langkah-langkah selanjutnya yang diambil Jenderal Soeharto, menjadi jelas ada kesengajaan dari Jenderal Soeharto untuk mengorbankan 6 jenderal-jenderal (Jenderal Nasution berhasil lolos) yang menjadi sasaran G30S. Jenderal Soeharto sengaja ingin menggunakan perwira-perwira muda yang melancarkan G30S di bawah Sentral-Komando yang dipimpin Letkol. Untung untuk menyingkirkan jenderal-jenderal yang lebih senior dari dirinya. Karena dengan disingkirkannya jenderal-jenderal yang lebih senior dari dirinya berarti terbuka jalan lapang bagi dirinya untuk merebut pucuk pimpinan tertinggi ABRI. Inilah siasat Jenderal Soeharto yang licik dan bermuka dua, di satu pihak seolah-olah berpihak pada perwira-perwira muda untuk mencegah "Dewan Jenderal" yang berencana meenggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno, sehingga semua rencana gerakan melalui Kol. Latief dilaporkan pada Jenderal Soeharto. Tapi, begitu setelah 6 jenderal-jenderal atasannya ditangkap dan dibunuh, Jenderal Soeharto berbalik menunjukkan wajah sesungguhnya untuk merebut kekuasaan, secara sigap menggempur perwira-perwira muda. Dan penggempuran tersebut dengan mudah bisa dimenangkan Jenderal Soeharto, karena perwira-perwira muda benar-benar tetap setia pada Presiden Soekarno, dengan setia menaati perintah Panglima Tertinggi Bung Karno untuk menghentikan segala gerakan. Sedang Jenderal Soeharto dengan KOSTRAD-nya, tidak lagi menaati perintah Panglima Tertinggi Bung Karno untuk menghentikan segala tindakan pertumpahan darah, justru melancarkan offensif menggempur perwira-perwira muda dan segera melakukan pengejaran, penahanan, dan pembunuhan massal terhadap perwira-perwira muda progresif dan kaum komunis.

Demikianlah tindakan-tindakan biadab yang melanggar batas-batas perikemanusiaan mulai dilancarkan oleh Jenderal Soeharto, dan telah membuat dunia menjadi terkejut! Di mana RI sebagai negeri yang semula di bawah kekuasaan Presiden Soekarno memperkenalkan pada dunia "*way of life*" dan jiwa toleransi besar berdasarkan 5 prinsip yang dinamakan "Panca Sila", yang diucapkan di depan sidang umum PBB dengan judul "*To Build The World A New*", ternyata sekarang di bawah kekuasaan militer Jenderal Soeharto justru berlangsung kejadian-kejadian yang kekejamannya melebihi kekejaman Nazi Hitler dalam membasmi Yahudi.

Bagaimana tidak? Kalau di tahun-tahun akhir 1965 sampai 1968, sungai-sungai di Jawa, Sumatra, dan Bali menjadi penuh dengan mayat-mayat komunis dan simpatisan-simpatisannya, pembunuhan massal berlangsung terhadap rakyat tidak berdosa, tanpa lebih dahulu diadili dan jelas apa kesalahan-kesalahannya! Banyak adegan-adegan mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri mendengarnya, karena orang yang berpikiran normal pasti tidak akan mungkin berbuat demikian sadis, apalagi bagi orang-orang beragama yang ber-Ketuhanan dan ber-Perikemanusiaan! Tapi kekejaman-kekejaman justru telah terjadi di negeri RI di mana penguasanya ketika itu sesumbar "memurnikan dan mengkonsekwenkan PancaSila dan UUD45"!

Manusia-manusia sadis berkerumun bersorak-sorai pesta "sate komunis", menusuk mayat-mayat komunis dengan bambu dari dubur menembus sampai ke kerongkongan, kemudian membakarnya seperti "sate"! Dan tidak sedikit terjadi di desa-desa, di mana seluruh keluarga yang dituduh komunis dibunuh habis termasuk anak-anak dan bayi-bayi yang masih dalam pelukan dada ibunya. Kejam, kekejaman yang luar biasa! Kantor berita ANTARA memberikan angka resmi pembunuhan massal itu 'hanya' 500.000 orang yang terbunuh, angka yang dikemukakan oleh Laksamana Sudomo dalam wawancara dengan wartawan *Newsweek*, Bernard Krisher, di tahun 1977. Tapi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Amnesti Internasional memberikan taksiran lebih dari satu juta jiwa komunis dan simpatisan-simpatisannya atau orang-orang yang hanya terkait dan tidak tahu apa-apa dibunuh! Bisa terjadi demikian banyaknya orang tak berdosa terbunuh, hanya karena adanya perintah penguasa ketika itu: "lebih baik salah membunuh 10 orang daripada meloloskan seorang komunis!", satu perintah biadab, perintah yang tidak lagi berdasarkan hukum! Dan cara-cara hukum-rimba, militer-fasis demikian tetap bisa kita lihat dengan adanya perintah: "Tembak di tempat bagi perusuh" dalam menghadapi Peristiwa 27 Juli 1996 baru-baru ini!

Siapa yang harus bertanggung jawab akan kejadian-kejadian pembunuhan massal yang demikian kejamnya itu? Jelas, bahwa segera setelah G30S dilancarkan dengan penahanan 6 jenderal, dan Presiden Soekarno untuk menentramkan situasi dan menghindari pertumpahan darah lebih lanjut, telah memerintahkan untuk menghentikan segala gerakan! Pihak perwira-muda dengan Sentral Komando yang dipimpin oleh Letkol. Untung, menaati perintah Panglima Tertinggi Bung Karno, menghentikan segala gerakan; tapi sebaliknya, pihak Jenderal Soeharto (ketika itu sebagai Panglima KOSTRAD berpangkat mayor jenderal) justru melakukan offensifnya menggempur perwira-perwira muda, dan kemudian melanjutkan tindakannya dengan pengejaran, penahanan dan pembunuhan massal terhadap kaum progresif, kaum komunis, dan simpatisan-simpatisannya! Jadi, jelas jenderal Soeharto-lah yang merupakan orang pertama yang paling bertanggung jawab akan kejadian-kejadian setelah G30S! Oleh karenanya, Jenderal Soeharto harus diajukan ke depan MAHKAMAH untuk mempertanggungjawabkan pembunuhan massal yang terjadi setelah G30S itu, dan tuntutan ke depan mahkamah ini tidak mengenal daluwarsa sekalipun sudah lewat 31 tahun! Mengapa di Indonesia yang berfilisafah "PANCASILA" dan berdasarkan HUKUM bisa terjadi tindakan-tindakan kekejaman yang tidak berperikemanusiaan, dan lebih aneh lagi, orang yang bertanggung jawab akan kekejaman-kekejaman itu tetap bisa bebas dari tuntutan HUKUM, hidup mewah di atas singgasana kekuasaan yang dibangun di atas ungkulan jutaan mayat

kaum progresif, kaum komunis, dan simpatisan-simpatisannya selama 31 tahun lebih?

Lebih celaka, dan lebih menyedihkan lagi, karena kenyataan singgasana kekuasaan Jenderal Soeharto masih tetap harus disirami dengan darah dan tangisan air mata rakyat banyak! Marilah kita lihat selama 31 tahun ini di bawah orde barunya Jenderal Soeharto, di satu pihak bisa kita lihat bangunan-bangunan pencakar-langit, mobil-mobil mewah berkeliaran di kota-kota metropolitan Jakarta, dan lahirnya segelintir konglomerat-konglomerat. Tapi di pihak lain, kita juga harus bisa melihat adanya kenyataan-kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa kebanyakan rakyat Indonesia tetap hidup dalam kemiskinan dan hidup dalam suasana ketakutan. Sebagian besar buruh masih mendapatkan upah di bawah UMR (Upah Minimum Regional), sebagian besar kaum tani di desa-desa masih hidup di bawah garis hidup sebagai manusia normal.

Kita pun harus berani melihat kenyataan pahit ini, ketika zaman kekuasaan Presiden Soekarno, selama 20 tahun hutang luar negeri hanya 2,5 miliar US Dollar. Tapi, di bawah kekuasaan Jenderal Soeharto, sampai Juni 1981 hutang luar negeri sudah mencapai 23 miliar US Dollar dan sampai paragraf pertama tahun 1996 ini sudah melonjak lebih dari 100 miliar US Dollar! Rakyat Indonesia telah dililit dan dicekik oleh hutang-hutang Jenderal Soeharto yang begitu besar berlipat ganda. Sehingga Prof. Sumitro memerlukan untuk memberi canang bahwa DSR (*Debt Service Ratio*) saat ini sudah dalam bahaya, sudah "lampu merah", karena kewajiban pembayaran cicilan hutang sudah mencapai 32%!(baca *Kompas*, 21 Juni 1996). Sungguh sangat menyedihkan melihat kenyataan ini!

Keadaan di Indonesia justru menjadi semakin parah dengan diperketatnya macam-macam pengawasan terhadap kebebasan rakyat Indonesia, hilangnya demokrasi rakyat, dan dikekangnya kehidupan politik rakyat. Sedikit pendapat yang berbeda dengan pemerintah, sedikit kritik terhadap penguasa dinyatakan sebagai golongan oposisi yang tidak diperkenankan, yang harus ditindas, dan ditahan, ditangkap, dijebloskan dalam penjara. Di bawah ini sedikit rentetan contoh dari banyaknya kejadian-kejadian yang sesungguhnya terjadi selama 31 tahun ini:

- Seorang dokter berpangkat kapten bernama Sumerapi, sebagai perwira kesehatan di Penjara Salemba, karena secara jujur mengajukan keadaan pengobatan/ kesehatan di dalam penjara sebagaimana adanya seperti, kurangnya obat-obatan; adanya para tahanan terjangkit busung lapar bahkan terjadinya para tahanan mati kelaparan pada Perwira Menengah Kodam V Jaya yang meninjau Penjara Salemba, akhirnya harus menderita siksaan berat dan ditangkap dan tahun 1970 dituduh "G30S/PKI" di buang ke tempat pengasingan Pulau Buru. Sungguh malang nasib seorang dokter yang berperikemanusiaan dan jujur ini!
- Pada awal 1979 dilakukan penahanan terhadap Sutomo, bekas pimpinan Barisan Pemberontak Indonesia; Mahmud Junaedi, mantan pimpinan Redaksi harian NU. *Duta Masyarakat*; dan Prof.dr. Mr. Ismail Suny, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta dan ahli Hukum Konstitusi. Ketiga orang ini ditahan dengan tuduhan mendalangi demonstrasi mahasiswa Indonesia.
- Sukmaji Tjahjono, di depan sidang pengadilan negeri Bandung tanggal 22 Februari 1979 dengan tegas menyatakan: "jiwa Hitler dan Mussolini hidup kembali di Indonesia. Dan di antara Rakyat Indonesia sekarang terdapat ribuan penindas, pemeras, dan diktatur-diktatur perseorangan." Ia mempertegas lagi,

"bahwa tidak terasa beda cara kerja polisi-polisi rahasia kolonial dengan cara kerja polisi-polisi rahasia kekuasaan yang berkuasa sekarang ini!" Pernyataan yang diajukan oleh mahasiswa Sukmaji itu, yang sedang menghadapi tuntutan pengadilan negeri Bandung dengan tuduhan "menghina raja" (baca: *majesty*), berdasarkan ketentuan hukum pidana warisan kolonial dalam hubungan dengan Pen.Pres No.5/1959, merupakan penilaian yang cukup tegas.

- Hanya karena menjual buku sastra, buku-buku karangan Pramoedya Ananta Toer, bekas tokoh LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) orang bisa dituduh subversi dan harus meringkuk dalam penjara selama 7-8 tahunan. Demikianlah Bambang Isti diganjar 8 tahun oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tahun 1989, dan Bambang Subono diganjar 7 tahun, sedang Bonar Tigor Naipospos diganjar 8 tahun 6 bulan. Dan yang pasti, mereka-mereka ini tetap merasa tak salah, karena yang mereka jual adalah buku-buku sastra yang baik!
- Dalam perjalanan orde baru ini kita masih ingat kasus pembajakan Woyla, kasus Tanjung-Priok, Komando Jihad, dsb, untuk menyingkirkan Kelompok Islam. Atau seperti baru-baru ini permainan kelompok Prabowo dalam penculikan Irian Jaya untuk menyingkirkan OPM. Semuanya dibarengi macam-macam tuduhan, untuk menindas aksi-aksia.
- Pada tahun 1990, Bambang Beathor Suryadi yang karena mengorganisasi demonstrasi menentang kenaikan tarif listrik,diganjar 4 tahun 6 bulan penjara dengan tuduhan 'menghina presiden'. Kemudian gelombang demonstrasi menentang Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) pada 1993 mengantar Nuku Sulaeman, bekas Ketua Harian PIJAR ke bui. Nuku divonis 4 tahun penjara—di tingkat banding menjadi 5 tahun—juga karena 'menghina presiden'.
- Penduduk Medan, Sumatera Utara, tentu sulit melupakan peristiwa berdarah dan berbau rasial pada April 1994. Ketika itu ribuan buruh seantero Medan membakar mobil, melempari toko, bahkan mengeroyok seorang direktur perusahaan sampai tewas. Petugas keamanan menuduh SBSI berada di balik kerusuhan itu. Muchtar Pakpahan (Ketua Umum SBSI) ditangkap, diadili, divonis 4 tahun penjara, mengajukan kasasi, dan baru dibebaskan setelah sekitar 100 hari dikerangkeng. Dan kembali dijebloskan dalam tahanan lagi sehubungan dengan "Peristiwa 27 Juli 1996".
- Perlakuan kekerasan militer terhadap perjuangan hak konstitusional atas legalitas Megawati sebagai ketua DPP-PDI serta penindasan atas perjuangan pro demokrasi untuk mencapai pemerintahan yang lebih demokratis, adalah bukti bahwa di Indonesia tidak ada lagi keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Segala tindakan kekerasan militer selama ini, dilakukan bertolak belakang dari semboyan mereka sendiri "memurnikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 45" seperti:

1. Melakukan pembunuhan massal pada aksi penyerangan dan pendudukan rakyat Maubere pada tahun 1975 dengan korban lebih dari 200 000 manusia (1/3 dari jumlah penduduk).
2. Perlakuan kekerasan militer terhadap demonstrasi 'Tanjung Priok' pada tahun 1983 dengan korban lebih dari 500 orang.

3. Perlakuan kekerasan militer terhadap demonstrasi mahasiswa di Ujung Pandang pada tanggal 22 April 1996 untuk menuntut pencabutan kembali peraturan kenaikan harga tarif-transportasi.
4. Perlakuan kekerasan militer angkatan laut-infanteri, angkatan darat, dan polisi huru-hara menyiksa dengan pukulan dan tendangan sepatu lars sangat kejam terhadap aksi mogok mogok 20.000 buruh yang tergabung dengan gerakan pro demokrasi di bawah koordinasi PRD pada tanggal 8 Juli 1996 dan 9 Juli 1996 di Surabaya.
5. Perampasan dan penyerbuan gedung DPP-PDI pusat dengan mengorbankan para pejuang pro-demokrasi pada tanggal 27 Juli 1996 oleh ABRI dengan menggunakan Soeryadi sebagai ketua ilegal partai PDI melalui kongres Medan rekayasa diktator militer Jendral Soeharto.
6. Memberlakukan peraturan TEMBAK DI TEMPAT pada setiap unjuk rasa untuk menuntut keadilan sosial dan hak asasi kemanusiaan dan memberlakukan peraturan dalam KEADAAN DARURAT.
7. Perlakuan cara kerja teroris gaya militer fasis dari rejim 'orde baru' dengan penangkapan, penculikan, pembunuhan misterius dan penyiksaan tahanan politik para pejuang pro demokrasi, seperti Dita Sari (ketua PPBI), Mochtar Pakpahan (ketua SBSI), Budiman Sudjatmiko (ketua PRD) dan Pramoedya Ananta Toer (eks-tapol, penulis roman).
8. Melakukan pembunuhan massal dan pembunuhan misterius terhadap rakyat Aceh, Papua, Lampung, dan rakyat penuntut hak atas tanah garapan serta hak atas perbaikan hidup buruh.

Rentetan peristiwa-peristiwa ini menunjukkan secara jelas penghidupan rakyat Indonesia di bawah rezim militer Soeharto tidak banyak beda dengan suasana hidup di zaman kolonial, tidak ada kebebasan bicara, tidak ada kebebasan mengajukan pendapat, tidak ada kebebasan mengkritik penguasa! Di mana lagi namanya kebebasan rakyat? Ke mana larinya demokrasi setelah merdeka? Tidak ada lagi!

Kita juga bisa melihat untuk menindas aksi-aksi gerakan massa, kekuasaan Jenderal Soeharto dengan sewenang-wenang menuduh semua aksi-aksi gerakan massa yang muncul sebagai kegiatan subversi, misalnya:

1. Kasus Malari 1974;
2. Amuk massa atas pos polisi Cicendo, Bandung 1981;
3. Mengeluarkan petisi-Lembaran Putih Kasus Priok di Jakarta tahun 1984;
4. Bonar Tigor Naipospos, Bambang Subeno, Bambang Isti Nugroho dalam kaitan penyebaran buku terlarang di Yogyakarta tahun 1986 dan 1987;
5. Perlawanan GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) Warsidi di Lampung tahun 1989. Terakhir (1996) Mulyadi (setelah menyandang status terdakwa selama enam tahun) dibebaskan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena tidak cukup bukti; dll.

Dengan berkedok "memurnikan pelaksanaan Pancasila", Jenderal Soeharto pada hakikatnya telah merubah negara kita Indonesia, menjadi negara kekuasaan, di mana yang berkuasa selalu "benar", atau "kebenaran" selalu berada di pihak penguasa. Satu tindakan penghianatan terhadap pejuang-pejuang kemerdekaan RI, yang bercita-citakan menegakkan satu negara yang berdasarkan prinsip "*rule of law*",

mencapai satu negara berdasarkan hukum, Negara Hukum. Jadi, jelas bukan lagi demokrasi yang diberikan pada Rakyat, bukan HUKUM yang berlaku, tapi kekerasan, tangan besi yang dijatuhkan di atas kepala Rakyat untuk mempertahankan singgasana kerajaannya! Penangkapan-penangkapan dan persekusi dilakukan lagi-lagi hanya dengan tuduhan membabi-buta gerakan demokratis ini sebagai perusuh, destruktif, "ditunggangi Komunis", "PKI hidup kembali", dll.

Mengikuti peristiwa-peristiwa terakhir ini, seharusnya kita bisa bangga melihat munculnya pemuda-pemuda demokrat yang berani tampil memperjuangkan cita-cita leluhurnya untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang benar-benar demokratis, bukan lalu menindasnya dan menjebloskannya dalam tahanan, ke dalam penjara-penjara. Sekali lagi hanya dengan tuduhan "komunis"! Kita harus mengagumi pemuda-pemuda kritis yang mampu melihat kebobrokan kekuasaan orde baru sekarang ini dan berani tampil ke depan untuk bersuara. Tapi ingat, kita sekarang sedang berhadapan dengan Jenderal Soeharto, jenderal yang kita kenal "selalu senyum" tapi mempunyai watak kekejaman yang luar biasa! Kita sekarang harus berhadapan dengan Jenderal Soeharto, satu-satunya jenderal dalam sejarah Indonesia yang menurunkan tangan besi, dengan kekejaman yang tidak kenal ampun dalam membunuh dan menangkap rakyat tak berdosa! Kita sekarang berhadapan dengan Jenderal Soeharto yang sangat lihai (cerdik dan licik), yang merupakan satu-satunya jenderal di dunia ini yang "berhasil" membasmi komunis dari muka bumi Indonesia, tanpa perlu bantuan yang besar dari Amerika Serikat!

Tentu, di samping kelihaihan Jenderal Soeharto dengan kekejamannya yang luar biasa "berhasil" membasmi komunis dari muka bumi Indonesia, kita juga harus bisa melihat "berhasil"-nya Jenderal Soeharto membasmi komunis, justru karena adanya kesalahan serius pada PKI! Salah satu kesalahan serius PKI itu, adalah tetap menganggap negara Republik Indonesia ketika itu sebagai negara hukum. Negara yang tetap akan memperlakukan segala peristiwa yang terjadi dengan HUKUM yang berlaku, tidak akan main tangkap dan main bunuh sebelum ada tuduhan-tuduhan yang terbukti di depan pengadilan! Sehingga PKI merasa segala legalitas yang ada harus tetap dipertahankan, dan oleh karenanya kita bisa melihat, setelah G30S meletus dan Jenderal Soeharto sebagai panglima KOSTRAD sudah mulai melakukan "pembersihan demi Keamanan Nasional", Lukman, Nyoto (Wakil Ketua PKI) masih tetap menghadiri sidang-sidang Kabinet! Demikian juga pimpinan-pimpinan PKI lainnya, tidak ada yang menghilang dan melakukan perlawanan sebagaimana mestinya.

Kesalahan lain yang merupakan kesalahan fatal dari PKI, adalah kesalahan dalam menilai pribadi Jenderal Soeharto. PKI bukan saja tidak menempatkan Jenderal Soeharto sebagai jenderal kanan-reaksioner yang harus masuk dalam "*black-list*", bahkan dikategorikan sebagai "sekutu", sebagai jenderal yang kalau perlu bisa dimintai "bantuan". Mungkin ini disebabkan hanya karena ketika Jenderal Soeharto sebagai utusan Moh.Hatta untuk meninjau Madiun (yang dikenal umum dengan "Peristiwa Madiun" 1948), telah memberikan laporan yang objektif, bahwa: "di kota Madiun ketika itu tidak ada gejala-gejala pemberontakan PKI, tidak ada bendera Merah Putih yang diturunkan dan tidak ada bendera palu-arit yang berkibar; penjara-penjara juga tidak menjadi penuh oleh pasukan yang ditawan. Semua berjalan lumrah!"

Di dalam sejarah Republik Indonesia, kita bisa melihat adanya pemberontakan-pemberontakan bersenjata yang terjadi. Dan kita bisa melihat bagaimana Presiden

Soekarno dalam menyelesaikan peristiwa pemberontakan PRRI-Permesta, tidak pernah merasa perlu untuk melakukan penahanan-penahanan-penangkapan-penangkapan massal terhadap seluruh anggota-anggota Masjumi-PSI, sekalipun jelas dan tegas tokoh-tokoh partai itu terlibat sebagai pimpinan-pimpinan pemberontakan PRRI-Permesta. Presiden Soekarno membatasi penahanan terhadap tokoh-tokoh pelaku-utama PRRI-Permesta, kemudian mengajukan ke sidang mahkamah dan setelah dibuktikan kesalahannya baru menjatuhkan hukuman sesuai dengan putusan hakim pada tokoh-tokoh utama nya seperti: Moh. Natsir; Syafrudin Prawiranegara; Dr. Sumitro dan Mr. Asaat. Dan ingat, bahkan Presiden Soekarno tidak pernah mencabut atau membatalkan secara sepihak pensiun yang berhak mereka terima sebagai bekas menteri, sebagai anggota DPR! Ini pertama; Kedua, Presiden Soekarno baru membubarkan/melarang Masjumi-PSI, setelah ternyata partai tersebut tidak mau mengutuk atau menjatuhkan disiplin-organisasi pada tokoh-tokoh yang jelas-jelas terlibat dan memimpin PRRI-Permesta.

Sebaliknya, Jenderal Soeharto dalam menyelesaikan Peristiwa G30S, tidak membatasi hanya menahan tokoh-tokoh pelaku G30S kalau itu dianggap makar, tapi justru sengaja memperluas sasaran sebesar-besarnya dengan mencantumkan embel-embel nama PKI yang dituduh terlibat dan mendalangi G30S, sekalipun dalam kenyataan tidak ada satu pun nama tokoh PKI yang tercantum dalam Sentral Komando G30S. Dan tidak berhenti sampai di situ, Jenderal Soeharto lebih kejam lagi melakukan pengejaran, penahanan, penangkapan, dan pembunuhan massal terhadap semua orang yang dicurigai "komunis" atau simpatisannya, dengan perintah: "Lebih baik salah membunuh sepuluh orang, daripada membiarkan lolos seorang komunis!" Ini pertama. Kedua, Jenderal Soeharto sekalipun tidak bisa membuktikan keterlibatan PKI dalam G30S, telah melakukan pembunuhan secara liar terhadap tokoh-tokoh utama PKI dan melarang PKI; Ketiga, Jenderal Soeharto setelah menahan belasan tahun perintis-perintis pejuang kemerdekaan, termasuk juga anggota-anggota MPR-DPR-DPA dalam penjara-penjara dengan siksaan berat dan tidak bisa membuktikan tuduhan-tuduhan kesalahan, setelah di-"kembalikan ke dalam masyarakat" (kata lain dari "bebas penuh") secara sepihak mencabut pensiun yang seharusnya didapat sebagai perintis pejuang kemerdekaan, sebagai anggota MPR-DPR-DPA!

Sedang ratusan ribu orang yang harus meringkuk di dalam penjara-penjara selama belasan tahun dengan menderita segala siksaan dan tidak tahu apa kesalahannya, setelah "bebas penuh", di-"kembalikan ke dalam masyarakat" juga tidak mungkin bisa mendapat pekerjaan. Karena adanya tanda "ET" (eks-tapol) bagi orang-orang yang telah "bebas penuh", sulit atau bahkan tidak mungkin mendapatkan keterangan "bebas terlibat G30S"! Dan dengan tidak adanya keterangan "bebas terlibat G30S", orang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Karena di Indonesia dibuat ketentuan: mereka yang dilahirkan pada tahun 1955 dan sebelumnya, diwajibkan menunjukkan keterangan "bebas terlibat G30S" dari polisi untuk melamar pekerjaan. Artinya, mereka yang sudah "bebas penuh" dan dengan rumusan di-"kembalikan ke dalam masyarakat", hakikatnya orang dijerumuskan dalam jurang penghidupan sebagai.... gelandangan!

PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN Jenderal Soeharto:

Membunuh tokoh-tokoh utama PKI sebelum diajukan ke pengadilan; Jenderal Soeharto sebagai panglima KOPKAMTIB ketika itu, tidak lagi mempedulikan hukum yang berlaku, secara mantap melaksanakan langkahnya untuk menggunakan

dalih G30S, membasmi komunis dan demokrasi dari muka bumi Indonesia. Langkah pertamanya yang dilaksanakan adalah menghilangkan-lenyapkan tokoh-tokoh utama PKI, dengan demikian pihak Jenderal Soeharto bisa semau-maunya mengatakan bahwa PKI "terlibat" dan "mendalangi" G30S. D.N. Aidit sebagai Ketua CC-PKI pernah diberitakan ditangkap oleh alat negara. Tetapi sampai sekarang tidak diketahui di mana dia ditahan, Harian Jepang dapat mengemukakan, bahwa dia telah mati disembelih di atas Gunung Merapi-Merbabu. Sedang pemerintah Jenderal Soeharto belum pernah secara resmi mengumumkan di mana dan bagaimana nasib D.N. Aidit itu. Kalau betul D.N. Aidit disembelih seperti yang diberitakan, siapa yang harus bertanggung jawab? Karena seorang yang ditahan oleh alat negara secara resmi, tidak boleh dibunuh dalam proses pemeriksaan! Bila terjadi pembunuhan sebelum selesai pemeriksaan, bagi pemerintah yang menjalankan "*rule of law*", wajib menuntut petugas-petugas negara yang bertanggung jawab ke sidang pengadilan untuk mempertanggungjawabkan pembunuhan atas D.N. Aidit itu. Sehingga D.N. Aidit sebagai ketua CC PKI tidak bisa diajukan ke sidang pengadilan, atas tuduhan terlibat atau mendalangi G30S. Atau penguasa militer Soeharto takut apa yang diungkapkan D.N. Aidit di sidang pengadilan akan tidak menguntungkan tuduhan PKI terlibat dan dalang G30S. Yang memang akan dijadikan alasan kuat untuk menumpas PKI dari muka bumi Indonesia.

Nyoto, sebagai menteri negara diketahui ditangkap oleh alat negara secara resmi, ketika keluar dari tempat kerja dr. Subandrio di Merdeka Selatan. Tindakan alat negara ini tentu saja merupakan pelanggaran."

Tidak Produktif?

SEMENJAK hari pertama Jenderal Soeharto menancapkan kukunya di tampuk kekuasaan pemerintahan, tidak sehari pun yang dilewatkan tanpa tertumpahnya darah, pembunuhan kejam dan brutal atas orang-orang yang menjadi lawan politiknya, terutama kaum komunis Indonesia. Berbagai macam kekejaman, kekejian, perkosaan, pembunuhan, dan kejahatan kemanusiaan dilakukan oleh Soeharto dengan menggunakan orde baru dan organisasi maupun partai pendukungnya, terutama Golkar, dari tahun ke tahun. Namun, semua itu diselimuti, ditutupi, tidak pernah diberitakan oleh koran-koran yang berada di bawah kontrol pemerintah orde baru/Soeharto. Begitu juga segala bentuk kelicikan dan kebusukan Soeharto semua disembunyikan oleh kroni-kroninya, bertamengkan dan bermodalkan "senyum sang jenderal" Soeharto.

Pada masanya, rakyat tidak berani melihat dan bersuara tentang kelicikan dan kebusukan Soeharto yang secara merangkak, selangkah demi selangkah melakukan perebutan kekuasaan pemerintahan dari tangan Presiden Soekarno. Hal ini dapat dengan jelas dilihat seperti apa yang diuraikan oleh Mr. Y. Pohan, sbb.:

"Soeharto sangat jelas dan mengerti ketinggian kewibawaan Presiden Soekarno pada waktu itu. Untuk menggulingkan Presiden Soekarno baginya tidak mungkin dia melakukannya segera dengan cara terang-terangan, tetapi ia menggunakan cara "halus" yaitu dengan Soekarno menggulingkan Soekarno. Dengan adanya Surat Perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Presiden/Panglima Tertinggi/

Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS di tangannya, Soeharto dengan mudah bertindak untuk pertama-tama menghancurkan kedudukan hukum kekuatan yang konsekwen mendukung Presiden Soekarno yaitu dengan pelarangan PKI yang didahului dengan penghancuran secara fisik. Setelah kekuatan itu dapat dilumpuhkan, dia lalu menggulingkan Presiden Soekarno dan menahan-rumahkan beliau sampai beliau wafat dalam keterpencilan pada tahun 1970. Menggunakan “tangan” Soekarno menghancurkan kekuatan-kekuatan yang mendukung Soekarno, kemudian merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno, adalah tindakan yang sangat licik dan keji kedua dari Soeharto.

Kup-kup militer seperti yang terjadi Afrika dan Amerika Latin agak mudah dilihat oleh mata orang awam. Soeharto pun mengerti akan hal itu. Karena itu, untuk menutup tindakan kupnya, Soeharto menggunakan badan “konstitusional” yaitu MPRS. Melalui badan tersebut dia “dipilih” (*baca: mengangkat diri*) menjadi pejabat presiden kemudian menjadi presiden penuh, di mana dia terlebih dahulu melakukan pengebirian besar-besaran atas MPRS sehingga menjadi badan yang sepenuhnya mendukung dan mengabdikan kepentingannya. Menggunakan stempel karet “konstitusional” untuk menutupi dan menyelubungi tindakan inkonstitusional adalah tindakan licik dan keji ketiga yang dilakukan Soeharto.

Tetapi saya ingin pula membahas sedikit masalah kup merangkap Soeharto itu yang diberi stempel karet “konstitusional”, yang sebenarnya adalah tidak konstitusional. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan singkat berikut ini:

Seperti telah dikemukakan di depan bahwa SP 11 Maret merupakan penyerahan sebagian kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Penyerahan eksekutif dari tangan Presiden Soekarno yang masih mampu melaksanakan tugas-tugasnya adalah bertentangan dengan UUD 45 pasal-pasal 5,10,11,12,13,14,15,16 dan ayat 2 pasal 17. Menurut UUD 45, ayat 1, dinyatakan bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Kemudian dalam penjelasan UUD No.XIV dinyatakan sebagai berikut: “Di bawah MPR, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan Presiden.” Pada waktu Soeharto dengan SP 11 Maret melakukan tindakan seperti dipaparkan di atas, Presiden RI tidak sedang pergi ke luar negeri, tidak berhalangan untuk memimpin negara, malahan pada masa itu masih aktif memimpin sidang-sidang kabinet.

Dalam praktik selanjutnya sampai dewasa ini, sesungguhnya tidak hanya dalam tiga hal tersebut di atas kelicikan Soeharto. Satu hal lagi ialah, dia sangat lihai dalam menghimpun dan menggunakan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang pada masa awal mendukungnya dalam merebut kekuasaan, diberinya kedudukan, tetapi sesudah merasa posisinya kuat, satu per satu orang-orang itu dicampakkan dan ditinggalkannya begitu saja, jika dia merasa bahwa orang itu mulai ada tanda-tanda akan menjadi saingannya, atau membahayakan kekuasaannya, atau karena orang itu sedikit saja tidak sependapat dengan dia.

Lihatlah apa yang terjadi dengan Jenderal Nasution, Sultan Hamengkubuwono IX, Jenderal Soemitro, Adam Malik, Jenderal M. Yusuf, Jenderal H.R. Dharsono, dan lain-lain, bukankah demikian adanya?

Dari uraian di atas dapatlah diambil konklusi bahwa semua tindakan Soeharto dengan menggunakan SP 11 Maret sebagai landasan hukum adalah tidak sah, adalah tindakan inkonstitusional. Pengambilan wewenang Presiden Soekarno oleh Jenderal Soeharto di mana beliau masih dimungkinkan untuk bertindak sendiri sesuai dengan UUD 45 adalah jelas merupakan tindakan kup, tindakan perebutan kekuasaan.

Kup merangkap Soeharto yang diuraikan di atas merupakan suatu tindakan yang penuh kelicikan, yang dalam batas tertentu bisa mengelabui orang awam, karena itu perlu disingkap.²³⁶

Namun, anak petani Kemusuk yang ahli dalam taktik licik dan busuk, dengan menggunakan falsafah Jawa “*ngluruk tanpa bala*”, menggunakan tangan orang lain untuk mencapai maksudnya itu, sempat berkuasa mengharubirukan rakyat dan bangsa Indonesia, yang oleh kroni-kroninya dibanggakan dan diagungkan seperti dewa, namun pada hakikatnya tak lebih dari serigala yang berjubahkan kambing, yang dikenal sebagai “*The Smiling General*”, namun praktiknya adalah penjahat kemanusiaan yang terbesar pada abad modern ini.

Semua itu terbukti dengan segala kekejaman dan kebrutalan pemerintahan Soeharto, dari hari ke hari selama kekuasaannya yang mengandalkan bedil, teror, dan ancaman terhadap rakyat dan bangsa Indonesia. Kekejaman, perkosaan, pembunuhan, dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan/direstui oleh Soeharto, yang merupakan sejarah hitam bangsa, harus diketahui dan diungkapkan, agar generasi muda bangsa dapat memandang dengan jernih dan berdiri teguh dalam melanjutkan cita-cita bangsa yang dicetuskan oleh para *founding father* Indonesia.

Prof. John Rossa, sejarawan University of British Columbia, Kanada, editor buku *Tahun yang Tak Pernah Berakhir*, mengatakan:

“Negara, setelah 65, tiap tahun membuat peringatan, mereka bikin film, mereka bicara banyak tentang 65, pejabat-pejabat orde baru, tetapi mereka tidak pernah menjelaskan pembunuhan [massal] itu. Mereka bicara lebih banyak tentang G30S, tetapi tentang pembunuhan [massal] itu, tentang penangkapan itu, mereka tidak menjelaskan.”

Sedang Dr. Robert Cribb, sejarawan Australian National University, Melbourne, menyatakan keheranannya dengan mengatakan:

“Yang aneh di Indonesia, peristiwa [G30S] itu tidak diammesikan, tidak dilupakan, tapi tidak dibicarakan. Setiap orang tahu bahwa memang ada peristiwa pembantaian massal tapi banyak orang tidak mau membicarakan. Itu yang aneh di Indonesia...!”

Mungkin sebagian karena orang Indonesia merasa malu, bagaimana itu bisa berlaku begitu?”

²³⁶ Y. Pohan, “Siapa Sesungguhnya yang Melakukan Kudeta terhadap Pemerintahan Presiden Soekarno?”, <http://www.munindo.brd.de/archiv/pohan.htm>.

Pendapat kedua ahli sejarah tersebut di atas, yang diucapkannya langsung dalam film dokumen *Kawan Tiba Senja* yang dikeluarkan oleh LPKP 65 Bali & JK 6, memang benar! Memang ternyata, bahwa Indonesia, terutama sebagian besar para pemimpinnya, bukannya malu, akan tetapi takut untuk membicarakan masalah pembunuhan manusia tahun 1965—1966 yang melewati batas perikemanusiaan itu. Hal ini, bukan saja karena anggapan yang ditanamkan oleh orde baru guna menutupi kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya, dengan berdalih bahwa “mustahil hal begitu bisa terjadi”, dan lebih daripada itu, banyak pemimpin yang duduk di tempat empuk sekarang adalah orang-orang yang pernah mendapat kenikmatan, kedudukan, dan untung berkat jasa Soeharto/orde baru. Jadi, bagaimanapun jelek dan busuknya Soeharto yang menyebabkan pembunuhan jutaan manusia Indonesia, pembuangan 12.000 tapol ke Pulau Buru, pencabutan kewarganegaraan atas bangsa Indonesia yang berada di luar negeri, mendiskriminasi hidup tidak kurang dari 20 juta rakyat dengan peraturan yang tidak manusiawi seperti misalnya Peraturan Mendagri Amir Mahmud No. 32/1981, tidak perlu dipersoalkan, karena “jasa-jasa” Soeharto terhadap semua kroni-kroninya yang sampai sekarang bisa mempunyai kedudukan-kedudukan tinggi dan penting. Bahkan, tidak bisa dibantah, bahwa seorang pemimpin tertinggi Indonesia adalah “keluarga” dari si penjagal 3 juta manusia, Sarwo Edhi Wibowo, bahkan ada juga yang pernah menjadi Ketua Umum KAMI, suatu organisasi yang baik pimpinannya maupun anggota-anggotanya sedikit-banyaknya, tangantangannya juga berlumuran darah bangsa Indonesia yang menjadi korban di bawah kekuasaan Soeharto. Dengan tari dan gendang yang sama, mereka bernyanyi, “membicarakan masalah G30S sebagai tidak produktif”, “tidak ingin membuka luka lama”, dan sebagainya, karena sesungguhnya mereka takut dengan sejarah, takut dengan kebenaran!

John Rossa, profesor muda bidang sejarah University of British Columbia, Kanada, bukan saja sekadar menjadi editor dari buku *Tahun yang Tak Pernah Berakhir*, namun lebih jauh lagi, juga telah menggunakan waktunya bertahun-tahun, semenjak menjadi mahasiswa, untuk menyelidiki, mengorek dan menggali, dan melakukan riset ke berbagai sumber sebagai ‘detektif sejarah’ hingga dapat membuka jaringan-jaringan dan persoalan-persoalan yang tersembunyi yang orang awam tidak pernah mengetahuinya sekitar G30S, dan yang kemudian dengan gemilang menuangkannya dalam bentuk buku yang berjudul *Pretext for Mass Murder: The September 30 Movement and Suharto's Coup d'Etat in Indonesia* yang diterbitkan oleh The University of Wisconsin Press, Madison, USA pada tahun 2006 dan telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Dalih Pembunuhan Massal—Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* pada tahun 2008.

Buku yang penuh dengan uraian dan pembuktian berdasarkan penyelidikan yang mendalam berdasarkan dokumen-dokumen dan wawancara terhadap tokoh-tokoh atau keluarga yang bersangkutan ini merupakan sumbangan yang sangat besar sekali buat semua golongan dan kalangan untuk menambah pengenalan

mereka terhadap masalah besar yang telah membikin sengsara puluhan juta bangsa dan warga negara Indonesia yang dilakukan oleh orde baru selama puluhan tahun... “Dalih Pembunuhan Massal” ini menunjukkan bahwa buku ini termasuk salah satu di antara buku-buku yang amat perlu dibaca oleh sebanyak mungkin orang, yang ingin mengetahui lebih banyak, lebih jelas atau lebih objektif tentang soal-soal yang berkaitan dengan Peristiwa 65. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib berterima kasih dan menghargai setinggi-tingginya atas usaha dan ketekunan serta proses panjang yang menyertai pembuatan buku ini.

“G30S/PKI” atau G30S/1965?

DALAM kata pengantarnya untuk buku tersebut, John Roosa mempertanyakan tentang penggunaan sebutan “G30S/PKI” untuk peristiwa G30S tahun 1965. Menurut John Roosa, ini “berarti bahwa penggunaan akhiran “/PKI” sesudah G30S itu mencerminkan jawaban terhadap pertanyaan siapa yang mendalangi gerakan itu. Ia adalah simbol pernyataan: “PKI mendalangi G30S”. Apabila jawaban itu didukung oleh bukti-bukti tak tersangkal dan secara luas diterima sebagai fakta historis maka kita tidak perlu mengajukan pertanyaan tentang dalang lagi. Kita bisa tutup buku dengan G30S. Tapi banyak sejarawan yang belum menerima jawaban tersebut, atau jawaban lain, sebagai suatu yang final, karena terdapat begitu banyak aspek yang aneh, tak terjelaskan tentang G30S. Banyak orang Indonesia bingung dengan G30S dan berharap menemukan lebih banyak informasi tentangnya. Pemerintah dapat mencoba menulis sejarah dengan keputusan resmi. Tetapi memastikan bahwa setiap penyebutan G30S harus diikuti dengan “/PKI” tidak akan mencegah orang untuk bertanya-tanya tentang arti kedua istilah yang mereka kaitkan itu: Apa G30S? Apa itu PKI? Dan bentuk hubungan seperti apa antara kedua istilah yang ditandai dengan garis miring itu?”

“Rezim Soeharto mengklaim bahwa PKI bertanggung jawab atas G30S; partai itu memimpin atau mengorganisasikan G30S. Klaim seperti itu dapat diterima sebagai sebuah hipotesa tetapi kita seharusnya berharap diberi sejumlah bukti sebelum kita menerimanya sebagai kesimpulan. Kita juga harus berharap ada rumusan yang lebih persis. PKI adalah sebuah partai dengan anggota kurang lebih tiga juta orang. Kalau pemerintah berniat bersikukuh bahwa “PKI” mengorganisasikan G30S, maka pemerintah harus mampu menjelaskan siapa di dalam PKI yang mengorganisasikan gerakan tersebut. Apakah tiga juta anggota partai secara keseluruhan bertanggung jawab? Ataukah sebagian? Atau hanya pimpinan partai? Apakah pihak pimpinan itu Central Komite atau Politbiro? Sepanjang masa kepemimpinan Soeharto, pemerintah tidak pernah dengan telak mengidentifikasi siapa di dalam PKI yang bertanggung jawab. Malahan dengan secara terus-menerus menggunakan istilah “PKI”, masyarakat digiring untuk percaya bahwa bukan hanya seluruh tiga juta anggota partai yang bertanggung

jawab, tetapi juga siapa pun yang berhubungan dengan partai, seperti para anggota organisasi-organisasi sealiran (seperti Lekra), bertanggung jawab.”

Dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami orang awam, Prof. John Roosa memberikan penjelasannya, yang dapat menggugah golongan yang selama ini terlena, golongan yang selama ini latah dan membebek tanpa mau berpikir dan mendalami fakta kebenaran apa yang mereka tuduh dan ucapkan.

Selanjutnya, Prof. John Roosa memberikan contoh yang sangat mudah dicerna dan dipahami: “Sebelum 1965, pemerintah Indonesia tidak pernah menimpakan kesalahan kepada suatu kelompok masyarakat secara keseluruhan. Kaum nasionalis yang berjuang untuk kemerdekaan 1945—1949 tidak membunuh orang-orang Belanda hanya karena mereka orang Belanda. Setelah pemberontakan PRRI/Permesta pada akhir 1950-an, pemerintah Soekarno melarang PSI dan Masyumi karena pemimpin-pemimpin kedua partai mendukung pemberontakan-pemberontakan tersebut. Tetapi pemerintah Soekarno tidak menyatakan bahwa semua anggota kedua partai adalah pengkhianat; pemerintah tidak menahan/dan atau membunuh orang-orang hanya karena mereka anggota PSI atau Masyumi. Soekarno mengampuni pemberontak-pemberontak Darul Islam—orang-orang yang memang mengangkat senjata untuk melawan pemerintah—kecuali pimpinan-pimpinan puncaknya. Bayangkan seandainya prinsip kesalahan kolektif diterapkan pada anggota Golkar dewasa ini: haruskah setiap anggota Golkar pada masa orde baru diminta bertanggung jawab atas kejahatan Soeharto?”²³⁷

Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto

“BUKU sejarawan dari University of British Columbia (Kanada), John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* itu mengungkapkan secara bagus sekali, berbagai bahan dan latar belakang tentang Peristiwa 65 yang berkaitan dengan masalah (antara lain): Bung Karno, Soeharto, PKI, Amerika Serikat, Angkatan Darat, situasi internasional, dll.”

John Roosa, dengan ketelitian dan kemahiran dan usaha kerasnya, dalam bukunya itu, telah berusaha me-“rekonstruksi”, atau “membangun kembali” peristiwa G30S 1965 itu, hingga bisa diikuti, dipelajari, dan dimengerti oleh siapa pun.

“Bagi sejarawan yang ingin memahami perjalanan sejarah Indonesia modern, hal yang terkadang menimbulkan rasa frustrasi ialah justru karena kejadian yang paling misterius ternyata merupakan satu babak kejadian yang terpenting. Pada dini hari 1 Oktober 1965, Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letnan Jenderal Ahmad Yani dan 5 orang staf umumnya diculik dari rumah-rumah mereka di Jakarta, dan dibawa dengan truk ke sebidang areal perkebunan di selatan kota. Para penculik membunuh Yani dan dua jenderal lainnya pada saat penangkapan berlangsung. Tiba di areal perkebunan beberapa saat kemudian pada pagi hari itu,

mereka membunuh tiga jenderal lainnya dan melempar enam jasad mereka ke sebuah sumur mati. Seorang letnan, yang salah tangkap dari rumah jenderal ketujuh yang lolos dari penculikan, menemui nasib di lempar ke dasar sumur yang sama.

Pagi hari itu juga orang-orang di balik peristiwa pembunuhan ini pun menduduki stasiun pusat Radio Republik Indonesia (RRI) dan melalui udara menyatakan diri sebagai anggota pasukan yang setia kepada Presiden Soekarno. Adapun tujuan aksi yang mereka umumkan ialah untuk melindungi presiden dari komplotan jenderal kanan yang akan melancarkan kudeta.

Mereka menyebut nama pimpinan mereka, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Cakrabirawa, yang bertanggung jawab mengawal presiden, dan menamai gerakan mereka Gerakan 30 September (selanjutnya disebut sebagai G30S).

Dalam sebuah unjuk kekuatan, ratusan prajurit pendukung G30S menduduki Lapangan Merdeka (sekarang Lapangan Monas) di pusat kota. Lalu pada sore dan petang hari 1 Oktober, seperti menanggapi isyarat dari Jakarta, beberapa pasukan di Jawa Tengah menculik 5 perwira pimpinan mereka. Kesulitan memahami G30S antara lain karena gerakan tersebut sudah kalah sebelum kebanyakan orang Indonesia mengetahui keberadaannya.

Gerakan 30 September tumbang secepat kemunculannya. Dengan tidak adanya Yani, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando Angkatan Darat pada pagi hari 1 Oktober, dan pada petang hari ia melancarkan serangan balik. Pasukan G30S meninggalkan stasiun RRI dan Lapangan Merdeka yang sempat mereka duduki selama 12 jam. Semua pasukan pemberontak akhirnya ditangkap atau melarikan diri dari Jakarta pada pagi hari 2 Oktober.

Di Jawa Tengah, G30S hanya bertahan sampai 3 Oktober. Gerakan 30 September lenyap sebelum anggota-anggotanya sempat menjelaskan tujuan mereka kepada publik. Pimpinan G30S bahkan belum sempat mengadakan konferensi pers dan tampil memperlihatkan diri di depan kamera fotografer. Kendati bernapas pendek, G30S mempunyai dampak sejarah yang penting. Ia menandai awal berakhirnya masa kepresidenan Soekarno, sekaligus bermulanya kekuasaan Soeharto. Sampai saat itu Soekarno merupakan satu-satunya pemimpin nasional yang paling terkemuka selama dua dasawarsa lebih, yaitu dari sejak ia bersama pemimpin nasional lain Mohammad Hatta, pada 1945 mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia satu-satunya presiden negara-bangsa baru itu.

Dengan karisma, kefasihan lidah, dan patriotismenya yang menggelora, ia tetap sangat populer di tengah-tengah semua kekacauan politik dan salah urus perekonomian pasca-kemerdekaan. Sampai 1965, kedudukannya sebagai presiden tidak tergoyahkan. Sebagai bukti popularitasnya, baik G30S maupun Mayor Jenderal Soeharto beralih bahwa segala tindakan yang mereka lakukan merupakan langkah membela Soekarno. Tidak ada pihak mana pun yang berani memperlihatkan pembangkangannya terhadap Soekarno.

²³⁷ John Roosa, *Kata Pengantar: Dalih Pembunuhan Massal: G30S dan kudeta Suharto*.

Di dalam kata pendahuluan buku *Dalih Pembunuhan Massal* itu, Prof. John Roosa mengatakan: “Soeharto menggunakan G30S sebagai dalih untuk merongrong legitimasi Soekarno, sambil melambungkan dirinya ke kursi kepresidenan. Pengambil-alihan kekuasaan negara oleh Soeharto secara bertahap, yang dapat disebut sebagai kudeta merangkak, dilakukannya di bawah selubung usaha untuk mencegah kudeta. Kedua belah pihak tidak berani menunjukkan ketidaksetiaan terhadap presiden. Juga bagi Presiden Soekarno, aksi G30S itu sendiri disebutnya sebagai “riak kecil di tengah samudera besar revolusi (nasional Indonesia),” sebuah peristiwa kecil yang dapat diselesaikan dengan tenang tanpa menimbulkan guncangan besar terhadap struktur kekuasaan, bagi Soeharto peristiwa itu merupakan tsunami pengkhianatan dan kejahatan, yang menyingkapkan adanya kesalahan yang sangat besar pada pemerintahan Soekarno.

Soeharto menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) mendalangi G30S, dan selanjutnya menyusun rencana pembasmian terhadap orang-orang yang terkait dengan partai itu. Tentara Soeharto menangkapi satu setengah juta orang lebih, Semuanya dituduh terlibat dalam G30S. Dalam salah satu pertumpahan darah terburuk dalam abad kedua puluh, ratusan ribu orang dibantai Angkatan Darat dan milisi yang berafiliasi dengannya, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, dari akhir 1965 sampai pertengahan 1966.

Dalam suasana darurat nasional, tahap demi tahap Soeharto merebut kekuasaan Soekarno dan menempatkan dirinya sebagai presiden *de facto* (dengan wewenang memecat dan mengangkat para menteri) sampai Maret 1966.

Gerakan 30 September, sebagai titik berangkat kejadian berkait kelindan yang bermuara pembunuhan massal dan 32 tahun kediktatoran, merupakan salah satu di antara kejadian-kejadian penting dalam sejarah Indonesia, setara dengan pergantian kekuasaan negara yang terjadi sebelum dan sesudahnya: proklamasi kemerdekaan Soekarno—Hatta pada 17 Agustus 1945 dan lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998.

Bagi kalangan sejarawan, G30S tetap merupakan misteri. Versi resmi rezim Soeharto—bahwa G30S adalah percobaan kudeta PKI—tidak cukup meyakinkan. Sukar dipercaya bahwa partai politik yang beranggotakan orang sipil semata-mata dapat memimpin sebuah operasi militer. Bagaimana mungkin orang sipil dapat memerintah personil militer untuk melaksanakan keinginan mereka? Bagaimana mungkin sebuah partai yang terorganisasi dengan baik, dengan reputasi sebagai partai yang berdisiplin tinggi, merencanakan tindak amatiran semacam itu? Mengapa partai komunis yang dipimpin prinsip-prinsip revolusi Leninis mau berkomplot dalam *pûtsch* oleh sepasukan tentara? Mengapa partai politik yang sedang tumbuh kuat di pentas politik terbuka memilih aksi konspirasi? Agaknya tak ada alasan ke arah sana.

Di lain pihak, sukar dipercaya bahwa G30S seperti dinyatakannya dalam siaran radio yang pertama “semata-mata dalam tubuh Angkatan Darat” karena memang ada beberapa tokoh PKI yang jelas ikut memimpin G30S bersama beberapa orang perwira militer. Sejak hari-hari Oktober 1965, masalah siapa dalang di belakang

peristiwa ini telah menjadi perdebatan yang tak kunjung reda. Apakah perwira militer itu bertindak sendiri sebagaimana mereka nyatakan, dan kemudian mengundang atau bahkan menipu beberapa tokoh PKI agar membantu mereka? Ataukah, justru PKI yang menggunakan sementara perwira militer ini sebagai alat pelakana rencana mereka, sebagaimana yang dikatakan Soeharto? Atau, adakah semacam *modus vivendi* antara para perwira militer tersebut dan PKI?

Perdebatan juga timbul sekitar hubungan Soeharto dengan G30S. Bukti-bukti tidak langsung memberikan kesan bahwa para perencana G30S setidaknya mengharapkan dukungan Soeharto; mereka tidak mencantumkan Soeharto dalam daftar jenderal yang akan diculik, dan juga tidak menempatkan pasukan di sekeliling markasnya. Dua perwira di antara pimpinan G30S adalah sahabat-sahabat pribadi Soeharto. Salah seorang, yaitu Kolonel Abdul Latief, mengaku memberitahu Soeharto tentang G30S sebelumnya dan mendapat restu darinya secara diam-diam.

Benarkah Soeharto sudah diberitahu sebelumnya? Informasi apa yang diberikan G30S kepadanya, apa tanggapan Soeharto terhadap informasi itu? Apakah ia menjanjikan dukungan atau melangkah lebih jauh dan membantu merencanakan operasi G30S? Apakah ia dengan licik menelikung G30S agar dapat naik ke tampuk kekuasaan? Sampai sekarang dokumen utama yang ditinggalkan oleh G30S hanyalah empat pernyataan yang disiarkan RRI Pusat pada pagi dan siang hari 1 Oktober 1965. Pernyataan-pernyataan itu menampilkan wajah G30S di depan publik dan tentu saja tidak mengungkap pengorganisasian di balik layar dan tujuan yang mendasarinya.

Sesudah tertangkap, para pimpinan kunci G30S tidak mengungkap banyak hal. Kesaksian mereka di depan pengadilan yang dikenal sebagai mahkamah militer luar biasa (mahmilub) lebih mencerminkan keterdesakan sangat untuk menolak segala dakwaan, ketimbang menjelaskan secara rinci tentang bagaimana dan mengapa G30S dilancarkan. Para terdakwa, dapat dimengerti, memilih tutup mulut, berbohong, tidak sepenuhnya berkata benar, dan menghindar demi melindungi diri sendiri dan kawan-kawan mereka, atau melempar kesalahan kepada orang lain.

Baik penuntut umum maupun hakim tidak ambil using untuk mengorek kesaksian-kesaksian mereka yang saling bertentangan; pengadilan memang tidak dimaksudkan untuk menyelidiki kebenaran atas peristiwa tersebut. Semua hanyalah pengadilan sandiwara belaka. Tidak satu orang pun yang dibawa ke mahmilub dibebaskan dari tuntutan. Dari lima orang pimpinan utama G30S, kecuali satu orang, semuanya dinyatakan terbukti berkhianat, dijatuhi hukuman mati, dan dieksekusi oleh regu tembak, sehingga dengan demikian menutup setiap kemungkinan mereka muncul kembali dengan keterangan baru yang lebih rinci dan akurat tentang gerakan mereka.”²³⁸

²³⁸ Kata Pendahuluan buku John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal. Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto*, cuplikan A.Umar Said, <http://kontak.club.fr/index.htm>.

Gerakan 30 September dan Amerika Serikat

JOHN ROOSA dalam bukunya, mengangkat—dengan tajam dan jelas sekali—ketersangkutan kepentingan Amerika Serikat dengan jatuhnya Soekarno dan hancurnya PKI karena pengkhianatan Soeharto bersama tentara di bawahnya. Dari cuplikan ini kelihatanlah secara gamblang bahwa pembangkangan Soeharto terhadap Bung Karno dan dilumpuhkannya kekuatan kiri di Indonesia merupakan kejadian penting sekali di skala dunia pada waktu itu, yang menggembirakan para penguasa Amerika Serikat.

Kalau dilihat perkembangan dalam negeri (di Indonesia) dan luar negeri (internasional) selama beberapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang, maka nyatalah bahwa—pada garis besarnya—politik Bung Karno yang anti-imperialisme (terutama AS) adalah benar. Sikap politik Bung Karno waktu itu, yang didukung oleh golongan kiri di Indonesia maupun di berbagai negeri Asia, Afrika, dan Amerika Latin, ternyata sekarang dibenarkan oleh gerakan menentang neo-liberalisme dan politik AS di mana-mana.

Dari situasi politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan di Indonesia sejak pemerintahan orde baru di bawah Soeharto juga menunjukkan bahwa persekutuan Soeharto dengan Amerika Serikat dalam menggulingkan Presiden Soekarno dan menghancurkan PKI (dengan dukungan dari sebagian golongan reaksioner, termasuk terutama sekali sebagian dari golongan Islam) adalah kesalahan besar. Ternyata dengan jelas sekali sekarang bahwa musuh dari bangsa atau rakyat Indonesia sejak dulu sama sekali bukanlah Bung Karno dan PKI, melainkan imperialisme AS dengan neo-liberalismenya.

Cuplikan dari buku John Roosa tentang peran AS sekitar tahun-tahun 1965 memberikan bahan-bahan yang menarik bagi renungan kita bersama tentang kejahatan persekongkolan AS dengan tentara waktu itu.²³⁹

“Gerakan 30 September merupakan peristiwa signifikan dan bukan hanya bagi Indonesia. Dutabesar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia pada 1965, Marshal Green, berpendapat bahwa G30S merupakan salah satu saat paling berbahaya bagi AS semasa perang dingin. Ia menafsirkan gerakan itu sebagai “usaha kudeta komunis”, yang jika berhasil, dapat mengubah Indonesia menjadi negara komunis yang bersekutu dengan Uni Soviet dan/atau Tiongkok.

Dalam wawancara di televisi pada 1997 ia menyatakan, “Saya kira (G30S) ini merupakan peristiwa yang sangat penting di dunia, dan saya tak yakin pers dan masyarakat umum pernah menganggapnya demikian. Dan saya tidak beranggapan, bahwa saya berkata begitu semata-mata karena saya ada di sana waktu itu : Saya kira benar – bahwa inilah bangsa yang sekarang merupakan bangsa terbesar keempat di dunia ini.....akan menjadi komunis, dan memang nyaris demikian “.

Serangan Soeharto terhadap kaum komunis dan perebutan kekuasaan presiden yang dilancarkannya berakhir pada pembalikan sepenuhnya peruntungan AS di Indonesia. Hampir dalam semalam pemerintah Indonesia berubah dari kekuatan yang di tengah-tengah perang dingin dengan garang menyuarakan netralitas dan anti-imperialisme menjadi rekanan pendiam dan patuh kepada tatanan dunia AS. Sebelum G30S terjadi, kedutaan AS telah memulangkan hampir semua personil mereka dan menutup konsulat-konsulatnya di luar Jakarta, karena gelombang-gelombang demonstrasi militan yang dipimpin PKI.

Presiden Soekarno kelihatannya menutup mata dan merestui aksi-aksi itu dengan tidak memberikan perlindungan keamanan yang cukup bagi konsulat-konsulat AS. Sementara serangan terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah AS sudah begitu mengkhawatirkan, kaum buruh mengambil alih perkebunan-perkebunan dan sumber-sumber minyak milik perusahaan-perusahaan AS, dan pemerintah Indonesia mengancam akan menasionalisasi perusahaan-perusahaan tersebut. Sejumlah pejabat pemerintah AS sempat mempertimbangkan pemutusan hubungan diplomatik sama sekali.

Tampaknya Washington harus melupakan Indonesia dan menganggapnya sebagai bagian dari dunia komunis. Sebuah laporan intelijen tingkat tinggi yang disiapkan awal September 1965 mengatakan bahwa, “Indonesia di bawah Soekarno dalam hal-hal penting tertentu sudah bertindak seperti sebuah negara komunis, dan lebih secara terbuka memusuhi AS ketimbang kebanyakan negara-negara komunis.”

Laporan itu memperkirakan bahwa pemerintah Indonesia, dalam waktu dua atau tiga tahun akan sepenuhnya didominasi PKI. Lepasnya Indonesia dari pengaruh AS akan menjadi kehilangan besar, yang jauh lebih mahal dari pada lepasnya Indocina. Dalam politik luar negeri AS setelah Perang Dunia kedua, Indonesia dianggap sebagai domino terbesar di Asia Tenggara, bukan hanya karena bobot demografis sebagai negeri berpenduduk terbesar kelima di dunia dan keluasan geograis sebagai kepulauan yang terbentang 3000 mil lebih dari timur ke barat, tapi juga karena sumber daya alamnya yang melimpah ruah.

Indonesia adalah sumber minyak, timah, dan karet yang penting. Dengan investasi lebih banyak, Indonesia akan menjadi produsen bahan mentah yang lebih besar lagi, termasuk emas, perak, dan nikel. Seperti dikatakan sejarawan Gabriel Kolko, bahwa AS pada awal 1950-an “telah menyerahkan Indonesia di bawah pengaruh ekonomi Jepang”; minyak, mineral, logam, dan tanaman pangan dari Indonesia akan menghidupi industrialisasi Jepang. “Keprihatinan utama” AS adalah “keamanan Jepang, yang aksesnya ke negeri kepulauan dengan sumber alam kaya raya itu harus dijaga agar tetap aman berada di kubu AS. “

Penilaian Kolko disusun berdasarkan pernyataan kebijakan Dewan Keamanan Nasional tahun 1952 yang berjudul “United States Objectives and Courses of Action with Respect to Southeast Asia” (Tujuan dan Arah Tindakan Amerika Serikat untuk Asia Tenggara).

Para pembuat kebijakan dalam pemerintahan Truman melihat kawasan ini dari segi sumber daya alam: “Asia Tenggara khususnya Malaya dan Indonesia, merupakan sumber utama dunia bagi karet alam dan timah dan produsen minyak bumi, serta komoditi lain yang penting secara strategis;”. Jatuhnya kawasan ini ke tangan komunis (atau, sejatinya kekuatan lokal mana pun yang ingin membatasi ekspor sumber daya alam tersebut) akan menghambat industrialisasi Jepang, dan hal

²³⁹ Cuplikan dari buku John Roosa oleh A. Umar Said, <http://kontak.club.fr/index.htm>

ini akan “sangat mempersulit upaya menghalangi Jepang untuk pada akhirnya menyesuaikan diri dengan komunis;”

Pemerintah Eisenhower mengeluarkan pernyataan politik serupa tentang Asia Tenggara dua tahun kemudian, yang mengulangi bahasa memorandum terdahulu hampir kata demi kata. Washington menganggap kemungkinan jatuhnya pemerintah Indonesia di bawah kekuasaan komunis sebagai hari kiamat. Sikapnya mempertahankan garis melawan komunis di Indocina antara lain didorong keinginan melindungi Indonesia. Dalam logika teori domino, negeri-negeri Indocina yang relatif tidak begitu strategis harus diamankan dari komunisme agar negeri-negeri yang lebih penting di Asia Tenggara dapat dipagari dari pengaruhnya.

Dalam pidatonya pada 1965 Richard Nixon membenarkan pemboman atas Vietnam Utara untuk melindungi “potensi mineral yang luar biasa” di Indonesia. Dua tahun kemudian ia menyebut Indonesia sebagai “anugerah terbesar di wilayah Asia Tenggara,” dan merupakan “timbunan sumber daya alam terkaya di kawasan itu.”

Pasukan darat yang mulai memasuki Vietnam sejak Maret 1965 akan menjadi tidak berguna jika kaum komunis menang di negeri yang lebih besar dan lebih strategis. Penguasaan Indonesia oleh PKI akan membuat intervensi di Vietnam sia-sia belaka. Pasukan Amerika Serikat sibuk bertempur di pintu gerbang, sementara musuh sudah berada di dalam, akan segera menduduki istana, dan menjarah rayah gudang-gudang simpanan.

Dalam minggu-minggu sebelum G30S beraksi, para pembuat kebijakan di Washington saling mengingatkan diri, agar perang di Vietnam tidak sampai mengalihkan perhatian mereka dari situasi di Indonesia yang sama daruratnya. Pertemuan antara sekelompok kecil pejabat Departemen Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri George Ball di akhir Agustus 1965 menegaskan bahwa Indonesia paling tidak sama penting dengan seluruh Indocina. Kelompok ini juga menegaskan bahwa pengambilalihan kekuasaan oleh sayap kiri di Indonesia sudah dekat. Menurut salah seorang pejabat yang hadir, William Bundy, kelompok tersebut percaya bahwa pengambilalihan kekuasaan seperti itu akan menimbulkan “efek menjepit sangat kuat bagi kedudukan negeri-negeri non-komunis di Asia Tenggara.”

Dalam renungan reflektifnya, Robert McNamara, Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Kennedy dan Johnson, mengatakan bahwa AS seharusnya mengurangi keterlibatannya di Indocina setelah pembasmian kaum komunis di Indonesia oleh Soeharto. Begitu domino besar di Asia Tenggara sudah aman di tangan tentara Indonesia, para pembuat kebijakan AS harusnya menyadari bahwa Vietnam sebenarnya tidak sepenting seperti yang mereka pikirkan semula.

“Kekalahan permanen “PKI di Indonesia, menurut pengakuannya sekarang, “telah mengurangi pertaruhan riil AS di Vietnam secara substansial”. Walaupun dalam sebuah memorandum 1967 Mc Namara telah menyebut penghancuran PKI sebagai alasan untuk menghentikan langkah AS meningkatkan perang, ia tidak mendorong dilakukannya pêninjauan kembali kebijakan AS secara menyeluruh. Perang pada gilirannya memperoleh logikanya sendiri, yang terpisah dari teori domino.

Kendati memiliki pemahaman mengenai implikasi dari kejadian-kejadian di Indonesia, McNamara tetap terpaku dalam kerangka pikir yang menghendaki, pada satu pihak, kemenangan AS dalam perang Vietnam, atau pada pihak lain, suatu cara

pengunduran diri dari Vietnam tanpa kehilangan muka bagi pemerintah AS. Para pembuat kebijakan gagal memahami bahwa setelah 1965 “hanya sedikit domino-domino yang tertinggal, dan kecil kemungkinannya mereka akan ikut roboh;” Walaupun tersisa oleh urusan Indocina pada 1965, Washington sangat gembira ketika tentara Soeharto mengalahkan G30S dan merangsak menghantam kaum komunis.

Ketidakberfihakan Soekarno dalam perang dingin dan kekuatan PKI yang semakin besar telah dibikin tamat dengan sekali pukul. Tentara Soeharto melakukan apa yang tidak mampu dilakukan negara boneka AS di Vietnam Selatan meskipun telah dibantu dengan jutaan dollar dan ribuan pasukan AS, yaitu menghabisi gerakan komunis di negerinya. Dalam sepuluh hari setelah G30S meletus, wartawan New York Times Max Frankel sudah mencatat bahwa suasana Washington menjadi cerah. Artikel Max Frankel berjudul “U.S. is Heartened by Red Setback in Indonesia Coup” (AS Gembira karena Kekalahan Kaum Merah dalam Kudeta di Indonesia).

Ia mengamati bahwa sekarang ada “harapan, padahal baru dua pekan lalu hanya ada keputusasaan mengenai negeri berpenduduk terbesar kelima di bumi itu, yang dengan 103 juta penduduknya di 4 000 pulau memiliki sumber daya melimpah tapi belum dimanfaatkan dan menduduki salah satu posisi strategis di Asia Tenggara.”

Ketika berita-berita pembantaian mulai berdatangan sepanjang berbulan-bulan berikutnya, harapan Washington justru membesar. Pada Juni 1966, seorang penulis editorial utama New York Times, James Reston, menyebut “transformasi biadab” di Indonesia sebagai “secercah cahaya di Asia”. Laporan utama majalah Times menyebut naiknya Soeharto sebagai “kabar terbaik bagi dunia Barat selama bertahun-tahun di Asia.”

Wakil Menteri Muda Luar Negeri Alexis Johnson percaya bahwa “pembalikan gelombang pasang komunis di Indonesia yang besar itu” merupakan “peristiwa yang bersama perang Vietnam mungkin merupakan titik balik sejarah terpenting di Asia dalam dasa warsa ini.” Seperti dinyatakan Noam Chomsky dan Edward Herman, pembantaian di Indonesia merupakan “pembantaian bermaksud baik” dan “terror yang konstruktif” karena melayani kepentingan politik luar negeri AS.

Sementara Washington mengemukakan setiap pelanggaran hak asasi manusia di blok Soviet sebagai bukti kejahatan musuhnya dalam perang dingin, ia mengabaikan, memberi pembenaran, atau bahkan bersekongkol dalam kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang bersekutu dengan AS.”

Soeharto, Seorang Militer Karier yang Memerintah Sebuah Negara²⁴⁰

“TIDAK suka bicara, tidak terbuka, suka menyendiri, tanpa emosi, Soeharto memerintah Indonesia selama 32 tahun sebagai seorang misterius, seorang diktator yang tampil sebagai tokoh tanpa wajah, yang tidak menonjol di dalam suatu pemerintahan yang apolitis. Pidato-pidatonya menjemukan, mudah terlupakan, penuh dengan kata-kata birokrat yang menjemukan, klise-klise yang usang, dan nasihat-nasihat yang saleh. Tidak ada satu pun pernyataannya yang bisa membuat orang terkenang padanya sekarang. Orang Indonesia, jika ditanya, akan sia-sia berusaha mengingat suatu kutipan pun yang berasal dari dia, sedangkan di lain

²⁴⁰ John Rossa, *Soeharto, Seorang Militer Karier yang Memerintah Sebuah Negara*, yang dicuplik oleh A. Umar Said, <http://kontak.club.fr/index.htm>

pihak, bahkan anak muda bisa mengutip kata-kata Soekarno, presiden yang digulingkannya pada tahun 1965. Soeharto meninggalkan kenangan tanpa kata.

Jarang diwawancarai, tapi sering dipotret, ia dikenang dari sebuah gerak tubuh: senyum. Begitulah ia ingin dikenal: biografi yang disuruhnya dibuat pada tahun 1969 berjudul: “*Jenderal yang Tersenyum*”. Itu adalah senyum “kucing Cheshire”²⁴¹, terpaku di tempatnya, menyembunyikan sesuatu, tidak mengungkapkan isi hatinya, dan menimbulkan tanda tanya tentang intrik-intrik dan kekerasan apa lagi yang tengah disulap di dalam otak yang ada di baliknya.

Orang tua Soeharto merupakan misteri. Dalam “otobiografi”-nya, yang ditulis oleh orang yang paling bertanggung jawab atas pembentukan citra publiknya, G. Dwipayana, Soeharto mengklaim bahwa ia dilahirkan di kalangan petani miskin di Desa Kemusuk di dekat Yogyakarta. Sebuah majalah yang dimiliki oleh bos intelijen militer yang dipercayanya mengklaim pada tahun 1974, bahwa ayahnya seorang ningrat. Dalam sebuah jawaban yang mungkin disiapkan lebih dulu, Soeharto mengundang wartawan ke ruang kerjanya di istana kepresidenan untuk menjelaskan garis keturunannya dan mengajukan saksi-saksi yang dapat menguatkan bahwa ia sungguh-sungguh orang yang baik, jujur, dan dapat dipercaya. Sekalipun ia menyanggah, garis keturunannya tetap diragukan. Di kalangan orang Indonesia tersebar luas cerita bahwa ia anak tidak sah dari seorang pedagang Tionghoa.

Karier yang menyenangkan

APA PUN asal-mulanya dan pengalaman masa kanak-kanaknya, di masa dewasa ia jelas adalah seorang militer karier. Ia masuk militer Belanda pada tahun 1940, yang merupakan peristiwa yang dalam “otobiografi”-nya dikatakannya sebagai “kunci yang membuka pintu kepada sebuah kehidupan yang menyenangkan.” Kehidupan menyenangkan yang terdiri dari baris-berbaris dan latihan itu berlanjut pada masa pendudukan Jepang, ketika ia menjadi anggota milisi Peta. Seperti anggota milisi lain, ia bergabung dengan tentara nasional Indonesia yang baru dibentuk begitu militer Jepang menyerah pada Agustus 1945. Tidak dimungkinkan lagi untuk kembali mengabdikan pada Belanda, karena Belanda telah dilucuti kekuasaan dan kekayaannya oleh Jepang dan menjalani tahun-tahun perang di dalam kamp-kamp konsentrasi yang kotor dan tidak nyaman.

Berkat latihan militer yang pernah diikutinya, Soeharto diberi pangkat tinggi (letnan kolonel) dalam tentara Indonesia yang baru itu, yang dibentuk untuk melakukan perang gerilya melawan tentara Belanda yang datang kembali. Pada tahun 1948 ia telah menjadi komandan sebuah brigade pasukan yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Yogyakarta, ibu kota republik. Serangan-serangan gerilya tentara itu tidak banyak bermanfaat dalam menghambat kemajuan pasukan Belanda. Sekalipun lebih menguasai medan di kandang sendiri, Soeharto dikejutkan pada 19 Desember 1948 ketika pasukan Belanda menyerbu Yogyakarta dan menguasainya pada hari yang sama tanpa menghadapi perlawanan sedikit pun. Entah bagaimana, keempat batalyon Soeharto sedang berada di luar kota. Itu merupakan kemunduran

²⁴¹ “Cheshire cat”, kucing yang diceritakan dalam kisah khayalan terkenal, “*Alice’s Adventures in Wonderland*”, karya Lewis Carroll. Kucing itu bisa muncul dan lenyap sesuka hati; akhirnya ia berangsur-angsur lenyap dan hanya tinggal senyumnya saja, sampai Alice berkata, “Saya sering melihat kucing tanpa senyum, tapi belum pernah melihat senyum tanpa kucing.”

terburuk bagi republik: kedua orang pimpinan tertingginya, Soekarno dan Hatta, tertawan.

“Politik saya terletak di ujung bayonet.”

SOEHARTO mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri ketika ia memimpin sebuah serangan terhadap kota Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Serangan itu hanya menimbulkan kerusakan kecil di kalangan pasukan Belanda yang menduduki kota itu dan dipukul mundur dalam waktu enam jam. Namun, Soeharto dan para komandan militer lain mengklaim bahwa mereka telah menguasai kota untuk sementara waktu dan membuktikan kehebatan angkatan bersenjata republik kepada dunia. Setelah Soeharto berkuasa pada tahun 1965, peristiwa itu disulap menjadi kemenangan yang menentukan dalam perang kemerdekaan, dan dibuatlah film tentang peristiwa itu, “*Janur Kuning*” (1979), dan di kota Yogya didirikan sebuah monumen besar untuk mengenangnya (1985).

Sebagai orang yang pernah bekerja dalam tiga tentara yang berbeda dalam kurun waktu satu dasawarsa, Soeharto mempunyai komitmen politik yang enteng. Salah satu kolega militernya belakangan berkata pada seorang wartawan, bahwa pada tahun 1948 Soeharto pernah berkata, “Politik saya terletak di ujung bayonet.” Tidak heran bahwa Soekarno dan menteri pertahanannya yang berhaluan kiri memasukkan komisaris politik di dalam tentara. Seperti banyak tentara yang dilatih di bawah perwira Belanda dan Jepang, Soeharto tidak punya pengalaman di dalam gerakan nasionalis populer yang telah berjuang melawan imperialisme.

Menapak Jenjang Kepangkatan

SETELAH kemerdekaan tercapai dalam tahun 1949, Soeharto menanjak pangkatnya: kolonel, brigadir jenderal, mayor jenderal. Ia pernah mengalami kemunduran pada tahun 1959, ketika ia diberhentikan sebagai komandan tentara di Jawa Tengah karena korupsi. Tetapi peristiwa itu ditutupi dan ia direhabilitasi dengan cepat. Ia ditugasi memimpin operasi merebut Irian Barat dari Belanda pada tahun 1962—operasi itu dihentikan pada saat terakhir dengan tercapainya kesepakatan diplomatik. Ia lalu dipindahkan ke Jakarta dan diberi jabatan sebagai komandan cadangan Angkatan Darat, Kostrad, pada tahun 1963. Dengan catatan karier yang tidak menonjol, pendidikan yang rendah, dan tidak menguasai bahasa asing, pada tahun 1965 ia menjadi calon utama untuk menduduki jabatan tertinggi di Angkatan Darat, dan bertindak menggantikan Panglima Angkatan Darat, Yani, bila ia pergi keluar negeri.

Soeharto naik ke puncak militer yang kemudian menjadi semacam negara di dalam negara, memiliki komandan teritorial, yang pada mulanya didesain untuk pertahanan terhadap invasi asing, tetapi kemudian memerintah masyarakat sipil. Kebanyakan dari jenderal-jenderal lain, termasuk yang paling senior, A. H. Nasution, sangat anti-komunis dan bertekad menahan kekuatan PKI yang tengah meningkat pada awal 1960-an. Untuk menandingi partai itu, mereka pun membentuk serikat buruh, perhimpunan seniman, dan surat kabar. Mereka berhubungan dengan organisasi-organisasi keagamaan dan partai-partai politik, dan meyakinkan mereka bahwa bila perlu militer akan menggunakan kekerasan terhadap PKI.

Soeharto tidak secara jelas memihak pada salah satu pihak. Seorang mantan anggota PKI di parlemen mengatakan kepada saya, bahwa D. N. Aidit, ketua PKI, pada awal 1965 mengira bahwa Soeharto seorang perwira yang “demokratis” oleh karena ia mendukung pengakhiran SOB (keadaan perang) pada tahun 1963. Tetapi

Soeharto juga berhubungan dengan golongan anti-komunis dalam usaha tertutupnya untuk menggerem kampanye anti-Malaysia Soekarno yang dimulai pada tahun 1963.

Hari yang Beruntung Baginya

DUDUK di pinggiran ternyata membawa Soeharto pada puncak kekuasaan. Ketika para perwira militer yang pro-PKI dan pro-Soekarno memutuskan bertindak terhadap para perwira saingan mereka, mereka beranggapan Soeharto akan mendukung mereka. Sekelompok perwira junior mengorganisir penculikan tujuh jenderal Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965. Dua di antara komplotan itu adalah sahabat dekat Soeharto, dan seorang di antaranya menceritakan kepada Soeharto rencana komplotan itu sebelum terjadi. Para penculik, yang menamakan diri Gerakan 30 September, akhirnya membunuh enam jenderal, termasuk di antaranya Panglima Angkatan Darat, Yani. Itu adalah hari yang menguntungkan bagi Soeharto. Dengan absennya Yani, ia menjadi Panglima Angkatan Darat. Gerakan 30 September tidak diotaki oleh Soeharto tetapi peristiwa itu justru memberi kesempatan baginya untuk mencapai cita-citanya.

Sebagai komandan militer, Soeharto mulai menentang perintah-perintah presiden dan menerapkan agenda yang sejak lama dimiliki oleh para perwira anti-komunis, yakni mengurangi pengaruh Soekarno sehingga menjadi presiden tanpa kekuasaan, menghancurkan PKI, dan menegakkan kediktatoran militer. Sikap anti-komunis Soeharto bukan berasal dari komitmen ideologis yang mendalam. Seandainya Gerakan 30 September berhasil dan kaum komunis meraih kekuasaan lebih besar, kita bisa dengan mudah membayangkan bagaimana Soeharto yang selalu oportunistik itu menyesuaikan diri dengan rezim yang baru. Ia adalah perwira yang biasa dan sama sekali tidak menonjol, sehingga pada minggu-minggu pertama Oktober itu banyak pengamat mengira bahwa ia sekadar mengikuti pimpinan Nasution.

Kudeta Merangkak

MENYINGKIRKAN Presiden Soekarno ternyata tidak terlalu sulit. Tokoh besar nasionalisme Indonesia, “penyambung lidah rakyat”, terus-menerus memprotes, tetapi tidak berbuat sesuatu untuk menyetop meriam Soeharto. Ia menguatkan Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat, menaikkan pangkatnya, dan memberinya kekuasaan darurat. Puncak dari kudeta merangkak terjadi pada Maret 1966, ketika Soeharto menggunakan perintah yang kata-katanya samar tentang “menjamin keamanan” dari Soekarno sebagai justifikasi untuk menangkap 15 menteri dan membubarkan kabinet Soekarno—seolah-olah presiden memerintahkan penggulingan dirinya sendiri.

Penghancuran PKI—prakondisi untuk menerapkan suatu kebijakan politik baru yang didominasi militer—ternyata juga tidak terlalu sulit. Pimpinan PKI, yang kalang kabut setelah 1 Oktober, menyerukan kepada para anggotanya untuk tidak melawan supaya Presiden Soekarno dapat mengatur suatu pemecahan politis terhadap krisis itu. Tetapi presiden tidak berkuasa atas tentara Soeharto. Bekerja sama dengan milisi sipil, tentara mengorganisir sebuah pertumpahan darah yang paling buruk dari abad ke-20, menangkap lebih dari sejuta orang, lalu dengan diam-diam membunuh banyak di antara mereka. Tahanan-tahanan lenyap di waktu malam. Kuburan-kuburan massal terisi mayat-mayat yang tak terhitung banyaknya tersebar tanpa tanda di seluruh Sumatra, Jawa, dan Bali.

Tidak ada dokumen yang membuktikan bahwa Soeharto memerintahkan satu pembunuhan pun. Dalam beberapa kesempatan yang jarang, ketika ia berbicara tentang pembunuhan-pembunuhan itu pada tahun-tahun belakangan, ia menyalahkan orang-orang sipil yang mengamuk. Penyelidikan yang saksama terhadap siapa, di mana, kapan, dan bagaimana berkaitan dengan pembunuhan-pembunuhan itu mengungkapkan bahwa militerlah yang paling bertanggung jawab dan bahwa Soeharto setidak-tidaknya menyetujuinya, kalau bukan ia yang memberikan perintah lisan atau tertulis yang eksplisit untuk melakukannya.

Wortel & Cemeti

DALAM merebut kekuasaan, Soeharto dan perwira-perwira militer kliknya menyadari bahwa stabilitas jangka panjang dari kekuasaan mereka akan bergantung pada kemampuan mereka untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Mereka berpaling pada bantuan, penanaman modal dan pasar luar negeri untuk memberikan rangsangan utama bagi pertumbuhan ekonomi. Modal Barat yang memboikot Indonesia karena kebijakan politik Soekarno dulu mendapati permadani selamat datang terhampar menyambut mereka. Soeharto sendiri campur tangan pada akhir 1965 untuk menghentikan usaha menteri perindustrian Soekarno untuk menasionalisir sektor minyak. Dengan kampanye teror militer terhadap serikat buruh di ladang-ladang minyak, kebun-kebun karet, dan pabrik-pabrik, modal Barat memperoleh tenaga kerja yang patuh.

Salah satu alasan bagi kemampuan Soeharto yang mencolok untuk mempertahankan kekuasaan begitu lama adalah kebijakannya memperluas kesempatan kerja di sektor publik. Pada akhir kekuasaannya, 4,6 juta orang mendapat gaji dari pemerintah, tiga kali lebih banyak daripada pada awal tahun 1970an. Jutaan orang lagi merupakan tanggungan para pegawai makan gaji ini. Jaminan gaji bulanan itu menarik, sekalipun pendapatannya rendah. Di samping itu, sejumlah jabatan di pemerintahan memungkinkan orang untuk mendapat lebih banyak uang dengan korupsi. Para pegawai negeri ini beserta sanak keluarganya merupakan basis pendukung kunci bagi rezim ini, dengan memberikan suara dan berkampanye bagi partai pemerintah, Golkar, pada setiap pemilihan umum. Mereka yang tidak memilih Golkar dipersalahkan karena menggigit tangan yang memberi mereka makan, dan kehilangan kesempatan untuk naik pangkat.

Tanggapan Soeharto terhadap pembangkangan—menggunakan bahasa sekarang—adalah ‘gertak & bikin takut’. Di Papua, ia menempatkan tentara pendudukan yang memperlakukan penduduk asli sebagai lebih rendah dari manusia, yang harus ditundukkan dengan kekerasan. Selama bertahun-tahun, satu-satunya wajah Indonesia yang dilihat oleh orang Papua adalah tentara. Soeharto bertanggung jawab bagi puluhan ribu orang Papua yang tewas dalam perang melawan pemberontakan dari akhir 1960-an sampai 1998. Ia juga bertanggung jawab atas perang agresi terhadap Timor Timur pada tahun 1975, dan atas terbunuhnya lebih dari 100 ribu orang di sana akibat perang di separo pulau itu. Ia juga bertanggung jawab atas terbunuhnya ribuan orang di Aceh yang juga merupakan korban perang melawan pemberontakan (1990—98), yang didesain untuk meneror penduduk sipil agar tidak mendukung gerilya, dan bukan menawarkan alternatif yang lebih positif kepada warga sipil.

Soeharto dengan keras kepala berpegang pada strateginya bahkan setelah terbukti kontra-produktif, ketika teror yang dilancarkan di Papua, Timor Timur, dan Aceh

menghasilkan lebih banyak perlawanan yang meluas. Hanya setelah Soeharto jatuh, para politisi Indonesia mendapat kesempatan untuk mengupayakan pemecahan politis & diplomatis yang lebih manusiawi terhadap perang-perang ini: Presiden Habibie mengizinkan suatu referendum yang dilaksanakan oleh PBB di Timor Timur pada tahun 1999, dan Presiden Yudhoyono menandatangani perjanjian perdamaian dengan kaum nasionalis Aceh pada tahun 2005.

‘Program Ponzi’ Raksasa Itu Pun Ambruk

DALAM menilai pemerintahan Soeharto, apa yang disebut pendekatan “seimbang” dari banyak sarjana Barat adalah mengkritisi Soeharto tentang pelanggaran-pelanggaran HAM-nya, tetapi memuji kinerja ekonomisnya. Mereka yang terkesan oleh pertumbuhan enam persen setahun tidak berbeda dengan para investor yang mudah dikibuli dalam suatu ‘Program Ponzi’²⁴² raksasa, yang yakin bahwa penghasilan tinggi yang terlihat di permukaan merupakan bukti tak terbantahkan dari sebuah sukses. Pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun Soeharto sebagian besar dihasilkan dengan menjual secara liar sumberdaya-sumberdaya alam negeri itu. Itu adalah pertumbuhan yang memakan dirinya sendiri, dan yang tak mungkin akan lestari. Sektor-sektor utama adalah minyak dan kayu. Keduanya mengalami salah urus yang hebat karena korupsi. Pada hari ini Indonesia secara bersih adalah negara pengimpor minyak dan hutan-hutannya menghilang dengan cepat, dibabat oleh para logger atau dibakar oleh pemilik perkebunan kelapa sawit. Pendapatan dari semua ekspor itu tidak diinvestasikan kembali ke dalam sektor-sektor lain; uang itu lenyap masuk rekening bank dari keluarga Soeharto & para kroninya (seperti Bob Hasan), dan para pejabat pemerintah.

Setelah tiga dasawarsa pertumbuhan ekonomi ala Soeharto, pemerintah Indonesia dibebani hutang banyak, dan perekonomian Indonesia tidak memiliki basis industri yang didanai dari dalam negeri. Sungguh pas kalau Soeharto, yang pengikut-pengikutnya memujinya sebagai “Bapak Pembangunan”, meninggal dunia di rumah sakit yang dimiliki oleh perusahaan minyak negara (Pertamina) yang oleh keluarganya dan kroninya (seperti Ibnu Sutowo) diperas habis-habisan.

Rezim Soeharto hidup dari modal asing dan mati karena modal asing. Liberalisasi sektor keuangan yang didesakkan oleh AS kepada Indonesia supaya dianut pada awal 1990-an berakibat kerentanan yang lebih besar terhadap perubahan mendadak dalam aliran modal internasional. Uang mengalir masuk ke dalam gerombolan kleptokrat Soeharto dan bank-banknya yang palsu, lalu tiba-tiba mengalir keluar lagi. ‘Program Ponzi’ raksasa itu pun runtuh dengan terjadinya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Satu-satunya legitimasi yang dimiliki oleh Soeharto adalah apa yang seolah-olah tampak merupakan kemampuannya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomis. Begitu itu berakhir, maka kelas menengah yang biasanya menurut saja membalik terhadapnya, tidak mau menolerir korupsinya, anak-anaknya yang serakah dan kroni-kroninya yang sangat immoral mencolok kekayaannya. Gerakan yang secara spontan terbentuk bagi “reformasi” ini menyatakan musuh utama mereka adalah KKN: Korupsi, Kolusi & Nepotisme. Kampanye keluarga Soeharto sendiri, “Saya Cinta Rupiah”, yang datang dari mereka yang justru punya dolar paling banyak, tidak mempunyai bobot yang sama dengan slogan gerakan itu.

²⁴² ‘Program Ponzi’: suatu operasi investasi palsu & kriminal, yang di situ para penanam modal awal mendapat hasil (“laba”) yang sangat besar yang dibayar dari investasi oleh para penanam modal yang datang belakangan, dan bukan dari hasil bersih yang berasal dari kegiatan bisnis yang benar.

Segudang paranormal yang dimiliki keluarga itu tidak bisa menyelamatkan mereka; tidak pula jenderal-jenderal penjiilat mereka, bahkan tidak Letnan Jenderal Prabowo, menantu Soeharto yang menguasai pasukan elite di Jakarta, dan yang selalu bergelimang uang dari saudaranya yang memiliki satu-satunya pabrik baja di negeri itu. Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, ketika Jakarta masih mengepul asap bekas kerusakan misterius, yang di situ toko-toko yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa dibakar.

Mr. Minus

MUNGKIN yang terbaik dapat dikatakan tentang 32 tahun pemerintahan Soeharto ialah bahwa salah-salah keadaannya bisa lebih buruk dari sekarang. Ia tidak memilih strategi jenderal-jenderal Burma dan mengisolasi negeri ini. Bergantung pada modal asing, ia rentan terhadap tekanan internasional. Pelepasan puluhan ribu tahanan politik pada akhir 1970-an sebagian besar disebabkan oleh tekanan dari luar negeri. Ia tidak memilih untuk mencari legitimasi dirinya melalui agama dan menerapkan hukum Islam. Negara Indonesia sebagian besar tetap sekuler. Ia tidak memupuk kultus pribadi di seputar dirinya. Ketika menghadapi protes massal pada tahun 1998, ia tidak memilih mempertahankan kekuasaan dengan segala cara.

Almarhum sastrawan besar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, yang menjadi tahanan politik Soeharto selama 14 tahun, pernah menulis bahwa ia tidak bisa memaksa dirinya menulis tentang rezim Soeharto. Sementara ia menulis banyak novel historis tentang Jawa di zaman pra-kolonial dan gerakan nasionalis Indonesia, ia berpendapat tidak ada apa-apa yang menarik untuk ditulis tentang orang yang bertanggung jawab memenjarakannya dan melarang buku-bukunya itu. Baginya, Soeharto adalah suatu negativitas, apa yang dinamakannya suatu “minus X”, suatu kemunduran kembali ke zaman para aristokrat kolonial, yang menindas bawahan mereka bagi kepentingan bisnis Eropa, namun membusungkan dada memamerkan kekuatan kosmik mereka yang hebat, dan tetap berpandangan sempit dan tidak peduli terhadap sains dan seni dari Eropa yang telah menaklukkan mereka. Tidak diragukan bahwa beberapa orang akan mengingat Soeharto bagi beberapa hal yang positif, tetapi sementara Indonesia berjuang mengatasi warisannya yang buruk, kita bertanya-tanya, apakah orang bisa menilai gelarnya sebagai “Bapak Pembangunan” itu sebagai sesuatu yang sah selain sebagai sebuah guayonan yang kejam.

Versi Mutakhir G30S

DR. Asvi Warman Adam, sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menulis: “Begitu meletus Peristiwa Gerakan 30 September 1965, para perwira di sekeliling Soeharto—Yoga Sugama, misalnya—langsung punya firasat: Partai Komunis Indonesia berada di balik itu. Dalam hitungan hari, 5 Oktober 1965, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigadir Jenderal Ibnu Subroto pun mengeluarkan pernyataan: “Peristiwa ini jelas didalangi oleh PKI yang merencanakan kup ini.”

Versi ini menimbulkan tanda tanya. Jika PKI berontak, kenapa tiga juta anggotanya tidak melawan? Kenapa partai komunis terbesar ketiga di dunia itu rontok dengan mudahnya?

Selama ini alasan yang digunakan pemerintah selalu mengacu pada proses Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) yang memutuskan PKI terlibat pemberontakan. Padahal putusan pengadilan hanya menyebutkan individu-individu yang dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, dengan alasan terbukti melakukan makar.

Pendekatan di atas itu ditentang oleh Benedict Anderson dan Ruth McVey, yang pada Januari 1966 mengatakan ini persoalan intern Angkatan Darat. Pandangan itu kemudian diterbitkan dan dikenal sebagai "*Cornell Paper*" (1971). Mereka memandang G30S sebagai pemberontakan perwira asal Kodam Diponegoro yang kesal melihat perilaku para jenderal SUAD yang hidup berfoya-foya di Jakarta. Perwira asal Jawa Tengah itu mengajak personil Angkatan Udara Republik Indonesia dan PKI dalam operasi mereka.

Analisis kedua ini lemah karena Untung dan Latief memang dari Kodam Diponegoro, tapi tidak demikian halnya dengan Brigadir Jenderal Supardjo (Siliwangi) dan Mayor Udara Sujono. Demikian pula, mengatakan ini semata-mata persoalan "intern Angkatan Darat" tidak tepat karena unsur PKI, seperti Syam dan Pono, juga terlibat.

Kedua versi tersebut ditengahi Harold Crouch (*The Army and Politics*, 1978) yang menolak *Cornell Paper* yang membebaskan PKI sepenuhnya dari kesalahan. Namun ia berpendirian bahwa "inisiatif awal timbul dari tubuh Angkatan Darat". PKI terlibat tapi sebagai "pemain kedua". Versi Crouch itu cukup beralasan, walaupun ia tak berhasil menjelaskan mengapa G30S dirancang dengan buruk, mengapa pengumuman mereka yang kedua disiarkan berselang lima jam dari yang pertama. Padahal, dalam suatu kudeta, kecepatan, dan ketepatan waktu sangat krusial.

Sebelum Harold Crouch, seorang penulis Belanda, Antonie Dake, menerbitkan untuk konsumsi internasional edisi dua bahasa yang berisi pengakuan ajudan Bung Karno, Bambang Widjanarko, *The Devious Dalang* (1974). Buku itu merupakan hasil pemeriksaan Bambang Widjanarko (3 Oktober—4 November 1970) yang membenarkan bahwa Soekarno pada 4 Agustus 1965 memanggil Letnan Kolonel Untung dan memerintahkannya mengambil tindakan terhadap jenderal-jenderal yang tidak loyal.

Soekarno wafat 22 Juni 1970 dan tidak mungkin lagi diadili. Tapi, untuk apa dilakukan pemeriksaan tentang keterlibatannya dalam G30S? Ditengarai wacana itu merupakan upaya preventif mencegah kebangkitan pendukung Soekarno dalam pemilihan umum Juli 1971. Versi Soekarno ini diragukan, karena Widjanarko sendiri mengakui kemudian ia dipaksa bersaksi. Apa yang terjadi pada 1 Oktober 1965 pagi hari membuktikan bahwa Presiden Soekarno tidaklah tahu sepenuhnya rencana G30S. Mengapa ia berputar-putar keliling Jakarta sebelum menuju Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, 1 Oktober 1965? Mengapa tidak langsung dari Wisma Yaso menuju Halim?

Keterlibatan Soeharto diungkapkan oleh W.F. Wertheim dalam artikelnya yang terbit musim dingin 1970: "*Soeharto and the Untung Coup—The Missing Link*". Hubungan Soeharto dengan Untung dan lebih-lebih lagi dengan Latief yang bertemu dengan Soeharto pada malam nahas itu juga dipertanyakan. Soalnya, Soeharto tidaklah "sejenius" itu, bukan tipe orang yang merancang perebutan kekuasaan secara sistematis. Tapi, karena sudah tahu sebelumnya, ia menjadi orang yang paling siap.

Amerika Serikat tidak ikut campur pada 30 September dan 1 Oktober 1965 walaupun berbagai dokumen menyebutkan keterlibatan mereka sebelum dan sesudah peristiwa. Bagi Amerika, jatuhnya Indonesia ke tangan komunis artinya kiamat. Keterlibatan Amerika ini sudah disinyalir Bung Karno dalam pidato *Nawaksara* pada 1967, yang menyebut adanya "subversi nekolim".

Setelah Soeharto jatuh pada 1998, bermunculan buku-buku yang semasa orde baru tidak boleh terbit di samping pencetakan ulang versi resmi. Meskipun berbentuk penerbitan terjemahan atau tulisan baru, semua buku itu masih dapat dikategorikan atas lima pendekatan dalam melihat dalang G30S (PKI, Angkatan Darat, Soekarno, Soeharto, dan CIA). Masing-masing menentukan dalang tunggal dari peristiwa yang sesungguhnya sangat kompleks. Padahal Soekarno pada 1967 sudah lebih maju dalam melihat peristiwa itu, yakni sebagai pertemuan tiga sebab: 1) keblingernya pemimpin PKI, 2) subversi Nekolim, 3) adanya oknum yang tidak bertanggung jawab.

Versi keenam, versi mutakhir G30S dikemukakan dalam buku John Roosa (*Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, 2008). Di sini peran Syam sangat menentukan. Kelemahan utama G30S adalah tidak adanya satu komando. Terdapat dua kelompok pemimpin, yakni kalangan militer (Untung, Latief, dan Sujono) serta pihak Biro Khusus PKI (Syam, Pono, dengan Aidit di latar belakang). Syam memegang peran sentral karena ia menjadi penghubung di antara kedua pihak ini. Namun, ketika upaya ini tidak mendapat dukungan dari Presiden Soekarno, bahkan diminta untuk dihentikan, kebingungan terjadi, kedua kelompok ini terpecah. Kalangan militer ingin mematuhi, sedangkan Biro Khusus tetap melanjutkan. Ini dapat menjelaskan mengapa antara pengumuman pertama, kedua, dan ketiga terdapat selang waktu sampai lima jam. Pada pagi hari mereka mengumumkan bahwa presiden dalam keadaan selamat. Adapun pengumuman berikutnya, siang hari, sudah berubah drastis: pembentukan Dewan Revolusi dan pembubaran kabinet.

Dokumen Supardjo mengungkap mengapa gerakan itu gagal dan tidak bisa diselamatkan. Kerancuan antara "penyelamatan Presiden Soekarno" dan "percobaan kudeta" dengan membubarkan kabinet dijelaskan dengan gamblang. Jauh sebelum peristiwa berdarah itu, Amerika telah mendiskusikan segala tindakan yang perlu untuk mendorong PKI melakukan gebrakan lebih dulu sehingga dapat dipukul secara telak oleh Angkatan Darat. Dan Aidit pun terjebak. Karena sudah mengetahui sebelum peristiwa itu terjadi, Soeharto adalah jenderal yang paling siap

pada 1 Oktober 1965 ketika orang lain bingung. Nama Soeharto sendiri tidak termasuk daftar perwira tinggi yang akan diculik.

Penulis Prancis, Paul Veyne, mengatakan bahwa sejarah itu tak lain dari intrik. Pada versi ini, kerumitan misteri itu disederhanakan dengan metode ala detektif. Pembaca diyakinkan bahwa tokoh kunci G30S, Syam Kamaruzaman, bukanlah agen ganda, apalagi *triple agent*, melainkan pembantu setia Aidit bertahun-tahun. Pelaksana Biro Khusus PKI yang ditangkap pada 1968 ini baru dieksekusi pada 1986. Ia bagaikan putri Syahrezad yang menunda pembunuhan dirinya dengan menceritakan kepada raja sebuah kisah setiap malam, sehingga mampu bertahan 1001 malam. Syam bertahan lebih dari 18 tahun dengan mengarang 1001 pengakuan. Ia diberi kesempatan untuk mengungkapkan siapa saja yang pernah direkrutnya.

Syam divonis mati dalam Mahmilub pada 1968. Ia diambil dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang 27 September 1986, dibawa ke RTM Cimanggis, Bogor. Pada 30 September dini hari, bersama Pono dan Bono dibawa ke lokasi eksekusi di salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Dari RTM Cimanggis dibawa dengan konvoi kendaraan militer ke dermaga Tanjung Priok. Dengan kapal militer berlayar selama 15 menit sampai di pulau. Mereka ditembak tepat pukul 3 pagi oleh regu tembak yang terdiri atas 12 orang. Rute kehidupan Syam dari Tuban (30 April 1924)—Jombang—Surabaya—Yogyakarta—Jakarta—RRC (berobat)—Vietnam Utara—Penjara Cipinang—RTM Cimanggis—Tanjung Priok—Kepulauan Seribu (30 September 1986) berakhir tepat pada peringatan 21 tahun tragedi berdarah itu.

Dalam versi keenam ini terungkap bahwa G30S lebih tepat dianggap sebagai aksi (untuk menculik tujuh jenderal dan menghadapkan kepada presiden), bukan sebagai gerakan. Sebab, peristiwa ini merupakan aksi sekelompok orang di Jakarta dan Jawa Tengah yang dapat diberantas dalam waktu satu-dua hari. Namun aksi ini (yang kemudian ternyata menyebabkan tewasnya enam jenderal) oleh Soeharto dan kawan-kawan lalu dijadikan dalih untuk memberantas PKI sampai ke akar-akarnya. Sesuatu yang di lapangan menyebabkan terjadinya pembunuhan massal dengan korban lebih dari setengah juta jiwa.

Kalau para jenderal yang diculik itu tertangkap hidup-hidup, mungkin sejarah Indonesia akan lain. Massa PKI akan turun ke jalan dan menuntut para jenderal itu dipecat. Presiden akan didesak untuk memberikan kursi departemen kepada golongan kiri itu karena sampai 1965 Soekarno tidak pernah mempercayakan pemimpin departemen kepada tokoh komunis kecuali menteri negara.

Versi terakhir ini dilakukan dengan membongkar versi-versi lama (dekonstruksi) dan menyusun narasi baru (rekonstruksi) dengan menggunakan sumber-sumber yang kesahihannya telah diuji serta tokoh kunci yang dapat diandalkan mengenai apa yang disebut Biro Khusus PKI. Versi ini menampilkan data baru (berbagai dokumen dari dalam dan luar negeri), metodologi baru (dengan mengikutsertakan sejarah lisan), dan perspektif baru (ini adalah aksi bukan gerakan, tapi kemudian dijadikan dalih untuk peristiwa berikutnya yang lebih

dahsyat). Karena Syam menjadi tokoh sentral, silakan versi terakhir ini disebut G30S/Syam.²⁴³

Membicarakan atau menggali sejarah terutama tentang Peristiwa G30S yang menjadi sebab kudeta Soeharto, bukanlah hal yang mudah. Ini disebabkan karena masih banyaknya pembela-pembela Soeharto, baik yang secara sembunyi maupun yang terang-terangan yang sampai kini masih berkuasa di semua lembaga pemerintahan, masih melakukan taktiknya. Begitu juga kurun waktu yang cukup lama, mempengaruhi penyelidikan ataupun pembicaraan, karena dianggap sudah kedaluwarsa serta kekurangan saksi-saksi yang masih hidup. Juga masalah keberanian, baik individu maupun lembaga ataupun badan pemerintahan, bahkan pimpinan negara yang tidak berani untuk membongkar, mencari kebenaran akan peristiwa tersebut. Dan itu juga menjadi suatu ukuran yang sangat menentukan.

Prof. John Roosa telah berusaha sekuat daya untuk menyelidiki Peristiwa G30S/1965, dengan mengorek dan mempelajari segala macam dokumen yang bisa diperoleh, di dalam maupun di luar negeri, mewawancarai berbagai sumber dan individu, tidak ketinggalan Syam Kamaruzaman yang dianggap tokoh G30S yang paling kuasa dan paling misterius yang menggunakan sampai 5 nama alias, dan juga arsip-arsip Mahkamah Militer Luar Biasa yang bisa diperoleh. Namun semua itu tidak dapat membantu membuka, merekonstruksi dengan benar apa dan bagaimana itu peristiwa G30S. Karena, kita bisa menimbang, apakah semua cerita dan celoteh Syam Kamaruzaman yang mencoba mengalihkan kesalahan kepada D.N. Aidit itu bisa dianggap benar? Aidit sendiri tidak bisa membantah celoteh Syam dan menjelaskan kebenaran, karena jauh hari sebelumnya Soeharto yang juga merupakan “atasan”-nya Syam, telah memerintahkan Kolonel Yasir Hadibroto untuk membungkam, membunuh D.N. Aidit. Dan Syam yang sudah pasti mengetahui bahwa Aidit sudah dibunuh, merasa bebas berceles, merasa bebas menimpakan kesalahan kepada Aidit buat melindungi dan mengharapkan berkah dari Soeharto. *Toh* Aidit tidak bakal bicara lagi. Kematian Aidit tanpa melalui hukum, tanpa pengadilan, tanpa bisa bicara adalah sangat menguntungkan buat Soeharto, hingga tertutup siapa dan bagaimana sesungguhnya Soeharto dalam peristiwa G30S. Sekaligus memberi jalan lebar buat Syam Kamaruzaman mengarang 1001 macam cerita semauanya, kendatipun akhirnya, dia ditembak mati pada September 1986 oleh rezim Soeharto setelah 19 tahun “dipelihara” sebagai tukang celoteh.

Dan Mahmilub, Mahkamah Militer Luar Biasa yang dilangsungkan, yang katanya untuk “mengadili” tokoh-tokoh G30S nyatanya bukanlah untuk memeriksa kebenaran atau kesalahan G30S, namun adalah cuma sekadar alat untuk membagi-bagikan jatah hukuman yang telah dirancang dan dijatahkan oleh rezim Soeharto. Dan para terdakwa, demi melindungi diri sendiri, dapat dimengerti, memilih tutup

²⁴³ Asvi Warman Adam, majalah mingguan *Tempo*, 17-11-2008.

mulut, berbohong, tidak sepenuhnya berkata benar, dan menghindar atau melempar kesalahan kepada orang lain.

Di samping pemimpin-pemimpin G30S yang dijatuhi hukuman mati, banyak militer maupun sipil yang dibunuh tanpa melalui proses pengadilan. Pimpinan tinggi PKI dibunuh begitu saja tanpa diadili, tanpa diproses oleh badan hukum, seperti Nyoto, Lukman, dan Aidit sendiri. Hanya sedikit sekali yang dibawa ke pengadilan untuk menerima jatah hukuman. Pimpinan daerah (walaupun tidak berbuat apa-apa) diberi jatah hukuman mati atau 20 tahun penjara yang akhirnya juga mati karena sakit dan kurang makan di penjara.

Jadi, menyelidiki atau coba merekonstruksi peristiwa G30S, nampaknya tidak bisa sempurna, karena tokoh besar yang bisa dimintai keterangan, D.N. Aidit, dan banyak lainnya lagi, dilenyapkan begitu saja terlebih dahulu oleh rezim Soeharto. Sehingga, apa pun keterangan, apa pun cerita yang bisa dikumpulkan, hanyalah dari satu sisi atau dari satu pihak. Karenanya, untuk bisa memberi pertimbangan dengan baik, mutlak perlu kita juga harus mempelajari dan mendalami analisa-analisa dan keterangan-keterangan para sarjana seperti Prof. Ben Anderson, Dr. Wertheim, dll., serta tulisan-tulisan para ahli sejarah dalam negeri seperti Dr. Asvi Warman Adam, dll., serta pengakuan dan tulisan korban-korban Soeharto seperti Karim D.P., Dr. Subandrio, Kolonel Latief, dll. Jadi, seperti judul tulisan ini yaitu "*Mengorek*", dimaksudkan adalah menggali dari berbagai sumber untuk bisa mendapatkan gambaran yang jernih.

Namun, betapapun masyarakat dan bangsa Indonesia serta para ahli sejarah menggali, mengorek, mempelajari, mendalami, dan menilai Peristiwa 1965 ini, faktanya, G30S menjadi alasan buat Soeharto melakukan kudetanya dan melakukan pembunuhan massal, genosida terhadap bangsa Indonesia yang menjadi lawan politiknya. Ini terbukti, selama kekuasaan rezim orde baru/Soeharto, jutaan bangsa Indonesia mati dibunuh tanpa salah dan tanpa proses pengadilan, ratusan ribu ditahan dalam kamp-kamp konsentrasi, dibuang ke Pulau Buru, yang di luar negeri dicabut hak kewarganegaraannya, dan puluhan juta rakyat hidup sengsara, terkucil dalam masyarakat bangsanya sendiri karena peraturan-peraturan pemerintah yang diskriminatif. Tidak ada bukti tertulis bahwa Soeharto berbuat atau memerintahkan pembunuhan itu semua, namun bangsa dan rakyat Indonesia, sipil maupun individu militer, mengetahui dan menjadi saksi akan kebrutalan dan kebiadaban rezim orba Soeharto selama kekuasaannya.

Seperti yang dikatakan John Roosa: "Rezim Soeharto membangun sebuah dunia fantasi tersendiri yang unsur-unsurnya, terutama yang berkaitan dengan Peristiwa 1965, terbukti masih bertahan gigih untuk tampak sebagai kebenaran abadi bagi bangsa Indonesia. Sekalipun arus propaganda terus membanjir selama tiga puluh tahun lebih, tentara Soeharto tidak pernah membuktikan bahwa PKI telah mendalangi G30S. Satu-satunya bukti bahwa PKI memimpin G30S adalah karena Angkatan Darat menyatakan demikian."

Pihak militer, sebagai kepanjangan tangan Soeharto, dalam sejarah, telah melakukan genosida, pembantaian massal atas jutaan bangsa Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Bertrand Russel, pemikir besar liberalisme, yang menyebut peristiwa ini sebagai hal amat mengerikan yang mustahil bisa dilakukan manusia.²⁴⁴ "Dalam empat bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, lima kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun" ["*In four months, five times as many people died in Indonesia as in Vietnam in twelve years.*"]²⁴⁵

Karenanya, sudah sepatutnya kita tundukkan kepala, sudah sepatutnya kita layangkan ingatan dan kita satukan hati kita dalam mengenang jutaan korban kekejaman Soeharto/orde baru/Golkar serta antek-anteknya yang tidak terungkap, yang digelapkan, yang didiamkan dan disembunyikan, yang merupakan sejarah hitam bangsa dan negara Indonesia, dimulai dengan peristiwa pembunuhan massal tahun 1965–1966, berlanjut dan berlanjut sampai kepada peristiwa heroisme pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1998 yang berhasil menurunkan si diktator otoriter dan jenderal fasis Soeharto dari kedudukannya setelah 32 tahun lamanya menguasai, menganggangi dan mencengkerami bumi persada Indonesia. Dan sudah sewajarnya jika bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang berbudaya tinggi, memperingati atau mendirikan tugu kenangan bagi jutaan rakyat yang tak bersalah yang telah dibunuh oleh rezim orba Soeharto selama kekuasaannya.

Semoga tulisan ini, kumpulan dari berbagai informasi dan bukti sejarah hitam bangsa dan negara Indonesia, akan bermanfaat bagi generasi muda bangsa agar lebih giat dalam mengorek dan menggali fakta kebenaran sejarah, seperti apa yang pernah diucapkan oleh bapak bangsa Indonesia, *founding father*, pemimpin besar Bung Karno, yaitu: "Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah!"

Sudah tentu tulisan ini jauh dari lengkap dan sempurna, namun sekurang-kurangnya dapat membantu dan memberi panduan kepada generasi muda bangsa untuk mempelajari, mengorek, menggali lebih dalam lagi kebenaran sejarah bangsa yang selama ini digelapkan, disembunyikan, atau dihilangkan melalui "kebijaksanaan pembodohan masyarakat" yang dilakukan oleh Soeharto beserta rezim orde barunya.

"Mengetahui kejahatan kemanusiaan dan tidak mencegah saja sudah merupakan kejahatan terhadap manusia."

Untuk melengkapi tulisan informasi tentang sejarah hitam ini, dan untuk memberikan bukti dan mengungkapkan kejahatan kemanusiaan, dan pelanggaran HAM berat Jenderal Soeharto selama berkuasa, dengan ini dilampirkan daftar nama sebagian dari korban-korban Soeharto/orba dalam Peristiwa 1965 dari beberapa daerah, yang diperoleh dari catatan-catatan DPP-LPRKROB (Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru) di Jakarta; DPD-LPRKROB Sumatra Utara;

²⁴⁴ *Perang Urat Syaraf*, Kompas, 9 Februari 2001.

²⁴⁵ Bertrand Russel, 1966/Kathy Kadane, *State News Service*, 1990.

Dr. A. Tjaniago, Ketua YSKP45, dan para korban orba yang masih hidup di beberapa daerah dan tempat di Indonesia.

Kepada semua pihak yang memberikan bantuan dan buah pikiran atau tulisannya dicantumkan di sini hingga tulisan ini dapat disusun, sebagai sumbangan untuk generasi muda bangsa, dengan hati tulus diucapkan ribuan terima kasih.

Australia—2009

LAMPIRAN:

Daftar Korban Genosida 1965—1968 di Indonesia¹

A

Tidak Jelas Penahanannya, Diculik, Dihilangkan, dan Dibunuh

Jawa Tengah: 156 orang

Dibunuh Aparat: 130 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
759	Amat Kastari	65	Ds. Sidomulyo, Teras	Boyolali	Petani / BTI Sidomulyo
755	Arjo	47	Ds. Deresan, Teras	Boyolali	Petani / BTI Deresan
752	Arjo Jimin	50	Ds. Tegalan, Teras	Boyolali	Dagang / PKI Tegalan
818	Atmo Markam	55	Ds. Sudimoro, Teras	Boyolali	Petani / BTI Sudimoro
861	Atmo Rejo		Ds. Tegalsari, Karang Gede	Boyolali	Dinas PU / SBPU Tegalsari
830	Atmoko	23	Ds. Kragilan, Mojosongo	Boyolali	Petani / LEKRA Kragilan
852	Bandi	25	Ds. Salakan, Teras	Boyolali	Pemuda Marhaen
850	Bedjo	25	Ds. Randusari, Teras	Boyolali	Pembantu / PR Randusari
658	Bisti Ciptowiryono	30	Ds. Karangmojo, Teras	Boyolali	Buruh Tani / PKI Karangmojo
762	Brahim Mitorwiryono	40	Ds. Mojosongo, Mojosongo	Boyolali	Dagang / PKI Mojosongo
675	Cipto Pawiro	56	Ds. Oro-oro Ombo, Gumukrejo	Boyolali	Petani / BTI Gumukrejo
686	Dali Suprpto	30	Ds. Randusari, Teras	Boyolali	PR Randusari

672	Dalimin Joyo Duwur	27	Ds. Ketaon, Banyudono	Boyolali	Petani / BTI Ketaon
679	Gimin Kartodikromo	28	Ds. Gumukrejo, Teras	Boyolali	Petani / BTI Gumukrejo
692	Gimo	30	Ds. Randusari, Teras	Boyolali	Petani / BTI Randusari
696	Gimo	30	Ds. Randusari, Teras	Boyolali	Pesuruh Kelurahan Randusari
837	Gito Mardi	35	Ds. Madurejo	Boyolali	Petani / BTI Madurejo
647	Gito Suwarno	42	Ds. Mojosongo, Mojosongo	Boyolali	Petani / BTI Mojosongo
665	Gito Wagimin	55	Ds. Tegalan, Teras	Boyolali	Petani / BTI Tegalan
676	Giyanto Paidi	56	Ds. Gumukrejo, Teras	Boyolali	Petani / BTI Gumukrejo
701	G.S. Arifin Darmowisastro		Ds. Krasak, Pecangaan	Jepara	Dinas Penerangan / PKI Pecangaan
724	Hadi Mulyono	45	Ds. Purwokerto, Tayu	Pati	Guru SDN Tayu / BTI Purwokerto
667	Hadi Subardi	55	Ds. Teras, Teras	Boyolali	Kebayan Desa / PPDI Teras
869	Hardjo Gimin	44	Ds. Bangsalan, Teras	Boyolali	Petani / BTI Bangsalan
673	Hardjo Sudarno	50	Ds. Ketaon, Banyudono	Boyolali	Pamong Desa / PKI Ketaon
871	Hardjo Wiryo	51	Ds. Bangsalan, Teras	Boyolali	Petani / BTI Bangsalan
848	Hardo al Suwari	43	Ds. Brajan	Boyolali	Petani / BTI Brajan
695	Harjo Sawi	25	Ds. Randusari, Teras	Boyolali	Petani / BTI Randusari
639	Harjo Sumarto	52	Ds. Panunggalan, Teras	Boyolali	DPR Boyolali
669	Harso Senen	23	Ds. Gupetsari, Teras	Boyolali	Petani / BTI Gupetsari
846	Harsoyo	27	Ds. Brajan	Boyolali	Guru SMP / PGRI Brajan
608	Haryopitoyo	62	Ds. Blontoh, Jekawal, Tangen	Sragen	Petani / BTI Sragen
763	Jarwadi	41	Ds. Gentan, Mojosongo	Boyolali	Pamong Praja / PPDI Boyolali
691	Jiana Jamu	20	Ds. Randusari, Teras	Boyolali	Petani / BTI Randusari
768	Jimin	22	Ds. Mojosongo, Mojosongo	Boyolali	Petani / PR Mojosongo
651	Jiyo Rejo	50	Ds. Sidomulyo, Teras	Boyolali	Petani / BTI Sidomulyo
680	Jumadi	17	Ds. Randusari, Teras	Boyolali	Petani / BTI Randusari
663	Kamidi Diropandoyo	60	Ds. Rogomulyo, Teras	Boyolali	Dagang / LEKRA Rogomulyo
723	Karsan	29	Ds. Jepat Kidul, Tayu	Pati	Petani / BTI Pati
732	Karsumi Rengkek	27	Ds. Mojoagung, Karanganom	Pati	Petani / PR Mojoagung

¹ Bagian Data, DPP Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru, Jakarta.

690	Karyorejo	35	Ds. Randusari, Teras	Boyolali	Petani / BTI Randusari
764	Kertomari	45	Ds. Butuh, Mojosongo	Boyolali	Petani / LEKRA Butuh
653	Kromo Sumardi	50	Dk. Sidomulyo, Teras	Boyolali	Petani / BTI Teras
635	Kromo Walidi	30	Ds. Teras, Teras	Boyolali	Petani / BTI Teras
662	Kromorejo Tukimin	55	Ds. Sidomulyo, Teras	Boyolali	Petani / BTI Sidomulyo
843	Madyo Utomo	56	Ds. Brajan	Boyolali	Petani / BTI Brajan
678	Mardi	30	Ds. Gumukrejo, Teras	Boyolali	Petani / BTI Gumukrejo
666	Mardi Sujiman	55	Ds. Tegalan, Teras	Boyolali	Petani / BTI Tegalan
847	Mardju	25	Ds. Brajan	Boyolali	
626	Margono	59	Ds. Krasak, Teras	Boyolali	Guru STN / PGRI Pedan
613	Marni	23	Ds. Sambirejo, Sragen	Sragen	Dagang / Gerwani Sragen
835	Marto Witono	45	Ds. Kadireso, Teras	Boyolali	Petani / BTI Kadireso
841	Mitro Sudarmo		Ds. Karanggenemg, Boyolali	Boyolali	Lurah / PPD I Karanggenemg
650	Mugi Hartono	18	Ds. Maluan	Boyolali	Pelajar / IPPI Maluan
745	Ngadimin	32	Ds. Ketaon, Banyudono	Boyolali	Dinas Kesehatan Boyolali
661	P. Karsorejo	60	Ds. Sidomulyo, Teras	Boyolali	Petani / BTI Sidomulyo
746	Paiman Joyosaputro	40	Ds. Ketaon, Banyudono	Boyolali	Petani / BTI Ketaon
872	Panut	38	Ds. Bangsalan, Teras	Boyolali	Petani / PKI Bangsalan
721	Parijo Sastrosudarmo	42	Ds. Jepat Kidul, Tayu	Pati	Guru SDN Tayu / CSS PKI Pati
867	Parmin	35	Ds. Bangsalan, Teras	Boyolali	Petani / BTI Bangsalan
642	Parmo	40	Ds. Deresan, Teras	Boyolali	Bengkel Sepeda / LEKRA Deresan
657	Parto Ngadi	25	Ds. Karangmojo, Teras	Boyolali	Petani / BTI Karangmojo
834	Parto Wijoyo	45	Ds. Kadireso, Teras	Boyolali	Kebayan / PKI Kadireso
656	Parto Wirejo	50	Ds. Teras, Teras	Boyolali	Petani / BTI Teras
845	Partono Diharjo	45	Ds. Brajan	Boyolali	Petani / BTI Brajan
751	Partowirejo	37	Ds. Ketaon, Banyudono	Boyolali	Petani / BTI Banyudono
813	Peruf	41	Ds. Bangsalan, Teras	Boyolali	Petani / PKI Bangsalan
829	Prapto Sukimin	35	Ds. Kragilan, Mojosongo	Boyolali	RSU / SEBDA Boyolali
668	Rajiyo	25	Ds. Gupetsari, Teras	Boyolali	PR Gupetsar

652	Rejo Gimani	39	Ds. Randusari, Teras	Boyolali	Petani / BTI Rejosari
671	Rejo Paino	30	Ds. Ketaon, Banyudono	Boyolali	Petani / BTI Ketaon
654	Reso Sumarto	60	Ds. Karanganyar, Teras	Boyolali	Petani / BTI Karanganyar
625	Sabu	29	Ds. Krasak, Teras	Boyolali	SDN Krasak / PGRI Boyolali
718	Sahri	38	Ds. Kertomulyo, Mojosongo	Pati	Dagang / PKI Pati
866	Sakir	25	Ds. Bangsalan, Teras	Boyolali	Petani / PR Bangsalan
870	Sakir	21	Ds. Bangsalan, Teras	Boyolali	PR Bangsalan
836	Samion	17	Ds. Purworejo, Kadireso, Teras	Boyolali	Petani / PKI Purworejo, Kadireso
641	Sastrojiyo	45	Ds. Deresan, Teras	Boyolali	Lurah / PPD I Deresan
838	Siswo Sumarno	32	Ds. Kadireso, Teras	Boyolali	Petani / PKI Kadireso
621	Siswo Sunarno	35	Ds. Krasak, Teras	Boyolali	STM Swasta Boyolali
823	Siswo Witono	50	Ds. Kragilan, Mojosongo	Boyolali	DPRD Tk. II / PPD I Kragilan
674	Slamet Wartoraharjo	45	Ds. Ketaon, Banyudono	Boyolali	Petani / BTI Ketaon
607	Smohardjo	23	Ds. Jarak, Banyuurip, Jenar	Sragen	Petani / BTI Sragen
760	Sodinomo al Demu	45	Ds. Teras, Teras	Boyolali	Dagang / PKI Teras
864	Soma Sukarto		Ds. Sranten, Mojosongo	Boyolali	Kepala Desa / PPD I Sranten
624	Somo Sukimin	60	Ds. Babadab, Krasak	Boyolali	Petani / BTI Krasak
812	Sriyono	30	Ds. Bangsalan, Teras	Boyolali	Petani / BTI Bangsalan
687	Subandi	70	Ds. Randusari, Teras	Boyolali	Mantri Polisi Randusari
736	Sudarman Harjosudarmo	60	Ds. Padas, Karanganom	Klaten	Kepala Desa Padas
744	Sugiman	25	Ds. Randusari, Teras	Boyolali	Petani / PR Randusari
694	Sugito		Ds. Randusari, Teras	Boyolali	Petani / BTI Randusari
754	Suhar Mulsuarso	50	Ds. Maluan	Boyolali	Petani / BTI Maluan
851	Suhardi	23	Ds. Kadireso, Teras	Boyolali	
756	Sujam	25	Ds. Maluan	Boyolali	Buruh Tani / LEKRA Maluan
734	Sujamal	34	Ds. Pandanan, Karanganom	Klaten	Guru SDN Pandanan / PGRI Klaten
817	Sukarman	35	Ds. Bangsalan, Teras	Boyolali	SDN Bangsalan / LEKRA Boyolali

682	Sumali	35	Ds. Randusari, Teras	Boyolali	Petani / BTI Randusari
748	Sumardiyono	27	Ds. Ketaon, Banyudono	Boyolali	PR Ketaon
702	Sumarlilan	29	Ds. Pecangaan	Jepara	Guru SDN Pecangaan / PGRI Jepara
685	Sunardi	35	Ds. Randusari, Teras	Boyolali	Dinas Kesehatan Teras
664	Supad Jojopawiro	65	Ds. Rogomulyo, Teras	Boyolali	Petani / BTI Rogomulyo
839	Supadmo	27	Ds. Kadireso, Teras	Boyolali	Petani / BTI Kadireso
720	Supardi Hadisukaryo	45	Ds. Jepat Kidul, Tayu	Pati	SDN Pati / CSS PKI Pati
684	Suparlan	25	Ds. Randusari, Teras	Boyolali	PR Randusari
683	Suparwo	20	Ds. Randusari, Teras	Boyolali	Buruh / LEKRA Randusari
819	Suradi	35	Ds. Kragilan, Mojosongo	Boyolali	Dinas Pengairan / SEBDA Kragilan
705	Suraji	19	Ds. Rejosari, Pakis	Magelang	Buruh Rejosari
833	Suranto	29	Ds. Kragilan, Mojosongo	Boyolali	SDN Kragilan / PGRI Boyolali
731	Suri	30	Ds. Mojoagung, Karangnom	Pati	Petani / BTI Mojoagung
689	Suripto	30	Ds. Randusari, Teras	Boyolali	Petani / BTI Randusari
677	Sutarjo	26	Ds. Gumukrejo, Teras	Boyolali	Petani / BTI Gumukrejo
769	Sutarno	26	Ds. Gatak, Mojosongo	Boyolali	Petani / PR Gatak
844	Sutjipto, Drs	26	Ds. Brajan	Boyolali	Mahasiswa / CGMI Brajan
862	Suwarso		Ds. Tegalsari, Karang Gede	Boyolali	Pamong Desa / PPDI Tegalsari
722	Suyadi	39	Ds. Jepat Kidul, Tayu	Pati	Guru SMP / PKI Pati
824	Suyatno	35	Ds. Kragilan, Mojosongo	Boyolali	RSU Boyolali
670	Tanu Sujono	31	Ds. Ketaon, Banyudono	Boyolali	PR Ketaon
622	Tomijo	38	Ds. Krasak, Teras	Boyolali	Petani / BTI Krasak
865	Tomo	45	Ds. Bangsalan, Teras	Boyolali	Petani / BTI Bangsalan
863	Toto Suhardjo		Ds. Tegalsari, Karang Gede	Boyolali	Pamong Desa / PPDI Tegalsari
868	Tuwuh	30	Ds. Bangsalan, Teras	Boyolali	Petani / BTI Bangsalan
832	Wagiyo	25	Ds. Kragilan, Mojosongo	Boyolali	Kebayan Desa / PKI Kragilan
826	Wardoyo	41	Ds. Kragilan, Mojosongo	Boyolali	Petani / LEKRA Kragilan

873	Warno	21	Ds. Bangsalan, Teras	Boyolali	PR Bangsalan
660	Wiro Sugito Tukul	55	Ds. Banjarsari	Boyolali	Petani / BTI Banjarsari
640	Wirodihardjo	30	Ds. Teras, Teras	Boyolali	Petani / BTI Teras
681	Wito Tenoyo	35	Ds. Gumukrejo, Teras	Boyolali	Petani / BTI Gumukrejo
761	Woro Sumarto Wagiyo	40	Ds. Teras, Teras	Boyolali	Petani / BTI Teras
688	Yitno Suparto	50	Ds. Randusari, Teras	Boyolali	Petani / BTI Randusari
825	Yoto Sumarto	45	Ds. Kragilan, Mojosongo	Boyolali	RSU / PKI Boyolali

Dibunuh Massa: 7 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
643	Jiman	25	Ds. Deresan, Teras	Boyolali	PR Deresan
659	Madya	25	Ds. Nglarangan, Teras	Boyolali	PR Nglarangan
710	Mardi Ganseng		Ds. Bulurejo, Mertoyudan	Magelang	PR Bulurejo
649	Padmo Muji	33	Ds. Maluan	Boyolali	Petani / BTI Maluan
1122	Pairan			Cilacap	Pemda Kabupaten Cilacap
644	Sugiman	25	Ds. Banjarsari, Teras	Boyolali	Buruh / PR Banjarsari
1061	Yusup			Purbalingga	SDN Pengadegan Purbalingga

Diculik dan Dihilangkan: 19 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
708	Atmodimulyo	27	Ds. Rejosari, Pakis	Magelang	Pamong Desa / PPDI Rejosari
753	Besur Yitnosuwito	30	Ds. Teras, Teras	Boyolali	Polisi PP / SEBDA Teras
614	Dewanto	29	Ds. Gondang	Sragen	PR Gondang
627	Diono	35	Ds. Tawang Sari, Teras	Boyolali	PR Tawang Sari
615	Hadisukadi	45	Ds. Mojosongo, Mojosongo	Boyolali	Kantor Kecamatan / PKI Mojosongo
709	Muhkamat	35	Ds. Rejosari, Pakis	Magelang	Petani / BTI Rejosari
719	Nasuka	25	Ds. Buwang, Mojosongo	Pati	Petani / BTI Buwang
703	Ngatno	60	Ds. Lambak, Pracimantoro	Wonogiri	SDN Pecangaan / PGRI Wonogiri
757	Pangad	25	Ds. Sidomulyo, Teras	Boyolali	Petani / BTI Sidomulyo
693	Rejoikromo	35	Ds. Randusari, Teras	Boyolali	Petani / BTI Randusari

749	Sardi Praptomartono	35	Ds. Ketaon, Banyudono	Boyolali	Dagang / PR Ketaon
770	Sriyono Sastrowondo	51	Ds. Ngaduman, Mojosongo	Boyolali	Dagang / PKI Ngaduman
707	Supar	30	Ds. Muneng, Pakis	Magelang	Petani Muneng
623	Suratmin	45	Ds. Krasak, Teras	Boyolali	SDN Krasak / PR Boyolali
704	Suyono		Ds. Kendalariyong, Petarukan	Pemalang	PR Kendalariyong
706	Tarmo	30	Ds. Gumelem, Pakis	Magelang	Petani / BTI Gumelem
750	Tubi	23	Ds. Ketaon, Banyudono	Boyolali	Petani / BTI Ketaon
648	Wiryo Sumarto	40	Ds. Sidomulyo, Mojosongo	Boyolali	Petani / PKI Sidomulyo
655	Wiyatmo Kusen	60	Ds. Karangmojo, Teras	Boyolali	Petani / BTI Karangmojo

Jawa Timur: 129 orang

Dibunuh Massa: 66 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1066	Abdullah			Jember	PNKA Jember
1084	Abdulmajid	39	Singojuruh	Banyuwangi	SDN Cantuk I Banyuwangi
1132	Alip	37	Ngadirojo	Pacitan	SDN Cokrokembang II Pacitan
998	Darmudji		Kerek	Tuban	SDN Pucengan Tuban
1072	Djaswadi		Muncar	Banyuwangi	SDN Tapanrejo I Banyuwangi
1055	Djoko Soetrisno		Umbulsari	Jember	PNKA Jember
1008	Eko Atmojo		Bojonegoro	Bojonegoro	Dinas Kesehatan Bojonegoro
1170	Hadiutojo	40	Bangorejo	Banyuwangi	SDN Glagahagung Banyuwangi
999	Hartono		Kerek	Tuban	SDN Gaji Tuban
1195	Hendro Wan Supono		Kanigoro	Blitar	SDN Kanigoro II Blitar
1147	Hidajat Taufiq	56	Muncar	Banyuwangi	SDN Tapanrejo III Banyuwangi
1005	Ikram		Bungah	Gresik	PN Semen Gresik Gresik
1129	Ismadi	58	Ngadirojo	Pacitan	SDN Kluwih Pacitan
1043	Karim		Klakah	Lumajang	PNKA / SBKA Lumajang
1193	Karolah S. Partodiwirjo			Tulungagung	Rumah Tangga Tulungagung
997	Kastam		Kerek	Tuban	SDN Jarorejo Tuban
1090	Koesniadji	35	Kabat	Banyuwangi	SDN Bunder Banyuwangi
1211	Lasmari		Ngancar	Kediri	SDN Ngancar Kediri
994	M. Darmo Redjo		Gedangan	Sidoarjo	SDN Gedangan Sidoarjo

1139	M. Maat	59	Rogojampi	Banyuwangi	Dinas Pasar Banyuwangi
1082	Makrup	34	Gambiran	Banyuwangi	SDN Gembolo Banyuwangi
1188	Marjono		Kanigoro	Blitar	SDN IV Jimbe Blitar
1168	Matiskan Agus Widjojo	30	Giri	Banyuwangi	SDN Plosorejo Banyuwangi
1100	Miseri Siswohadi Kusno		Srono	Banyuwangi	SDN Banyuwangi Banyuwangi
1208	Misjanto Adiwirno		Gedangan	Malang	SDN Wonokerto Malang
1127	Misni	31	Tulakan	Pacitan	SDN Wonodadi Pacitan
1044	Misran			Jember	PNKA / SBKA Jember
1006	Mruwan		Menganti	Gresik	
1079	Muh. Suhaimi	35	Rogojampi	Banyuwangi	SDN Rogojampi III Banyuwangi
982	Mukit		Purwoharjo	Banyuwangi	SDN Temurejo II Banyuwangi
984	Muradji		Cluring	Banyuwangi	Perum Perhutani Cluring
1040	Nawi		Sawah	Surabaya	SDN Domas Surabaya
1164	P. Sudijono		Bangorejo	Banyuwangi	Dinas Sosial Bangorejo
1212	Pamudji		Ngancar	Kediri	SDN Bedali Kediri
1111	Premono		Banyuwangi	Banyuwangi	SDN Sumberberas Banyuwangi
1133	Purwosajoko	59	Pacitan	Pacitan	Jawatan Penerangan Pacitan
1042	Rasman Sukarno		Kedungjajang	Lumajang	PNKA / SBKA Lumajang
1205	Rusman		Kanigoro	Blitar	SDN Klampok Blitar
1060	S.I. Kotot Soebiantoro			Malang	Pemda Kotamadya Malang
1067	Sali	39	Cerme	Gresik	Kantor Kecamatan Gresik
1046	Sambowo		Klakah	Lumajang	PNKA / SBKA Lumajang
1080	Samin	59	Rogojampi	Banyuwangi	SDN Aliyan Banyuwangi
1045	Sanapi		Kedungjajang	Lumajang	PNKA / SBKA Lumajang
1134	Sarmidi		Ngadirojo	Pacitan	Dinas Penerangan Ngadirojo
1004	Satar		Menganti	Gresik	SDN Sangkadura Gresik
1021	Setu		Kedungpring	Lamongan	Petani / BTI Kedungpring
1029	Soebowo		Talun	Blitar	SDN Tumpang Talun Blitar
1030	Soemarto		Talun	Blitar	SDN Tumpang Talun Blitar
1036	Soenjoto		Sanan Wetan	Blitar	SDN Sumberingin I Blitar
1214	Soepranoto		Srengat	Blitar	SDN Srengat II Blitar
1070	Subadri		Kepohbaru	Bojonegoro	SDN Nglumber Bojonegoro
1063	Sugito		Kanigoro	Blitar	SDN Gampang Blitar
1141	Suhairi Harijanto	65	Singojuruh	Banyuwangi	Jawatan Penerangan Singojuruh
1121	Sukidi		Banyuwangi	Banyuwangi	SDN Sumberbening Banyuwangi
1000	Sumardi		Babat	Lamongan	Perum Telkom Lamongan
1059	Sumardi			Madiun	SMAN I Madiun

1200	Sumarno		Tegaldlimo	Banyuwangi	SDN Kaliboyo Banyuwangi
1035	Supar Danu Siswojo		Wates	Kediri	SDN Wates I Kediri
1202	Supardi Hadimuljoto		Kanigoro	Blitar	SDN Karangsono II Blitar
983	Supoyo		Purwoharjo	Banyuwangi	SDN Curahjati Banyuwangi
1167	Suradjin	57	Singojuruh	Banyuwangi	SDN Singojuruh I Banyuwangi
1125	Surahmad		Kemlagi	Mojokerto	PG Gempolkrep Mojokerto
1131	Sutedjo		Ngadirojo	Pacitan	SDN Wonolerto II Pacitan
986	Tarmudji		Baron	Nganjuk	SDN Muneng Nganjuk
1114	T. Hardijat Kartosuwondo		Srono	Banyuwangi	SDN Banyuwangi Banyuwangi
1028	Wagiman Notosuwikno		Srengat	Blitar	SDN Pakisrejo Blitar

Diculik dan Dihilangkan: 63 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1078	Abdullah Siswosuparto		Gambiran	Banyuwangi	SDN Sumberkembang B Banyuwangi
1113	Dimin		Tegaldlimo	Banyuwangi	Pengairan Tegaldlimo
1108	Djamal		Tegaldlimo	Banyuwangi	SDN Kedungwungu Banyuwangi
1112	Djemirin Sudi Rianto		Muncar	Banyuwangi	SDN Sragen Banyuwangi
1106	Hadihatmoko		Tegaldlimo	Banyuwangi	SDN Kendalrejo Banyuwangi
1117	Hadiprajitno		Tegaldlimo	Banyuwangi	SDN Purwoasri II Banyuwangi
1109	Hadipurwanto		Tegaldlimo	Banyuwangi	SDN Kedungwungu Banyuwangi
1161	Hardja PBV		Sempu	Banyuwangi	SDN Sempu III Banyuwangi
1172	Hari Prastowo	28	Pesanggaran	Banyuwangi	SDN Siliragung II Banyuwangi
1120	Harisubroto		Gambiran	Banyuwangi	SDN Sumberkembang B Banyuwangi
1075	Ismail		Gambiran	Banyuwangi	SDN Sumberkembang B Banyuwangi
1128	Ismangil	34	Ngadirojo	Pacitan	SDN Tanjunglor Pacitan
1153	Kamsijadi		Bangorejo	Banyuwangi	SDN Pasembon Banyuwangi
1091	Karep Adi Purwasana	28	Purworejo	Banyuwangi	SDN Temurejo Banyuwangi
1116	Keni Hadisiswojo		Muncar	Banyuwangi	SDN Kedunggebang Banyuwangi
1159	Kumbul Darmadja		Gambiran	Banyuwangi	SDN Jajag Banyuwangi
1099	Kusnadi Kusnowiyoto		Srono	Banyuwangi	SDN Gembolo Banyuwangi
1154	Latiman Herususanto	27	Singojuruh	Banyuwangi	SDN Gabor Banyuwangi

1160	Maskar Subowo	32	Kabat	Banyuwangi	SDN Kepatihan Banyuwangi
1083	Masngut	25	Gambiran	Banyuwangi	SDN Gembolo Banyuwangi
1175	Mihrad		Kabat	Banyuwangi	SDN Bareng I Banyuwangi
1077	Misgimin Mardisiswojo		Gambiran	Banyuwangi	SDN Sumberkembang B Banyuwangi
1148	Misman Pudjihardjo	28	Tegaldlimo	Banyuwangi	SDN Kampung 5 Banyuwangi
1102	Mokit Wisnu Hadiwiyono		Bangorejo	Banyuwangi	SDN Bangorejo Banyuwangi
1074	Muhidin		Cluring	Banyuwangi	Jawatan Penerangan Cluring
1089	Muljosuwito	62	Kabat	Banyuwangi	SDN Pakistaji Banyuwangi
1076	Murdoko		Gambiran	Banyuwangi	SDN Sumberkembang B Banyuwangi
1176	Njoto Pramono	64	Bangorejo	Banyuwangi	SDN Bangorejo Banyuwangi
1158	P. Gimun		Pesanggaran	Banyuwangi	SDN Sumberagung Banyuwangi
1149	Paruki	29	Rogojampi	Banyuwangi	SDN Rogojampi Banyuwangi
1124	Rais		Kedamean	Gresik	SDN Sidoraharjo Gresik
1137	Rasmun	39	Tegaldlimo	Banyuwangi	Perum Perhutani Tegaldlimo
1173	Repin Purminto	26	Bangorejo	Banyuwangi	SDN Kedungagung Banyuwangi
1088	S. Partoatmodjo	38	Pesanggaran	Banyuwangi	SDN Siliragung Banyuwangi
1068	Saleh	56	Cerme	Gresik	SDN Klampok Benjeng Gresik
1169	Samad Sudiandojo	65	Srono	Banyuwangi	SDN Kaligoro Banyuwangi
1146	Samudji Hadiwinoto	33	Sempu	Banyuwangi	SDN Tegalpane Banyuwangi
1095	Samut		Gambiran	Banyuwangi	SDN Sumberkembang B Banyuwangi
1118	Sapari		Tegaldlimo	Banyuwangi	SDN Purwoasri I Banyuwangi
1126	Sapari	54		Pacitan	SDN Bogoharjo Pacitan
1155	Sjawalpamidji	28	Tegaldlimo	Banyuwangi	SDN Kedungwungu Banyuwangi
1085	Slamet Prajitno	45	Glenmore	Banyuwangi	SDN Temurejo Banyuwangi
1163	Subakat	35	Cluring	Banyuwangi	Balai Kesehatan Cluring
1107	Sudarsono Siswoandoyo		Tegaldlimo	Banyuwangi	SDN Kendalrejo Banyuwangi
1136	Sukandar		Rogojampi	Banyuwangi	PN Pegadaian Banyuwangi
1105	Sukiman		Tegaldlimo	Banyuwangi	SDN Wringinpitu Banyuwangi
1151	Supardi	62	Rogojampi	Banyuwangi	SDN Badean Banyuwangi

1104	Supodihardjo		Tegaldlimo	Banyuwangi	SDN Kendalrejo Banyuwangi
1130	Suprijono		Gedangan	Sidoarjo	SDN Klepu Kelis Sidoarjo
1103	Suradiman		Tegaldlimo	Banyuwangi	SDN Kedungwungu Banyuwangi
1081	Suratman Sigit Wujanto	28	Bangorejo	Banyuwangi	SDN Ringintelu Banyuwangi
1143	Sutrisno	23	Tegaldlimo	Banyuwangi	SDN DAM 3 Banyuwangi
1140	Suwondo Darmopudjo		Pesanggaran	Banyuwangi	Jawatan Penerangan Pesanggaran
1138	Tasrip	58	Tegaldlimo	Banyuwangi	Dinas Kesehatan Rakyat Tegaldlimo
1098	Teguh	56	Muncar	Banyuwangi	SDN Sragi I Banyuwangi
1150	Tijpto Harijono		Rogojampi	Banyuwangi	SDN Kaotan Banyuwangi
1156	Towil Siswonurhadi		Pesanggaran	Banyuwangi	SDN Kesilir Banyuwangi
1171	Trimo		Bangorejo	Banyuwangi	TNI AD Banyuwangi
1097	Tukiran		Gambiran	Banyuwangi	Perum Perhutani Gambiran
1086	Tulus Tijptosujitno	59	Bangorejo	Banyuwangi	SDN Bangorejo I Banyuwangi
1145	W.G. Siswanto	32	Srono	Banyuwangi	SDN Kopenlumbar Banyuwangi
1157	Wari Hadisuwignjo		Gambiran	Banyuwangi	SDN Dasri II Banyuwangi
1110	Warsimin	57	Kalibaru	Banyuwangi	Perum Perhutani Kalibaru

Sumatra Barat: 1 orang

Dibunuh Massa: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
978	Sultani		Simalanggang	Limapuluh Kota	Dinas PU Payakumbuh

Sumatra Utara: 47 orang

Dibunuh Aparat: 20 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
879	Adija Hajah Siregar	47	Kp. Meranti, Kisaran	Asahan	
894	Daud	40	Pakam Kebun Ubi, Pagurawan		
942	Endang	47	Kb. Aek Tarum, Bandar Pulau		
1064	Jamin Jalil		Pagar Marbau	Deli Serdang	
882	Mariamah	37	Sei Kamah II, Air Batu	Asahan	
880	Matai Manurung	57	Sei Balai	Asahan	
896	Matnur	36	Sei Kamah II, Air Batu	Asahan	

881	Saman Udi	41	Kb. Pulahan, Air Batu	Asahan	
917	Samrudi	37	Komp PNKA, Rantauprapat	Labuhan Batu	
923	Sardi	39	Komp. PNKA, Rantauprapat	Rantauprapat	
914	Sarmon	39	Komp. PNKA, Tanjung Balai	Tanjung Balai	
877	Sukur	50	Kp. Meranti, Kisaran	Asahan	
946	Sumargono	47		Lubuk Pakam	
934	Taman Pinem	38		Kabangahe	
921	Timbul	38	Komp. PNKA, Perbaungan	Deli Serdang	
944	Tumijo	71	Kb. Sidomanik, P. Siantar	Simalungun	
895	Tumino	32	Sidamulio		
903	Usman Ismail	45	Jl. Patimura, Kisaran	Asahan	
883	Wahab Sibarani	47	Selat Lancang, Tg. Balai	Asahan	
916	Warjo	44	Komp. PNKA, Perlanaan	Asahan	

Dibunuh Massa: 14 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
951	Acun	38		Lubuk Pakam	BAPERKI Lubuk Pakam
1180	Badri			Deli Serdang	
938	Ibrahim Nasution	45	Pisang Binay, Simpang 4	Asahan	
947	Kamaludin Lubis	42	Kp. Jagung, Ds. Durian	Deli Serdang	
1177	Mamang Jadi	60	Pagar Marbau	Deli Serdang	Petani / BTI Pagar Marbau
935	Roda Barus	42	Berastagi	Karo	
950	Sandung	42		Lubuk Pakam	
941	Selamat Kidal	42	Kb. Maboko, Bandar Pulau		
911	Sojin Muat	20	Jl. Sudirman, Tebingtinggi	Deli Serdang	
1179	Supani			Deli Serdang	
948	Suparjan	44		Lubuk Pakam	
949	Suratman	40		Lubuk Pakam	
910	Tan Akang	38	Jl. Sudirman, Tebingtinggi	Deli Serdang	
937	Tongkat Barus	39	Tiga Panah		

Diculik dan Dihilangkan: 10 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
886	Abdul Karm Panggabean	60	Tebingtinggi	Deli Serdang	Dinas Kehewan Tebingtinggi
902	Azis	55	Cemara, Tebingtinggi	Deli Serdang	Guru Ngaji Tebingtinggi
890	Dolah	70		Deli Serdang	
874	Haji Muhamad Suhaimi	62	Kp. Sei Alim Ulu, Air Batu	Asahan	
930	Jakirjobo	41		Medan	
876	Jumain	55	Emplasemen Kebun Air Batu	Asahan	Dewan Perusahaan PNP / PKI Air Batu
898	Pardi	18	Bangsar PNKA, Tebingtinggi	Deli Serdang	
887	Rumini	40	Sei Rejo, Rampah	Deli Serdang	
900	Sarif Purno	25	Bagelen, Tebingtinggi	Deli Serdang	TNI AD Pematangsiantar
875	Zakaria Hasibuan	47	Kb. Pulahan, Air Batu	Asahan	Penghulu Kp. Pulahan

Meninggal dalam Kerja Paksa: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
953	Suripto	39	Kb. Bah Bulian, Tebingtinggi		

Meninggal Tidak Jelas Sebabnya: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
905	Ratnah	30			
904	Ruliem	45	Jl. Kartini, Tebingtinggi	Deli Serdang	

Jumlah Keseluruhan: 333 orang

B

Tahanan yang Dihilangkan, Dibunuh, dan Meninggal

Banten: 1 orang

Meninggal dalam Tahanan: 1 orang

Kodim Serang: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1244	Sarto	25	Anyar	Serang	PNKA / SBKA Serang

DI Yogyakarta: 78 orang

Dihilangkan dari Tahanan: 78 orang

Kodim Bantul: 29 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
349	Budijah			Bantul	anggota DPRD / PKI Bantul
346	Darso			Bantul	anggota DPRD / PKI Bantul
361	Djono			Bantul	anggota CS PKI Bantul
348	Dono			Bantul	anggota DPRD / PKI Bantul
363	Gijanto			Bantul	Guru Taman Dewasa / PGRI Bantul
371	Hardjo			Bantul	
370	Kawit			Bantul	
369	Kemi			Bantul	
354	Klimen			Bantul	anggota DH CS PKI Bantul
359	Muljono			Bantul	CSS PKI Bantul
355	Muradi			Bantul	Lurah / PPD Bantul
362	Mustajab			Bantul	Sekretaris CSS PKI Bantul
364	Ngatidjo			Bantul	
358	Noto			Bantul	Wk. Sekretaris CSS PKI Bantul
360	Parman			Bantul	Pimpinan BTI Bantul
367	Parsih			Bantul	
357	Projobunarto			Bantul	Lurah / PPD Bantul
356	Sardjo			Bantul	Lurah / PPD Bantul
365	Sastro			Bantul	Veteran Bantul
352	Sastrosuwondo			Bantul	anggota Petani / BTI Bantul
345	Sawab			Bantul	anggota CS PKI Bantul
344	Sudarsono			Bantul	Sekretaris CS PKI

					Bantul
343	Sudarto			Bantul	Wk. Ketua DPRD / PKI Bantul
347	Sumardi			Bantul	anggota DPRD / PKI Bantul
351	Surodjo			Bantul	anggota Petani / BTI Bantul
366	Sutadi			Bantul	
353	Tjipto			Bantul	anggota Petani / BTI Bantul
350	Umi Kalsum			Bantul	Pimpinan Gerwani Bantul
368	Wijono			Bantul	

Kodim Gunung Kidul: 7 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
338	Alimun		Genjahan	Gunungkidul	anggota DPRD / PKI Wonosari
341	Dibjo			Gunungkidul	anggota CS PKI Wonosari
337	Gunadi			Gunungkidul	Sekretaris Daerah / SEBDA Wonosari
339	Prawiro Suwignjo			Gunungkidul	anggota BPH / PKI Wonosari
336	Sapari			Gunungkidul	anggota DPRD / PKI Wonosari
340	Tjokro			Gunungkidul	anggota BPH / PKI Wonosari
342	Tukiman			Gunungkidul	anggota CS PKI Wonosari

Kodim Kulonprogo: 7 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
372	Danu			Kulonprogo	Dinas Kesehatan Kulonprogo
1048	Mardi		Pengasih	Kulonprogo	SDN Tambak Kulonprogo
385	Pegeng			Kulonprogo	Petani / BTI Kulonprogo
381	Sikam			Kulonprogo	anggota DH CS PKI Kulonprogo
384	Suldiman			Kulonprogo	anggota BPH / PKI Kulonprogo
383	Surodjo			Kulonprogo	anggota DH CS PKI Kulonprogo
382	Winarno			Kulonprogo	anggota DH CS PKI Kulonprogo

Kodim Sleman: 12 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
-----	------	------	--------	-----------------	----------------------

331	Amin			Sleman	anggota DPRD / PKI Sleman
335	Djadi			Sleman	Petani / BTI Sleman
332	Purojo			Sleman	CSS PKI Sleman
334	Sakim			Sleman	Petani / BTI Sleman
1058	Sastrohadisumarto		Turi	Sleman	Kantor Desa Turi
1047	Sokidi Sudiwijono		Turi	Sleman	
329	Sunarjo			Sleman	anggota BPH / PKI Sleman
333	Sungkono			Sleman	Dalang / LEKRA Sleman
981	Supardi Martohardjono		Turi	Sleman	SDN Turi II Sleman
327	Susman			Sleman	CS PKI Sleman
328	Teguh			Sleman	CS PKI Sleman
330	Wardi			Sleman	anggota DPRD / PKI Sleman

RTM Yogyakarta: 23 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
223	Achmad			Yogyakarta	anggota DPRD / PKI Yogyakarta
230	Andjar			Yogyakarta	Anggota Front Nasional / PKI Yogyakarta
232	Aris Munandar			Yogyakarta	SOBSI Yogyakarta
326	Bakri			Yogyakarta	PNKA / SBKA Yogyakarta
375	Beni			Yogyakarta	Front Nasional / PKI Yogyakarta
225	Djadi			Yogyakarta	DPRD / PKI Yogyakarta
325	Djaetun			Yogyakarta	Direktur UNRA / H S I Yogyakarta
181	Djiono			Yogyakarta	DPRD / PKI Yogyakarta
178	Djono			Yogyakarta	DHC / PKI Yogyakarta
379	Gai Ing			Yogyakarta	
222	Hari Harsono			Yogyakarta	Bakuna Yogyakarta
373	Hari Sabantu			Yogyakarta	CGMI Yogyakarta
231	Kidal			Yogyakarta	SOBSI Yogyakarta
377	Lie Boen Tik			Yogyakarta	
226	Marlan			Yogyakarta	Direktur Penerbit Pesat / LEKRA Yogyakarta
224	Marwi WP			Yogyakarta	anggota BPH / PKI Yogyakarta
305	Mukadi			Yogyakarta	Bakuna Yogyakarta
195	Murwani			Yogyakarta	Bumi Putera Yogyakarta
298	Praworo			Yogyakarta	Penerbit Pesat Yogyakarta
380	Purbodjojo			Yogyakarta	Ketoprak Mahasiswa / LEKRA Yogyakarta
376	Samidjo			Yogyakarta	Kepala SMP VII / PGRI Yogyakarta

228	Sunardi, Drs			Yogyakarta	Dosen UGM / HIS Yogyakarta
194	Sutrisno			Yogyakarta	anggota BPH / PKI Yogyakarta

Jawa Barat: 8 orang

Dihilangkan dari Tahanan: 7 orang

LP Cirebon: 7 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
990	Amdad		Karangsembung	Cirebon	SMPN I Sindanglaut Cirebon
988	Ano Sukarno		Karangsembung	Cirebon	Dinas Kesehatan Karangsembung
987	Dana		Karangsembung	Cirebon	SDN Karangasem Cirebon
991	Daslam		Karangsembung	Cirebon	SDN Kalimeang Cirebon
1194	Kandar Budiono		Beber	Cirebon	SDN Kamarang Cirebon
992	Katam		Karangsembung	Cirebon	SDN Getrakmayan Cirebon
989	Wirja		Karangsembung	Cirebon	Buruh Cirebon

Meninggal dalam Tahanan: 1 orang

Pulau Buru: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1241	Cece	60	Cicadas	Bandung	Perusahaan Gas Negara Bandung

Jawa Tengah: 625 orang

Dihilangkan dari Tahanan: 597 orang

Kodim Banjarnegara: 12 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
435	Dahlan		Karangsalam, Purworejo	Banjarnegara	
449	Muljadi		Kp. Semarang	Banjarnegara	
453	Oter		Gumelem, Purworejo	Banjarnegara	
433	Purwadi		Krandegan	Banjarnegara	
451	Purwoko		Jl. Pulosari, Banjarnegara	Banjarnegara	
450	Sugeng		Balun, Wonoyo	Banjarnegara	

434	Sugoro		Krandegan	Banjarnegara	
448	Sukar		Kp. Semarang	Banjarnegara	
454	Sukardi			Banjarnegara	
431	Suwadi		Kp. Semarang	Banjarnegara	
432	Tukul Harsono		Purwonegoro	Banjarnegara	
452	Wahjudi		Krandegan	Banjarnegara	

Kodim Blora: 26 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
307	Bambang		Nglaju, Cepu	Blora	Permigas / Perbum Cepu
299	Darmawan			Blora	anggota DPRD / PKI Blora
310	Djariman		Nglaju, Cepu	Blora	Makelar Cepu
317	Dwidjo			Blora	Guru SDN Blora / PGRI Blora
1038	Hadiman		Randublatun	Blora	Permigas Cepu
314	Jakub		Sitimulyo, Cepu	Blora	Tukang Sepatu Cepu
737	Juari	33	Ds. Tambakrejo, Tunjungan	Blora	Petani / BTI Tambakrejo
306	Kasiban		Nglaju, Cepu	Blora	Permigas / Perbum Cepu
300	Kusman			Blora	
313	Lukman		Sitimulyo, Cepu	Blora	
304	Marjono		Sambong, Cepu	Blora	Permigas / Perbum Cepu
312	Njono		Sitimulyo, Cepu	Blora	Penjual Buku Cepu
742	Ny. Kamari	31	Ds. Growong, Tunjungan	Blora	Guru SDN Growong / Gerwani Blora
302	Ny. Suwardjo			Blora	Pimpinan Gerwani Blora
741	Puryas	34	Ds. Growong, Tunjungan	Blora	Petani / BTI Growong
311	Sardjono		Sitimulyo, Cepu	Blora	Permigas / Perbum Cepu
309	Somo Met		Nglaju, Cepu	Blora	
303	Srijono		Sambong, Cepu	Blora	Permigas / Perbum Cepu
316	Sukirno		Balun, Sawahan	Blora	PNKA / SBKA Blora
315	Sumangun		Ketapang	Blora	PNKA / SBKA Cepu
738	Sumarno	32	Ds. Nglawungan, Tunjungan	Blora	Petani / BTI Nglawungan
308	Suwardji		Nglaju, Cepu	Blora	
301	Suwardjo			Blora	Wk Ketua DPRD / PKI Blora
739	Suwarno	34	Ds. Ngetrep, Tunjungan	Blora	Petani / BTI Ngetrep
740	Tarji	33	Ds. Ngetrep, Tunjungan	Blora	Petani / BTI Ngetrep
743	Wito	31	Ds. Tunjungan, Tunjungan	Blora	SDN Tunjungan / PGRI Blora

Kodim Boyolali: 35 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
856	Atmo Parlan	47	Ds. Dopleng, Teras	Boyolali	Petani / BTI Dopleng
767	Basuki	34	Ds. Tegalwiro, Mojosongo	Boyolali	Petani / LEKRA Tegalwiro
628	Giman	30	Ds. Tawang Sari, Teras	Boyolali	PR Tawang Sari
629	Hadi Sukanto	35	Ds. Tawang Sari, Teras	Boyolali	Petani / BTI Tawang Sari
645	Harto Giman	31	Ds. Tegalwiro, Mojosongo	Boyolali	LEKRA / LEKRA Tegalwaru
816	Haryono al Tomo Giyono	42	Ds. Bangsalan, Teras	Boyolali	Petani / BTI Bangsalan
821	Joso	33	Ds. Kragilan, Mojosongo	Boyolali	Pamong Desa / PPD Kragilan
854	Joyo Dadi	33	Ds. Salakan, Teras	Boyolali	Petani / BTI Salakan
827	Joyo Jimin	44	Ds. Kragilan, Mojosongo	Boyolali	RSU / SEBDA Boyolali
859	Jupri	20	Ds. Dopleng, Teras	Boyolali	PR Dopleng
842	Kardi	55	Ds. Srimulyo, Boyolali	Boyolali	Kantor PEMDA / SOBSI Srimulyo
860	Karto Sutomo	25	Ds. Karanggede, Karang Gede	Boyolali	Dinas PU / SBPU Karanggede
822	Kismo	40	Ds. Kragilan, Mojosongo	Boyolali	Dinas Pengairan / PKI Kragilan
630	Komari	30	Ds. Tawang Sari, Teras	Boyolali	Petani / BTI Tawang Sari
633	Mujiman		Ds. Tawang Sari, Teras	Boyolali	Pelajar / PR Teras
747	Ngadimin	25	Ds. Ketaon, Banyudono	Boyolali	Pelajar / IPPI Ketaon
853	Niti Dikromo	50	Ds. Salakan, Teras	Boyolali	Petani / BTI Salakan
758	P. Kemi Tablikpomo	60	Ds. Sidomulyo, Teras	Boyolali	Petani / BTI Sidomulyo
831	Prapto Sutar	35	Ds. Kragilan, Mojosongo	Boyolali	Petani / BTI Kragilan
632	Rajimin	45	Ds. Teras, Teras	Boyolali	Petani / BTI Teras
849	Reso Kardiyo	41	Ds. Randusari, Teras	Boyolali	Petani / BTI Randusari
765	Sarjono	21	Ds. Mojosongo, Mojosongo	Boyolali	PR Mojosongo
814	Siwo Martono	57	Ds. Bangsalan, Teras	Boyolali	Petani / BTI Bangsalan
634	Slamet M	40	De Tawang Sari, Teras	Boyolali	Petani / BTI Tawang Sari
828	So Wiredjo		Ds. Kragilan, Mojosongo	Boyolali	Petani / LEKRA Kragilan
187	Suali			Boyolali	Bupati / PPD Boyolali

857	Subadi	27	Ds. Dopleng, Teras	Boyolali	Petani / BTI Dopleng
646	Sugito	41	Ds. Pomah, Mojosongo	Boyolali	Petani / BTI Pomah
631	Sumali	25	Ds. Tawang Sari, Teras	Boyolali	PR Tawang Sari
619	Surahman	35	Ds. Krasak, Teras	Boyolali	SDN Krasak / PGRI Boyolali
858	Suro Murdi	45	Ds. Dopleng, Teras	Boyolali	Petani / BTI Dopleng
766	Suwardi	26	Ds. Tegalwiro, Mojosongo	Boyolali	Petani / LEKRA Tegalwiro
855	Warno	40	Ds. Dopleng, Teras	Boyolali	Petani / BTI Dopleng
815	Wiro Gule	51	Ds. Bangsalan, Teras	Boyolali	Dagang / PKI Bangsalan
840	Wiryo Pono	55	Ds. Karanggenem, Teras	Boyolali	Petani / BTI Karanggenem

Kodim Brebes: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
564	Kumoro		Pulosari	Brebes	Lurah / PPD Pulosari

Kodim Cilacap: 87 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
492	Abdul Djalal		Sidareja	Cilacap	Pedagang Sidareja
495	Chaeri		Sidareja	Cilacap	Pelda. TNI AD Sidaredja
457	Dajan			Cilacap	anggota DPRD / PKI Cilacap
524	Darman			Cilacap	PNKA / SBKA Cilacap
509	Darmo			Cilacap	Kantor Kecamatan / SEBDA Cimanggu
527	Darmodjo			Cilacap	Guru SMEA / PGRI Cilacap
523	Darmoredjo			Cilacap	Pedagang Kayu Cilacap
532	Darus			Cilacap	Dinas PU / SBPU Cilacap
489	Dasim		Sidareja	Cilacap	Dinas Kesehatan Sidaredja
503	Dasuki		Cimanggu	Cilacap	Petani / BTI Cimanggu
497	Djamal		Sidareja	Cilacap	Sersan TNI AD Sidareja
529	Djasmin			Cilacap	Petani / BTI Cilacap
533	Djawawi			Cilacap	SOBSI Cilacap
470	Dulah Sumeri			Cilacap	Lurah / PPD Kasugihan
536	Dullah Komari			Cilacap	Lurah / PPD Planjan
485	Hamid		Sidareja	Cilacap	Jawatan Penerangan Sidareja

486	Hardjo Wage		Sidareja	Cilacap	Kantor Pasar / SEBDA Sidareja
459	Hardjoprajitno			Cilacap	anggota DPRD / PKI Cilacap
542	Jusup		Cimanggu	Cilacap	Carik / PPDI Bantarpanjang
463	K. Siswojo			Cilacap	anggota DPRD / PKI Cilacap
507	Kamid		Cisalak	Cilacap	Lurah / PPDI Cisalak
510	Kardiki		Cimanggu	Cilacap	Kopem Malaria Cimanggu
537	Kartosin		Bantarmangu	Cilacap	Petani / BTI Bantarmangu
474	Kasimun		Tambakrejo	Cilacap	Reparasi Radio Cilacap
483	Katamsi		Caruy	Cilacap	Petani / BTI Caruy
464	Kumarno			Cilacap	anggota DPRD / PKI Cilacap
499	Kusworo		Sidareja	Cilacap	Pabrik Rokok Sidareja
514	M.B. Sutrisno		Cisuru	Cilacap	Lurah / PPDI Cisuru
502	Maduki		Cimanggu	Cilacap	Carik / PPDI Cimanggu
498	Mardijono		Sidareja	Cilacap	OPR Sidareja
490	Mashadi		Sidareja	Cilacap	Petani / BTI Cilacap
500	Masuhadi		Bantarpanjang	Cilacap	Lurah / PPDI Bantarpanjang
540	Masutardjo		Bantarpanjang	Cilacap	Bau Desa / PPDI Bantarpanjang
491	Matnjangin		Sidareja	Cilacap	Petani / BTI Cilacap
455	Matrochijat		Caruy	Cilacap	Carik / PPDI Caruy
493	Muljadi		Sidareja	Cilacap	PGRI Cilacap
476	Muljosengodjo		Karangpucung	Cilacap	Lurah / PPDI Cidadap
505	Nakum		Bantarmangu	Cilacap	Guru SGO Cimanggu / PGRI Cilacap
522	Natoni		Gandrungmangu	Cilacap	Kepala Kantor Pasar Cilacap
513	Ngabin		Cipari	Cilacap	Stasiun KA / SBKA Cipari
467	Ngadiran			Cilacap	anggota BPH / PKI Cilacap
475	Otong Tjandra		Karangpucung	Cilacap	Lurah / PPDI Pengawaran
535	Otong Warijo		Kawung	Cilacap	
484	Prajitno		Sidareja	Cilacap	Lurah / PPDI Sidareja
458	Rachmat			Cilacap	anggota DPRD / PKI Cilacap
541	Ralam		Bantarpanjang	Cilacap	Bau Desa / PPDI Bantarpanjang
478	Rudi		Ciporas	Cilacap	
512	Samidi Reksomihardjo		Bantarpanjang	Cilacap	
481	Sana		Sidareja	Cilacap	Lurah / PPDI Kunci
526	Sarbini			Cilacap	Tukang Besi Cilacap
471	Sarin			Cilacap	Lurah / PPDI Tambakrejo
517	Sarno		Cipari	Cilacap	Petani / BTI Cilacap
515	Sastrosupono		Cisuru,	Cilacap	Carik / PPDI Cisuru

508	Satiwan		Cimanggu	Cilacap	
482	Sawud		Caruy	Cilacap	BUMN Cilacap
487	Sigit Pranowo		Sidareja	Cilacap	Guru SDN Sidareja / PGRI Cilacap
469	Slamet Sunari			Cilacap	Kantor Bupati / SEBDA Cilacap
518	Sobali		Sindangsari	Cilacap	Guru / PGRI Cilacap
511	Sontoredjo		Gayamsari, Cipari	Cilacap	Kepala Dukuh Gayamsari Majenang
506	Sudirdjo		Kalabuana	Cilacap	Lurah / PPDI Kalabuana
473	Sukamto		Tambakrejo	Cilacap	PR Tambakrejo
519	Sukarno S. Jatno		Majenang	Cilacap	Kantor Pb. Bupati / SEBDA Majenang
525	Sukirman			Cilacap	Kantor Pegadaian Cilacap
534	Sumardan			Cilacap	Jawatan Penerangan Cilacap
521	Sumardi		Tinggarjaya	Cilacap	PPDI Desa Tinggarjaya
468	Suparno			Cilacap	anggota BPH / PKI Cilacap
472	Suseno		Tambakrejo	Cilacap	Agen Harian Rakjat Cilacap
462	Susiswo			Cilacap	anggota DPRD / PKI Cilacap
480	Sutarto		Karangpucung	Cilacap	Petani / BTI Cilacap
528	Sutjipto			Cilacap	Pabrik Superfosfat Cilacap
516	Sutjipto		Cisuru	Cilacap	PNP Cisuru Cipari
531	Suwardi			Cilacap	PN Pelabuhan Cilacap
504	Suwardi Suko		Cimanggu	Cilacap	
461	Suwarto			Cilacap	anggota DPRD / PKI Cilacap
538	Targono		Negarajati	Cilacap	Carik / PPDI Negarajati
477	Tirtodwirjo		Ciporas	Cilacap	Lurah / PPDI Ciporas
494	Tjahjono		Sidareja	Cilacap	SGA / IPPI Cilacap
496	Tjipto		Sidareja	Cilacap	Polri Cilacap
479	Tjitrosengodjo		Karangpucung	Cilacap	Kantor Kecamatan / SEBDA Karangpucung
501	Tjitrosuhono		Bantarpanjang	Cilacap	Carik / PPDI Bantarpanjang
530	Tjo Kwat Ing			Cilacap	BAPERKI Cilacap
520	Tuwuh		Kroya, Maos	Cilacap	Guru STN Majenang / PGRI Cilacap
466	Umarsaid			Cilacap	anggota BPH / PKI Cilacap
465	Wasi Suwandi		Kroya, Maos	Cilacap	anggota DPRD / PKI Cilacap
456	Wimbosujitno			Cilacap	anggota DPRD / PKI Cilacap
488	Wirjosardjono		Sidareja	Cilacap	Pabrik Padi Sidareja
539	Wirjosumarto		Bantarpanjang	Cilacap	

Kodim Demak: 5 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
233	Lasidi		Bantarpanjang	Demak	anggota BPH / PKI Demak
227	M.K. Siarno			Demak	
234	Rakijo			Demak	Jawatan Penerangan Demak
235	Singgih			Demak	
229	Wirjossadiran			Demak	anggota BPH / PKI Demak

Kodim Jepara: 5 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
700	Dahlan	57	Ds. Pelem Kerep, Nalumsari	Jepara	Petani / BTI Nalumsari
278	Dihardjo			Jepara	Siswa SMP / IPPI Jepara
277	Gun Slamet			Jepara	anggota DPRD / PKI Jepara
279	Kardojo		Jatiwangi	Jepara	Carik / PPDI Jepara
699	Parno		Ds. Gayungan, Bangsri	Jepara	Petani / BTI Bangsri

Kodim Karanganyar: 7 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
175	Harun Alrasid, Drs.			Karanganyar	Kantor Bupati / SEBDA Karanganyar
176	Ny. Harun Alrasyid			Karanganyar	
193	Sakir			Karanganyar	Lurah / PPDI Sragen
180	Sardju			Karanganyar	Lurah / PPDI Jati
174	Supardjo			Karanganyar	CS PKI Sragen
179	Supono		Colomadu	Karanganyar	Pabrik Gula / SB Gula Sragen
177	Sutirto		Colomadu	Karanganyar	Pabrik Gula / SB Gula Sragen

Kodim Kendal: 28 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
208	Abu			Kendal	Guru SDN Kendal / PGRI Kendal
198	Buchori			Kendal	anggota DPRD / PKI Kendal
173	Djaelan			Kendal	Petani / BTI Kendal
216	Haribowo			Kendal	Jawatan Penerangan Kendal
196	Kusmalhadi			Kendal	anggota BPH / PKI Kendal

207	Machmud			Kendal	Komisaris Koperasi Kendal
210	Marsono			Kendal	
221	Mutiah Amin Sujitno			Kendal	Guru TK Melati / PGRI Kendal
205	Ngalim			Kendal	PN Pegadaian Kendal
212	Parsudi			Kendal	
215	Prajogo			Kendal	Lurah / PPDI Kendal
200	Safuan			Kendal	Dinas Kesehatan Kendal
209	Sarwedi			Kendal	Guru SDN Kendal / PGRI Kendal
214	Sasmitohadi			Kendal	Lurah / PPDI Kendal
217	Siswosumarto			Kendal	Jawatan Penerangan Kendal
211	Subijanto			Kendal	Guru SDN Kendal / PGRI Kendal
172	Sujoto			Kendal	anggota DPRD / PKI Kendal
199	Sukadiono			Kendal	Pimpinan SB Gula Kendal
219	Sukarni Wibowo			Kendal	
213	Sukemi		Kedungsuren	Kendal	Lurah / PPDI Kedungsuren
204	Sunarmo			Kendal	Dinas Sosial Kendal
203	Sundoro			Kendal	PN Pegadaian Kendal
202	Surjatno			Kendal	Pendidikan Masyarakat Kendal
220	Sutarni Djuli			Kendal	Pimpinan Gerwani Kendal
206	Sutrisno			Kendal	Kantor Sensus / SEBDA Kendal
201	Utomo			Kendal	Pemda / SEBDA Kendal
218	Wibowo			Kendal	Jawatan Penerangan Kendal
197	Widodo			Kendal	anggota DPRD / PKI Kendal

Kodim Klaten: 6 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
189	Dihardjo			Klaten	anggota BPH / PKI Klaten
735	Masranto Mujito	65	Ds. Suropaten, Karanganyar	Klaten	Kepala Desa / PPDI Suropaten
188	Sajono			Klaten	Sekretaris CS PKI Klaten
191	Sarwidhardjo		Mendak	Klaten	Lurah / PPDI Mendak
190	Sukirman		Manisrenggo	Klaten	Lurah / PPDI Manisrenggo
192	Sutanto		Delanggu	Klaten	Carik / PPDI Klaten

Kodim Kudus: 11 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
285	Basrawi			Kudus	Pimpinan SOBSI Kudus
283	Bini			Kudus	Dinas Kesehatan Kudus
280	Kisworo			Kudus	anggota BPH / PKI Kudus
288	Krebet Utojo			Kudus	Kantor PDK Kudus
290	Larni		Barongan	Kudus	Guru Taman Siswa / PGRI Kudus
286	Martijah			Kudus	SOBSI Kudus
287	Mochamad			Kudus	Kantor PDK Kudus
289	Sidarto			Kudus	
284	Slamet			Kudus	Pimpinan SOBSI Kudus
281	Sugiman			Kudus	anggota BPH / PKI Kudus
282	Suudarmo			Kudus	anggota DPRD / PKI Kudus

Kodim Magelang: 4 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
389	Djamas			Magelang	
386	Sastrogito			Magelang	Sekretaris CS PKI Magelang
388	Sujitno		Glagah	Magelang	anggota DPRD / PKI Magelang
387	Sumali			Magelang	anggota BPH / PKI Magelang

Kodim Pati: 18 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
714	Darmo	29	Ds. Bulumanis Lor, Margoyoso	Pati	Petani / BTI Bulumanis Lor
733	Dono Siswojo	25	Ds. Karanganyar, Karanganom	Pati	Guru SDN Karanganyar / PGRI Pati
272	Hadisurjono			Pati	anggota BPH / PKI Pati
727	Karnen	50	Ds. Margomulyo, Tayu	Pati	PKI / PKI Margomulyo
716	Lukito	38	Ds. Bulumanis, Mojosongo	Pati	Kepala Kantor Desa / PKI Bulumanis
715	Moh Biso	42	Ds. Bulumanis, Mojosongo	Pati	Kepala SDN Mojosongo / PKI Bulumanis
712	Mulyadi	25	Ds. Cibolek, Mojosongo	Pati	Guru SDN Cibolek / PR Pati
717	Ruslan	31	Ds. Bulumanis, Mojosongo	Pati	Petani / BTI Bulumanis
274	Sudarwi Zam Zam			Pati	anggota DPRD / PKI

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
726	Sugeng	28	Ds. Margomulyo, Tayu	Pati	
276	Sujat			Pati	Lurah / PPDI Pati
730	Sukamto	30	Ds. Trangkil, Trangkil	Pati	Buruh / SB Gula Trangkil
729	Sukawi	42	Ds. Kebromo, Tayu	Pati	PKI / PKI Kebromo
273	Sulais			Pati	anggota BPH / PKI Pati
713	Sutoyo	24	Ds. Semplak Kidul, Margoyoso	Pati	SDN Semplak Kidul / PR Pati
725	Suwandi	35	Ds. Purwokerto, Tayu	Pati	SDN Purwokerto / PGRI Pati
275	Tjokro			Pati	Petani / BTI Pati
271	Wahono			Pati	CS PKI Pati

Kodim Pekalongan: 20 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
553	Bambang Suparno			Pekalongan	anggota DPRD / PKI Pekalongan
558	Basuki			Pekalongan	Veteran Pekalongan
543	Bukri			Pekalongan	PNKA / SBKA Pekalongan
554	Dalim			Pekalongan	Petani / BTI Pekalongan
550	Go You Han			Pekalongan	BAPERKI Pekalongan
460	Imam Suprpto			Pekalongan	anggota BPH / PKI Pekalongan
545	Istadi			Pekalongan	
556	Kambali			Pekalongan	Lekra / LEKRA Pekalongan
548	Kuat Slameto			Pekalongan	Veteran Pekalongan
560	Muso			Pekalongan	Perusahaan Batik Pekalongan
544	Nurjasin			Pekalongan	Pabrik Tekstil / SB Tekstil Pekalongan
559	Oey Oen Bing			Pekalongan	
555	Rochmadi			Pekalongan	Jawatan Penerangan Pekalongan
546	Rotib			Pekalongan	LEKRA / LEKRA Pekalongan
561	Subardi			Pekalongan	LEKRA / LEKRA Pekalongan
551	Sudibjo			Pekalongan	Sekretaris CS PKI Pekalongan
552	Sugeng			Pekalongan	anggota BPH / PKI Pekalongan
547	Sutrisno			Pekalongan	Kantor Bea Cukai Pekalongan
557	Tarbi			Pekalongan	Veteran Pekalongan
549	Tojib			Pekalongan	Buruh Pekalongan

Kodim Pemalang: 14 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
576	Bakri			Pemalang	
574	Bintoro			Pemalang	
21	Darso			Pemalang	
577	Gimo			Pemalang	
583	Gondosubagio			Pemalang	PKPN Pemalang
585	Imam Mursodo			Pemalang	
579	Kasmuri			Pemalang	CS PKI Pemalang
573	Machdum			Pemalang	
578	Marsaid			Pemalang	CS PKI Pemalang
581	Rochadi			Pemalang	anggota BPH / PKI Pemalang
582	Sapardi			Pemalang	Kepala Jawatan Penerangan Pemalang
584	Sukarso			Pemalang	Veteran Pemalang
580	Sumali			Pemalang	anggota BPH / PKI Pemalang
575	Tapsir			Pemalang	

Kodim Purbalingga: 4 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
437	Djuhari			Purbalingga	Kepala LP Purbalingga
439	Marno			Purbalingga	
438	Maulana			Purbalingga	PNKA / SBKA Purbalingga
436	Suhada			Purbalingga	Sekretaris CS PKI Purbalingga

Kodim Purwodadi: 35 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
247	Dargo			Grobogan	
243	Darmo			Grobogan	anggota DPRD / PKI Purwodadi
238	Djajus			Grobogan	anggota BPH / PKI Purwodadi
256	Djasmo		Brati	Grobogan	Petani / BTI Grobogan
1069	Djasno Wiknyosumarto	62	Kedungjati	Grobogan	SDN Bringin I Grobogan
242	Gito			Grobogan	anggota DPRD / PKI Purwodadi
253	Hardi		Brati	Grobogan	Guru SDN Ngurungan / PGRI Purwodadi
637	Hardi		Ds. Randusari, Pulokulon	Grobogan	Petani / BTI Purwodadi
263	Hartilam			Grobogan	Jawatan Penerangan Purwodadi
239	Hartono			Grobogan	anggota BPH / PKI Purwodadi

245	Hermawan			Grobogan	Jawatan Penerangan Purwodadi
249	Kardi			Grobogan	Polisi PP Grobogan
264	Kasim			Grobogan	
261	Kemi		Wirosari	Grobogan	Perum Perhutani Grobogan
240	Kusup		Monggol	Grobogan	Petani / BTI Gundi
254	Lasidi		Brati	Grobogan	Guru SDN Bantar / PGRI Grobogan
636	Mardi		Ds. Brangkal, Karanganyar	Grobogan	SDN Purwodadi / PGRI Purwodadi
266	Margono			Grobogan	
257	Masirun		Brati	Grobogan	Petani / BTI Grobogan
262	Muklos		Danyang	Grobogan	Carik / PPD Danyang
265	Rusman			Grobogan	
260	Satimin		Wirosari	Grobogan	Perum Perhutani Grobogan
255	Siswomartono		Brati	Grobogan	Guru SDN Jangkunharjo / PGRI Grobogan
237	Slamet			Grobogan	anggota BPH / PKI Purwodadi
252	Somosukir		Brati	Grobogan	Petani / BTI Grobogan
248	Sudomo		Sekaran	Grobogan	Lurah / PPD Sekaran
236	Sugiarto			Grobogan	anggota DPRD / PKI Purwodadi
638	Sugiyanto Hadiwardoyo	25	Ds. Padas, Karanganyar	Grobogan	SDN Purwodadi / PGRI Purwodadi
246	Sumarmo			Grobogan	Jawatan Penerangan Grobogan
258	Sunardi		Brati	Grobogan	Lurah / PPD Brati
244	Suparjo			Grobogan	Jawatan Penerangan Purwodadi
259	Sutiadi			Grobogan	Lurah / PPD Wirosari
250	Suwardi		Brati	Grobogan	Jawatan Penerangan Grobogan
251	Suwarto		Brati	Grobogan	Petani / BTI Grobogan
241	Wardjo			Grobogan	anggota DPRD / PKI Purwodadi

Kodim Purwokerto: 18 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
414	Abubakar			Purwokerto	Sekretaris CS PKI Banyumas
421	Bardo Amiredjo		Notog	Purwokerto	Carik / PPD Notog
417	Dapon		Kebasen	Purwokerto	Pimpinan PGRI Purwokerto
422	Hadisiswojo			Purwokerto	PGRI Purwokerto
427	Hardi			Purwokerto	Sinder PG / SB Gula Kalibagor
426	Johan Minggu			Purwokerto	Kepala Satpam Banyumas
1183	Kitam		Pekuncen	Banyumas	Dinas Pasar Pekuncen

420	Manot			Purwokerto	Kepala Setasiun KA / SBKA Banyumas
428	Muheni			Purwokerto	
415	Nasidi		Pekuncen	Purwokerto	Pimpinan PGRI Purwokerto
418	Sadimin			Purwokerto	Pimpinan PGRI Purwokerto
423	Salikin		Sokareja Wetan	Purwokerto	Bupati / PPDI Sokareja Wetan
430	Sarkum		Purwokerto Timur	Purwokerto	Carik / PPDI Purwokerto
429	Sarwin			Purwokerto	Jawatan Penerangan Purwokerto
425	Subardo			Purwokerto	Petani / BTI Purwokerto
424	Sugirwan			Purwokerto	SOBSI Purwokerto
416	Sumedi		Sumbang	Purwokerto	Pimpinan PGRI Purwokerto
419	Taswanto			Purwokerto	SDN Purwokerto / PGRI Purwokerto

Kodim Purworejo: 18 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
394	Achmad Rochani			Purworejo	Penempatan Tenaga Kerja Purworejo
399	Bustam			Purworejo	SDN Purworejo / PGRI Purworejo
393	Darusman			Purworejo	anggota BPH / PKI Purworejo
403	Djapar		Loano	Purworejo	
407	Hadisaljo		Baledono, Tanganrejo	Purworejo	
395	Harjosuwarso			Purworejo	Guru Taman Siswa / PGRI Purworejo
402	Kamarun			Purworejo	Petani / BTI Purworejo
396	Mangun Prawiro			Purworejo	PKK Purworejo
400	Mangun Sentono		Gebang	Purworejo	CSS PKI Gebang
401	Mochtar		Bener	Purworejo	CSS PKI Purworejo
406	Singosentono			Purworejo	
398	Sukirman			Purworejo	
392	Sumatri			Purworejo	CS PKI Purworejo
404	Sumedi		Bagelen	Purworejo	
408	Sutrisno			Purworejo	
397	Wardojo		Brengkelan	Purworejo	PGRI Purworejo
405	Wongsodirwirjo		Pituruh	Purworejo	

Kodim Rembang: 41 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
777	Anarisi		Ds. Reteh, Rembang	Rembang	
795	Asrun	25	Ds. Pasar Bangsi, Rembang	Rembang	Nelayan / BNI Pasar Bangsi

791	Chalyubi	28	Ds. Leteh, Rembang	Rembang	DPRD / PKI Leteh
788	Darmin	19	Ds. Kebalen, Rembang	Rembang	Dinas PU / SBPU Kebalen
800	Djakri	46	Ds. Bando, Sluke	Rembang	Petani / BTI Bando Sluke
774	Djoemari	25	Ds. Tasikagung, Rembang	Rembang	
804	Harno	19	Ds. Sumber Girang	Rembang	Koperasi Sumber Girang
783	Jamsir	35	Ds. Megulung, Sumber	Rembang	Petani / BTI Megulung
799	Kasban	24	Ds. Pasar Bonggi, Rembang	Rembang	Nelayan / BNI Pasar Bonggi
297	Kasmidjan		Mrayu	Rembang	SDN Rembang / PGRI Rembang
784	Kaswarin	27	Ds. Magersari	Rembang	Guru / PKI Magersari
775	Katni	21	Ds. Kutoarjo, Rembang	Rembang	PR Kutoarjo
790	Kawi	25	Ds. Kutoarjo, Rembang	Rembang	PR Kutoarjo
782	Kustam	29	Ds. Jolotundo, Lasem	Rembang	SDN Jolotundo / PGRI Rembang
771	Liem Kwik Swie		Ds. Tasikagung, Rembang	Rembang	PR Tasikagung
295	Liem You Hwa		Lasem	Rembang	Pedagang Rembang
270	Maktum		Ngemplak	Rembang	DPRD / PKI Rembang
805	Mani bin Atmo		Ds. Pesaren, Warung Asem	Batang	Petani / BTI Pesaren
294	Mardi		Lasem	Rembang	Petani / BTI Rembang
291	Mastur		Lasem	Rembang	LLAJR Rembang
779	Mintarjo	37	Ds. Serang, Kutoarjo	Rembang	Kantor Kecamatan / PKI Serang
292	Mochari		Lasem	Rembang	Petani / BTI Rembang
796	Salim	23	Ds. Pasar Bonggi, Rembang	Rembang	Nelayan / BNI Pasar Bonggi
792	Samin bin Darso Siram		Ds. Tanjungsari, Rembang	Rembang	PNKA / SBKA Tanjungsari
781	Sanadi		Ds. Karangmengol, Rembang	Rembang	Petani / BTI Karangmengol
798	Sarmin	63	Ds. Pacar, Rembang	Rembang	Koperasi / CR PKI Pacar
296	Sastrosuwito		Pancur	Rembang	Kantor Desa Rembang
780	Singgih	35	Ds. Lateh, Rembang	Rembang	Dinas PU / SBPU Lateh
772	Sparman	23	Ds. Tasikagung, Rembang	Rembang	PR Tasikagung
776	Sujati	21	Ds. Kutoarjo	Rembang	Kopem Kutoarjo
797	Suki	26	Ds. Pasar Bonggi, Rembang	Rembang	Nelayan / BNI Pasar Bonggi
785	Sumarno	25	Ds. Sluke, Sluke	Rembang	Guru / PKI Sluke

269	Sungeb			Rembang	
789	Surisno	65	Ds. Kutoarjo, Rembang	Rembang	Guru STN / PGRI Kutoarjo
778	Suyono	63	Ds. Leteh, Kutoarjo	Rembang	PR Leteh
773	Tan Kiem Liong		Ds. Tasikagung, Rembang	Rembang	LEKRA / LEKRA Tasikagung
793	Tan Tjwan Bie	28	Ds. Tanjungsari, Rembang	Rembang	Reparasi Sepeda / PKI Tanjungsari
267	Toha			Rembang	
268	Tojib			Rembang	
794	Wardi	24	Ds. Kemundung, Rembang	Rembang	OPR / PR Kemundung
293	Wasito		Lasem	Rembang	

Kodim Sala: 6 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
322	Sadali			Sala	anggota BPH / PKI Sala
323	Sarijono			Sala	DPRD / PKI Sala
319	Sunardi			Sala	PGRI Blora
321	Suparto			Sala	anggota BPH / PKI Sala
318	Suwarno			Sala	CS PKI Sala
320	W. Sutarno			Sala	anggota DPRD / PKI Sala

Kodim Salatiga: 19 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
153	Ismail		Jl. Jendral Sudirman No.121, Salatiga	Salatiga	DPRD / PKI Salatiga
169	Kardjono		Kutowinangun	Salatiga	Carik / PPD Kutowinangun
167	Moch Parjono		Salatiga	Salatiga	
154	Ny. Ismail		Jl. Jendral Sudirman No.121, Salatiga	Salatiga	
164	Ny. Rachman Hadi		Kalicacing	Salatiga	
168	Ny. Sastroratri		Kaliyoso	Salatiga	
161	Ny. Sosro			Salatiga	
159	Ny. Sujud		Gendongan	Salatiga	
156	Ny. Suwandi		Jl. Senjoyo No.6, Salatiga	Salatiga	
163	Rachman Hadi		Kalicacing	Salatiga	Seniman / LEKRA Salatiga
165	Rahayu		Kaliyoso Lor	Salatiga	
170	Siswati		Pancuran	Salatiga	
160	Sosro			Salatiga	Direktur Hotel Kaloka / PKI Salatiga
158	Sujud		Gendongan	Salatiga	anggota BPH / PKI Salatiga

171	Sukimin		Kutowinangun	Salatiga	Lurah / PPD Kutowinangun
166	Suparni Kaslan		Kaliyoso	Salatiga	
155	Suwandi		Salatiga	Salatiga	anggota BPH / PKI Salatiga
162	Suwarto		Gendongan	Salatiga	Seniman / LEKRA Salatiga
157	Tan Tong Liong		Salatiga	Salatiga	anggota BPH / PKI Salatiga

Kodim Sragen: 7 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
603	Ny. Nyamiyem		Ds. Nglombo, Tenggak, Sidoarjo	Sragen	Gerwani Sragen
605	Partorejo	58	Ds. Ngepringan, Jenar	Sragen	Petani / BTI Sragen
374	Sigit			Sragen	DPRD / PKI Sragen
378	Sumardi		Gesi, Srawung	Sragen	Lurah / PPD Gesi
606	Suratno	38	Ds. Ngepringan, Jenar	Sragen	SDN Ngepringan / PKI Sragen
324	Waridjan			Sragen	DPRD / PKI Sragen
604	Witoatmodjo		Ds. Nglombo, Tenggak, Sidoarjo	Sragen	Petani / BTI Sragen

Kodim Sukoharjo: 3 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
182	Alfandi			Sukoharjo	DPRD / PKI Sukoharjo
183	Hardjosuharto		Luwang	Sukoharjo	Lurah / PPD Luwang
184	Sutjipto			Sukoharjo	anggota BPH / PKI Sukoharjo

Kodim Tegal: 10 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
568	Abdu Satar			Tegal	CS PKI Tegal
566	Margono			Tegal	
567	Purwosudarmo			Tegal	
572	Saleh			Tegal	
563	Srijono			Tegal	CS PKI Tegal
562	Sudarmo			Tegal	CS PKI Tegal
565	Sukisno			Tegal	CS PKI Tegal
569	Sumardjo			Tegal	SDN Tegal / PGRI Tegal
570	Supardjo			Tegal	anggota BPH / PKI Tegal
571	Sutarno		Pesurungan	Tegal	

Kodim Temanggung: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
390	Ishadi			Temanggung	CS PKI Temanggung
391	Tjundoko			Temanggung	CS PKI Temanggung

Kodim Wonogiri: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
185	Sudarsono			Wonogiri	CS PKI Wonogiri
186	Sutomo			Wonogiri	Lurah / PPD Desa

Kodim Wonosobo: 8 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
440	Haji Sabitun		Jl. Pasar, Wonosobo	Wonosobo	Sekretaris CS PKI Wonosobo
446	Kok Djien		Jl. Banyumas, Wonosobo	Wonosobo	PR Wonosobo
445	Martono		Lodoyong	Wonosobo	Pertanian Wonosobo
447	Oei Tiong Tjia		Wonosobo	Wonosobo	Sekretaris CSS PKI Wonosobo
441	Ronomihardjo		Sumberan	Wonosobo	Kantor Agraria Wonosobo
442	Sutardjo		Prajuritan	Wonosobo	
443	Suwandi		Prajuritan	Wonosobo	
444	Trubus		Tosari	Wonosobo	SOBSI Wonosobo

Koramil Surodanan: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
620	Tukul	35	Ds. Krasak, Teras	Boyolali	

LP Brebes: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1037	Sudihardjo			Brebes	Dinas Kesehatan Brebes
1039	Wikjam		Padasugih	Brebes	Guru SDN Padasugih Brebes

LP Pekalongan: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
806	Kasbi		Ds. Badulan, Warung Asem	Batang	Petani / BTI Bandulan, Pesaren
811	Prapto	29	Ds. Tagung, Teras	Boyolali	Petani / BTI Tagung

LP Pekalongan I: 78 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
602	Kasiyan		Ds. Badulan, Warung Asem	Batang	Petani / BTI Batang
808	Kastari		Ds. Badulan, Warung Asem	Batang	Petani / BTI Bandulan, Pesaren
600	Marjan		Ds. Pesaren, Warung Asem	Batang	Petani / BTI Pesaren
601	Sonawi bin Tarjadi		Ds. Badulan, Warung Asem	Batang	Petani / BTI Pesaren
810	Suyitno		Ds. Badulan, Warung Asem	Batang	Petani / BTI Bandulan, Pesaren
809	Wait bi Sarmin		Ds. Badulan, Warung Asem	Batang	Petani / BTI Bandulan, Pesaren
807	Warsan		Ds. Banjaran, Warung Asem	Batang	Pamong Desa / PPD Banjaran

LP Yogyakarta: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1182	Yakub	28		Wonosobo	PN Pegadaian Wonosobo

Mbeteng Ambarawa: 127 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
102	Achamd		Kupang	Semarang	Kantor Pos / SB Postel Semarang
93	Ali Sadi Bey		Kranggan	Semarang	Pendidikan Masyarakat Salatiga
131	Alim		Kupang	Semarang	Bekel / PPD Salatiga
100	Amat Irdjan		Baran Kauman	Semarang	Petani / BTI Semarang
125	Amrodji		Banyubiru	Semarang	Petani / BTI Semarang
30	Arkam		Banyubiru	Semarang	Petani / BTI Semarang
115	Asngadi		Duren	Semarang	
41	Atmowijoto		Jimbaran	Semarang	PGRI Semarang
127	Bari		Banyubiru	Semarang	Petani / BTI Semarang
27	Barimin		Banyubiru	Semarang	Petani / BTI Semarang
144	Bedjo		Lodoyong	Semarang	
65	Bono		Salatiga Luar	Semarang	Carik / PPD Salatiga
60	Broto		Karangduren	Semarang	Jawatan Penerangan Semarang
67	Dalimah Hardjowar		Jambu	Semarang	Petani / BTI Semarang
117	Dardi		Duren	Semarang	
90	Darsono			Semarang	DPRD / PKI Semarang
114	Djajus		Panjang	Semarang	PGRI Semarang
116	Dulah		Lodoyong	Semarang	PNKA / SBKA Semarang
145	Dulah		Duren	Semarang	Lurah / PPD Duren
126	Dulrachman		Banyubiru	Semarang	Petani / BTI Semarang
146	Dultjpto		Bejalen	Semarang	Petani / BTI Semarang
80	Dwidjo Juwono		Sumowono	Semarang	PGRI Semarang

82	Hadidjamal		Sumowono	Semarang	Pedagang Jubelan
38	Hadingasian		Sidomukti	Semarang	Petani / BTI Semarang
96	Hadiprajitno		Kranggan	Semarang	Front Nasional / PKI Semarang
135	Hadiwinoto Robi		Kupang	Semarang	Mantri Pes Semarang
52	Hadiwirjono		Bringin	Semarang	Lurah / PPD I Bringin
66	Hardjowar		Jambu,	Semarang	Petani / BTI Semarang
59	Harkim		Karangduren	Semarang	Lurah / PPD I Karangduren
28	Hasjim		Kupang	Semarang	Petani / BTI Kupang
137	Hastuti Hasjim		Kupang	Semarang	Gerwani Kupang
43	Hundari		Ungaran	Semarang	
122	Idris		Candi	Semarang	Veteran Ngoto
105	Iksan		Kranggan	Semarang	DPRD / PKI Semarang
94	Iksan		Kupang	Semarang	Sekolah Tenik Semarang
37	Ismail		Doplang	Semarang	Jawatan Penerangan Semarang
87	Jojosumpeno		Jubelan	Semarang	Lurah / PPD I Jubelan
110	Joso		Bandungan	Semarang	Pedagang Semarang
62	Joto		Timpik	Semarang	Petani / BTI Semarang
53	Judowirjono		Bringin	Semarang	Petani / BTI Semarang
148	Jusri		Bejalen	Semarang	Dalang / LEKRA Semarang
34	Juwono		Banyubiru	Semarang	Kantor Sosial Semarang
61	Kamto		Tengaran	Semarang	Petani / BTI Semarang
54	Kardjokarman		Sidomukti	Semarang	Petani / BTI Semarang
97	Kartini Hadiprajitno		Kranggan	Semarang	Gerwani Semarang
24	Kasbolah		Kranggan	Semarang	Petani / BTI Semarang
81	Kasdi		Banyubiru	Semarang	
74	Kaslan		Klepu	Semarang	Buruh Perhutani Semarang
119	Kaslin S. Widjaja		Candi	Semarang	Veteran Semarang
35	Kasri		Lemahireng	Semarang	Petani / BTI Semarang
46	Katam		Ungaran	Semarang	Dinas PU / SBPU Semarang
95	Kh. Harjono		Kranggan	Semarang	Jawatan Penerangan Semarang
32	Kuarin		Banyubiru	Semarang	
86	Kusnan		Sumowono	Semarang	Jawatan Penerangan Semarang
77	Mardjohan		Langensari	Semarang	PGRI Semarang
78	Margono		Langensari	Semarang	
48	Mawardi		Gading	Semarang	Petani / BTI Semarang
51	Mintarso		Getas Asinan	Semarang	Buruh Perum Perhutani Semarang
141	Mudjijo		Lodoyong	Semarang	Petani / BTI Semarang
26	Muljanto		Banyubiru	Semarang	Petani / BTI Semarang
50	Munir		Getas Asinan	Semarang	Buruh Perum Perhutani Semarang
91	Muslimin		Lodoyong	Semarang	anggota BPH / PKI Semarang

36	Narto		Merakmati	Semarang	Pedagang / PKI Semarang
55	Ngatmin		Sidomukti	Semarang	Petani / BTI Semarang
149	Noto		Bandungan	Semarang	Kantor Desa Ambarawa
75	Noto		Klepu	Semarang	
58	Panut		Wates	Semarang	Lurah / PPD I Desa
22	Parmin		Banyubiru	Semarang	Petani / BTI Banyubiru
121	Ponijan		Karanglo	Semarang	Petani / BTI Semarang
72	Prajitno		Genting	Semarang	Lurah / PPD I Genting
42	Ramelan		Jimbaran	Semarang	Petani / BTI Semarang
99	Rameli		Baran Kauman	Semarang	Pensiunan Semarang
89	Rasan		Suruh	Semarang	
120	Rasidiono		Ngasem	Semarang	
138	Riamah		Lodoyong	Semarang	Dalang / LEKRA Semarang
136	Rochani		Kupang	Semarang	Sekolah Teknik Negeri Semarang
112	Rojati Sastrowardojo		Panjang	Semarang	Gerwani Semarang
71	Rusdi		Ngamping	Semarang	Petani / BTI Semarang
83	Rusdjanto		Sumowono	Semarang	PGRI Semarang
23	Ruslan		Banyubiru	Semarang	Petani / BTI Semarang
70	S.Leman		Gondoriyo	Semarang	Lurah / PPD I Gondoriyo
25	Sadjad		Banyubiru	Semarang	Petani / BTI Semarang
132	Sahid		Kupang	Semarang	Veteran Semarang
147	Saratmin		Bejalen	Semarang	Petani / BTI Semarang
76	Sardju		Klepu	Semarang	PGRI Semarang
64	Sastro		Timpik	Semarang	Carik / PPD I Semarang
68	Sastrosedjono		Jambu	Semarang	Jawatan Penerangan Semarang
111	Sastrowardojo		Panjang,	Semarang	Pedagang Semarang
152	Satiman		Bandungan	Semarang	Petani / BTI Semarang
73	Sidik		Klepu	Semarang	Petani / BTI Semarang
150	Slamet Sari		Bandungan	Semarang	PGRI Semarang
29	Sofjan		Banyubiru	Semarang	Petani / BTI Semarang
104	Somoredjo		Kupang	Semarang	Pedagang Semarang
101	Sonhadji		Kupang	Semarang	PKI / PKI Semarang
57	Srijono		Randusari	Semarang	SDN Randusari / PGRI Semarang
133	Subechi		Kupang	Semarang	Jawatan Penerangan Semarang
140	Sudarisman		Lodoyong	Semarang	Pedagang Semarang
69	Sudewo		Jambu	Semarang	Petani / BTI Semarang
113	Suhrman		Panjang	Semarang	Partindo Semarang
139	Suhrman		Lodoyong	Semarang	Bekel / PPD I Semarang
56	Sukardi		Kupang	Semarang	Pedagang Wiraswasta Semarang
106	Sukardi		Kopeng	Semarang	Lurah / PPD I Kopeng
134	Sukarno		Kupang	Semarang	Jawatan Kebudayaan Semarang
85	Sukijar		Sumowono	Semarang	Petani / BTI Semarang
124	Sulimah		Banyubiru	Semarang	Petani / BTI Semarang

103	Sumarman		Kupang	Semarang	Tukang Jahit Semarang
123	Sunar		Tambakboyo	Semarang	Dalang / LEKRA Semarang
31	Sungkono		Banyubiru	Semarang	Petani / BTI Semarang
88	Supangat		Jubelan	Semarang	Petani / BTI Semarang
40	Suparmin Tjokropranoto		Bawen	Semarang	Buruh Perum Perhutani Semarang
98	Suratin		Kranggan	Semarang	PR Kranggan
33	Suratmo		Banyubiru	Semarang	Bekel / PPDII Semarang
107	Suroso		Kupang	Semarang	PKI / PKI Semarang
109	Sutardi		Kupang	Semarang	PGRI Semarang
151	Sutiman		Bandungan	Semarang	Lurah / PPDII Bandungan
45	Sutjipto		Ungaran	Semarang	Dinas PU / SBPU Semarang
79	Suwadi HS		Sumowono	Semarang	Veteran Semarang
118	Suwardi		Milir	Semarang	Petani / BTI Semarang
47	Suwarno		Bandarejo	Semarang	Lurah / PPDII Bandarejo
92	Suwondo		Pudakpayung	Semarang	anggota BPH / PKI Semarang
108	Tasri		Kupang	Semarang	Petani / BTI Semarang
142	Untung		Lodoyong	Semarang	Pandai Besi Semarang
84	Unus Sumardjo		Sumowono	Semarang	Jawatan Penerangan Semarang
44	Usup		Ungaran	Semarang	Jawatan Penerangan Semarang
63	Wargosastro		Timpik	Semarang	Petani / BTI Semarang
39	Warso		Bawen	Semarang	Petani / BTI Semarang
49	Warsono		Kesongo	Semarang	

Polsek Ajibarang: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1062	Djaenudin		Pekuncen	Banyumas	Petani / BTI Pekuncen

RTM Semarang: 5 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
128	Alimin		Ligu Utara	Semarang	Petani / BTI Semarang
129	Said Ranu		Kp. Damai, Semarang	Semarang	Veteran Semarang
130	Sudarno		Jl. Imam Bonjol, Semarang	Semarang	CGMI Semarang
20	Sukarno		Mugas Timur	Semarang	anggota BPH / PKI Semarang
143	Thamrin Sukarno		Wonodri	Semarang	Pelajar / IPPI Semarang

Meninggal dalam Tahanan: 28 orang

Kodim Jepara: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
697	Harto Dalim		Ds. Palem Kerep	Jepara	Dinas Pengairan / SOBSI Palem Kerep

Kodim Pati: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
711	Suyadi		Ds. Tanjungsari, Jakenan	Pati	PR Tanjungsari

Kodim Pekalongan: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1250	Tohari	57	Pekalongan Barat	Pekalongan	Perum Postel Pekalongan

Kodim Sragen: 3 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
609	Giyo	23	Ds. Ngepringan, Jenar	Sragen	Petani / BTI Sragen
610	Pawiroredjo	60	Ds. Ngepringan, Jenar	Sragen	Kepala Desa / PPDII Ngepringan
612	Rusdi		Ds. Ngepringan, Jenar	Sragen	Petani / BTI Sragen

LP Brebes: 4 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1247	Kuid b Rawi	56	Kersana	Brebes	PG Tersana Baru Brebes
1217	Ngatman	59	Kersana	Brebes	PG Tersana Baru Brebes
1227	Tabri		Jatibarang	Brebes	Petani Jatibarang
1228	Wirja Kuncung		Jatibarang	Brebes	Petani Jatibarang

LP Nusakambangan: 14 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1225	Dasim	22	Pekuncen	Banyumas	PNKA / SBKA Banyumas
1230	Karjo Rahardjo	6	Tarub	Tegal	Guru SDN Bulakwaru I Tegal
1246	Marsiadi		Brebes	Brebes	Peternak Ayam Krasak
803	Miser	28	Ds. Sluke, Sluke	Rembang	SDN Sluke / PGRI Rembang
1229	Nasuka bt Sanusi	15	Songgom	Brebes	Petani Songgom

617	Ngadiman Mangunsuwito	35	Ds. Geger, Gumukrejo, Teras	Boyolali	SDN Gumukrejo / PGRI Boyolali
616	Ngadimin	39	Ds. Geger, Gumukrejo, Teras	Boyolali	Guru / PGRI Teras
1215	Nursid		Pangkah	Tegal	PN Gula Pangka Tegal
802	Prawoto	27	Ds. Sluke, Sluke	Rembang	Petani / PR Sluke
786	Sadig		Ds. Wara, Krasan	Rembang	Petani / PKI Wara
728	Sudarno		Ds. Jepat Kidul, Tayu	Pati	Pabrik Gula / SB Gula Tayu
1219	Timbul	21	Padasugih	Brebes	Guru SDN Padasugih Brebes
611	Trunotariyo	25	Ds. Blontah, Jekawal, Tangen	Sragen	Petani / BTI Sragen
618	Wito Salip	33	Ds. Ngadisono, Krasak	Boyolali	Petani / BTI Ngadisono

LP Pekalongan: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1239	Koesnadi Pudjodarsono	23		Pekalongan Kota	Guru SDN Pendawa Tegal

LP Tegal: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1216	Raun		Pangkah	Tegal	PN Gula Pangka Tegal

Pulau Buru: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
801	Karni		Ds. Sluke, Sluke	Rembang	Petani / BTI Sluke
787	Sadimin	30	Ds. Magersari	Rembang	PNKA / SBKA Magersari

Jawa Timur: 106 orang

Dihilangkan dari Tahanan: 85 orang

Kamp Kalibaru: 7 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1152	Isno	40	Bangorejo	Banyuwangi	SDN Pasembon Banyuwangi
1162	Kamdi Harjanto		Purwoharjo	Banyuwangi	SDN Gumukrejo Banyuwangi
1144	Saring Sukorahardjo	37	Purwoharjo	Banyuwangi	SDN Glagahagung Banyuwangi
1073	Soepardi	65	Kalibaru	Banyuwangi	PNKA Banyuwangi

1096	Supardi		Muncar	Banyuwangi	Perum Perhutani Muncar
1165	Suparmo	37	Bangorejo	Banyuwangi	Koperasi Rakyat Bangorejo
1174	Suprijanto	26	Kalibaru	Banyuwangi	SDN Pringgodani Banyuwangi

Kamp Rengel: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1054	Imam Sudjono		Babat	Lamongan	Kantor Kecamatan Babat

Kodim Banyuwangi: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1201	Adisumarto		Kradenan	Banyuwangi	SDN Benculuk II Banyuwangi

Kodim Blitar: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1187	Sudiro		Kanigoro	Blitar	PU Kota Blitar
977	Sukida		Srengat	Blitar	SDN Kunir I Blitar

Kodim Bojonegoro: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1007	A. Hernawa		Bojonegoro	Bojonegoro	LVRI Bojonegoro

Kodim Jombang: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1196	Rifai		Mojoagung	Jombang	SDN Kemolo Jombang
1001	Sutikno Irdadi		Bareng	Jombang	Penerangan Jombang

Kodim Kediri: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1210	Mulyono		Ngancar	Kediri	SDN Ngancar Kediri

Kodim Malang: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1207	Tumiran Wistianarji			Malang	SDN Clumprit II Malang

Kodim Mojokerto: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1071	Kandar Hari Prayitno	34	Kemlaji	Mojokerto	Dinas Kesehatan Kemlaji

Kodim Nganjuk: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1	Sutomo Budi Kuncachyo		Trenggalek	Trenggalek	Bupati Trenggalek

Kodim Pacitan: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1092	Sumadi Sumodihardjo		Ngadirojo	Pacitan	SDN Wonokerto II Pacitan

Kodim Pasuruan: 4 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1052	(suami Umi Kalsum)			Pasuruan	LP Pasuruan
1050	Ngadin			Pasuruan	LP Pasuruan
1051	Sumadi			Pasuruan	LP Pasuruan
1053	Temo			Pasuruan	LP Pasuruan

Kodim Sidoarjo: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
993	Moch Rifai	30	Gedangan	Sidoarjo	SDN Semambung Sidoarjo

Kodim Surabaya: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
976	Moekadji Kartoesoedarmo		Sawahlan	Surabaya	SDN Sumber Surabaya

Kodim Tulungagung: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1184	Soepangat Partodiwiryo			Tulungagung	SDN Banaran Tulungagung
1192	Wibisono			Tulungagung	Perum Postel Tulungagung

Koramil Bangorejo: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1135	Soeparno Soemali	35		Surabaya	RSUP Simpang Surabaya

Koramil Banyuwangi: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1119	Trimoadi		Cluring	Banyuwangi	Dinas Kehutanan Banyuwangi

Koramil Blitar: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1002	S. Pandojosoemarto		Baron	Nganjuk	SDN Sambiroto Nganjuk

Koramil Garum: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1186	Sri Endang Sukarmi			Probolinggo	Dinas Kesehatan Probolinggo

Koramil Gedangan: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
996	Swarlihap		Gedangan	Sidoarjo	Pemda Propinsi Surabaya
995	Wardojo		Gedangan	Sidoarjo	Pabrik Garam dan Soda Negara Sidoarjo

Koramil Kademangan: 4 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
975	Musair Handoyo		Kademangan	Blitar	SDN Panggungduwet Blitar
974	Pridid Hadi Sujoto		Kademangan	Blitar	SDN Pakisaji Blitar
973	Suparno		Kademangan	Blitar	SDN Suruhwadang Blitar
972	Suradi		Kademangan	Blitar	SDN Maron Blitar

Koramil Kalibaru: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1166	Tamat	41	Kalibaru	Banyuwangi	PNP Malangsari Kalibaru

Koramil Kedungpring: 12 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1027	(ayah kandung Wardi)			Lamongan	
1015	Amin		Kedungpring	Lamongan	Petani / BTI Kedungpring
1014	Dono		Kedungpring	Lamongan	Petani / BTI Kedungpring
1017	Kerto Sumadi		Kedungpring	Lamongan	Bapindo Lamongan
1016	Mustadji		Kedungpring	Lamongan	Petani / BTI Kedungpring
1025	Mustam		Kedungpring	Lamongan	Dinas Kesehatan Kedungpring
1018	Nasirun		Kedungpring	Lamongan	Petani / BTI Kedungpring
1019	Saimin		Kedungpring	Lamongan	Petani / BTI

					Kedungpring
1023	Sujut		Kedungpring	Lamongan	Petani / BTI Kedungpring
1022	Sukadi		Kedungpring	Lamongan	Petani / BTI Kedungpring
1026	Utomo		Kedungpring	Lamongan	Petani / BTI Kedungpring
1020	Watijo		Kedungpring	Lamongan	SDN Jatidrojog Lamongan

Koramil Rogojampi: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1142	Rifai		Rogojampi	Banyuwangi	Ex. Shell-BPM Banyuwangi
1087	Sanusi	61	Rogojampi	Banyuwangi	SDN Sukojadi Banyuwangi

Koramil Sumberrejo: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1010	Soekiman D.K.		Sumberrejo	Bojonegoro	SDN Sumberrejo I Bojonegoro

Koramil Talun: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1206	Sugito Suhadiwijoto		Sanan Wetan	Blitar	SDN Kendalrejo Blitar
1199	Sukardji		Talun	Blitar	Dinas Kesehatan Wlingi

Koramil Wlingi: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1209	Sudirjo		Wlingi	Blitar	Dinas Kesehatan Wlingi

LP Banyuwangi: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1101	Soedarjono		Kalibaru	Banyuwangi	Dinas Penerangan Kalibaru

LP Blitar: 9 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1190	(suami Soerip Soeharti)	65	Sanan Wetan	Blitar	SMEP Blitar
1204	Bedjo Adimihardjo		Kanigoro	Blitar	SDN Bendosewu Blitar
1191	Darmo Hadipranoto		Kanigoro	Blitar	SDN Sambong Blitar
1198	Sadjiman		Sanan Wetan	Blitar	Dinas PU Blitar
1213	Siswomihardjo		Sanan Wetan	Blitar	Kanwil Depora Blitar
1032	Slamet		Sanan Kulon	Blitar	SDN Purworejo II Blitar

1031	Soetojo		Srengat	Blitar	SDN Kauman I Blitar
1033	Sujud		Sanan Kulon	Blitar	Kanwil Blitar Blitar
1185	Wasis Hartoyo			Blitar	PU Kabupaten Blitar

LP Bojonegoro: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1009	Koesnan		Bojonegoro	Bojonegoro	TNI AD Bojonegoro
1011	Maskoer		Bojonegoro	Bojonegoro	SDN Dander II Bojonegoro

LP Jombang: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1197	Sardjono		Bareng	Jombang	SMPK Mojowarno Jombang

LP Lamongan: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1012	Ardjo Hardjowasito		Kedungpring	Lamongan	SDN Kedungpring II Lamongan
1013	Mandrim		Kedungpring	Lamongan	Wiraswasta Kedungpring

LP Malang: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1049	Teguh		Sumberpucung	Malang	Pamong Desa Sumberpucung

LP Mojokerto: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1123	Suhud		Mojosari	Mojokerto	SDN Kauman Mojokerto

LP Nganjuk: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
985	Suparmono		Baron	Nganjuk	SDN Lambangkuning Nganjuk

LP Pacitan: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1093	Suhartono		Ngadirojo	Pacitan	SDN Wonodadi Kulon Pacitan

LP Sumenep: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
-----	------	------	--------	-----------------	----------------------

1056	Sahrawi			Sumenep	Dinas Kesehatan Sumenep
------	---------	--	--	---------	-------------------------

LP Trenggalek: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1189	Moedjeni		Ponggok	Blitar	SDN Slorok I Blitar

LP Tuban: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1024	Widji Eko Atmodjo		Babat	Lamongan	SDN Tegalsari Lamongan

LP Tulungagung: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1041	Soemiran Loegiantanto			Tulungagung	Pemda Kabupaten Tulungagung

Polisi Nglegok: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1034	Moekani		Kepanjen	Blitar	SDN Tawangsari Blitar

Polisi Talun: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1203	Harijadi		Kanigoro	Blitar	SDN Tawangungkung Blitar

Polsek Bangsal: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1003	Sutanto		Bangsal	Mojokerto	SDN Wunut Mojokerto

Polsek Umbulsari: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1057	Sudiono Sastroatmodjo		Umbulsari	Jember	SDN Tanggul Jember

Puterpra Purwosari: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1115	Susilo Adi Pusposudiro		Tegaldimo	Banyuwangi	SDN Kedungwungu Banyuwangi

RTM Madiun: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
-----	------	------	--------	-----------------	----------------------

1094	Bibit	58	Magunharjo	Madiun	TNI AD Madiun
------	-------	----	------------	--------	---------------

Meninggal dalam Tahanan: 21 orang

Kodim Mojokerto: 3 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1253	Kasbi		Jetis	Mojokerto	Guru SDN Japanan II Mojokerto
1252	Kasni Hardojo	59	Dlanggu	Mojokerto	Guru SDN Kauman Mojokerto
1251	Wasrip Martoatmodjo	63	Dlanggu	Mojokerto	Guru SDN Sambilawang Mojokerto

Kodim Pacitan: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1254	Koesni		Ngadirojo	Pacitan	Dinas Kesehatan Pacitan

Kodim Sidoarjo: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1226	Samaksin Suprianto			Sidoarjo	Guru SDN Keboan Sikep Sidoarjo

LP Blitar: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1218	Moenaris	65	Sukorejo	Blitar	Dinas Bina Marga Blitar
1220	Soepardi	35	Kepanjen	Blitar	Dinas Kesehatan Kepanjen

LP Bojonegoro: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1234	Djumadi	25	Bojonegoro	Bojonegoro	Guru SDN Pumpungan Bojonegoro
1233	Maslan	62	Sumberrejo	Bojonegoro	Penerangan Bojonegoro

LP Bondowoso: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1249	Sunandar Edy Kusbroto	30	Bondowoso	Bondowoso	Kepala Sekolah SDN Bataan Bondowoso

LP Kalisosok: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1221	Hardono	17	Lodoyo	Blitar	Perum Perhutani Blitar

LP Nusakambangan: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1242	T.M.L. Soekartono	65		Surabaya	PNS Pensiun Surabaya
1231	Tasim	61	Sidorejo	Tuban	Perum Perhutani Tuban

LP Sidoarjo: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1236	Asmuni	61	Sidoarjo	Sidoarjo	LP Sidoarjo
1235	Nasikan	65		Sidoarjo	LP Sidoarjo

LP Tuban: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1232	K.Prawirosoedarmo	57	Tuban	Tuban	Guru SDN Banaran Tuban

Polsekta Tandes: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1240	Soekadji	8	Wonocolo	Surabaya	Polri Surabaya

Pulau Buru: 4 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1223	D .Sujadi		Wringinanom	Gresik	Guru SDN Jeruklegi Sidoarjo
1243	Ignatius Tohir	30	Bubutan	Surabaya	TNI AD Surabaya
1237	Suratin	26	Kedungpring	Lamongan	Dagang Kedungpring
1238	Sutomat	9	Kedungpring	Lamongan	Petani Kedungpring

Lampung: 2 orang

Dihilangkan dari Tahanan: 2 orang

LP Kemarau: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
980	Muhamad Rameli		Penengahan	Lampung Selatan	Jawatan Penerangan Penengahan

Meninggal dalam Tahanan: 1 orang

Koramil Telukbetung: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1222	Sono	15	Tanjungkarang Timur	Bandar Lampung	PNKA / SBKA Lampung Selatan

Riau: 115 orang

Dihilangkan dari Tahanan: 106 orang

Kodim Bengkalis: 3 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
962	Bakar Ibrahim		Selat Panjang	Bengkalis	PR Pasir Pangaraian
961	Dahlan		Selat Panjang	Bengkalis	CSS PKI Selat Panjang
955	Murad		Bengkalis	Bengkalis	DPRD / CS PKI Bengkalis

Kodim Rengat: 3 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
963	Agus Alihamy		Rengat	Indragiri Hulu	CS PKI Rengat
964	Raja Abas		Rengat	Indragiri Hulu	CS PKI Rengat
965	Rubinem		Rengat	Indragiri Hulu	Gerwani Rengat

Kodim Tanjung Pinang: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
970	Sudomo		Tanjung Pinang	Riau Kepulauan	CS PKI Tanjung Pinang
971	Tajul Arifin		Tanjung Pinang	Riau Kepulauan	CS PKI Tanjung Pinang

Kodim Tembilahan: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
966	Assat		Tembilahan	Indragiri Hilir	CS PKI Tembilahan
967	Marsono		Tembilahan	Indragiri Hilir	CS PKI Tembilahan

Koramil Bagan Siapi-api: 5 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
958	Anis		Bagan Siap-api	Rokan Hilir	CSS PKI Bagan Siapi-api
960	Ny Syamsul Bahri		Bagan Siap-api	Rokan Hilir	Gerwani Bagan Siapi-api
957	Syahudin		Bagan Siap-api	Rokan Hilir	CSS PKI Bagan Siapi-api
959	Syamsul Bahri		Bagan Siap-api	Rokan Hilir	CSS PKI Bagan Siapi-api
956	Syofyan		Bagan Siap-api	Rokan Hilir	CS PKI Bengkalis

Koramil Pasir Pangaraian: 52 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1333	Abdul Aziz		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	

1297	Abdul Hasan		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1314	Agus		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1329	Agus Salim		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1286	Aladdin Nasution		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1292	Aliamron		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1308	Alikamis		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1325	Amat		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1324	Aminudin		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1291	Amir Hamsyah		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1293	Amir Hasyim		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1294	Bacok		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1295	Buyung Saridin		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1305	Daib		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1321	Datuk Patih		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1309	Djalib		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1304	Dohim		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1332	Dullah		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1335	Harun Nasution		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1306	Ibrahim		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1287	Ilyas		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1328	Kapas		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1299	Karia		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1301	Kasim		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1331	Kasud		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
968	Kattudin Nasution		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	CS PKI Pasir Pangaraian
1300	Laham		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1317	Malim		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1322	Marantai		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1298	Marhanda		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1318	Masir		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	

1311	Metmet		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1320	Muhamag P'I		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1326	Muhamad Nasution		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1323	Muhamad Nur		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1330	Muhamad Talib		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1334	Muhamad Zen		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1307	Muis		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1289	Nurdin		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1290	Pakso		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1310	Rahman		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1288	Siddik		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1319	Sinaga		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1313	Sotar		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1315	Sulung		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
969	Tamela Rachman		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	PR Pasir Pangaraian
1302	Tengku Pangeran		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1303	Tengku Saleh		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1316	Usman		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1312	Yahya		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	Imam Masjid Pasir Pangaraian
1327	Yunus		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	
1296	Zakaria		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	

RTM Pekanbaru: 39 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
10	A. Kusumitro		Boom Lama Rumbai	Pekanbaru	PT Caltex / PR Rumbai
18	A. Sujitno Hadi	31	Pekanbaru	Pekanbaru	Sekretaris CS PKI Pekanbaru
413	Abas Mandor		Pekanbaru	Pekanbaru	
2	Abunandar	50	Rumbai Km. 3,5	Pekanbaru	PT Caltex / LEKRA Rumbai
409	Ali Usir		Bangkinang	Kampar	Sekretaris CSS PKI Bangkinang
4	Ardan A. Nopel		Pekanbaru	Pekanbaru	Kantor Gubernur / SEBDA Pekanbaru
6	Azis Siregar		Pekanbaru	Pekanbaru	Perbum Pekanbaru

698	Bachtiar		Pekanbaru	Pekanbaru	Pimpinan SBKB Pekanbaru
7	Daradjat Lubis		Pekanbaru	Pekanbaru	Pimpinan SOBSI Pekanbaru
412	Darwis		Pekanbaru	Pekanbaru	Kotapraja / SEBDA Pekanbaru
410	Djasni		Pekanbaru	Pekanbaru	Mahasiswa UNRI / CGMI Pekanbaru
590	Hamdah		Sei Pakning, Bengkalis	Bengkalis	CSS PKI Sei Pakning
8	Hamlet Nasution		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	PR Pasir Pangaraian
9	Kamaluddin Sjamsuddin		Rumbai Km. 3	Pekanbaru	PT Caltex / Perbum Rumbai
586	Kambasli		Pekanbaru	Pekanbaru	Mahasiswa UNRI / CGMI Pekanbaru
820	Lukman		Pekanbaru	Pekanbaru	Bea Cukai Pekanbaru
19	M. Jusuf, BA	31	Pekanbaru	Pekanbaru	anggota BPH / PKI Pekanbaru
11	M. Lubis		Pekanbaru	Pekanbaru	SOBSI Pekanbaru
595	M. Saleh		Pekanbaru	Pekanbaru	Pelajar / IPPI Pekanbaru
5	Malanton Simanjuntak		Pekanbaru	Pekanbaru	Agen Transportasi / SBKB Pekanbaru
12	Misbach		Duri	Bengkalis	PT Caltex / Perbum Duri
13	Misdar		Dumai	Rokan Hilir	PT Caltex / Perbum Dumai
588	Muchtar Bagindo Maradjo		Pekanbaru	Pekanbaru	Petani / BTI Pekanbaru
14	Muslihun		Pekanbaru	Pekanbaru	PT Caltex / PKI Rumbai
15	Nasution		Sei Rangau	Bengkalis	Petani / BTI Sei Rangau
954	Ngadibi		Pekanbaru	Pekanbaru	PR Pekanbaru
411	Ngadimin		Duri	Bengkalis	PT Caltex / Perbum Duri
593	Nurdin O.		Pekanbaru	Pekanbaru	PR Pekanbaru
587	Ny. Nasution		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	Gerwani Pasir Pangaraian
16	Rusli Danur, B.A.	31	Pekanbaru	Pekanbaru	Guru SMA Negeri / PGRI Pekanbaru
3	Sidi Barbanso		Pekanbaru	Pekanbaru	Sekretaris CS PKI Pekanbaru
17	Sjahruddin Djalal		Pekanbaru	Pekanbaru	PT Caltex / SOBSI Rumbai
589	Sjarif		Duri	Bengkalis	PT Caltex / Perbum Duri
591	Subekti		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	LEKRA Pasir Pangaraian
594	Sugimin		Pekanbaru	Pekanbaru	Kotapraja / SEBDA Pekanbaru
596	Sutan Malano		Pekanbaru	Pekanbaru	Kantor Walikota / SEBDA Pekanbaru
597	Tampubolon		Sei Rangau	Rokan Hilir	CSS PKI Sei Rangau
598	Zainuddin		Rumbai Km. 3	Pekanbaru	PT Caltex / PKI Rumbai

599	Zubir Achmad		Bangkinang	Kampar	Pelajar / IPPI Bangkinang
-----	--------------	--	------------	--------	---------------------------

Meninggal dalam Tahanan: 9 orang

LP Padang: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1266	Dahur		Bagan Siapi-api	Rokan Hilir	Wiraswasta / PR Bagan Siapi-api
1265	Umar Kasim		Bagan Siapi-api	Rokan Hilir	Wiraswasta / PR Bagan Siapi-api

RTM Pekanbaru: 7 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1258	Diun		Sei Rangau	Rokan Hilir	Petani / BTI Sei Rangau
1257	Kartopawiro	65	Sidinginan	Rokan Hilir	Petani / BTI Sidinginan
1260	Muljono		Bangkinang	Kampar	TNI AD, Yonif 444 Bangkinang
1263	Nurdin Kanan		Boom Lama Rumbai KM 1.5	Pekanbaru	PT Caltex / Perbum Rumbai
1261	Radjab Siregar		Minas	Kampar	Perbum Minas
1262	Sudirman		Pekanbaru	Pekanbaru	PT Caltex / Perbum Rumbai
1259	Taufik		Pasir Pangaraian	Rokan Hulu	Pelajar / IPPI Pasir Pangaraian

Sulawesi Selatan: 1 orang

Meninggal dalam Tahanan: 1 orang

Kodim Moncong Loe: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1245	A. K. Karaeng Ngimba	21	Bontonompo	Gowa	PN Pertani Gowa

Sumatra Barat: 66 orang

Dihilangkan dari Tahanan: 52 orang

Kodim Painan: 51 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1385	Agus Labak			Pesisir Selatan	Pemuka Masyarakat Surantih
1396	Ajis Jamin			Pesisir Selatan	Sekretaris Secom PKI Balaiselasa
1370	Ali Basril			Pesisir Selatan	Camat Kec. Batangkas

1356	Alimuiddin			Pesisir Selatan	
1394	Aliudin			Pesisir Selatan	Pemuda Balai Selasa
1375	Anas Hamid			Pesisir Selatan	
1377	Bachtiar			Pesisir Selatan	Pegawai Kecamatan Tarusan
1387	Cupu			Pesisir Selatan	Veteran Kec Air hadji
1372	Darusa			Pesisir Selatan	
1386	Debok			Pesisir Selatan	
1351	Djamaan			Pesisir Selatan	
1366	Djamirus			Pesisir Selatan	
1349	Hadji Sunar			Pesisir Selatan	
1399	Halil Pasya			Pesisir Selatan	Anggota DPRD Painan
1355	Hanif Yunus			Pesisir Selatan	
1368	Idris			Pesisir Selatan	
1353	Ilyas Radjo Bungsu			Pesisir Selatan	
1378	Imam Daralat			Pesisir Selatan	
1376	Indra			Pesisir Selatan	Pegawai Kecamatan Tarusan
1362	Ismail			Pesisir Selatan	
1380	Jamirus			Pesisir Selatan	
1398	Jirin			Pesisir Selatan	
1391	Lamid			Pesisir Selatan	
1365	Maas			Pesisir Selatan	
1352	Mak Usir			Pesisir Selatan	
1361	Mali			Pesisir Selatan	
1381	Mansarudin			Pesisir Selatan	Aktivis Masyarakat Kec. Kambang
1389	Mansur K.			Pesisir Selatan	
1371	Mansyah			Pesisir Selatan	
1354	Muhammad Yunus			Pesisir Selatan	
1397	Nudar			Pesisir Selatan	
1393	Nukman Jao			Pesisir Selatan	Pekerja Kec. Sungai Tunu
1383	Nurdin			Pesisir Selatan	Aktivis Pertanian Kec Kambang

1395	Palim			Pesisir Selatan	Pemuda Balai Selasa
1357	Rabaini			Pesisir Selatan	
1384	Rahman			Pesisir Selatan	
1358	Rajab			Pesisir Selatan	
1388	Ridwan Ber			Pesisir Selatan	
1390	Rifai			Pesisir Selatan	
1369	Rusli			Pesisir Selatan	
1350	Sabirudin			Pesisir Selatan	
1367	Saidinia Abbas			Pesisir Selatan	
1382	Sidi Salim			Pesisir Selatan	Aktivis Masyarakat Kec. Kambang
1374	Syamsir Alam			Pesisir Selatan	
1360	Syofyan			Pesisir Selatan	
1373	Usman Latif			Pesisir Selatan	
1392	Wali Gafar			Pesisir Selatan	Wali Negeri Kec. Sungai Tunu
1379	Wali Kadir			Pesisir Selatan	Wali Negeri Surantih
1359	Yunus Djamil			Pesisir Selatan	
1364	Zaininar			Pesisir Selatan	
1363	Zubir			Pesisir Selatan	

Meninggal dalam Tahanan: 14 orang

LP Payakumbuh: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
979	Amran		Simalanggang	Limapuluh Kota	Pemda Kabupaten Limapuluh Kota

Kodim Painan: 13 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1336	Abbas Datuk Sati			Pesisir Selatan	Penghulku Adat Kel Tambang
1345	Alam Samad			Pesisir Selatan	Pegawai Negeri Api-Api
1347	Ali Asam bin Mat Asin			Pesisir Selatan	
1341	Baharudin			Pesisir Selatan	
1339	Buyung Tabing			Pesisir Selatan	

1343	Darmansyah			Pesisir Selatan	
1342	Djulis			Pesisir Selatan	
1338	Hamzah			Pesisir Selatan	Pemuka Masyarakat Salido
1344	Idris			Pesisir Selatan	Guru SR / Anggota DPRD Tarusan
1337	Kasiran			Pesisir Selatan	Wali Negeri Salido
1340	Kiram			Pesisir Selatan	Pegawai Dep. Penerangan Balaiselasa
1348	Mansur			Pesisir Selatan	
1346	Mat Asin			Pesisir Selatan	

RTM Pekanbaru: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1264	Anwar Datuk		Padang Panjang	Agam	CS PKI Padang Panjang

Sumatra Utara: 43 orang

Dibunuh Massa setelah dibebaskan: 1 orang

Koramil Tanjung Balai: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
913	Amir	38	Komp. PNKA, Tg. Balai	Asahan	PNKA / SBKA Tanjung Balai

Diculik Massa setelah dibebaskan: 1 orang

Kodim Asahan: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
915	Dalang Tembong	39	Jl. Diponegoro, Kisaran	Asahan	

Puterpra Rampah: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
884	Panut	41	Sei Rejo, Rampah	Deli Serdang	

Dihilangkan dari Tahanan: 34 orang

Gudang Hitam: 6 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
907	Matlana	45	Jl. Bulian, Tebingtinggi	Tebingtinggi	

906	Paiman	25	Bangsas PNKA, Tebingtinggi	Tebingtinggi	
899	Ranlan	27	Bangsas PNKA, Tebingtinggi	Tebingtinggi	
909	Sugeng Martono	25	Gg. Aman, Jl. Bagelen, Tebingtinggi	Tebingtinggi	
908	Suwardi	30	Jl. Bulian, Tebingtinggi	Deli Serdang	
897	Yatin	50	Bangsas PNKA, Tebingtinggi	Tebingtinggi	PNKA / SBKA Tebingtinggi

Kamp Tebingtinggi: 3 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
926	Jemingin	40	Komp. PNKA, Tg. Balai	Tanjung Balai	
925	M.S. Tunggul	37	Komp. PNKA, Tebingtinggi	Tebingtinggi	
927	Ramlan	39	Komp. PNKA, Tebingtinggi	Tebingtinggi	

Kodim Tebingtinggi: 5 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
889	Darno	42	Pasar 12, Rampah	Deli Serdang	
1065	Kasin		Sei Rampah	Deli Serdang	
888	Ngatimin	38	Sei Rejo, Rampah	Deli Serdang	
891	Uyup	50	Paya Lombang	Deli Serdang	
885	Y. Gelam Sipayung	62	Pk. Kamis, Dolok Masihul	Simalungun	Camat Dolok Masihul

Koramil Bandar Pulau: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
939	Ruslan	47	Bandar Pulau		

Koramil Pulau Samardan: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
922	Tori	38	Komp. PNKA, Tg. Balai	Tanjungbalai	

Koramil Sentang: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
924	Wirasa	42	Kisaran	Asahan	

Koramil Tanjung Balai: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
912	Rembang Perangin Angin	41	Komp. PNKA, Kisaran	Asahan	

LP Pematang Siantar: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
943	Yohanes Sitorus	38		Pematang Siantar	

LP Tebingtinggi: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
878	Hasan Basri	50	Kb. Paya Pinang, Tebingtinggi	Deli Serdang	Perk. Payapinang Tebingtinggi

Pomdam II: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
929	Maisem	32		Medan	
931	Rumiati	31		Medan	

Puterpra Bandar Halipah: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
892	Abdul Wahab	52	Bd. Khalipah, Deli Serdang	Deli Serdang	
893	Sobirin	65	Sei Rampah	Deli Serdang	

Puterpra Pancur Batu: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
936	Renda Ginting	40	Pancurbatu		

Puterpra Perbaungan: 3 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1181	Suhaimi		Perbaungan	Serdang Bedagai	Kantor Desa Dewan Buluh
1178	Sukardi		Perbaungan	Serdang Bedagai	Kantor Kecamatan Perbaungan
945	Suroso	66	Komp. PNKA, Perbaungan	Deli Serdang	PNKA / SBKA Perbaungan

RTM Pekanbaru: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
592	Sudibjo			Deli Serdang	Petani / BTI Deli Serdang

TPS Gunung Melayu: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
940	Toto Sugeng	39	Gunung Melayu, Pulau Raja	Asahan	
918	Wakidi	47	Komp. PNKA, Pulau Raja	Tanjung Balai	

TPS Sekolah Cina: 3 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
919	Abidin	38	Komp. PNKA, Perbaungan	Tebingtinggi	
920	Sopian	34	Komp. PNKA, Perbaungan	Tebingtinggi	
928	Mundiruddin	44		Tanjungbalai	

Meninggal dalam Tahanan: 6 orang**Kamp Binjai Medan: 1 orang**

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
901	Haji Ismail	65	Bangsai PNKA, Tebingtinggi	Tebingtinggi	Pensiun KA / SBKA Tebingtinggi

Kamp Tanjung Kasau: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1248	Surip	22	Sei Rampah	Deli Serdang	PT Losum London Deli Serdang

Kodim Binjai: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1224	Haji Ismail	56		Tebingtinggi	PNKA / SBKA Deli Serdang

LP Sukamulia: 2 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
933	Lokot	47	Medan	Deli Serdang	TNI AD Medan
932	Pandak Tarigan			Simalungun	Walikota Pematang Siantar

Puterpra Galang: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1256	Umartani			Deli Serdang	

Puterpra Rampah: 1 orang

No.	Nama	Umur	Alamat	Kabupaten /Kota	Pekerjaan/Organisasi
1255	Seblu			Deli Serdang	

Jumlah seluruhnya: 1045 orang

C

Pemeriksaan Perempuan di Indonesia Tahun 1966—1967

Sumatra Utara

**Dibunuh sesudah diperkosa
Asahan**

No.	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan	Alamat Kerja	Ditangkap
1274	Asnita	24	Ds. Perlompongan Karetia, Air Batu	Penjual Jamu Gendong	Air Batu	
1273	Juriah	32	Perk Teluk Dalam, Simpat 4			Okt 1965
1285	Linda Wati Lubis	22	Perk Gunung Bayu, Perdagangan			
1275	Malinda br Ginting	18	Pancur Batu	Pedagang sayur	Pancur Batu	1966
952	Mariamah	27	Sei Kamah II, Air Batu			
1270	Menah	27	Perk Sei Dadap, Air Batu	Gerwani	Air Batu	
1267	Nur Rijah Nasution	20	Kp Meranti, Kisaran			1966
1278	Nurdiah	17	Tanjung Balai			
1272	Parinem	18	Perk Membang Muda, Pulau Raja			1966
1269	Ramlah	20	Pulau Raja Pekan, Pulau Raja			
1271	Suparmi	30	Perk Sei Dadap, Air Batu	SARBUPRI	Air Batu	

Dairi

No.	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan	Alamat Kerja	Ditangkap
1281	Tiur Nauli br Simbolon	20	Jl Runding, Sidikalang			1966

Deli Serdang

No.	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan	Alamat Kerja	Ditangkap
1277	Nundiah bt Harjo		Gelam Sei Sarimah, Bd Khalipah			

Medan

No.	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan	Alamat Kerja	Ditangkap
1282	Mirbah	17	Kp Sekoni, Belawan	Belawan	Sekretariat SSNI	

Sibolga

No.	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan	Alamat Kerja	Ditangkap
1279	Salbiah	27	Batang Toru	Batang Toru	Gerwani	1965

Tapanuli Selatan

No.	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan	Alamat Kerja	Ditangkap
1280	Melur Nasution	21	Pk Sayur Matinggi			1965

**Tidak Dibunuh
Asahan**

No.	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan	Alamat Kerja	Ditangkap
1268	Ngatiyem	22	Ds. Danau Sijabut, Air Batu			Okt 1965

Deli Serdang

No.	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan	Alamat Kerja	Ditangkap
1283	Siti Maryam	27	Lubuk Pakam			Okt 1965

Labuhan Batu

No.	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan	Alamat Kerja	Ditangkap
1276	Rosdiana	27	Rantau Prapat Kota			1966

Langkat						
No.	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan	Alamat Kerja	Ditangkap
1284	Sulamsi	25	Titi Jungkeruk, Sei Benjarah			

D

Penjelasan tentang Pemerkosaan Perempuan di Indonesia Tahun 1966—1967

No.	Nama	Umur
1274	Asnita	24

Korban dipanggil Puterpra untuk membenarkan bahwa seorang tahanan bernama Asmawi adalah adiknya. Sore harinya kedua kakak-beradik itu disuruh pulang. Sesampai di Air Teluk mereka dicegat 4 orang, seorang di antaranya bersenjata api.. Asmawi langsung dibunuh, sedangkan Asnita diperkosa terlebih dulu baru dibunuh. Jenazah mereka terlihat di Sungai Air Teluk dekat Pekan T selama 2 hari dan kemudian hilang.

Anak lelaki Asnita (7 tahun) dan adik perempuannya (1 tahun) karena terlunta-lunta lalu diasuh seorang anggota TNI dari Kodam Brawijaya sampai sekarang.

No.	Nama	Umur
1273	Juriah	32

Korban hendak dipindahkan ke Kisaran dengan membawa bayinya berumur 4 bulan.. Di Pasar Miring Sei Dadap mobil tahanan dihadang segerombolan orang. Korban kemdian diperkosa dan dibunuh.

Bayi itu sekarang masih hidup tetapi tidak diketahui di mana.

No.	Nama	Umur
1285	Linda Wati Lubis	22

Korban sedang dalam perjalanan pulang dari mengirimi ayahnya yang ditahan di Kamp.Tanjung Kasau dan kemalaman di Perkebunan Gunung Bayu. Ia ditangkap dan diperkosa oleh seorang sipil bersenjata api dan seorang veteran bernama Kabul dari Lima Puluh, kemudian dibunuh. Jenazah ditemukan di Perkebunan Gunung Bayu.

No.	Nama	Umur
1275	Malinda br Ginting	18

Korban diadakan sesama penjual sayur bernama Dona Baru ke polisi bahwa ia anggota Gerwani. Korban lalu ditangkap dan 4 hari kemudian jenazahnya ditemukan dalam keadaan telanjang bulat di Kebun Kuala Bekala.

No.	Nama	Umur
952	Mariamah	27

Sebelum dibunuh diperkosa bergiliran oleh 6 orang disaksikan oleh Serma. A. Aruan dan Puterpra 74 bernama Airbat, lalu dinjak-injak dalam keadaan bugil. Mayatnya dibuang ke Sei Silau dan dilarang untuk diambil. Gerombolan pemerkosa dipimpin oleh Pungut, penduduk Km. 4 Tanjung Balai, tukang jual obat keilling.

No.	Nama	Umur
1280	Melur Nasution	21

Sebelumnya, korban tinggal di Perkebunan Hapsong, Batang Toru, Sibolga. Pada tahun 1965 ia kembali ke Pekan Sayur Matinggi lalu ditangkap Puterpra dan ditahan 3 hari. Sewaktu pulang dari tahanan, korban dikeroyok 8 orang dan diperkosa di ladang. Orang lain yang hendak menolongnya ditakut-takuti dengan tembakan. Korban kemudian juga ditembak mati.

No.	Nama	Umur
1270	Menah	27

Korban dibunuh sesudah diperkosa di Penimbangan Getah. Jenazahnya ditemukan dalam keadaan telanjang bulat.

No.	Nama	Umur
1282	Mirbah	17

Sebagai tahanan rumah Puterpra Belawan, korban diambil segerombolan pemuda lalu diperkosa di sebuah tongkang rusak di Belawan, kemudian dibunuh.

No.	Nama	Umur
1268	Ngatiyem	22

Korban ditangkap oleh Puterpra Air Batu karena pada tanggal 30 Sep.1965 ia berada di Jakarta. Kodim Asahan menyerahkan korban kepada gerombolan preman Tanjung Balai yang lalu membawanya ke pekebunan kelapa. Di sana korban diperkosa ramai-ramai sampai pingsan dan ditinggalkan begitu saja, sehingga selamat dan sampai sekarang masih hidup

No.	Nama	Umur
1277	Nundiah bt Harjo	

Karena ayah korban ditahan di Kamp. Tanjung Kasau, korban lalu berlindung di Perkebunan Tanjung Kasau. Kemudian dipekerjakan oleh seorang dokter di Medan. Pada tahun 1967 kembali ke Tanjung Kasau dan mengaku hamil karena diperkosa. Begitu diketahui bahwa korban hamil, ia disiksa sampai mengalami pendarahan dan meninggal.

No.	Nama	Umur
1267	Nur Rijah Nasution	20

Korban dibebaskan dari tahanan menjelang malam karena salah tangkap dan sampai di teriminal bis Kisaran sekitar jam 19.00. Di sana ditangkap oleh gerombolan Pemuda Panca Sila Kisaran lalu diperkosa dan dibunuh.

Ayah korban, Norman Nasution mendengar kabar tersebut dan bermaksud mengambil jenazah anaknya, tetapi justru ikut dibunuh.

Ibu korban meninggal karena tertekan batin 7 bulan setelah peristiwa.

No.	Nama	Umur
1278	Nurdiah	17

Korban ditangkap ramai-ramai oleh Pemuda Panca Sila Tanjung Balai, kemudian diperkosa ramai-ramai lalu dibunuh dengan cara pusatnya ditusuk dengan besi sampai tembus ke kemaluannya. Dalam keadaan tertusuk, jenazahnya dipancang dengan kepala di bawah dan kaki di atas di Jl. Mesjid, Tanjung Balai.

No.	Nama	Umur
1272	Parinem	18

Korban dibebaskan oleh Puterpra Pulau Raja dan dalam perjalanan pulang disergap, diperkosa, dan dibunuh oleh enam orang di perkebunan karet.

No.	Nama	Umur
1269	Ramlah	20

Korban ditangkap ramai-ramai oleh gerombolan yang dipimpin oleh veteran bernama Maskur. Malam harinya dibawa ke gerbong KA lalu diperkosa dan dibunuh. Jenazahnya dibuang dari atas jembatan KA Sungai Asahan dan ditemukan dan dikubur penduduk di tepi Sungai Asahan.

No.	Nama	Umur
1276	Rosdiana	27

Korban disekap di sebuah rumah di Rantau Prapat dan diperkosa berulang-ulang oleh 6 orang. Kemudian diserahkan kepada polisi dan polisi lalu menyerahkannya ke Kodim Rantau Prapat. Selanjutnya korban ditahan di Kamp. Tanjung Kasau dan melahirkan seorang anak lelaki dalam tahanan pada tahun 1967

No.	Nama	Umur
1279	Salbiah	27

Korban melarikan diri ke tempat kerabatnya, Abdulah Rambe, di Sibolga. Tetapi di sana ia ditangkap Puterpra Sibolga. Sesudah ditahan 2 hari lalu dilepaskan sekitar jam 19.00, tetapi di jalan ia ditangkap ramai-ramai oleh Pemuda Panca Sila Sibolga dan diperkosa bergantian. Jenazahnya ditemukan di sebuah kapal rusak di pelabuhan Sibolga.

No.	Nama	Umur
1283	Siti Maryam	27

Sebagai tahanan korban dijadikan gundik Komandan Puterpra, walaupun ia baru saja melahirkan anaknya yang ke-7. Beberapa tahun

kemudian ia diperistri secara sah oleh seorang perwira Kodam selama 6 tahun sampai melahirkan 2 orang anak. Karena korban diduga sebagai anggota PKI, maka perwira tersebut kemudian ditangkap dan korban pulang ke kampung. Di sana korban ditangkap kembali oleh komandan Puterpra yang baru dan hendak diperkosa tetapi gagal, lalu diserahkan ke Kodim Tebingtinggi. Sebagai tahanan Kodim, korban dijadikan gundik oleh Pasi I Kapten Ramiso sampai melahirkan seorang anak. Kemudian Kodam Bukit Barisan menyerahkan korban kepada gerombolan preman yang dipimpin oleh Koda Kartolo. Korban lalu diperkosa bergantian oleh 11 orang di perkebunan Cina dan ditinggalkan begitu saja. Kemudian korban ditemukan orang masih hidup dan diserahkan kembali ke Kodim Tebingtinggi. Kapten Rumiso memberinya uang dan menyuruhnya pulang ke kampung. Sampai sekarang korban masih hidup. Alamatnya sekarang: ... Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara.

No.	Nama	Umur
1284	Sulasmi	25

Karena suami korban ditahan, ia selalu didatangi oleh seorang veteran bernama Dukum Boyok dan diperkosa berulang-ulang sampai hamil. Karena kehamilannya diributkan oleh seisi kampung, korban diusir atas perintah si veteran. Karena di mana pun tidak ada yang mau menerima kehadirannya, korban lalu gantung diri dan meninggal, tetapi bayi kandungannya lahir selamat dan kembar dua, perempuan semua. Kedua anak tersebut sekarang bernama Nasita dan Nasini, berjualan sayur di Jakarta.

No.	Nama	Umur
1271	Suparmi	30

Korban adalah pemenang pemilihan Penghulu. Dijemput oleh dua orang veteran yang memberitahukan bahwa suami korban, Tumijo, dikeroyok orang di perkebunan. Korban lalu pergi ke tempat kejadian dan menemukan suaminya telah meninggal dibunuh. Kemudian ia sendiri juga dibunuh setelah diperkosa di kebun karet.

No.	Nama	Umur
1281	Tiur Nauli br Simbolon	20

Sebagai tahanan, korban diperintahkan menjadi PRT seorang perwira ABRI. 7 bulan kemudian korban hamil dan orang tuanya menanyakan hal tersebut kepada si perwira. Sesudah itu orang tuanya diberitahu bahwa korban telah lari dari rumah si perwira. 5 hari sesudah itu jenazah korban ditemukan di perkebunan kopi di dekat Simpang Tele dengan luka bekas tembakan di kepala.

Daftar di atas adalah sebagian kecil dari ribuan nama dan catatan para korban rezim orde baru, yang berhasil dikumpulkan oleh LPR-KROB. Terima kasih dan penghargaan kita kepada segenap pimpinan LPR-KROB, terutama kepada Sdr. Sumargo, Bagian Data Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru yang telah bekerja keras tanpa menghiraukan lelah dan berhasil mengumpulkan, dan menyusun daftar dari segenap pelosok tanah air yang sangat berharga ini, yang menjadi bukti tentang kekejaman, kebiadaban, dan pelanggaran HAM berat orde baru / Soeharto.

Jika ada sanak keluarga korban yang ingin mendapat keterangan lebih jauh dan terperinci mengenai waktu dan tempat kejadian pembunuhan dan pemerkosaan serta alamat para korban dll., dipersilakan dengan hormat menghubungi Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KROB) di Jakarta. Terima kasih.
Untuk catatan: Menurut Ketua Umum LPR-KROB, Sumaun Utomo, daftar ini juga sudah diserahkan kepada Komnas HAM Jakarta.

Australia—2009

YOSEPH TUGIO TAHER

Lahir: 17 Desember 1938 di Kayutanam/Padangpanjang—Sumbar

Pendidikan: 1961, Tamat SMA/B Negeri Pekanbaru Riau; 1963, *Ext. Course* di Fakultas Ekonomi Universitas Riau (UNRI) Pekanbaru.

Pekerjaan: 1962—1965, Pegawai Non Staff Caltex Pacific Indonesia di Rumbai Pekanbaru Riau.

Pengalaman: 1958/1959, selagi masih menjadi siswa SMA/B Pekanbaru, ditangkap oleh pemberontak PRRI Sumatera Barat dan ditahan di Pekanbaru, Padang, Solok, Muara Labuh, dan Sungai Penuh/Kerinci.

Tahun 1959, bebas dari tahanan setelah melarikan diri dari Penjara Sungai Penuh; 18 November 1965, sebagai pegawai Caltex anggota Persatuan Buruh Minyak (Perbum), ditangkap oleh militer di tempat kerja (Rumbai) dan dijadikan tapol orde baru dan ditahan di RTM/TPU Pekanbaru Riau selama 12 tahun sampai akhir tahun 1977. Tahun 1978—1986, bekerja di Malaysia dan Singapore.

Tahun 1986 pindah ke Australia. Di Australia, tahun 1992 menikah dengan seorang warga Australia dan mendapat keturunan seorang anak lelaki yang lahir pada tahun 1994.

Tahun 2004, menulis buku “Kisah Perjalanan Hidupku” yang diberi judul *Riau Berdarah* dan diterbitkan oleh Hasta Mitra Jakarta, Oktober 2006.